

Prof. Dr. Hamka Naping, MA



LAUT

Manusia Dan Kebudayaan



Editor:
Lebba S.Ag, M.Si

KAUKABA
Pusat Studi Agama dan Budaya

LAUT, MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



LAUT, MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
Prof. Dr. Hamka Naping, MA

16cm x 24cm, xxii + 314 halaman

1. Masyarakat Bugis. 2. Ekonomi Maritim Bugis.
3. Politik Maritim Bugis. 4. Teknologi Maritim Bugis.

ISBN: 978-602-1508-64-0
Cetakan 1, September 2017

Editor: H. Lebba Kadorre Pongsibanne
Layout: Kang Baha
Desain Cover: Kaukaba Art

Diterbitkan Oleh:
Kaukaba Dipantara
(Anggota Ikapi)
Krapyak Kulon RT 05 No. 181
Sewon Bantul Yogyakarta 55188
Email: redaksikaukaba@gmail.com
Telp./Fax. (0274-387435
WA 085643706757
BB7D341FOF



Prof. Dr. Hamka Naping, MA.



LAUT, MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



KATA PENGANTAR PENULIS

Laut adalah sebuah misteri menyimpan berbagai ragam masalah yang menarik untuk diungkap membuka tabir dan memberi penggambaran nyata bagi rasa keinginan tahu yang mendalam dari mahluk manusia. Bagi ilmu pengetahuan, laut merupakan gudang yang mengoleksi berbagai macam masalah yang memerlukan pengkajian dan analisis yang komprehensif sesuai dengan metode dan pendekatan masing-masing ilmu pengetahuan, sehingga terwujud sosok ilmu (*body of knowledge*) dengan uraian sistematis yang memudahkan umat manusia menyelami berbagai kerumitan yang terdapat di dalam eksistensi laut.

Secara sederhana ilmu pengetahuan dapat diklasifikasi paling sedikit atas tiga kelompok yakni, kelompok ilmu-ilmu ke alaman (*natural science*) yang mengkaji dan menelaah fenomena keteraturan dalam dunia alami, meliputi rumpun ilmu pengetahuan alam seperti, fisika, kimia, biologi, astronomi, klimatologi, dan sebagainya. Rumpun ilmu pertanian seperti, budi daya dan teknologi pertanian, kelautan, peternakan, kehutanan dan sebagainya. Rumpun ilmu kesehatan yang meliputi kedokteran, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, farmasi dan sebagainya. Rumpun ilmu teknik dengan segala cabang yang dilingkupinya. Bahkan, merujuk pada filsafat ilmu pengetahuan ada pihak yang memasukkan ilmu matematika ke dalam kelompok

ini. Kelompok ilmu yang kedua adalah kelompok ilmu-ilmu social (*social science*) mengkaji dan menganalisis fenomena yang terkait dengan keteraturan dalam interaksi antara manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Kelompok ilmu-ilmu social terdiri atas antara lain; ilmu ekonomi, politik, psikologi, sosiologi, antropologi, dan sejarah social. Kelompok ilmu yang ketiga adalah ilmu humaniora (*humaties science*) adalah kelompok ilmu yang menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terkait dengan eksistensi manusia yang memiliki hati nurani dan sebagai makhluk yang berbudaya. Termasuk ke dalam kelompok ilmu ini adalah; ilmu-ilmu sastra, ilmu hukum, dan ilmu filsafat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, hampir semua pengelompokan ilmu seperti disebutkan di atas memiliki relevansi yang sangat tegas dengan laut, semua cabang ilmu dapat menjadikan unsur-unsur atau bagian-bagian tertentu dari laut sebagai obyek kajian, baik secara mandiri maupun secara terintegrasi dengan disiplin ilmu lain.

Antropologi adalah bagian dari ilmu social merupakan disiplin ilmu yang memiliki perhatian penuh terhadap manusia dengan segala dimensinya, secara sederhana dimensi manusia meliputi dimensi fisik biologis, dimensi social psikologis dan dimensi humanistik. Dalam kaitannya dengan laut ilmu antropologi mengkaji dengan menitik beratkan pada berbagai kelompok manusia yang melihat laut sebagai sumber daya (*resources*) dan manusia yang memandang laut sebagai sarana. Kelompok pertama menganalisis dan menjelaskan laut dengan melihat bagaimana kelompok masyarakat mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut untuk memenuhi sejumlah kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan social lainnya. Sedangkan



kelompok kedua menganalisis dan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan laut sebagai sarana penghubung antara satu tempat dengan tempat lain.

Sebagai sebuah kajian antropologis buku ini menjelaskan fenomena manusia dan laut dengan mengacu pada peng “unsur “ ankebudayaan seperti yang dijelaskan oleh Prof. Koentjaraningrat seorang peletak pondasi ilmu antropologi di Indonesia, pada dimensi laut sebagai sumber daya dan laut sebagai sarana. Berdasar atas itu, buku ini menyajikan secara sederhana sekelumit wawasan berkenaan dengan system pengetahuan dan kepercayaan, system ekonomi, organisasi dan kelembagaan, dimensi politik, system teknologi, aspek seni, budaya passompe, dan konsep ruang dan waktu tentang kemaritiman bagi masyarakat busis Makassar di Sulawesi Selatan.

Prilaku masyarakat bugis Makassar dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut sangat dipengaruhi oleh bukan hanya kapasitas rasional yang mereka miliki tapi juga kepercayaan mereka tentang makhluk halus yang mendiami laut. Media untuk berhubungan dengan makhluk halus tersebut melalui upacara *maccera tasie* dengan maksud mencapai keselarasan hubungan antara mereka dengan kekuatan gaib yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan lingkungan laut. Kegiatan upacara yang dilakukan nelayan selain mengandung aspek psikologi mempertebal rasa kepercayaan diri dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut yang penuh resiko dan bahaya, juga mengandung aspek social meningkatkan rasa kesetiakawanan para nelayan sehingga masalah yang sering timbul pada waktu melakukan penangkapan ikan dapat diselesaikan secara baik.

Memahami perilaku ekonomi suatu kelompok masyarakat nelayan, mencakup 3 hal pokok yaitu pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi. Ketiga hal tersebut diutarakan secara terintegrasi meliputi; **Faktor produksi**: tercantum di dalamnya mengenai peralatan produksi, proses produksi dan upacara-upacara dalam proses produksi. **Faktor Distribusi**: yang tercakup di dalamnya mengenai cara dan proses pendistribusian, tempat dan alat pendistribusian hasil produksi. Distribusi terbagi dua yaitu, distribusi langsung dalam bentuk hasil tangkapan ikan disalurkan langsung ke konsumen tanpa perantara, dan kedua adalah distribusi tidak langsung, dimana hasil tangkapan disalurkan ke konsumen melalui *pabbalu*, *paggadde* dan *paggandeng*. **Faktor konsumsi** yang menyangkut perilaku konsumsi dari hasil produksi. Hasil pendapatan digunakan untuk: Pendapatan untuk aksi ekonomi: hasil yang didapatkan selain digunakan untuk kebutuhan primer (makan, minum, pakainya) juga untuk kebutuhan pelengkap (sekunder) seperti membeli kendaraan, membangun rumah dan memperkuat modal usaha nelayan. Pendapatan untuk aksi sosial: hasil yang didapat digunakan untuk kebutuhan sosial seperti menyumbang ke mesjid, keluarga atau tetangga. Pendapatan untuk aksi religi: Pendapatan digunakan untuk upacara-upacara adat atau acara syukuran dan untuk menunaikan ibadah haji.

Organisasi dan kelembagaan masyarakat maritime tumbuh dan berkembang memenuhi fungsi secara spesifik terkait dengan berbagai masalah yang muncul dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut. Pola-pola kelembagaan yang ada tentu saja memiliki karakter kemaritiman karena secara determinan dipengaruhi oleh lingkungan laut. Unsur kelembagaan dan organisasi yang paling menonjol pada masyarakat maritim di Sulawesi Selatan adalah kelembagaan *pongga sawi*.

Dalam dimensi politik buku ini menjelaskan bagaimana sosok pemimpin yang ideal bagi masyarakat bugis Makassar. *Sulapa eppa* (segi empat) adalah empat sifat yang mendominasi mentalitas orang Bugis yang harus dimiliki setiap pemimpin yang baik. Selain berasal dari keturunan yang tepat, orang yang ingin menjadi pemimpin yang baik harus pula *warani* (berani), *macca* (cerdas), *sugi* (kaya), dan *panrita* (saleh). Pada masyarakat maritim harus membekali diri dengan pengetahuan tentang kemaritiman dan masalah-masalah kelautan. Di samping itu ia juga harus mengerti petuah-petuah dan pantangan-pantangan dalam kepercayaan masyarakat maritim.

Perubahan teknologi dan modernisasi merupakan proses perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi nelayan. Dalam kehidupan sosial terlihat makin meningkatnya jumlah kelompok-kelompok sosial berupa kerja kelompok dalam aktivitas penangkapan ikan yang keanggotaannya tidak hanya terbatas dalam lingkungan keluarga dan kerabat. Modernisasi perikanan terutama melalui introduksi teknologi baru menuntut modal uang yang lebih besar untuk investasi, karena hal ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan ekonomis nelayan melalui pengenalan KIK, dan Bank. Khusus dalam usaha pemerintah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk kredit untuk menjadikan nelayan mampu mengembangkan usaha-usahanya.

Modernisasi dalam bidang peralatan seperti: mesin tempel, jaring, gillnet dan lain-lain. Ini terjadi institusi dalam bidang peralatan tradisional ke sistem peralatan modern. Terjadinya pergantian ini mengimplikasikan pula perubahan dalam pola tingkah laku nelayan yang biasanya mereka buat sendiri/bersama-sama (peralatannya) sekarang mereka membeli dalam hal ini

mencakup organisasi seperti terbentuknya unit-unit kelompok kerja, yang sebelumnya merupakan kesatuan-kesatuan kerja yang bersifat tradisional. Demikian pula KIK berpengaruh pada bentuk organisasi sosial yang lain yang meleburkan diri menjadi unit-unit kelompok penerima KIK yang selanjutnya menjadi nelayan produktif. Dengan demikian, terjadinya dinamika dan perubahan-perubahan dalam aktivitas dan perilaku nelayan, mereka mulai berkenalan dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank, lembaga perikanan, PPL, TPI, Bengkel dan lain-lain. Berkenalan dengan Bank berarti telah mengetahui sistem kerja Bank. Hal ini berpengaruh pula pada perilaku nelayan, mereka mulai membiasakan diri menyisihkan/menabung sejumlah penghasilan untuk keperluan pembayaran kredit yang diterima.

Seni adalah potensi imajinatif manusia yang secara kreatif menerangkan, memahami, dan menikmati abstraksi dan makna hidup. Seni atau kesenian adalah kemampuan yang khusus dimiliki manusia menggunakan lambing, memberi bentuk dan arti kepada alam fisik yang tidak hanya sekedar untuk keperluan yang bermanfaat secara materil. Ahli antropologi berkepentingan dengan kesenian sebagai pencerminan nilai-nilai kebudayaan dan sesuatu yang penting bagi masyarakat. Kesenianlah yang memberi sarana dan bahan untuk permainan imajinatif manusia, dan dengan demikian membantu memaknai kehidupan. Oleh karena itu, menurut jalan pikiran buku ini kesenian bukan suatu kemewahan yang hanya dimiliki dan dinikmati oleh sekelompok seniman, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang yang normal dan aktif ikut berperan serta. Dalam masyarakat nelayan mengenal system seni antara dalam bentuk tradisi lisan meliputi dongeng, kepercayaan, dan adat kebiasaan dalam kebudayaan. Sedangkan kesenian verbal mencakup cerita dan nyanyian rakyat yang

terlihat pada saat pelaksanaan pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo*. Kesenian verbal pada umumnya meneruskan adat kebiasaan dan nilai-nilai kebudayaan.

Beberapa ahli sejarah dan ahli pemerintahan Belanda yang pernah bekerja atau berkunjung ke Indonesia, mengakui dalam tulisannya, bahwa suku bangsa yang mendiami Sulawesi Selatan adalah bangsa bahari yang berani menjelajah lautan dengan perahu yang dibuatnya sendiri. **Terutama** orang Bugis, tidak disangkal **bahwa** mereka adalah *pasompe* yang tangkas, pelaut pedagang yang ulung, berdagang dari satu pulau ke pulau lainnya, bahkan berhubungan dengan benua Asia di Asia Tenggara, singgah di beberapa negeri dan bergaul dengan suku bangsa yang dijumpainya. Berbulan-bulan lamanya dalam pengembaraan, barulah mereka pulang setelah berhasil membawa lapangan hidup ini, sudah dilakukannya sejak abad-abad sekitar zaman Sriwijaya di Indonesia. Mereka adalah entrepreneurship yang ulet, baik di laut maupun di darat dengan berani mengambil resiko atas keberaniannya mengarungi lautan. Keberanian melakukan lapangan hidup mereka, karena itu budaya maritime yang diwarisinya memberikan abstraksi berfikir dan resep tentang sistem pengetahuan; pengetahuan astronomy dan oceanology, teknologi pembuatan perahu layar.

Lapangan hidup sebagai *pasompe*, adalah salah satu lapangan hidup yang **utama** di Sulawesi Selatan, disamping sebagai petani (*pallaonruma*) dan nelayan (*pakkaja*). Kelompok masyarakat *pasompe* tersebar di pesisir barat dan timur Sulawesi Selatan, mereka membagi masyarakatnya atas tiga lapisan, yakni *pongawa*, *nakhoda/Juragang* dan *sawi*. Lapisan ini, bukan saja berlaku dalam pelayaran, melainkan tercermin pula dalam pergaulan sehari-hari

di daratan. Sejak lama, kegiatan *pasompe* dibimbing oleh sebuah hukum yang disebut *adek allopi-loping ri bicaranna pakbalu-E*, yaitu hukum pelayaran dan perdagangan, masih ditaati sampai sekarang, ditambah aturan-aturan nasional mengenai aturan keselamatan pelayaran.

Kualitas ruang dan waktu, dalam arti lingkungan budaya, merupakan tata tertib mikrokosmos, sama secara kualitatif dengan tata tertib desa, maupun rumah. Dengan demikian, sistem pengetahuan dan teknologi adalah isi dari ruang dan waktu, termasuk keseluruhan sistem-sistem dan cara-cara hidup kelompok masyarakat atau suku bangsa, yang berbeda dari satu ruang/waktu dengan yang lainnya. Perbedaan isi ruang/waktu, oleh karena perbedaan lingkungan budaya. Demikian suku bangsa di Sulawesi Selatan dan lebih khusus kelompok masyarakat Ara yang mahir membuat perahu, telah mewarisi berbagai sistem pengetahuan dalam masyarakat yang memungkinkan mereka trampil dalam teknologi perahu.

Betapapun kemahiran sebagai '*pasompe*' (Bugis) atau '*pasombala*' (Makassar) yang didukung oleh warisan budaya, tanpa didukung oleh undang-undang pelayaran" (*ade' alloping-loping*), maka kemahiran tidak akan berkembang. Oleh karena itu, orang Bugis dan Makassar disebut memiliki budaya bahari, disebabkan adanya lembaga *pasompe*, alat perahu yang digunakan dalam melakukan lapangan hidupnya, serta nilai-nilai yang menjadi acuan dari keseluruhan perilaku kebaharian.

Demikian seluruh uraian yang tersaji dalam buku ini, adalah sebuah kerja akademik yang melibatkan sejumlah pihak, oleh karena itu melalui lembaran ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama dan utama

kepada guru kami Prof. Dr. Abu Hamid (alm) yang dengan dedikasinya yang tak ternilai terutama dalam memberikan ilmu keantropologian kepada kami murid-muridnya, terlebih lagi karena dalam buku ini termuat tulisan beliau yang saya sunting karena sangat relevan dengan dunia kemaritiman bagi orang bugis Makassar. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. yang dengan kebijakannya menciptakan iklim akademik yang demikian kondusif sehingga memungkinkan seluruh sivitas akademika dapat mengembangkan kapasitasnya masing-masing, termasuk bagi saya yang diberi ruang dan kesempatan menulis buku ini. Demikian pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak Dekan Fisip Unhas Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, MSi yang senantiasa memberi dorongan dan semangat kepada setiap dosen Fisip untuk mengembangkan karya akademik dalam bentuk buku dan jurnal. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada semua teman sejawat dalam lingkup Jurusan Antropologi Fisip Unhas, yang dengan suasana kekerabatan yang kental menjadi sebuah iklim dan suasana yang indah mendorong saya menerbitkan buku ini. Kepada seluruh dosen dalam lingkup Fisip Unhas yang penuh dengan persahabatan dan saling mendorong untuk berkarya, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Selanjutnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh mahasiswa antropologi mulai dari program S1, S2 dan S3 yang secara bersama-sama dengan kami bekerja secara akademik sehingga sejumlah tulisan dalam buku ini adalah hasil diskusi yang berlangsung dalam kurung waktu yang cukup lama.

Melalui lembaran singkat ini, dari lubuk hati yang paling dalam, ingin saya menyampaikan rasa terima kasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada isteri saya yang tercinta Dra. Hj. Nurjamiah Sallatu, dua putri saya tersayang; Icha Musywirah Hamka, S.Sos., MSi dan Nurul Fitri F. Hamka., cucu kami penyejuk hati, Nur Faiqah Ahmad mereka semua adalah sumber inspirasi dan spirit berkarya, kepadanya semua, buku ini saya persembahkan.

Akhirnya kepada Allah kami bersrah diri dan senantiasa memohon ridho dan magfirahNya agar **senantiasa** membimbing kami dalam **menapaki** hidup dan selamat dunia dan akhirat, amiin.

Makassar, 12 April 2017

Hamka Naping



KATA PENGANTAR EDITOR

Masyarakat Bugis Makassar pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari laut. Di samping tumbuh suburnya kepercayaan tentang makhluk halus yang mendiami laut, mereka juga menumpukan kehidupan perekonomian dari sector pengelolaan lingkungan laut yang meliputi faktor produksi, faktor distribusi, dan faktor konsumsi. Dari sinilah lantas muncul organisasi dan kelembagaan masyarakat Bugis.

Buku ini memaparkan secara gamblang perilaku masyarakat Bugis Makassar terhadap laut. Diawali dengan pemetaan pengetahuan dan kepercayaan kemaritiman yang termanifestasikan dalam ritual religius berupa upacara *maccera tasi*. Upacara ini merupakan ritual penting yang diyakini mampu menjembatani komunikasi dengan kekuatan gaib yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan laut.

Secara detail juga dijelaskan sistem ekonomi maritim, organisasi dan kelembagaan maritim, politik maritim, teknologi maritim, seni, dan budaya masyarakat Bugis. Pemaparan yang lugas, bernas dan saling berhubungan antara bab satu dan lain membuahkan pemahaman yang komprehensif. Tampaklah gambaran utuh sinergi positif antara laut, manusia, dan kebudayaan.

Terbitnya buku ini perlu diapresiasi secara serius. Dari sedikitnya buku yang mengulas budaya kemaritiman nusantara, buku ini memberi kontribusi penting. Setidaknya, akan membuka cakrawala pengetahuan tentang khazanah kemaritiman nusantara. Karena itulah, di sela-sela kesibukan sebagai staf pengajar antropologi di UIN Syarif Hidayatullah, saya merasa terharu diberi kesempatan untuk terlibat secara intensif selaku editor dalam proses penerbitan buku bermutu ini.

Editor

Lebba, S.Ag., M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR EDITOR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN KEMARITIMAN MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR.....	1
A. Orang Bugis Makassar Sebagai Nelayan	1
B. Sistem Pengetahuan dan Kepercayaan Kemaritiman.....	5
1. Simbol-Simbol Kepercayaan	5
2. Sikap dan pandangan nelayan	9
C. Studi Tentang Lingkungan Laut	21
D. Tabu dan Pemali	24
E. Upacara Sebagai Bagian Dari Sistem Kepercayaan	30
F. Proses Pelaksanaan Upacara	32
1. Tahap Persiapan	33
2. Tahap Pelaksanaan Upacara.....	34
3. Pantangan-pantangan Dalam Upacara	34
G. Fungsi Upacara Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Nelayan	37
1. Fungsi Relegius	37
2. Fungsi Sosial	38
3. Fungsi Ekonomi	39
4. Fungsi Integrasi Antara Generasi.....	40
H. Kesimpulan.....	41

BAB II SISTEM EKONOMI MARITIM

MASYARAKAT BUGIS43

- A. Fenomena Hidup Masyarakat Maritim 43
- B. Konsep Sistem Ekonomi Maritim 51
 - 1. Aspek Ekonomi Maritim 53
 - 2. *Proses Pemasaran atau Distribusi* 68
 - 3. *Pola Konsumsi*..... 74
- C. Penutup 77

BAB III ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MARITIM

MASYARAKAT BUGIS81

- A. Pendahuluan 81
- B. Konsep Masyarakat 84
 - 1. Masyarakat Maritim..... 84
 - 2. Karakteristik Sosial Masyarakat Maritim .. 85
 - 3. Pendekatan Pengkajian Masyarakat Maritim 87
- C. Kebudayaan Maritim..... 91
 - 1. Konsep Kebudayaan..... 91
 - 2. Konsep Kebudayaan Maritim..... 93
 - 3. Unsur-Unsur Budaya Maritim..... 95
 - 4. Organisasi Sosial Masyarakat Maritim 98
 - 5. Sistem Teknologi Dan Seni Kemaritiman .. 98
 - 6. Sistem Ekonomi Kemaritiman 99
- D. Kelembagaan Masyarakat Maritim..... 102
 - 1. Konsep Kelembagaan Masyarakat 102
 - 2. Kelembagaan Kekerabatan 107
 - 3. Kelembagaan Politik 108
 - 4. Kelembagaan Keagamaan 109
- E. Penutup 112

BAB IV DIMENSI POLITIK MARITIM

ORANG BUGIS..... 115

- A. Pendahuluan 115
- B. Sistem Kepemimpinan..... 119
 - 1. Kriteria Pemimpin 119

2. Proses Pemilihan Pemimpin.....	125
3. Hubungan Kekuasaan dan Kepemimpinan	128
4. Sistem Politik Dan Stratifikasi Sosial	134
5. Sistem Politik dan Masalah Ligitimasi.....	142
6. Pengendalian Sosial.....	145
7. Kesimpulan	156

BAB V SISTEM TEKNOLOGIMARITIM

ORANG BUGIS	159
A. Pendahuluan	159
1. Konsep Masyarakat Bahari	161
2. Konsep Budaya Bahari.....	163
B. Teknologi yang digunakan oleh masyarakat nelayan	169
a. Nelayan dan Teknologi Penangkapan Ikan.....	169
b. Penyebaran Teknologi Baru Dari Lapisan Atas Ke Lapisan Bawah	172
C. Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan	174
1. Aspek Organisasi Sosial	174
2. Aspek Ekonomi	176
3. Aspek Permodalan.....	177
4. Aspek Peralatan	183
D. Reaksi Terhadap Modernisasi	185
E. Perubahan-perubahan sosial lain	187
a. Perubahan Ekologi	187
b. Perubahan Struktural	188
c. Perubahan Kultural.....	190
F. Kesimpulan.....	194
Lampiran	196

BAB VI ASPEK SENI MARITIM ORANG BUGIS..... 199

A. Pendahuluan	199
B. Bentuk dan Tekhnik Pembuatan,Motif Perhiasan dan Gaya Benda–Benda Kesenian	204

1. Aktualisasi Mitos Pada Pembuatan Perahu Pinisi.....	207
2. Eksistensi Seni Perbal Bagi Pelaut dan Nelayan Bugis	214
3. Seni Musik dan Fungsinya Bagi Masyarakat Nelayan Bugis di Sulawesi Selatan.....	219
4. Hubungan Antara Seni Dengan Aktivitas Kenelayanan	223
5. Pesta Nelayan <i>Tinja'na Palebbo</i> Sebagai Wujud Seni Nelayan dan Pelaut Bugis Di Sulawesi Selatan	225
6. Hubungan Antara Kesenian Dengan Pelaksanaan Kegiatan Religi dan Upacara Keagamaan Bagi Masyarakat Nelayan dan Pelaut Di Sulawesi Selatan.	231
7. Dampak Sosial Budaya dari Pelaksanaan Upacara <i>Tinja'na ToPalebbo</i> Terhadap Kehidupan Nelayan.....	245
8. Kesimpulan	248

BAB VII BUDAYAPASOMPEBAGIORANGBUGIS ...251

A. Pendahuluan	251
B. Latar belakang Sejarah Kebaharian	253
C. Pola Hubungan Kerja.....	257
D. Karakter dan Budaya Maritim	259
E. Sistem Teknologi Perahu Pinisi (kasus Phinisi Nusantara)	265
1. Alam pikiran Mithis	266
2. Teknologi Tradisional Pembuatan Perahu Pinisi	268

xviii Prof. Dr. Hamka Naping, MA.

3. Kelebihan dan Kelemahan Perahu Pinisi	276
F. Kesimpulan.....	277
CATATAN.....	279

BAB VIII KONSEP RUANG DAN WAKTU ORANG

xvi Prof. Dr. Hamka Naping, MA.

BUGIS/MAKASSAR TENTANG	
KEBAHARIAN	283
A. Sekelumit Sejarah Kebaharian	283
B. Pola Hubungan Kerja	286
C. Konsep Ruang dan Waktu	288
1. Pandangan tentang eksistensi manusia	288
2. Pandangan Makrokosmos-Mikrokosmos.	290
3. Sistem pengetahuan kepelautan.....	292
D. Kesimpulan.....	295
Daftar Catatan.....	297
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	299
CURRICULUM VITAE	303





BAB I

PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN KEMARITIMAN MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR

A. Orang Bugis Makassar Sebagai Nelayan

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai wilayah laut dan daerah pantai yang cukup luas yakni sekitar 197.120 km. Dengan luas wilayah laut dan daerah pantai yang dimiliki seperti itu, orang Sulawesi Selatan yang terdiri atas suku Bugis, dan suku Makassar dikenal sebagai masyarakat maritim, yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya laut. Kadir (1989:3) menyatakan bahwa sejak zamandahulu sampai sekarang masyarakat Bugis Makassar memenuhi kebutuhan protein melalui pemanfaatan sumber daya laut, secara kuantitas jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Mengingat potensi laut begitu besar, maka masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, memanfaatkan lingkungan laut sebagai sumber mata pencaharian hidup. Sallatang (1972:42) mengategorikan masyarakat pantai atas empat kelompok yaitu, masyarakat pantai dengan pekerjaan

pokok sebagai nelayan dilaut maupun yang mengembangkan budidaya perikanan di empang, masyarakat pantai dengan pekerjaan pokok sebagai niaga dan transportasi laut, masyarakat pantai dengan pekerjaan sebagai petani tanaman bahan pangan dan masyarakat pantai dengan pekerjaan pokok sebagai petani dengan sistem tanaman industri. Dengan kategori tersebut diatas maka mereka yang bekerja sebagai nelayan adalah kelompok yang langsung memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Para nelayan memanfaatkan sumber daya laut dengan jalan menyusuri pantai untuk menangkap ikan, terutama pada daerah-daerah teluk. Para ahli mengakui bahwa lebih dari 50% ikan seluruh dunia hidup dalam kawanan (koloni) sampai beribu – ribu jumlahnya pada jarak antara satu sampai sepuluh kilometer dari pantai. Pada musim – musim tertentu, kawanan ikan mendekati pantai untuk mencari makanan dan bertelur.

Dengan demikian, nelayan sebagai pemburu ikan dilaut selalu menemukan dirinya tergantung dari anugerah alam yang banyak gelorahnya itu. Mereka mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut dengan strategi singkritis atau tumpang sari yakni dengan memadukan berbagai cara dan metode dalam waktu yang bersamaan. Hingga saat ini pemanfaatan system teknologi modern disertai dengan penggunaan system pengetahuan dan kepercayaan tradisional untuk memberi keyakinan kepada mereka dalam memperkecil resiko kegagalan penangkapan ikan. Cara yang digunakan nelayan adalah menerapkan metode ilmu gaib dan perilaku budaya lainnya dalam setiap aktivitas penangkapan dan pelayaran. Strategi seperti ini dianggap efektif karena memburu ikan dilaut merupakan mata pencaharian hidup yang

mengandung resiko kegagalan yang tinggi dibandingkan dengan mata pencaharian hidup di darat seperti berkebun atau berternak.

Dalam memanfaatkan lingkungan laut yang penuh resiko ini, nelayan etnis Bugis – Makassar di Sulawesi Selatan banyak memanfaatkan perkembangan teknologi pelayaran dan penangkapan. Alat-alat untuk menangkap ikan yang banyak digunakan seperti berbagai jenis kail, tombak, jala, dan perangkap. Selain itu nelayan juga membutuhkan perahu dengan segala perlengkapannya untuk melajukan dan mengemudikannya. Untuk melengkapi perangkat teknologi seperti itu, nelayan memanfaatkan system pengetahuan tradisional yang menunjang pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan laut. Sistem pengetahuan tradisional itu meliputi pengetahuan mengenai sifat-sifat laut, angin, dan arus-arusnya, serta pengetahuan tentang bintang – bintang di langit yang menjadi pedoman dalam mengarungi samudra.

Kerangka acuan nelayan untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan lautnya adalah kebudayaan yang mereka warisi secara turun temurun dari generasi pendahulunya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Forde dalam Suparlan (1983: 66) bahwa hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijematani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Dengan menggunakan kebudayaan inilah, nelayan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan proses penyusaian ini nelayan mengelolah lingkungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Bugis-Makassar yang mengelolah dan memanfaatkan lingkungan laut sebagai sumber mata pencaharian hidup memiliki system kebiasaan tradisional yang terpolah dalam kebudayaan mereka,

dan system kepercayaan terpola tersebut tetap eksis hingga saat ini. Salah satu esensi dari system kepercayaan tersebut adalah alam yang dihuni oleh manusia (termasuk darat dan laut dan udara) dikendalikan dan diatur oleh suatu kekuatan supernatural. Kekuatan supernatural tersebut sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam setiap aktivitasnya, terutama aktivitas di laut. Oleh karena itu setiap orang harus menjaga dan memelihara hubungan harmonis dengan kekuatan supernatural tersebut melalui bentuk berbagai kegiatan upacara dan perilaku tertentu yang sudah ditetapkan oleh pola budaya mereka. Perilaku budaya tersebut tetap bertahan hingga saat ini meskipun agama Islam telah masuk ke Sulawesi Selatan sejak abad XVII.

Masyarakat pedesaan, terutama yang bekerja di sector kelautan pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah dengan taraf hidup sosial ekonomi yang rendah pula. Mereka ini masih berpegang teguh pada nilai-nilai moral, etika, dan pengetahuan budaya yang mereka warisi dari leluhurnya. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi bingkai utama dalam mengarahkan perilaku dan aktivitas keseharian mereka dalam memanfaatkan lingkungan laut.

Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang dan dipadukan dengan pengalaman hidup dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya adalah menjadi modal utama bagi masyarakat Bugis-Makassar melakoni hidup sebagai nelayan. Pengetahuan ini cukup penting digunakan untuk menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa serta benda-benda dalam rangka pengelolaan lingkungan alam khususnya lingkungan laut.

Dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki, nelayan mengelolah lingkungan laut dengan caranya sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir dan sistem kepercayaan serta tradisi-tradisi yang berkembang didalam masyarakatnya. Dengan memanfaatkan system pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki, mereka mampu menciptakan cara-cara dan strategi mengelolah lingkungan laut. Hal ini terlihat dalam hal bagaimana teknik menangkap ikan, mereka mampu membuat peralatan dan perlengkapan penangkapan seperti jaring, bagang, rompong, pancing dan jala serta menggunakan kapal penangkapan ikan, baik itu digerakkan dengan menggunakan dayung, layar, maupun menggunakan mesin. Selain itu, nelayan Bugis-Makassar memiliki kemampuan untuk mengenal musim melalui tanda-tanda alam, mereka juga memiliki kemampuan pengenalan tentang jenis-jenis ikan, pengenalan tentang air laut, serta pengenalan tentang gerakan air laut seperti ombak dan arus. Jika dalam suatu kondisi dimana nelayan berhadapan dengan dengan kekuatan-kekuatan alam yang sukar atau tidak dapat diatasi dengan menggunakan teknologi yang dimiliki, mereka merespon kondisi tersebut dengan cara-cara persuasif yakni dengan menyelenggarakan berbagai persembahan atau upacara kepada kekuatan gaib yang dianggap sebagai sumber atau penyebab kondisi tersebut.

B. Sistem Pengetahuan dan Kepercayaan Kemaritiman

1. Simbol-Simbol Kepercayaan

Seorang nelayan bukan saja harus membekali dirinya dengan keberanian menantang badai, atau berpegang pada pesan-pesan (*message*) orang tuanya, melainkan harus pula membekali dirinya dengan setumpuk pengetahuan, tentang

dunia kelautan terutama yang berkaitan dengan hari- hari nahas yang dalam bahasa local disebu *nakkase* (hari atau waktu yang dipercaya mendatangkan kesialan atau minimal membawa ketidak beruntungan) bagi masyarakat nelayan, pengetahuan tentang astronomi dan oceanologi tradisional yang membudaya dalam masyarakatnya.

Sistem pengetahuan tersebut melekat dalam keyakinannya atas dasar sistem kepercayaan dan pandangan kosmologi yang dianutnya. Alam ini memiliki kekuatan yang berjalan menurut hukumnya sendiri. Kepercayaan tentang adanya hari baik dan hari buruk yang digunakan untuk mengadakan suatu kegiatan seperti; melakukan perjalanan, mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan semua urusan dan pekerjaan yang hendak dilakukan. Pengetahuan ini berdasarkan terbitnya bulan qamariyah, bahkan setiap hari secara kualitatif mengandung makna tersendiri bagi kehidupan mereka. Sistem pengetahuan dan kepercayaan tentang hari-hari nahas bagi masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dapat dibagi atas lima bagian yakni; malam pertama setiap bulan, hari ketiga setiap bulan, hari kesembilan setiap bulan, hari kesebelas setiap bulan, dan malam kedua puluh sembilan setiap bulan. Kemudian ditambah hari rabu terakhir dalam setiap bulan. Selanjutnya, pada setiap tanggal 1 Muharram diyakini oleh orang Bugis-Makassar tidak boleh melakukan aktivitas penting dan atau melakukan perjalanan karena dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Pada tanggal 1 Muharram dan hari-hari naas sebagaimana disebutkan oleh nelayan Bugis-Makassar tidak melakukan penangkapan ikan atau melakukan perjalanan atau mengarungi laut.

Pengetahuan tentang astronomi dengan berdasar pada letak dan munculnya bintang-bintang yang dapat mempengaruhi datangnya angin, hujandan petir. Seperti salah satu yang dikenal dengan istilah bintang *sulo bawie*. Bila bintang inimuncul disebelah timur dan terbenam pada awal malam, tanda kemungkinan datangnya angin timur, demikian pula dengan bintang *wara-warae* adalah bintang tunggal yang bersinar agak terang, bintang ini menjadi tanda bagi nelayan kemungkinan datangnya panas terik pada siang hari esok. Bintang *tanrae* yang berjumlah 3 buah dijadikan sebagai pedoman menentukan arah mata angin, dan dalam posisi tertentu dijadikan sebagai tanda kemungkinan datangnya angin kencang. Bintang *manue* yang berjumlah 6 buah yang menyerupai bentuk ayam adalah tanda bahawa musim kemarau sudah pertengahan. Bintang *worongporonge* berjumlah 7 buah yang muncul disebelah timur, berarti musim kemarau sudah mulai datang. Bintang *lambarue* berjumlah 6 buah yang muncul disebelah timur, berarti musim penghujan mulai datang. Jika sudah terbenam disebelah barat berarti musim penghujan sudah hampir berakhir. Bintang *tellu-tellue* yaitu 3 buah bintang berjajar dengan posisi yang seimbang utara selatan, bintang inilah dijadikan pedoman atau petunjuk untuk berlayar kearah barat dan timur.

Adapun pengetahuan tentang kelautan, terutama untuk menentukan adanya karang dan daratan. Para nelayan mendasarkan pengetahuannya ini dengan indera penglihatan (pakkita), pendengaran (parangkalinga), penciuman (paremmau), perasaan (penedding), dan keyakina (tentuang), antara lain ; Adanya kilat yang mendatar dipermukaan laut atau kilat itu bersinar ke atas, berarti tanda bahaya karena angin

kencang akan datang. Awan hitam sebelah barat, kemudian berubah cepat jadi terang, berarti angin kencang hendak bertiup seketika dan cukup membahayakan. Udara berbau anyir dan terlihat gumpalan awan tang hitam berekor sebelah bawah membayang dipermukaan laut, berarti *lasoanging* pasti datang. Nelayan bersiap-siap mengalihkannya dengan jalan telanjang bulat diajungan kapal sambil mencabut keris pusaka (*kawali luwu*) dengan mengayunkannya keatas tiga kali sambil membaca mantra. Kemudi perahu berbunyi berisik sambil berdetak-detak berarti didepan atau haluan kapan terdapat batu karang atau air laut dangkal. Apabila dipermukaan laut ada seperti sorotan lampu berwarna kehijauan atau kebiruan pada awal terbitnya bulan, atau laut tenag tampak bercampur minyak, berarti ditempat itu kemungkinan ada gurita besar yang dapat membahayakan perjalanan sehingga sangat ditakuti oleh nelayan. Apabila dipermukaan laut tampak mengkilap terutama saat terang bulan di malam hari, atau di waktu siang berwarna putih kemudian disertai adanya sesuatu yang muncul berbau anyir yang dicium kurang lebih satu mil kearah depan, ini menjadi tanda bahwa daerah yang hendak dilalui terdapat batu karang, haluan cepat diubah.

Demikianlah sistem pengetahuan yang digunakan oleh nelayan dalam mengarungi lautan. Di samping mereka memiliki pengetahuan dan keharusan yang dilakukan, mereka juga memegang dan mentaati berbagai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan, pada saat mereka dalam pelayaran atau mengarungi lautan. Di antara semua pantangan yang ada, pantangan yang paling dilarang untuk dilakukan adalah dilarang bertengkar dengan sesama sawi diatas perahu. Di samping pantangan bagi seorang suami yang sementara

berada di laut, pantangan juga ditujukan kepada seorang isteri yang tinggal di rumah pada saat suaminya sedang berlayar.

2. Sikap dan pandangan nelayan

Manyarakat nelayan sangat tergantung pada lingkungan laut. Mereka mengelolah laut menurut pola budaya yang dimiliki didalam masyarakatnya. Dapat pula dikatakan bahwa tingka laku individu untuk mengelola lingkungan laut, merupakan manifestasi dari konsep budaya yang ada dalam masyarakat.

Nelayan yang memanfaatkan lingkungan laut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai budaya yang berbeda dengan petani yang memanfaatkan lingkungan darat dalam bentuk kebun atau sawah untuk mendapatkan sumber pemenuhan hidup. Sistem kebudayaan pulala yang membedakan dalam mengantisipasi setiap masalah yang muncul dari lingkungan dimanaia berada, mereka memiliki suatu modal berupa pranata sosial yang berfungsi untuk mengatursegalaaktivitaskenelayaan.Modalsocialdanmodal budaya yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat terwujud dalam bentuk pengetahuan, keprcayaan, organisasi ekonomi dan lain-lain yang tentu saja sangat fungsional dalam rangka mengelolah lingkungan laut.

Pranata sosial budaya yang mereka miliki merupakan strategi adapatasi nelayan dalam menghadapi lingkungan laut yang penuh resiko dan bahaya yang dapat mendatangkan bencana. Pada umumnya nelayan dimanapun didunia ini (terutama di Negara-negara dunia ketiga), dalam menghadapi lingkungan laut yang demikian, sering kali menggunakan

metode ilmu gaib untuk menambah metode-metode teknologis yang nyata (Koentjaraningrat, 1992:34). Kekuatan ilmu gaib yang mereka miliki seringkali menambah kekuatan dan kepercayaan diri mereka dalam menagrungi laut. Bahkan pada masyarakat yang masih sangat tradisional justru kemampuan menguasai pengetahuan ilmu gaib menjadi petanda dalam menentukan ketokohan dan status social seseorang.

Ilmu gaib yang digunakan oleh setiap nelayan berbeda-beda, baik pada level kekuatan dan kemampuan menyelesaikan masalah, maupun pada level dimana ilmu gaib itu dimanfaatkan, atau bahkan sangat ditentukan oleh siapa yang memanfaatkan, namun satu prinsip kunci terkait dengan pemanfaatan ilmu gaib bagi masyarakat nelayan adalah tingkat keyakinan dan kekuatan hati dari pelakunya. Artinya semakin kuat keyakinan seseorang terhadap ilmu gaib tersebut maka pasti semakin menunjukkan kekuatan yang dimiliki. Selain itu ilmu gaib yang dimiliki oleh suatu masyarakat tergantung sifat sistem nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Hafidz (1988) dalam penelitiannya pada masyarakat Pulau Barrang Caddi melaporkan bahwa masyarakat Pulau Barrang Caddi menggunakan ilmu gaib dalam pelayaran menangkap ikan, mereka menyebutnya "*teai sissik bujuruk*" yaitu orang yang mengadakan pelayaran dan mempertanggung jawabkan perhunya beserta seluruh isinya memiliki ilmu gaib untuk menangkal atau mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam atau selama perjalanan di laut. Selanjutnya, Hafidz dalam penelitiannya itu mengemukakan bahwa dalam masyarakat nelayan Pulau Barrang Caddi mengenal ilmu gaib dengan sebutan sebagai berikut:

- 1) *Amminro*, yaitu suatu tingkah laku yang disertai dengan membaca mantra-mantra yang dilakukan oleh juragang atau nahkoda kapal dengan berjalan mengitari perahu yang hendak ditumpangi sebanyak tiga kali sebelum berangkat.
- 2) *Tapakkorok*, yaitu duduk menghadap ke arah bagian depan rumah sebelum berangkat menuju ke laut, dimaksudkan untuk **menenangkan** hati atau pikiran sambil menanti atau mendengarkan kata-kata yang bermakna kebaikan diucapkan baik dari orang yang ada di dalam rumah atau orang lain yang ada di sekitar mereka. Kata-kata yang dinilai baik adalah semua kata yang bermakna keselamatan, keberuntungan, hidup, bahagia, rezeki dan sebagainya.
- 3) *Ammolong laso anging*, yaitu suatu ilmu yang dimiliki oleh juragan atau nakkoda kapal yang dipercaya dapat **mematahkan** atau menyelamatkan diri dari terjangangan angin kencang yang datang dari arah barat **meenyerupai** bentangan pohon kelapa menerjang kapal (*laso anging*). Jenis angin sangat berbahaya dan ditakuti oleh semua pelaut sehingga untuk menghadapi diperlukan kemampuan ilmu gaib.
- 4) *Appasolong batu*, yaitu suatu ilmu yang dapat memecahkan atau mencaikan batu karang pada saat perahu terpaksa melintasinya. Kadang-kadang dalam perjalanan atau pelayaran perahu harus melintasi batu karang, disebabkan karena tidak melihat, atau kerena terseret oleh arus yang kuat sehingga tidak sempat menghindar, maka nelayan mengatasi dengan menggunakan ilmu gaib tersebut.

Sesungguhnya, masih banyak ilmu-ilmu gaib yang dimiliki oleh para pelaut Bugis, yang semuanya berinti pada pemanfaatan kekuatan supernatural dalam rangka menghadapi peristiwa-peristiwa luar biasa dalam pelayaran agar mereka bias selamat dan sampai ke tempat yang dituju.

Dalam rangka mengelolah lingkungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, para nelayan dan pelaut Bugis memanfaatkan pengetahuan yang bersifat supranatural untuk memanfaatkan sumber daya, dan mengatasi masalah yang ada di wilayah sekitar pemukimannya. Darwis (1998) dalam penelitiannya tentang mistik bagi kaum nelayan di nelayan telah menemukan cara-cara yang dilakukan nelayan dalam rangka bekerjasama dengan makhluk gaib yang disebut *pasawek*, yaitu semacam menghormati dan bermohon restu pada makhluk halus setiap kali wilayah kekuasaannya di dekati dan di manfaatkan. Cara *mappsawek*, ialah mengucapkan mantera-mantera, yang baik disertai dengan sesajen maupun dengan tanpa sesajen. Selanjutnya, Darwis memaparkan pelaksanaan *mappasawek* oleh nelayan mulai meninggalkan rumah sampai di daerah penangkapan ikan sebagai berikut:

1. Pada mulut pintu rumah

Pada waktu ini, mereka berseru kepada Nabi Sulekka dengan mengucapkan “Hai Nabi Sulekka, menepilah dan doakanlah saya memperoleh rezeki dari tuhan Allah Taala.

2. Pada waktu tiba di pantai

Pada waktu ini mereka bertafakkur sejenak sambil membayangkan perahunya. Diucapkanlah “Nabi Pakkere namamu engkau yang tinggal di tepi air. Pinggir pinggirilah dan mintakanlah rezeki untukku dari Tuhan Allah Taalla”.

Maka turunlah mereka menginjakkan kaki kanan di air untuk seterusnya berjalan menuju perahunya.

3. Sebelum menginjakkan kaki pada air di permukaan laut, maka terlebih dulu mengucapkan kata-kata keselamatan dalam bahasa Arab “Assalamu Alaikum”. Kemudian diucapkan, “*Mangung Seuwa* namamu wahai air, pinggir pinggirlah dan mintakanlah rezeki pada tuhan Allah Taala.
4. Sewaktu berada di air terdengar seruan keras tiga kali dengan kalimat “menghadap baratlah, puang Aji”.
5. Sewaktu hendak naik perahu
Pada waktu ini dibacalah, “Nurung ri wae nama sebenarmu wahai air, Nabi Nuhung
Nabimu wahai perahu, berjiwa besarlah menjelajahi samudra luas mencari rezeki, dan segera kembali dalam tempo seminggu “. Maka di usapkanlah air tiga kali bagian kepala perahu keatas.
6. Sewaktu diatas perahu
Pada waktu ini diucapkanlah, “Wahai Nabi Nuh, pinggir pinggirlah, mintakanlah rezeki pada tuhan Allah Taala yang melimpah dan aku dapat kembali dalam tempo tiga malam.
7. Waktu Pemasang Guling
Pada waktu ini dibacalah, “*I Jampellan* namamu wahai guling jangan sampai engkau menghilangkan rezeki di tengah samudera”. Sambil berucap “Assalamu Alaikum”. Guling itu dijulurkanlah ke dalam air.
8. Pada waktu memasang tiang

Sambil mengucapkan lengan tiga kali, diucapkanlah yang kujadikan tiang adalah tongkat beri Nabi Adam, Takkan patah tiangku, kecuali tongkat nabi Adam itu patah duluan.

9. Sewaktu mengembangkan layar

Pada waktu ini yang dibaca adalah”Qulhuwallahu Ahad AllahuSamad:Lam YakumLahu KupuanAhad”.Ini dibaca tiga kali.

10. Sewaktu ikan terbang bertelur

Pada waktu ini dibacakan mantera-mantera, kemudian kalau ikan-ikan itu telah ramai mendekat maka anugeralah kedepan perahu membasahi kepala perahu dengan air tiga kali serta membaca mantra-mantra kembali.

11. Sewaktu Melakukan penangkapan Ikan

Pada waktu ini dibacalah,”*Mangung Seuwa asemmu*. Hal Air, Nabi Elere Nabimu, Nabi Daud nabimu engkaulah Ikan.

12. Sewaktu Mengumpulkan Ikan

Pada waktu ini dibacalah, “Eh Lacci, Iyacci kau hamili segera, Nurung yang menyuruhmu, Muhammad yang menerimamu, Allah Taala yang memberikan rezeki, Kumpayakun”. Maka di himpunlah ikan-ikan itu sambil menyirami air tiga kali.

13. Sewaktu tali panjangnya ditarik

Disini dibaca, “Oh Nabi Helere, Nabi Daud, halaukanlah semua anak cucumu kemari baik jauh maupun dekat, engkau masukkan kedalam jaring ini dan perhatikan padaku segera. Ini tiga kali dibaca.

Demikianlah fase-fase kegiatan *mappasawek* yang dilakukan terutama pada waktu penangkapan ikan terbang. Membicarakan system kepercayaan dan kegiatan *mappasawek* dalam ranah ilmiah oleh kalangan tertentu merupakan sesuatu yang tidak ada pijakan nalarnya karena tidak mungkin menemukan hubungan kausalitas yang mampu diterima oleh logika, namun dalam pandangan fenomenologis yang bersifat emikal merupakan sebuah fakta dan realita social budaya yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Bahkan, menjadi keyakinan masyarakat nelayan bahwa jika prosesi *mappasawek* tidak dilakukan pasti hasil tangkapan mereka tidak memuaskan, bahkan mereka dapat mengalami kegagalan.

Naping (1990) dalam studinya tentang pengetahuan kelautan masyarakat nelayan dikelurahan LappaSulawesi Selatan telah mengemukakan bahwa masyarakat nelayan memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan laut yang didasarkan pada keadaan dan cir-ciri air laut. Dikatakan bahwa para nelayan di Desa Lappa memahami jenis air laut dalam suatu wilayah berdasarkan kedalaman air. Masyarakat memiliki system pengetahuan berkenaan dengan sifat air yang terdapat pada suatu wilayah tertentu berdasarkan tingkat kedalaman air laut tersebut sebagai berikut:

a) *Wae tasi mencana*

Keadaan air laut yang masuk kategori ini adalah air laut yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 7 m. permukaan air laut kelihatannya berwarna biru kecoklat-coklatan dan agak keruh karena bayangan dasar laut yang terdiri dari lumpur dan pasir tampak jelas dari permukaan dan juga

dapat diketahui apabila sedang berlayar diatasnya teras seperti meloncat-loncat

b) Wae tengnga-tengngah

Ini terlihat apabila kawanan ikan yang ditangkap dengan peralatan tradisional. Berkumpul dimana keadaan airnya tidak terlalu dalam dan dangkal.

c) Wae tasi meanraleng

Air laut yang meanraleng adalah air laut yang kedalamanya diatas 30 depa. Tanda-tandanya air biru khitam-hitaman, teras lebih asing karena tidak adanya campuran air tawar, ombak keadaan normal terutama pada malam hari tampak bercahaya.

Selain pengetahuan tentang lingkungan laut berdasarkan keadaan air laut, masyarakat nelayan di Desa Lappa juga memiliki pengetahuan menyangkut gerakan air laut. menurut Naping (1990) bahwa ada tiga gerakan air laut yang dikenal masyarakat yaitu:

- a) Bonang* (air pasang), yaitu gerakan-gerakan air dikenal atas dua macam yaitu penno pasang (pasang naik) dan pondah.
- b) Arusu* (arus), yaitu gerakan yang terjadi pada badan air. Para nelayan mengetahui keadaan ini jika dalam perjalanan mengarungi laut tampak ada aliran air seperti anak sungai ataupun menurunkan tali kedalam air sehingga mengakibatkan tali yang diturunkan tidak berdiri tegak.
- c) Bombang* (gelombang), yaitu gerakan air laut yang tidak pernah berhenti, kejadian ombak sangat

tergantungan dan dipengaruhi oleh angin, semakin besar angin, semakin besar pula ombak yang terjadi.

Pada umumnya masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan memiliki pengetahuan tentang iklim dan perbintangan yang mereka pedoman dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Mereka memahami gejala-gejala alam berdasarkan pengetahuan budaya yang mereka miliki secara turun temurun, Naping (1990) menyatakan bahwa iklim yang dipahami oleh nelayan adalah suatu keadaan tertentu yang berkenaan dengan suatu kondisi tertentu pula. Sehingga apabila terjadi suatu keadaan di suatu wilayah, dimana tidak ada angin, tidak hujan, dan tidak ada ombak besar, maka keadaan ini dipahami sebagai *lino*. Artinya suatu keadaan yang sangat baik dan menguntungkan setiap aktivitas penangkapan. Dan sebaliknya apabila keadaan dimana, angin bertiup dari arah timur, terkadang dalam kecepatan tinggi disertai dengan hujan dan angin yang berubah-ubah arah. Keadaan ini dipahami sebagai *Russa*.

Walaupun sekarang nelayan telah menggunakan perahu motor dalam pelayaran dilengkapi dengan kompas untuk menentukan arah dan daerah dimana tujuannya menangkap ikan namun sebelumnya para nelayan hanya menggunakan perhitungan bintang untuk menentukan arah dan posisi daerah yang dituju. Hafidz (1988) melaporkan tentang bintang – bintang yang dijadikan pedoman nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di pulau.

Pada umumnya nelayan dalam melakukan aktivitas kenelayannya masih berpegang teguh pada pengetahuan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan seperti pengetahuan tentang hari baik atau buruk dalam memulai

pekerjaan. Naping (1990) dalam studi-studi yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa hari pertama bulan Muharram merupakan hari yang tidak baik melakukan aktifitas kenelayannya, karena hari tanggal satu Muharram adalah hari Nakhase tahun, bila digunakan untuk melakukan aktifitas kenelayannya hasilnya tidak menguntungkan bahkan pada umumnya membawa kerugian dan malapetaka. Demikian pula pada hari jumat, pada umumnya nelayan bugis menganggap hari yang tidak baik untuk melakukan penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena didalam diri nelayan tertanam kepercayaan bahwa bila hari jumat digunakan untuk operasi penangkapan ikan dilaut, maka pelaku harus menghadapi dua kemungkinan resiko yaitu mendapat bencana dilaut dan turun tanpa memperoleh hasil.

Masyarakat nelayan dalam rangka mengelolah dan memanfaatkan lingkungan lautan senantiasanya mengorganisasikan dirinya dalam bentuk “pongawa sawi” sebagai unit kerja nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut. Abu Hamid (1986 dan 1988) dalam penelitiannya mengenai peningkatan kehidupan nelayan dan serta kemaritiman serta pola pengembangan masyarakat nelayan sebagai suatu studi sosio antropologi ekonomi menyimpulkan bahwa hubungan kerja antara nelayan dalam suatu kelompok *pongawa sawi* didasarkan atas prinsip hubungan kekeluargaan yang bersifat fungsional. Kelompok ini ada tiga peranan yang diperankan anggota-anggotanya. Pertama, perangkat peranan menyediakan modal yang dijalankan oleh ponggawa darat. Kedua, adalah perangkat peranan penggunaan modal yang dijalankan oleh ponggawa laut dibantu oleh sawi dan

ketiga adalah perangkat peranan memasarkan produksi dan mengorganisasikan anggota-anggota yang dijalankan oleh ponggawa darat dan pengecer.

Resusu (1985) dalam kajiannya pada nelayan bagan di Pulau Sembilan melihat hubungan kerja antara juragan dan anak buah sebagai suatu system social yang melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompoknya. Hubungan social antara anggota kelompoknya dalam bentuk aturan tingkah laku atau tatakelakuan yang telah berpola dan ditaati sehingga merupakan normah social diantara mereka.

Sejumlah ilmuwan social yang berminat pada masalah-masalah hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara lain dapat dirujuk (Sallatang, 1972 ; Mattulada, 1981, dan Pelras, 1981) melihat model hubungan ponggawa sawi ini identik dengan patron klien , Scoot (1982) dalam kajiannya pada masyarakat petani mengemukakan bahwa patron klien adalah suatu kasus hubungan antara dua orang (kelompok) yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang yang lebih tinggi kedudukan social ekonomisnya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya memberikan dukungan yang umum dan bantuan yang termasuk jasa-jasa pribadi pada patron.

Mubyarto (1984) dalam kajiannya tentang nelayan dan kemiskinan di dua desa pantai di Pulau Jawa mengemukakan bahwa hubungan kerja (jaringan kerja) diantara lapisan masyarakat diantara golongan penduduk baik menurut

umur atau jenis kelamin dan juga diantara berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dibidang usaha dan perikanan bisa diibaratkan sebagai suatu jarring laba-laba yang saling berkaitan. Jaringan yang terkonsentrasi ini memiliki suatu focus atau tujuan, yakni menjual tangkapan ikan kepasar atau ke konsumen.

Dalam organisasi *pongawa sawi* pada nelayan yang terdapat di masyarakat nelayan Bugis di Sulawesi Selatan, Tata hubungan antara pongawa dengan sawi mengacu pada tradisi yang ada atas dasar hubungan social ekonomi yang menjelmakan pula hutang budi. Dengan demikian, prinsip-prinsip resiprositas masih berlaku untuk memperkuat hubungan social antara anggota sehingga pemberian tidak pernah dihitung secara material kebendaan atau nilai uang tapi dibalas dengan memberikan suatu barang walaupun dalam bentuk yang berlainan (Abu Hamid, 1986: 92).

Hubungan pongawa sawi mengandung interaksi yang saling menguntungkan dan keduanya saling membutuhkan. Pongawa membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam seluruh proses kenelayan seperti operasi penangkapan, pemeliharaan alat tangkap dan perahu, serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengangkat hasil tangkapan ke darat atau pelelangan, sementara sawi pada sisi yang lain membutuhkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan pongawa secara ideal disediakan oleh sawi, sedangkan semua kebutuhan pongawa dilayani oleh sawi, pongawa bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan sawi dan keluarganya, sementara sawi memiliki beban moral untuk mendukung setiap langkah yang diambil

oleh ponggawa pada semua kondisi. Hubungan antara ponggawa dan sawi terpaut pada suatu system hubungan yang dilakukan berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka suatu system kenelayanan pada masyarakat nelayan Bugis di Sulawesi Selatan.

Prinsip pembagian hasil yang berlaku bagi suatu kelompok organisasi kerja ponggawa sawi dikenal dengan system bagi hasil. Tiap anggota tidak mendapat upah berupa sejumlah uang tetap, tetapi mendapat bagian tertentu dari hasil penangkapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, berdasarkan perjanjian antara anggota kelompok. Bretton (1977) dalam kajiannya pada masyarakat dipantai Venezuela mengatakan bahwa aturan bagi hasil sangat umum berlaku pada perikanan tradisional berskala kecil, sedang pada perikanan modern berskala besar menganut aturan pengupahan (Lampe 1992:16).

C. Studi Tentang Lingkungan Laut

Negara Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil dengan garis pantai yang sangat panjang. Pendayagunaan wilayah pesisir sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional baik dalam bidang ekonomi, social, politik, budaya maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara.

Nontji (1987) menyatakan bahwa kondisi laut di Indonesia sangat di pengaruhi oleh dua musim. Perubahan musim serta tekanan udara di benua Asia dan Australia menyebabkan berkembangnya angin musim di Indonesia yang menentukan terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Pertukaran massah air laut yang terjadi di samudra Hindia dan Pasifik harus melewati

banyak selat yang bertebaran diantara pulau-pulau nusantara. Kondisi ini mempengaruhi kehidupan di dalam laut.

Karena perairan laut Indonesia terletak didaerah strategis, maka pada umumnya perairan Indonesia kaya dengan berbagai jenis biotik laut. Menurut Sugiarto (1992) bahwa perairan Indonesia sangat subur untuk biotik laut karena:

- a. Perairan dekat pantai, khususnya dekat muara sungai, unsur- unsur haranya disediakan secara terus menerus dari darat.
- b. Perairan yang dangkal selalu beraduk dengan bagian dasar perairan yang kaya dengan unsur-unsur harah.
- c. Daerah Upwelling, ialah perairan yang pada musim tertentu terdapat arus vertikal dari suatu kedalaman tertentu ke permukaan dengan membawa unsure hara yang cukup tinggi.

Dasar laut di Indonesia mempunyai bentuk yang unik dan kompleks yang berbeda dengan Negara lain. Nontji (1987) mengatakan bahwa laut yang ada di nusantara umumnya bentuk topografi dasar laut selalu terdapat paparan yang dangkal, terumbu karang, lereng yang curang dan landai, gunung berapi di bawah laut, palung laut dalam, basin atau pasu yang terkurung. Kompleksnya dasar laut ini disebabkan karena lingkungan laut Indonesia berbenturan atau bergesekan dengan lempeng litosfer yakni lempeng-lempeng Eurasia, Filipina, Pasifik, dan Samudera Hindia-Australia.

Begitu kompleksnya dasar laut di Indonesia, menyebabkan perairan Indonesia dapat dibagi atas dua yakni perairan dangkal berupa paparan dan perairan laut dalam. Perairan dangkal dikenal

paparan Sunda dan paparan Sahul seperti laut Banda, laut Maluku dan di laut Sulawesi (Nontji, 1987). Perairan laut ini, mengandung beberapa lapisan air yang berguna bagi biotik laut. Menurut Soegiarto (1987) bahwa lapisan air dapat dibedakan atas:

1. Euphotic Zone, lapisan air di permukaan yang cukup cahaya untuk plankton nabati berfotosintesis.
2. Disphotic Zone, lapisan air yang remang-remang sehingga proses fotosintesis yang dapat terjadi hanya untuk bernafas bagi biotik laut atau bahkan lebih kecil.
3. Aphotic Zone, lapisan air yang gelap abadi di mana cahaya matahari tidak sampai pada lapisan ini sehingga proses fotosintesis tidak terjadi.

Menurut Whitten (1987) bahwa lingkungan laut di Sulawesi Selatan termasuk dalam mintakat litoral. Hal ini disebabkan karena pasang naik dan pasang surut yang terjadi di sekitar Sulawesi masing-masing terjadi dua kali setiap hari secara bergantian. Peristiwa pasang ini menimbulkan keunikan dalam komunitas hayati laut di Sulawesi seperti terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, komunitas ini sangat berfungsi dalam melindungi pantai dari pengikisan air laut dan sebagai tempat mencari makanan dan berlindung bagi banyak jenis ikan yang berpotensi ekonomi.

Selanjutnya Whitten (1987) mengatakan bahwa terumbu karang yang ada di lingkungan laut di sekitar wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Terumbu karang ini sangat berperan dalam bidang perikanan untuk menghasilkan protein dan bidang industri pariwisata. Dikatakan bahwa bentuk-bentuk terumbu karang ini, kaya dengan berbagai jenis ikan yang mengandung nilai ekonomi baik ikan yang dapat dikonsumsi maupun ikan hias.

Hutan bakau (*mangrove*) yang ada di pantai Sulawesi Selatan bagian barat hanya terdapat di beberapa tempat saja karena sebagian telah ditebang untuk diambil kayunya dan sebagian lagi dijadikan sebagai lahan tambak. Menurut sejumlah informasi yang diperoleh, ada beberapa jenis pohon yang kadang-kadang ditemukan didalam hutan yang dekat dengan lahan kering. Jenis pohon mangrove seperti, bakau, api-api, pedada, tanjang, nyirih, tegar, dan buta-butaya yang paling sering didapat disepanjang pantai.

Lingkungan laut di Sulawesi mempunyai garis pantai yang sangat panjang dibanding pulau-pulau lainnya, Menurut Whitten (1987) bahwa arus permukaan di lingkungan laut Sulawesi yaitu bulan November sampai April angin bertiup dari arah barat laut menyebabkan arus di permukaan laut mengalir berlawanan dengan arah jalan jarum jam di sekitar Sulawesi. Dari bulan Mei sampai November pola arus demikian tidak tampak lagi. Pola sirkular air laut demikian sudah cukup memberi pertukaran air pada palung-palung yang terdalam sehingga terdapat cukup oksigen yang dibutuhkan oleh biotik laut yang ada di dasar laut dalam (Nontji, 1987).

D. Tabu dan Pemali

Tabu dan pemali lebih bersifat menghindarkan diri dari semua larangan dengan sanksi yang tegas. Hampir semua tabu dan pemali yang ditemukan pada masyarakat nelayan Bugis terkait dengan bagaimana proses penangkapan berlangsung yakni pada saat nelayan berada di laut, dan proses yang terjadi pada aktivitas kerumahtanggaan seperti tabu dan pemali bagi isteri dan anggota keluarga yang ditinggalkan pada saat sang suami sedang berada di laut. Hampir semua tabu dan pemali terkait dengan keselamatan

dan kebahagiaan apabila diindahkan atau dipatuhi oleh, sebaliknya terkait dengan kecelakaan atau kesensaraan jika tidak diindahkan atau dilanggar. Namun dalam masyarakat umum tabu dan pemali juga terkait dengan masalah pertimbangan kesehatan khususnya berkenaan dengan produksi kelahiran dan kesehatan ibu dan anak.

Tabu atau pemali merupakan pengetahuan budaya, karena masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah warisan dari orang-orang tua mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut mereka, asal mula keberadaan pemali ini adalah, warisan dari orang-orang tua mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut pemahaman orang Bugis di Sulawesi Selatan, asal mula keberadaan pemali ini adalah, hasil pembacaan dari nenek moyang mereka terhadap semua gejala dan fenomena yang telah mereka lewati dalam kehidupan mereka yang terus berlangsung melintasi beberapa generasi yang kemudian mengambil kesimpulan tertentu terkait dengan kebaikan dan keburukan yang terjadi dan mungkin terjadi. Bahwa orang tua mereka dulu telah melakukan berbagai jenis pekerjaan termasuk pekerjaan yang mengandung akibat, baik positif maupun negatif yang telah mereka alami. Pekerjaan yang dianggap mempunyai akibat yang negative dipesankan kepada anak cucunya untuk tidak dilakukan, agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Pemali sebagai bagian dari system kepercayaan nelayan bugis masih tetap diyakini sampai saat ini walaupun sudah mengalami perubahan, baik bentuk maupun nilainya.

Pada beberapa decade yang lampau masyarakat nelayan di Barru percaya berbagai macam pantangan atau pemali, baik pemali ketika mereka masih berada di rumah (sebelum melaut),

pemali pada saat mereka menjalankan aktifitasnya di laut, maupun pemali bagi sanak keluarga di rumah saat nelayan berada di laut.

Sebelum turun ke laut umpamanya, seorang nelayan pantang mengucapkan maupun mendengarkan kata ‘tidak ada’ (*mappadde*) baik disengaja maupun tidak, karena itu dipercaya sebagai pertanda kesialan dalam perjalanan operasi penangkapan, si nelayan tidak dapat memperoleh hasil atau mungkin menemui berbagai kesulitan di laut.

Selain kata ‘tidak ada’, seorang nelayan ketika hendak turun ke laut pantang baginya mendengar suara tangisan (*tauteri*) sekalipun di rumah tetangganya, karena itu juga merupakan pertanda yang kurang baik dengan kata lain mungkin mendapat kesusahan, baik selama dalam perjalanan (ditengah laut) atau ketika dia sudah sampai di rumah. Tangis bagi nelayan dimaknai sebagai suatu kondisi yang tidak menyenangkan, bersedih, berduka cita. Oleh karena itu apabila di rumah ada orang menangis, sebaiknya si nelayan itu menunda dulu beberapa saat, sampai hilangnya suara tangisan. Demikian pula, pertanda buruk lainnya adalah jika hendak melaut tiba-tiba ada orang meninggal di kampung tersebut, maka sebaiknya keberangkatan ditunda dulu, karena dipercaya dapat berakibat sial atau tidak menguntungkan jika melaut.

Pada saat nelayan sudah berada di pinggir laut, sebelum naik diperahu pantang baginya melintas didepan perahu dan pantang baginya menginjak batas antara tanah dengan tepi air. Dengan melintas didepan perahu, diyakini bahwa rezeki bakal terhalangi, dan jika menginjak batas tanah dengan air, maka kemungkinan tinggal diperbatasan dengan kata lain meninggal di tengah laut.

Begitupula saat nelayan atau juragan naik ke kapal atau perahu, maka pantang baginya langsung ke belakang,

sebaiknya kedepan dulu sejenak baru kebelakang, maksudnya adalah supaya perjalanan bisa lancar dan tidak menemui suatu halangan. Posisi bagian depan bagi nelayan bagang rambo misalnya selalu disosialisasikan dengan harapan sesuatu yang akan dituju, sehingga kalau harapan atau yang dituju itu dalam genggaman mereka, diyakini tidak akan menemui kesulitan, ada satu kepercayaan bagi mereka untuk selalu menguasai atau menggapaitujuan sebelum berangkat, dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah “*lettumemenni na lao*” (yakin sudah sampai dahulu baru kemudian berangkat).

Adapun pantangan bagi nelayan jika sudah berada ditengah laut, antara lain; pantang meludah ke tengah laut karena hal itu di percaya menyebabkan pekerjaannya akan sia-sia, (meludah adalah pekerjaan membuang, sedangkan membuang bagi nelayan bermakna melepaskan sesuatu, sehingga pekerjaan boleh jadi tidak mendatangkan hasil apa-apa), pantang memasak pada malam hari, karena biasa diikuti oleh binatang laut (dahulu, para nelayan menangkap ikan dilaut dengan tidak menggunakan pencahayaan karena memang alat tangkap yang digunakan seperti pancing dan jaring tidak membutuhkan cahaya, pada kondisi seperti maka ia melarang dan bahkan menjadikan tabu menyalakan api di tengah laut sehingga memasakpun dilarang bahkan dianggap tabu, kepercayaan seperti itu tetap bertahan dalam kurung waktu yang sangat lama hingga nelayan menggunakan cahaya lampu dalam proses penangkapan, namun saat ini kepercayaan itu sudah mulailonggar dan bahkan pada tempat atau wilayah tertentu mulai tidak dianggap larangan lagi, karena pada waktu peneliti mengikuti kegiatan mereka secara partisipatif, nelayan memasak nasi, memasak ikan dan membakar ikan di atas kapal, pantangan lain adalah tidak boleh membuang

abu gosok di laut karena menurut kepercayaan mereka penjaga laut akan marah dan akan menimbulkan malapetaka (untuk hal ini nelayan tidak menjelaskan makna kandungannya, namun sebagian informan merasionalkan bahwa abu gosok itu dapat menyebabkan pencemaran di laut sehingga di pantangkan untuk di buang). Demikian pula jika melihat hal yang aneh–aneh atau dianggap keramat dilarang ditegur atau diberi komentar supaya tidak mendapat kecelakaan atau musibah di tengah laut. Kalau sedang berada di tengah laut dan kebetulan dirasakan ada angin, maka orang di atas kapal pemali meminta angin, karena biasanya secara tiba-tiba angin bertiup kencang yang dapat menimbulkan bencana. Dan apabila hendak atau sedang memasak nasi di atas kapal, pantang membuang air cucian beras dan pantang membuang gelembung–gelembung air masakan ke laut, pelanggaran atas larangan ini di percaya akan mendatangkan bahaya/musibah.

Sedangkan pantangan bagi orang yang berada di rumah yaitu keluarga nelayan adalah tidak boleh memakai atau menggunakan bekas peralatan makan seperti piring (*penne*) orang yang sedang turun atau berada di laut, sekalipun oleh istrinya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan orang yang sedang melaut, menurut kepercayaan mereka jika bekas peralatan makan orang yang berangkat ke laut kemungkinan mengalami kecelakaan. Orang di rumah juga pantang menurunkan makanan dari rumah, kalau hal ini di langgar maka menurut kepercayaan mereka orang yang pergi dapat mendapat celaka atau bahaya dalam perjalanan. Begitupula dengan api, pantang di turunkan dari rumah, misalnya ada tetangga yang minta (pada zaman dahulu korekapi adalah barang langka sehingga untuk menghidupkan api biasanya diperoleh dari api tetangga yang lebih dahulu ada) untuk keperluan masak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pantangan

menyimpan sendok nasi (*sanrunanre*) dipanci atau di periuk terlalu lama (*maddenreng*), karena mereka mempercayai bahwa hasil yang di peroleh (ikan), boleh jadi tinggal tidak laku terjual.

Pantangan atau pemali yang disebutkan di atas, hanya sebagian kecil saja yang masih diketahui atau diyakini masyarakat di daerah ini pada saat sekarang, sebagian besar lainnya telah bergeser sebagai akibat dari berkembangnya sistem pengetahuan yang dalam aplikasinya berkembang **sistem** teknologi, baik yang di gunakan dalam aktivitas kenelayanan seperti pemanfaatan teknologi penangkapan bagang rambo, maupun teknologi lain yang menunjang kehidupan mereka seperti pemanfaatan teknologi transportasi dan komunikasi yang menyebabkan pikiran mereka semakin berkembang.

Dalam wujudnya hingga saat ini sejumlah pantangan atau pemali tidak lagi terindahkan oleh mereka, seperti pengungkapan sejumlah kata yang dahulu mengndung kesialan jika di ucapkan, atau perilaku tafakur sebelum meninggalkan rumah menuju ke laut, menggunakan bekas peralatan makanan, dan sejumlah hal lainnya tidak secar ketat di anut oleh mereka, walaupun hal-hal seperti itu masih tersimpan dalam ingatan dan pengetahuan mereka.

Selain pantangan-pantangan yang telah disebutkan di atas, masyarakat juga percaya terhadap adanya waktu dan hari-hari baik serta waktu dan hari buruk untuk melakukan aktifitas. Dalam siklus satu minggu (*siminggu*) rangkaian waktu dibagi atas hari di mana dalam perjalanannya di tentukan hari baik dan buruk sesuai dengan peredaran bulan, sehingga dikenal adanya *esso macedeng* (hari baik), dan *esso nakkase* (hari nakas). Kategori hari baik adalah hari dimana orang dapat melakukan aktifitas, baik aktifitas

secara upacara adat, aktifitas ekonomi maupun dalam bepergian, dipercaya bahwa jika melakukan kegiatan pada hari baik ini pasti hasilnya memuaskan. Sebaliknya jika melakukan kegiatan apasaja pada hari yang dipercayai sebagai hari naskah inio pasti hasilnya dapat menjadi jelek bahkan bisa mendapat celaka.

Demikian pula dalam satu bentangan hari terdapat wwktu-waktu tertentu yang dipercaya oleh nelayan memiliki makna tertentu , rentetan waktu tersebut meliputi ; 08.00, eleduha (pagi hari), yakni antar pukul 06.00 sampai pukul 08.00, dhuha yaitu renytang waktu antara pukul 11.00 sampai dengan 12.00, waktu loro (dhuhur), rentang waktu antara pukul 15.00 sampai dengan 18.00 disebut abubueng (sore hari).

Masing-masing rangkaian waktu seperti waktu dikemukakan di atas, dalam setiap hari dipercaya memiliki makna yang selalu berubah. Artinya pada hari tertentu kemungkinan hari baik jatuh pada rentang waktu pagi, namun pada hari lainnya waktu baik jatuh pada rentang tengah hari, dan seterusnya. Kandungan makna dari setiap rentang perjalanan waktu menurut kepercayaan masyarakat adalah; *pole poko* (pulang pokok), *kosong* (tidak berisi), *tuo* (hidup), *wuju'* (mayat), dan *malise* (berisi). Kandungan makna tersebut bergeser untuk setiap sesuai dengan peredaran bulan. Sistem kepercayaan masyarakat berkenaan dengan waktu tersebut di atas, oleh nelayan di Barru disebut dengan sebutan *pananrang*.

E. Upacara Sebagai Bagian Dari Sistem Kepercayaan

Masyarakat nelayan memiliki sejumlah unsur kepercayaan yang hingga saat ini masih dipraktekan secara rutin. Pelaksanaan unsur-unsur kepercayaan tersebut menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat nelayan. Salah satu unsur penting dalam

system kepercayaan masyarakat nelayan adalah system upacara, yang pada prinsipnya memegang peranan penting dalam struktur masyarakat. Demikian urgennya unsur upacara tersebut sehingga tidak mungkin digantikan oleh unsur yang lain. Walaupun disadari bahwa dalam beberapa bagian dalam pelaksanaannya telah mengalami pergeseran seiring dengan terjadinya perubahan social budaya masyarakat.

Inti dari sistem kepercayaan adalah keyakinan yang menjembatani antara manusia dengan kekuatan supernatural dalam bentuk serangkaian tindakan dan aktivitas mengintegrasikan sejumlah unsur seperti; pemimpin upacara, pelaksana upacara, benda atau materi upacara, dan tempat pelaksanaan upacara. Demikian halnya dengan masyarakat nelayan, mereka melaksanakan ritual yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan kekuatan supernatural yang dipercaya oleh mereka sangat menentukan kehidupan mereka. Kekuatan supernatural tersebut menurut kepercayaan masyarakat nelayan memiliki keinginan dan kehendak tertentu, sedangkan upacara yang dilakukan oleh mereka adalah untuk memenuhi keinginan dan kehendak tersebut. Fungsi pengetahuan dan kepercayaan terkait dengan upacara adalah kemampuan masyarakat melalui pemimpin atau tokoh masyarakat menentukan apa yang menjadi kehendak kekuatan supernatural tersebut. Keberhasilan mengharmoniskan hubungan antara anggota masyarakat dengan kekuatan supernatural melalui pelaksanaan upacara sangat menentukan kondisi kehidupan di masa depan. Kenyataan yang mereka hadapi pada setiap selesai mengadakan upacara pesta nelayan dan memulai aktivitas melaut hasil tangkapan mereka semakin meningkat, hal itu berkontribusi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan yang mendiami pesisir pantai.

Sebagai sebuah bentuk komunikasi antara warga masyarakat dengan kekuatan supernatural yang diarahkan menjadi strategi mempertahankan harmonisasi antara masyarakat dengan kekuatan gaib tersebut, masyarakat nelayan bugis di Sulawesi Selatan melaksanakan pula suatu system upacara untuk memenuhi tujuan yang lebih spesifik dalam kehidupan mereka. Selain upacara yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemaritiman masyarakat nelayan juga tetap menjalankan adat istiadat dan budaya nenek moyangnya yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk upacara seperti; pernikahan, kelahiran, pembuatan rumah, menaiki rumah baru, upacara kematian dan upacara siklus hidup.

Berbagai bentuk upacara yang setiap tahun dilakukan secara besar-besaran oleh masyarakat nelayan Bugis adalah upacara pesta laut yang kemudian oleh Bugis dikenal dengan nama “*mappanrestasi*”. Upacara ini dimaksudkan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari masyarakat nelayan terhadap kekuatan gaib yang dipercaya menjadi penyebab kehidupan yang lebih baik karena hasil tangkapan yang banyak dan kondisi laut yang tenang sehingga memungkinkan masyarakat nelayan melakukan aktivitas kenelayan dengan aman.

F. Proses Pelaksanaan Upacara

Masyarakat nelayan seperti yang telah kami uraikan masih tetap memegang adat istiadat dari para leluhurnya seperti upacara yang dilakukan pada waktu mereka berhasil menangkap ikan yang banyak atau panen mereka melakukan suatu upacara khusus yang dilakukan setelah adanya munyawarah kapan waktu yang tepat melaksanakan upacara syukuran kepada Tuhan YME. Dalam

kegiatan upacara pesta nelayan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rapat atau pertemuan, kemudian dilanjutkan dengan beberapa rangkaian. Rangkaian kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Menentukan waktu dan tempat

Menentukan waktu dan tempat untuk memulai pesta, biasanya masyarakat nelayan mengadakan pertemuan yang biasanya disebut Tudang Sipulung (duduk berkumpul). Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah dan instansi terkait bersama dengan sandro (dukun) atau pawang dan para nelayan setempat. Masing-masing pihak tersebut mempertemukan pendapat dan menentukan waktu yang tepat yang dianggap baik untuk melaksanakan pesta nelayan. Setelah itu segenap nelayan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki kegiatan pesta nelayan pada tahun ini.

b. Menyiapkan panganan dan makanan untuk pesta

Sehari sebelum pesta dilakukan para nelayan menyiapkan panganan tradisional, disamping panganan kecil, penyelenggara menyiapkan tumpeng yang dihiasi telur warna warni serta makanan pada pesta pada umumnya. Setelah panganan tradisional dan makanan untuk pesta nelayan selesai di buat lalu di kumpulkan disatu tempat untuk siap diantar ke pelabuhan.

2. Tahap Pelaksanaan Upacara

Tahap pelaksanaan pesta nelayan biasanya berlangsung sehari dari pagi hingga sore hari. Pada malam sebelumnya, masyarakat nelayan melakukan pembacaan barasanji diakhiri dengan makan bersama sama. Pada pagi hari masyarakat nelayan, para undangan berduyun-duyun mendatangi tempat upacara adat yang hendak diselenggarakan, ini biasanya dilaksanakan di pinggir pantai (**pelabuhan**). Seperti pada acara adat lainnya, para undangan pemuka masyarakat dan pemuka agama berkumpul dalam suatu tempat mereka melakukan pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka agama.

Pembacaan naskah dan doa-doa hanya berlangsung beberapa saat. Setelah itu pembawa acara memandu acara selanjutnya yaitu sambutan dari pemerintah dan petuah adat yang dilanjutkan dengan turun ke laut dengan menaiki perahu-perahu yang telah **disiapkan**, sambil membaca doa keselamatan untuk para leluhur yang menjaga keselamatan mereka selam di laut. Perahu – perahu yang telah dihiasi oleh ornamen warna warni dari kertas dan bendera yang terbuat dari kain, berlayar mengelilingi pulau.

3. Pantangan-pantangan Dalam Upacara

- a. Para peserta upacara pantang mengucapkan kata-kata kasar

Sebagaimana kita ketahui bahwa hampir semua tradisi pantangan melarang mengeluarkan kata-kata kasar, seperti mengumpat, mencaci dan menghina. Apabila seseorang dalam upacara ini mengeluarkan kata-

kata kasar maka arwah para leluhur yang ada dilaut akan murkah dan menurunkan bala atau marabahaya yang bisa berbentuk angin atau gelombang besar yang mengakibatkan bencana bagi nelayan. Ditinjau dari segi agama perkataan kasar seperti ini pun tidak diperbolehkan dan merupakan suatu dosa.

b. Pantang bagi peserta upacara bertengkar

Pertengkar adalah suatu permusuhan yang dapat menimbulkan keretakan antara sesama nelayan. Pertengkar ini akan menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi masyarakat nelayan pada saat melakukan upacara. Berdasarkan kepercayaan masyarakat nelayan apabila terjadi pertengkar mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan apabila mereka turun melaut, ikan akan pindah ke pesisir laut lain dan ini akan merugikan nelayan.

c. Tidak boleh menegur benda – benda yang aneh

Apabila nelayan menemukan benda aneh di laut seperti pohon nipa yang tumbang dan hanyut dilaut atau benda menyerupai perahu sedang berlayar maka para peserta upacara tidak boleh menegur. Menurut kepercayaan mereka para nelayan apabila para peserta upacara menegur tentang keindahan alam tersebut maka akan mengalami kesurupan.

d. Tidak boleh tidur pada saat upacara berlangsung

Menurut kepercayaan para nelayan apabila mereka tidur pada saat upacara berlangsung maka mereka akan diganggu oleh roh-roh halus yang ada dilaut, yang menyebabkan mereka bisa kerasukan seperti orang gila

dan tentunya akan mengganggu proses pelaksanaan upacara pesta nelayan tersebut.

- e. Tidak boleh makan panganan sebelum tiba waktunya
Menurut kepercayaan masyarakat nelayan para leluhur murka dan upacara yang berlangsung tidak akan memberikan hasil yang diinginkan para nelayan apabila mereka turun setelah melakukan upacara.
- f. Tidak boleh berpikiran buruk pada saat upacara berlangsung
Apabila ada peserta upacara berpikiran buruk, menurut kepercayaan para nelayan, akan terjadi musibah yang mengganggu peserta upacara tersebut misalnya penyakit tiba-tiba apabila mereka telah sampai di rumah masing – masing.
- g. Peserta upacara tidak boleh berkata dusta
Apabila peserta upacara berkata dusta dalam pelaksanaan upacara ini, menurut kepercayaan para nelayan, mereka akan mendapatkan petaka berupa kehilangan sesuatu barang berharga yang mereka miliki.
- h. Tempat menyimpan ikan tidak boleh kosong
Apabila para nelayan mengosongkan tempat ikan mereka yang ada diperahu pada saat melaksanakan upacara menurut kepercayaan nelayan yang bersangkutan mereka pada saat turun melaut tidak akan mendapatkan hasil tangkapan.
- i. Dilarang bagi siapapun menghamburkan makanan dan minuman ke laut

Mengotori laut dan pesisir pantai menurut kepercayaan para nelayan, ikan - ikan yang masih ada di laut akan meninggalkan areal tersebut sehingga pada saat turun ke laut mereka tidak akan mendapatkan hasil tangkapan yang memadai.

Prinsipnya, pantangan yang disebutkan diatas mengandung makna religi disamping bermakna budaya. Hal-hal tersebut harus dipatuhi para nelayan demi keberhasilan dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam rangka peningkatan ekonomi. Hal yang pada akhirnya berdampak positif pada pembangunan.

Walaupun para nelayan tidak mendengar atau melihat langsung arwah leluhurnya, namun mereka yakin arwah para leluhur dapat menolongnya dalam musim penangkapan ikan tahun berikutnya. Setelah upacara selesai para nelayan dan peserta upacara kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri melaut keesokan harinya.

G. Fungsi Upacara Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Nelayan

1. Fungsi Relegius

Para antropolog sejak lama menaruh perhatian cukup besar terhadap kajian tentang upacara dari system upacara. Koenjaganigrat (1987: 82) mengungkapkan bahwa system keyakinan disatu sisi menentukan acara ritus dan upacara. Sebaliknya system ritus dan upacara itu sendiri melahirkan serta mengembangkkn suatu konsep dan keyakinan. Pandangan tersebut di atas menunjukkan adanya suatu hubungan yang sangat erat antar system upacara dan system religious.

Kedudukan sanro bagi nelayan dikenal sebagai unsure penyampaian doa-doa yang berhubungan langsung dengan arwah leluhur para nelayan yang bersemayam dilaut. Namun demikian hubungan antara sanro dan arwah leluhur itu merupakan hubungan kebatinan antara manusia dengan alam gaib. Selain itu sanro yang melakukan doa-doa keselamatan pada arwah para leluhur dan kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa agar para nelayan selamat di laut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam mengarungi lautan.

Mengenai mitos tentang pelaksanaan upacara merupakan pesan dan janji yang turun temurun dari leluhur para nelayan. Mitos ini mengisahkan tentang janji yang harus ditepati disamping doktrin ajaran yang diungkapkan dalam bentuk amanat. Melihat perkembangan saat ini di mana upacara pesta nelayan sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta yang dipadukan dengan ketaatan kepada pesan-pesan para leluhur. Keyakinan ini terus mereka pertahankan dan laksanakan melalui upacara adat pada setiap tahunnya secara berkala dan semakin meningkat baik ditinjau dari unsur pelaksanaannya.

Nelayan mentaati semua janji dan pesan serta menghindari segala pantangan yang ditetapkan, maka para nelayan akan berhasil dalam penangkapan ikan dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

2. Fungsi Sosial

Upacara religious atau agama yang biasanya dilaksanakan oleh banyak warga komunitas nelayan. Pemeluk religi

bersangkutan mempunyai fungsi social untuk mengintensifkan solidaritas manusia (Robertson Smith dalam Koentjaraningrat 1987:67). Gagasan ini ternyata sesuai dengan kenyataan yang tercermin dalam upacara pesta nelayan.

Perwujudan solidaritas social dalam rangka pelaksanaan upacara, antara lain tercermin pada pola kerjasama baik untuk menyiapkan berbagai makanan maupun menyiapkan perahu yang akan menghiasinya, dan menyiapkan biaya penyelenggaraan upacara tersebut. Masing-masing pihak memberikan sumbangan menurut kemampuannya. Selain itu proses penetapan waktu pelaksanaan upacara ditentukan dalam forum pertemuan pendapat yang menetapkan kata sepakat/musyawarah.

Pesan yang merupakan doktrin dari para leluhur menekankan perlunya komunitas nelayan menjaga hubungan harmonis diantara sesama mereka, antara sesama komunitas atas dasar saling menghormati, kasih mengasihi, dan saling menghormati. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga itu mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dan solidaritas social yang makin intensif melalui upacara pesta nelayan.

3. Fungsi Ekonomi

Salah satu bagian yang dikisahkan dalam naskah lontara yang dibacakan oleh pemuka adat dalam pesan para leluhur, khususnya menyangkut tata cara peraturan ekonomi rumah tangga. Para leluhur nelayan menurut pesan mengatakan pesan bahwa Sang pencipta tidak menyenangi suasana rumah tangga para nelayan yang gemar menghambur-hamburkan

nasi, memperebutkan makanan, makan secara sembunyi-sembunyi, bersifat boros, sombong dan lain-lain.

Pada umumnya pada upacara terkandung suatu gagasan tentang pola penataan ekonomi rumah tangga yang dianggap ideal. Dalam hal ini para leluhur tidak melakukan monopoli atas sumber daya laut, melainkan harus membaginya secara merata sesuai dengan jasa dan kerja masing-masing orang. Selain itu nelayan tidak boleh boros, demikian juga tidak dikehendaki mereka bersifat pelit. Demikianlah akan tercipta kehidupan ekonomi yang stabil sekaligus mendorong timbulnya kesejahteraan bersama dan kemakmuran di kalangan anggota masyarakat petani. Berdasarkan pesan dalam pelaksanaan upacara terkandung fungsi-fungsi ekonomi, termasuk mendorong timbulnya etos kerja yang tinggi bagi segenap nelayan

4. Fungsi Integrasi Antara Generasi

Adapun fungsi pesta nelayan yang cukup menonjol ialah pemantapan hubungan solidaritas masyarakat untuk lebih menambah keterikatan antara satu dan lainnya. Dalam hal ini warga masyarakat termasuk kaum remaja dan anak-anak secara langsung dapat mengambil alih atau mewarisi berbagai norma disamping nilai-nilai budaya leluhur yang dipesankan melalui upacara.

Secara psikologi pengalaman masa kecil biasanya meninggalkan kesan cukup dalam hingga anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka mau memperhatikan dan menyimak pesan-pesan para leluhur melalui pembacaan naskah lontara, dengan sendirinya akan mengetahui tentang berbagai

sifat positif, norma social serta nilai –nilai luhur yang sejak lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu melalui upacara yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat, segala seluk beluk proses pelaksanaan upacara, generasi muda dapat secara langsung merekamnya dalam pikiran mereka. Demikianlah, maka secara beransur-ansur tatat cara upacara di transmisikan dalam suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengalaman individu masing-masing peserta upacara.

H. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis kemukakan sehubungan dengan sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka tentang makhluk halus yang mendiami laut. Media untuk berhubungan dengan makhluk halus ini dengan cara macceratasie dengan maksud untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Kegiatan upacara yang dilakukan nelayan selain mengandung aspek psikologi dengan mempertebal rasa kepercayaan diri nelayan dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut yang penuh resiko dan bahaya, juga mengandung aspek social yang dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan para nelayan sehingga masalah yang sering timbul pada waktu melakukan penangkapan ikan dapat diselesaikan secara baik.



BAB II

SISTEM EKONOMI MARITIM MASYARAKAT BUGIS

A. Fenomena Hidup Masyarakat Maritim

Indonesia terkenal sebagai Negara Kepulauan yang melintang di atas khatulistiwa. Ada kurang lebih 13000 pulau besar dan kecil tersebar dan membujur dari barat ke timur, sekitar 60 % persen wilayah Indonesia terdiri atas perairan dengan luas kurang lebih 3 juta kilometer persegi. Sebagian besar penduduk yang hidup di tepi pantai menggantungkan kehidupannya dari laut, baik sebagai nelayan maupun sebagai pelaut yang dengan perahu-perahunya berlayar mengarungi dan menjelajah lautan serta menjadi alat transportasi melintas dari satu pulau ke pulau lainnya. Oleh karena penghidupan dan kehidupan mereka bersumber dari laut, maka mereka sering disebut masyarakat maritime (*maritime society*).

Masyarakat maritime diseluruh wilayah pantai Indonesia bertempat tinggal dalam kelompok-kelompok teritorial; dan hidup dalam kelompok-kelompok sosial di tempat-tempat terpisah sepanjang pantai pada masing-masing pulau. Keterpisahan

masyarakat tersebut memungkinkan timbulnya perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan mereka. Di samping perbedaan tersebut juga dimungkinkan adanya sejumlah persamaan kebudayaan karena pengalaman mereka dalam berhubungan mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut. Terdapat kemungkinan jika terjadi perbedaan lingkungan budaya suatu masyarakat dapat menyebabkan perbedaan dalam kehidupan social ekonomi mereka. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kelompok masyarakat maritime yang telah mengalami perubahan budaya dimana mereka menerima unsur-unsur budaya dari luar yang kemudian di internalisasi dalam kebudayaan mereka, sementara ada pula kelompok masyarakat maritime yang bersifat konservatif tidak menerima perubahan dan bertahan pada pola budayanya sendiri. Diantara kelompok masyarakat maritime terdapat kelompok-kelompok yang telah menerima dan menggunakan teknologi modern dengan orientasi komersial dalam menangkap ikan atau sumberdaya alam perikanan lainnya. Tetapi tidak sedikit pula yang masih menggunakan system pengetahuan dan teknologi tradisional dengan orientasi subsistensi dengan maksud mempertahankan keserasian hubungan dengan lingkungan alam laut.

Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, dikenal masyarakat Lamalera. Sejak dahulu kala, masyarakat ini hidup dari penghasilan menangkap ikan paus. Seluruh tata hidup mereka diatur atas dasar system mata pencaharian sebagai penangkap ikan paus. Alat utama yang digunakan adalah perahu dan tombak. Masyarakat ini tergolong miskin dan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (Selo Soemarjan, 1989). Mereka memilih hidup dalam kondisi social ekonomi miskin, subsistensi karena mereka merasa lebih penting menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan laut

untuk mempertahankan eksistensi hidup mereka dan generasi berikut.

Sebaliknya dikenal pula berbagi kelompok masyarakat maritime yang menangkap ikan atau sumberdaya alam perikanan lainnya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri, tetapi sebagai komoditas yang diperdagangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat luar, bahkan terdapat masyarakat melakukan perdagangan hasil tangkapan dengan melakukan perdagangan antar pulau, atau bahkan sebagai komoditi ekspor. Salah satu contoh adalah nelayan patorani yang bermukim di pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi-Selatan. Nelayan ini khusus menangkap ikan terbang dan mengumpulkan telur ikan terbang yang dilakukan pada musim tertentu. Ikan terbang, terutama telurnya memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama di pasar internasional.

Di Sulawesi-Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar, kegiatan menangkap ikan terbang dan mengumpulkan telur ikan terbang, tidak hanya menjadi pilihan sebagai pekerjaan pokok sebagian besar nelayan pantai, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang menjadi suatu model budaya tersendiri yang berbeda dengan kelompok nelayan lainnya yang bermukim di sekitar kawasan pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan. Pola budaya yang mereka miliki diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya sehingga keberlangsungan kelompok ini terpelihara sejak zaman lampau hingga sekarang. Para nelayan patorani memiliki system pengetahuan dan teknologi penangkapan dan pelayaran yang diperoleh melalui proses sosialisasi yang berlangsung sejak dini, dimulai sejak anak masih kecil tanpa melalui pendidikan formal di sekolah. Pengetahuan mereka berkembang dari suatu proses

panjang dalam bentuk catatan pengalaman berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan laut. Rangkaian pengalaman itu membentuk suatu system pengetahuan dan kepercayaan spesifik dijadikan sebagai modal dasar dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut.

Masyarakat nelayan Sulawesi - Selatan terkenal dengan kejayaannya dilaut, kejayaan itu terutama disebabkan karena nelayan Bugis Makassar berani dan tangkas mengarungi lautan sungguhpun dengan perahu yang tergolong kecil. Dengan kepiawaian mengarungi lautan tersebut, orang bugis Makassar terkenal memiliki banyak tempat dan perkampungan di seluruh wilayah nusantara, bahkan di tempat-tempat lain di luar batas wilayah Kepulauan Indonesia seperti di Johor Malaysia, bahkan terdapat informasi yang mungkin menarik untuk ditelusuri kebenarannya bahwa orang penduduk asli Australian terdapat hubungan kekerabatan dengan orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan.

Karena kecenderungan berorientasi kelaut, otomatis sebahagian besar masyarakatnya hidup sebagai nelayan. Dalam banyak hal mereka mempunyai pola-pola sosial budaya yang sangat berbeda dengan pola-pola sosial budaya masyarakat petani darat. Pola pekerjaan mereka mengharuskan lebih sering terpisah dengan masyarakat darat, juga dapat dikatakan bahwa pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan berat dan mengandung banyak resiko sebab pekerjaan yang mereka geluti sangat tergantung dari anugrah alam yang setiap saat bergejolak sekalipun teknik yang mereka gunakan dan peralatan yang memadai telah mereka kenal namun pekerjaan sebagai nelayan tetap merupakan hal rawan sewaktu-waktu dapat menyebabkan kecelakaan bagi pelakunya.

Nelayan sebagai pemburu ikan di laut selalu menemukan dirinya tergantung dari anugrah alam yang banyak geloranya itu. Bagaimanapun banyaknya teknik-teknik penangkapan yang ada sekarang ini dan juga betapa banyaknya teknologi yang diperkenalkan, namun bagi nelayan selalu memilih strategi yang terbaik dan yang dapat memperkecil kegagalan. Bagaimanapun harus dikatakan, bahwa pekerjaan sebagai nelayan, adalah pekerjaan yang berat dan mengandung banyak resiko dibanding dengan pekerjaan bertani di sawah atau berkebun di ladang. Sekalipun teknik yang terbaik dengan peralatan yang memadai, pekerjaan ini tetap dirasakan rawan. Selain mereka menghadapi berbagai masalah di tengah laut, nelayan sering pula mengalami kerawanan di darat, terutama jika hasil produksinya rendah nilainya dipasaran. Hasil tangkapan nelayan kadang-kadang harganya turun drastis, bahkan bias jadi harga yang mereka terima tidak rasional terutama pada musim turuna (produksi tinggi), pada kondisi seperti itu, penghasilan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan biaya produksi dan tenaga yang digunakan.

Masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang dalam mempertahankan hidupnya mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut sebagai sumber daya utama. Mereka memiliki suatu pola budaya yang spesifik dideterminasi oleh lingkungan laut. Oleh sejumlah ahli mengatakan bahwa laut merupakan bentuk lingkungan yang memiliki sifat mendua (*ambiguity*) yang memerlukan karakter perilaku tertentu untuk berinteraksi dan beradaptasi. Relasi antara bentuk dan sifat lingkungan pada satu sisi dengan bentuk dan pola kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada sisi yang menyebabkan adanya variasi kondisi social budaya dan ekonomi yang dijumpai pada masyarakat nelayan di sejumlah desa pantai di Sulawesi Selatan pada khususnya dan pada masyarakat

nelayan dunia umumnya. Pekerjaan sebagai nelayan kontras dalam berbagai hal dengan pekerjaan sebagai petani dan peladang. Dalam beberapa kasus, jika dibandingkan antara kehidupan social ekonomi nelayan dengan saudaranya yang bekerja sebagai petani atau peladang, tingkat kehidupan ekonomi nelayan jauh lebih rendah. Rendahnya tingkat kehidupan nelayan disebabkan karena sifat dari produksi hasil tangkapan mereka yang cepat rusak dan tidak bernilai ekonomi, hal ini berbeda dengan sifat hasil produksi petani di darat, oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi kedua segmen masyarakat ini maka diharapkan ada keseimbangan dinamis antara pembangunan masyarakat nelayan dan pembangunan masyarakat petani. Kebijakan yang diperlukana adalah bagaimana mengoptimalkan peranan pertanian darat dan meningkatkan peranan nelayan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan secara lebih efektif dan berkesinambungan. Mengingat kondisi social ekonomi sebagian besar kelompok nelayan yang mendiami sebagian besar desa-desa pantai di Sulawesi Selatan tergolong rendah, maka sebagai golongan masyarakat terbelakang dari segi social budaya dan ekonomi perlu mendapat perhatian dari pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Sawe (1986) “Bahwa dari sekian kelompok masyarakat, mereka yang bermukim didesa-desa pantai menjadi salah satu kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebahagian golongan ekonomi lemah. Mereka memiliki tingkat pendapatan yang rendah (terutama kelompok sawi), pendidikan dan tingkat kesehatan yang masih memperhatikan sehingga kelompok nelayan sepatasnya mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah dalam era pembangunan dewasa ini.”

Dalam Undang-Undang perikanan (1995:3) mata pencaharian sebagai nelayan melakukan penangkapan ikan, secara geografi

masyarakat nelayan relatif terpisah dari masyarakat lain, dimana kelompok masyarakat nelayan berada pada siklus hidup yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, sedangkan kondisi iklim secara langsung mempengaruhi dinamika mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Dalam kegiatan ekonomi nelayan ini, masih terikat oleh tradisi walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang demikian pesat, namun kondisi sosial budaya dan geografis mereka menyebabkan mereka belum sepenuhnya mampu mengadopsi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Modal yang mereka peroleh ini terikat pada satu obyek usaha saja sehingga kendala produksi juga tergantung pada keadaan ekonomi masyarakat nelayan itu sendiri, ini tercermin dari pendapat Lampe (1989:1) mengenai masyarakat nelayan, sebagai berikut: “Masyarakat nelayan adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian hidup dengan memanfaatkan sumber daya laut seperti ikan dan biotik laut lainnya yang mengandung nilai ekonomis (dapat dikonsumsi dan dipasarkan), baik secara terus-menerus atau musiman, dengan menggunakan prasarana dan sarana seperti perahu, alat penangkapan, dan lain-lain.”

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal bahwa dalam kehidupan nelayan sebagai pencari ikan di laut, harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan, mereka harus menghadapi ganasnya ombak, angin kencang, terik matahari di siang hari, udara dingin di malam hari. Pada satu sisi kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus ditaklukkan dan dapat menjadi kendala utama dalam usaha penangkapan, namun pada sisi yang lain, dengan berhadapan kondisi semacam itu membentuk nelayan

menjadi manusia tangguh dan pemberani dalam menghadapi segala resiko yang terjadi.

Kadang-kadang dengan situasi seperti itu nelayan tradisional yang sangat tergantung dengan kondisi alam tidak dapat melakukan kegiatan kenelayanan dengan baik. Keterbatasan yang melekat pada diri mereka adalah konsekuensi logis dari perkembangan kebudayaan yang dimiliki. Walaupun tampak dari luar berbagai kesulitan yang dialami oleh nelayan, mereka tetap bertahan dalam status quo disebabkan karena memang secara alami dalam proses evolusi, eksistensi pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan penting bagi suku-suku bangsa yang bermukim dekat pantai (Koentjaraningrat, 1985:11), meskipun dalam proses perkembangan awalnya, mereka hanya menggunakan system teknologi yang sangat sederhana seperti kayu dan tombak.

Perkembangan pembangunan perikanan melalui proses modernisasi perikanan merupakan suatu dinamika masyarakat yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan perubahan tertentu pada kehidupan social ekonominya. Mc.Luhan berpendapat bahwa inovasi-inovasi dalam bidang teknologi banyak pengaruhnya terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka perkembangan pembangunan perikanan umumnya di Sulawesi-Selatan yang diawali oleh inovasi teknologi baru dalam bidang perikanan, dapat mempengaruhi kehidupan social ekonomi nelayan, sehingga menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu, walaupun pada tingkat intensitas yang berbeda. Aspek-aspek tersebut antara lain: aspek organisasi, aspek ekonomi, aspek teknologi dan peralatan, dan sebagainya.

B. Konsep Sistem Ekonomi Maritim

Sistem adalah suatu rangkaian kerja yang tertata harmonis yang melibatkan berbagai unsur-unsur terkait tanpa menimbulkan kecenderungan pada salah satu aspek yang dianggap paling menonjol. Arti dari sistem ini menurut W.J.S.Poerwadarminta (1985:479) adalah: “Sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud tertentu”. Lebih lanjut Soetrisno Prawiraharjono memberikan pengertian sistem sebagai suatu keseluruhan yang menyeluruh (totalitas) atau kesatuan (entitas) yang terdiri dari unsur-unsur yang saling jalin menjalin dan merupakan suatu kesatuan yang bulat.

Dalam pandangan structural fungsional, suatu teori yang jamak digunakan oleh para ahli sosiologi dan antropologi dalam menjelaskan hubungan berfungsi antar bagian atau unsur dalam suatu system, dimana unsur-unsur dari suatu system tersebut pasti memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga dan mempertahankan berlangsungnya keseimbangan system tersebut. Jika suatu unsur dari system itu mengalami perubahan maka unsur yang lain akan berusaha menyesuaikan sehingga terjadi keseimbangan dinamis. Berbagai unsur dalam suatu system kemasyarakatan antara lain dapat berupa; system ekonomi, system hukum, system kekebrabatan, system teknologi, system bahasa dan lain sebagainya.

William A. Shoride dan Voiel (dalam Munadah, 1987:77) menyebutkan 6 (enam) ciri pokok dari suatu sistem, yaitu:

1. Suatu sistem mempunyai aturan sehingga perilaku dan kegiatan diarahkan kepada pencapaian satu tujuan. Perilaku ini disebut *Purposive Behavior*.

2. Suatu sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*). Keseluruhan yang bulat dan utuh tersebut bukan sekedar kumpulan bagian-bagian (subsistem) dan bergabung menjadi satu melainkan mempunyai makna tersendiri.
3. Sistem mempunyai sifat terbuka, suatu sistem berinteraksi dengan sistem lainnya yang lebih luas dan biasanya dinamakan lingkungan sistem.
4. Suatu sistem melakukan transportasi dan mengubah sumber-sumber masukan (*input*) menjadi luaran atau hasil (*output*) untuk mencapai tujuan.
5. Dalam sistem terdapat saling keterkaitan, ada interaksi di antara bagian-bagian satu samalain yang saling bergantung, juga terdapat interaksi antara sistem dengan lingkungan.
6. Sistem mempunyai mekanisme kontrol, didalam sistem terdapat kekuatan pemersatu, sehingga sistem ini berpadu satu sama lain, terkait jadi satu dan sistem mampu mengatur dirinya sendiri.

Sistem mempunyai mekanisme kontrol, di dalam sistem terdapat kekuatan pemersatu, sehingga sistem ini berpadu satu sama lain, terkait jadi satu dan sistem mampu mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, sistem ekonomi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat permanen membentuk pola bagaimana pemenuhan kebutuhan suatu kelompok masyarakat dapat dicapai melalui sumberdaya yang terbatas dengan tingkat keinginan yang tanpa batas. Unsur sistem ekonomi paling sedikit terdiri atas tiga komponen besar yakni; unsur sistem dalam bentuk unsur

berproduksi, unsur sistem dalam bentuk unsur distribusi dan unsur sistem dalam bentuk unsur konsumsi. Masing-masing unsur sistem tersebut memiliki unsur yang lebih kecil yang disebut dengan unsur-unsur sistem, demikian seterusnya, sehingga analisis sistem akan tiba pada kebulatan pemahaman terhadap sebuah substansi yang berlapis mulai dari unsur yang paling besar sampai pada unsur yang paling kecil.

1. Aspek Ekonomi Maritim

Aspek ekonomi maritim atau perikanan yang akan diuraikan disini mencakup pengertian: Bagaimana proses produksi ikan dan komoditas lainnya bagaimana proses distribusi dari produsen ke konsumen, dan bagaimana pola konsumsi yang terdapat pada masyarakat maritim. Sistem ekonomi di Sulawesi Selatan terutama pada wilayah desa pantai berjalan dengan dipengaruhi oleh lingkungan laut. Seperti bagaimana proses produksi ikan dan komoditas laut lainnya sebagai komoditas utama daerah ini. Demikian juga bagaimana proses distribusi ke tempat lain dan distribusi barang-barang kebutuhan lain ke daerah lain melalui media laut dan juga mungkin melalui jalur darat. Demikian pula pola-pola konsumsi yang ada pada masyarakat sangat tergantung dan sesuai dengan pola konsumsi diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

Abu Hamid, (1986:5) dalam studi sosiologi Antropologi Ekologi tentang peningkatan kehidupan nelayan dan sektor kemaritiman di Sulawesi-Selatan memberi sorotan utama terhadap nelayan khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi dengan meletakkan masalah transaksi dalam unit kerja pemilik modal dan sarana produksi sebagai tema dasar.

Juga dikatakan kaum nelayan berada dalam dilematis. Disatu pihak, mereka dituntut untuk meningkatkan produksi, sedangkan dilain pihak, kebutuhan konsumsi dan akumulasi modal harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kebutuhan-kebutuhan nelayan yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup dengan minimum kalori, kebutuhan cadangan dan kebutuhan upacara adakalanya bertentangan dengan keharusan yang ingin dipaksakan oleh perencana pembangunan pedesaan (para ahli ekonomi makro). Kaum nelayan adalah mereka juga pelaku ekonomi dan berada dalam sebuah rumah tangga. Nelayan sebagai anggota komunitas menyiapkan tenaga dan pendanaan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Pengeluaran tidak didorong oleh sistem yang mengutamakan perhitungan untung rugi namun didorong oleh sistem norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang dilingkungannya.

Sejak adanya manusia di muka bumi ini, masalah ekonomi sangat menarik perhatian ilmuwan karena hal ini merupakan masalah bagi semua umat manusia. Perilaku nelayan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seperangkat pengetahuan yang dimilikinya untuk mengelola sumber daya laut yang potensial dijadikan sebagai lahan perikanan secara intensif. Dimana hal ini merupakan abstraksi budaya, menurut Koentjaraningrat (1997:10) bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh mahluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi inikira-kira 4 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Sejarah kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut terjadi selaras

dengan pola berpikir manusia, perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya tetapi bertitik tolak dari pandangan-pandangan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kemajuan pada saat ini merupakan konsep-konsep masalah yang secara historis telah terbentuk pada waktu lampau.

Antropologi ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dan kebudayaan dalam organisasi dan pranata-pranata yang mengatur sumber-sumber daya alam yang terbatas dalam upaya pemenuhan kebutuhan kebutuhannya dalam suatu masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat manusia melakukan usaha-usaha atau karya yang diciptakan yang bernilai ekonomis agar dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan semua ini merupakan bagian dari kebudayaan seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat bahwa ada paling sedikit 7 macam dorongan naluri salah satu diantaranya adalah: “dorongan untuk mempertahankan hidup”. Dorongan ini memang merupakan suatu kekuatan biologi yang juga ada pada semua makhluk di dunia ini dan yang menyebabkan bahwa semua jenis makhluk mampu mempertahankan hidupnya dimuka bumi ini, (1990:109). Oleh karena itu manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan oleh adanya dorongan untuk mau mempertahankan hidup. Apalagi kebutuhan manusia tidak akan pernah berakhir bahkan semakin meningkat seiring dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu manusia harus mampu memecahkan setiap permasalahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti yang diungkapkan Malinowski

dan Koentjaraningrat (1990:199), bahwa "semua aktivitas kebudayaan berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian kebutuhan hidupnya. Adanya kebutuhan tersebut membuat manusia bertingkah laku.

Telah dibahas pada bagian terdahulu bahwa, dalam memahami perilaku ekonomi suatu kelompok masyarakat dalam profesi tertentu, yang mencakup 3 hal yaitu pola produksi, pola distribusi dan konsumsi. Ketiga hal tersebut yang diutarakan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, dalam arti kata ketiganya merupakan mata rantai yang saling kait mengait membentuk suatu sistem. Faktor produksi: yang tercantum di dalamnya mengenai peralatan produksi, proses produksi dan upacara-upacara dalam proses produksi. Faktor Distribusi: yang tercakup mengenai cara dan proses pendistribusian, tempat dan alat pendistribusian hasil produksi. Dan Faktor konsumsi yang menyangkut mengenai perilaku konsumsi dari hasil produksi.

a. Proses Produksi

Sebagai suatu daerah pemukiman nelayan, mata pencaharian utama dari penduduknya adalah mencari dan menangkap ikan dan sumberdaya lainnya dan juga budi daya ikanditambak-tambakatauempang. Dengandemikian, proses produksi di lingkungan masyarakat nelayan sangat tergantung pada perairan laut di sekitarnya. Para nelayan yang mencari ikan di laut memerlukan adanya sarana dan prasarana alat tangkap seperti perahu, jaring dan alat perlengkapan lainnya. Tanpa sarana dan prasarana maka kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan atau mengalami hambatan, bahkan kadang-kadang peralatan lengkap jika hambatan lain

dalam bentuk keadaan dan situasi musim yang kurang baik menyebabkan mereka tidak melakukan operasi penangkapan. Pada musim penghujan yang terjadi antara bulan Oktober sampai April proses operasi penangkapan dapat berjalan atau terpaksa berhenti karena para nelayan tidak berani mengambil resiko yang mungkin dapat timbul.

Tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses produksi ini adalah sejumlah anak buah kapal (*sawi*) yang berjumlah antara 8-15 orang dibawah kordinasi *punggawa* laut. Tinggi rendahnya hasil produksi ikan memang sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya ialah faktor peralatan yang dipakai. Jika dibandingkan produksi ikan dalam satu musim yang sama (penangkapan ikan) baik menggunakan peralatan modern maka terlihat adanya perbedaan jumlah yang cukup menonjol. Penggunaan peralatan tradisional mempunyai kapasitas daya tangkap yang terbatas, dan pemakaiannya sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia yang terbatas, sedangkan peralatan modern, selain kapasitas daya tangkapnya lebih besar juga lebih memungkinkan untuk menambah frekwensi turun ke laut (dengan menggunakan mesin tempel). Pada tahun 1976 produksi ikan mencapai jumlah 134, 402 ton, pada saat ini penggunaan teknologi modern hampir belum ada, sedangkan produksi tahun 1980, pada saat modernisasi perikanan telah masuk, jumlah produksi mencapai 920, 175 ton. Sementara itu agar peningkatan produksi ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan ekonomi nelayan, perlu diimbangi dengan cara pemasarannya yang lebih efektif. Dalam hal ini perbaikan pola pemasaran lewat sistem pelelangan di TPI dapat membantu memudahkan para nelayan memasarkan hasil produksinya

dalam menghindarkan mereka dari jeratan para tengkulak yang biasanya merugikan nelayan. Adanya peningkatan produksi ikan yang disertai dengan pola pemasaran dan pengolahan pasca panen yang lebih efektif, berarti pula dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan, disamping meningkatnya swasembda pangan pada bidang perikanan.

Produksi merupakan suatu langkah awal dari perilaku ekonomi dalam menghasilkan suatu jenis barang yang bernilai ekonomi, selanjutnya benda atau hasil dari produksi tersebut disalurkan ke masyarakat, atau dengan kata lain ini adalah suatu proses dari pola distribusi. Proses ini merupakan proses memindahkan hasil produksi yang telah mempunyai harga tertentu, yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. Proses Konsumsi adalah sebuah proses dimana hasil produksi dimanfaatkan memenuhi kebutuhan manusia dan merupakan proses akhir dari perilaku ekonomi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pola-pola budaya yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Organisasi produksi dapat dibedakan atas empat kenyataan, yakni: Susunan keanggotaan organisasi, Modal dan Teknologi, Pengawasan kekayaan, dan Bagi hasil serta resiprositas.

a. Susunan Keanggotaan Organisasi

Pada masyarakat yang masih sederhana, sebagaimana halnya dengan desa-desa nelayan, agaknya pembagian ini bisa dijadikan dasar untuk melihat kasus-kasus tertentu dalam kegiatan produksi. Meskipun uraian berikut tidak akan menjadi rumit, seperti halnya pada sistem produksi yang berskala besar. Keanggotaan dalam organisasi Ponggawa-Sawi, pada umumnya berasal dari ikatan pemukiman sama

atau dari unit tetangga yang berdekatan. Namun demikian, keanggotaan yang dapat dipercaya adalah berasal dari lingkungan keluarga sendiri, sesuai dengan norma sosial, dari garis keturunan belineal dan hubungan perkawinan, juga termasuk generasi sepupu dan kemenakan. Selain ukuran keanggotaan tersebut, lebih utama pula dilihat dari segi moral dan fisik, yakni kejujuran dan kekuatan jasmani.

Pemimpin organisasi adalah Ponggawa darat, seorang yang telah menyediakan modal kerja dan seperangkat teknologi (perahu layar /motor dan peralatan tangkap).

Seorang Ponggawa darat, bukanlah orang luar biasa, melainkan orang yang berhasil dan berpengalaman mengenai seluk beluk perikanan, ia berhasil mengakumulasikan modal dan memiliki posisi sosial tertentu dalam lingkungan masyarakatnya. Ia bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan masyarakatnya. Ia mempunyai budi pekerti luhur, jujur dan ulet serta ramah terhadap semua orang. Tidak pernah diketahui melakukan perbuatan dusta, curang, pemabuk dan penjudi. Ia seorang yang berani mengambil keputusan dan menanggung resiko atas keputusannya. Ia mempunyai sifat-sifat pemimpin dengan tutur kata yang menarik dan berani berkorban untuk orang lain, satunya kata dengan perbuatan, sehingga ia dapat memelihara kepercayaan orang padanya. Sifat yang terakhir ini adalah yang terpenting dari segala sifat yang harus dimilikinya, oleh karena sekali kepercayaan orang lain memudar, maka usaha dan organisasi bakal bubar, berarti *pongawadarat* akan kehilangan pekerjaan, semua orang akan mengucilkannya. Ia akan menjadi buah bibir dilingkungan masyarakatnya. Bukan saja dia, melainkan termasuk anggota

keluarganya. Jika hilang kepercayaan orang padanya, maka ia harus memilih diantara dua alternatif, yakni memilih pindah ke daerah lain atau memulai kembali dari awal dengan merubah semua sifat-sifat yang lalu.

Ponggawa darat adalah seorang wiraswastawan yang tumbuh dari bawah, memulai usaha dari skala kecil sebagai pedagang perantara ataupun mulai dari Ponggawa laut. Memang akhir-akhir ini, tidak kurang orang menjadi Ponggawa darat dari kalangan pegawai negeri yang tiba-tiba mempunyai modal atau pinjaman kredit dari Bank atas pengaturan tertentu, ia dapat menyediakan modal kerja dan teknologi serta menghimpun Sawi untuk bekerja padanya. Para sawi tertarik padanya, bukanlah karena sifat-sifat baik yang melekat padanya melainkan ia menggunakan wibawa jabatannya dalam birokrasi. Tidak pula orang menjadi Ponggawa darat seketika, karena mempunyai hubungan dengan pengusaha non pribumi sebagai pemberi modal dan fasilitas lainnya.

Orang kedua dalam organisasi produksi adalah Ponggawa laut. Pengangkatan untuk jadi *ponggawa* Laut, karena 2 (dua) sebab, yaitu: (1). Sawi yang dipercaya oleh *ponggawa* darat karena kejujurannya, keterampilannya dan pengalamannya tentang seluk beluk kemaritiman serta perikanan. Diberi kepercayaan untuk menjalankan perahu bersama seperangkat peralatan tangkap. *Sawi* yang diangkat bisa saja berasal dari kalangan yang sudah lama bekerja dibawah asuhan *ponggawa* darat atau berasal dari *ponggawa* darat lainnya. Faktor kejujuran dan kemahiran dilaut menjadi pertimbangan utama bagi pengangkatan tersebut. (2). Orang yang berpengalaman

dari kalangan nelayan mandiri yang sudah mempunyai perahu, sedang ia ingin menambah, merubah atau membeli peralatan baru guna mengganti yang sudah rusak/hilang, datang pada *pongawa* darat memintamodal kerjadan membuat perjanjian untuk menyerahkan produksinya. *Ponggawa* laut yang pindah atau telah memutuskan hubungan dengan *pongawanya* karena sesuatu sebab. Tugas-tugas *Ponggawa* Laut:

- Melakukan produksi pada lokasi penangkapan selama beberapa hari sekali turun melaut.
- Dalam proses produksi *Ponggawa* laut bertanggung jawab terhadap keselamatan armada beserta hasil-hasil yang diperolehnya.
- *Ponggawa* laut menjadi pemimpin dan orang tua bagi *Sawi-sawinya*, baik di darat, terutama dilaut.
- *Ponggawa* laut menyerahkan semua hasil produksi kepada *Ponggawa* darat melalui tim pengangkut (*pabbelolang*).

Orang ketiga dalam organisasi produksi, adalah *Para Sawi* yang diterima menjadi anggota suatu armada produktif, ditentukan oleh *Ponggawa laut* dan bias pula oleh *Ponggawa darat*. *Para sawi* ini diharapkan daripadanya, keterampilan dan kemampuan fisiknya dalam menjalankan unit penangkapan. Mereka tunduk atas perintah *pongawa* laut dengan segala pesan-pesannya. Diperlukan dari mereka keuletan dan kerja sama, baik di darat maupun di laut. Pada umumnya, pemilihan *Sawi* diambil dari sanak saudara *Ponggawa* laut atau orang yang dipercaya dari lingkungan tetangga.

Dalam merekrut tenaga kerja biasanya diambil dari lingkungan keluarganya sendiri sebab dapat membantu

anggota keluarganya yang belum memperoleh kerja dan dapat mengurangi kemungkinan larinya *sawi* jika telah mempunyai utang yang relatif banyak pada tempat dimana bekerja. Sebagaimana halnya dengan masyarakat pesisir, juga mengenal adanya kelompok sosial Ponggawa dan Sawi, kedua belah pihak selalu berdampingan dan bekerjasama dalam suatu komunitas untuk memperoleh sumber daya perikanan. Mereka ini dipertemukan oleh berbagai faktor, antara lain: Ponggawa adalah pemilik modal produksi yang dapat membantu dengan mempekerjakan sejumlah sawi. Sementara itu Sawi umumnya adalah pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga, mereka ini memiliki modal seperti yang dimiliki Ponggawa karena itu mereka butuh bantuan Ponggawa. Ponggawa selain menguasai produksi juga menguasai proses pemasaran. Kedua kelompok ini diikat oleh hubungan keluarga sekampung atau sedaerah.

Menurut Resusun (1989:28) bahwa, hubungan kerja antara Ponggawa dan Sawi didalam suatu aktifitas ekonomi pada hakekatnya adalah temporer, karena sebenarnya sawi adalah orang bebas yang hanya mengadu untung selama satu trik penangkapan, namun dalam kenyataan hubungan kerja antara Ponggawa dan sawi ini cenderung permanen.

Mereka menjadi *sawi*, oleh karena mereka telah membuat perjanjian kepada ponggawa arat melalui perjanjian kepada Ponggawa darat melalui Ponggawa laut yang berfungsi Juragan, karena mereka menerima sejumlah uang belanja atau barang. Ponggawa darat mengikat mereka dengan modal tersebut, bekerja dalam organisasinya sampai batas waktu tak tertentu. Masa kerja mereka dapat berlanjut terus sepanjang ada

pertalian “hutang budi” atau “hutang modal” pada *Ponggawa* darat. Seorang *Ponggawa* darat yang bijaksana, tidak pernah memaksa sawi membayar utangnya, sepanjang ia masih ingin kerja. Sementara sawi berada dalam organisasi, berarti semua kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, akan diurus oleh *Ponggawa* darat bersama Ponggawalaut, sepanjang ia berminat melakukan pekerjaannya. Dalam hubungan demikian, semua kesusahan apa saja, akan ditanggulangi bersama oleh *Ponggawa* darat keberanian mengambil resiko oleh seorang *Ponggawa* darat, terletak pada pelayanan kebutuhan anggota-anggotanya, oleh karena dipahaminya bahwa dengan pelayanan itu, maka anggotanya akan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya.

Berbeda halnya dengan nelayan *pangolin* sebagai nelayan mandiri, keanggotaannya dalam proses produksi terdiri atas anggota-anggota keluarga sendiri, sehingga disebut pula nelayan keluarga. Organisasi produksi bersifat sederhana dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

b. Modal dan Teknologi

Kesulitan yang dihadapi dalam usaha pengembangan perikanan rakyat adalah lemahnya permodalan untuk investasi. Nelayan sebagai bagian dari masyarakat selalu berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam mengikuti perkembangan modernisasi dalam bidang perikanan terutama untuk peningkatan produktivitas melalui penggunaan peralatan modern, seperti motorisasi, porsensine, perahu dan lain-lain, setidaknya-tidaknya menuntut adanya kebutuhan modal uang relatif lebih besar

dibandingkan kebutuhan modal dalam pemakaian peralatan tradisional.

Untuk memahami kebutuhan modal, nelayan berusaha mendapatkannya, baik melalui fasilitas KIK yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun dengan cara lain. Karena pemanfaatan teknologi baru di samping bertujuan meningkatkan penghasilan nelayan itu sendiri, sekaligus untuk mendukung program pembangunan di tingkat regional (desa) ataupun nasional. Adanya kebijaksanaan perkreditan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu usaha ekonomi lemah, terlihat pada sebagian besar nelayan yang pernah melakukan peminjaman modal dengan memanfaatkan program KIK yang disalurkan oleh BRI. Realisasinya kadang-kadang melalui kelompok atau individu tergantung dari jumlah permohonan. Adanya kebutuhan modal yang lebih besar dapat mengarahkan nelayan untuk berpikir ekonomis, karena mereka harus berhadapan dengan pola perhitungan ekonomi yang lebih terinci, sekaligus dapat mengubah sikap dan perilaku nelayan terhadap lingkungan yang lebih luas melalui realisasi lembaga-lembaga yang terkait, seperti BRI, Dinas Perikanan, dan lain-lainnya.

Aspek modal sangat menentukan maju mundurnya nelayan di samping alat tangkap yang dipergunakan. Dalam banyak contoh, hanya mereka yang mempunyai modal kuat yang mengambil keuntungan dan mampu menangkap peluang atau kesempatan baru. Apalagi akhir-akhir ini meningkatnya biaya alat-alat produksi dan peralatan baru lebih cepat rusak yang menuntut kecermatan nelayan, (Pollanac dalam Suwitha, 1991).

Telah dijelaskan di depan bahwa *Ponggawa* darat menyediakan modal dan peralatan tangkap, kemudian mengangkat *ponggawa* laut untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Modal berupa uang, dan peralatan tangkap terdiri atas perahu, layar/motor dan peralatan. Peralatan tangkap diadakan sesuai dengan kelompoknya, seperti pancing, romping dan bagang. Peralatan ini sebagian dapat dibeli langsung dan sebagian lagi dapat dibuat sendiri. Kemampuan seorang *Ponggawa* darat mengadakan modal dan alat tangkap, merupakan kekuatan dimiliki yang mungkin diperoleh dari akumulasi harta benda yang dimilikinya atau diperoleh melalui kredit Bank. Modal inilah yang diinvestasikan untuk menjalankan usahanya, dan diharapkan kembali melalui produksi secara bertahap menurut musim penangkapan.

Pinjaman sawi untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya tidak dibayar dengan tunai sekaligus atau ditentukan bunganya, tetapi dibayar melalui upa kerja lewat pembagian dari bagi hasil. Membayar utang, bukanlah tuntutan utama dari *Ponggawa* kepada sawi, melainkan kerja sungguh-sungguh lebih penting diharapkan dari mereka.

Seorang *Ponggawa* adalah seorang wiraswastawan yang menanamkan modalnya melalui investasi peralatan tangkap dengan segala kemungkinan resiko, sehingga kepercayaan penuh diletakkan pada *Ponggawa* laut sebagai pemimpin armada.

c. Pengawasan Kekayaan

Ponggawa darat sebagai pemilik modal dan teknologi, dan sebagai pemimpin organisasi senantiasa mengawasi jalannya

produksi dalam rangka usaha pengawasan kekayaan yang sudah ada. Ia harus meniti diatas tradisi masyarakat, yakni mempertebal keyakinan para anggotanya untuk bekerja lebih giat, agar keberhasilan dapat diperoleh yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Bagaimanapun berhasil atau tidak berhasil, Ponggawa tetap memberikan respons emosional kepada mereka, agar semangat kerjanya tidak mengendur. Dalam hal ini fungsi ponggawa adalah memberikan dorongan moral kepada para sawi.

Sebaliknya jika terjadi pelanggaran, misalnya menjual produksinya kepada orang lain, maka Ponggawa member ganjaran sewajarnya. Ganjaran berangsur-angsur jadi keras, jika pelanggaran sudah tiga kali. Kalau terjadi musibah, misalnya perahunya terdampar ke daerah lain, sehingga produksinya dijual didaerah itu, maka harus diperlihatkan kwitansi penjualannya kepada Ponggawa darat. Kalau peralatan tangkap hanyut dibawa arus, misalnya romping yang sudah dipasang menghilang, maka semua anggota menanggung resiko bersama Ponggawa darat.

Dalam memilih alternatif, apakah harus diadakan penghematan atau memaksimumkan produksi, maka Ponggawa selalu memilih resiko yang terkecil. Dengan kata lain selalu “mendahulukan keselamatan” dari semua alternative. Oleh karena itu, bila terjadi musim barat atau produksi akan berkurang, maka dipilih lebih baik tidak melaut dari pada melaut yang merugikan karena membuang banyak ongkos. Jika perhitungan mereka biaya produksi lebih tinggi daripada nilai produksi maka, armada harus istirahat dan semua resiko yang timbul ditanggung oleh Ponggawa darat.

d. Bagi Hasil dan Resiprositas.

Sistem bagi hasil dalam masyarakat nelayan yang dikenal secara umum di Sulawesi-Selatan terbagi atas 2 (dua) kategori: Pertama, Bagi hasil secara prosentase, yaitu nilai produksi dikurangi biaya produksi, lalu dibagi dua. Ponggawa darat memperoleh 50% dan Ponggawa laut bersama sawi-sawinya juga 50%. Kedua, bagi hasil komponen, yaitu pembagian kepada setiap komponen yang ikut berperan dalam proses produksi menurut bobot fungsinya. Nilai produksi yang dikurangi biaya produksi, kemudian dibagi masing-masing:

- a. Perahu 1 bagian
- b. Motor 1 bagian
- c. Peralatan tangkap 1 bagian
- d. Ponggawa darat 1 bagian
- e. Ponggawa laut 1 bagian
- f. Para sawi 1 bagian.

Kedua kategori inilah yang dikenal sebagai satu system dan merupakan sebuah norma bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Namun berbagai hal, terdapat varian yang berbeda-beda setiap organisasi dan pada setiap desa, tergantung besar-kecilnya atau berat-ringannya tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi.

Faktor resiprositas, yaitu pemberian berbalasan diantara anggota organisasi atau diantara tetangga tidak pernah dihitung secara rational dan material, oleh karena pemberian itu tidak berfungsi ekonomik, tetapi berfungsi kohesi diantara

anggota dalam rangka system ekonomi. Kohesi-adhesi sangat penting artinya dalam kelompok dan organisasi produksi.

2. *Proses Pemasaran atau Distribusi*

Penyebaran produksi, lazim disebut dalam istilah ekonomi, distribusi. Istilah ini mengandung pengertian yang luas digunakan oleh para ahli ekonomi karena menyangkut berbagai masalah dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakatnya. Pada kesempatan ini, tidak akan diurai secara luas menurut pemikiran ekonomi, tetapi pemikiran-pemikiran sosial yang menyangkut kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, bukan berarti menyangkal bahwa semua tindakan dan tingkah laku mempunyai aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Tingkah laku individu maupun kelompok selalu berhubungan satu dengan yang lainnya.

Distribusi komoditi ikan merupakan lanjutan kegiatan produksi. Dilihat dari segi pola tingkah laku, antara produksi dan kegiatan kegiatan distribusi, perlu dibedakan. Tidak berarti bahwa antara dua kegiatan tersebut samasekali tidak berhubungan, akan tetapi diperlukan untuk kepentingan analisa.

Apabila dilihat dalam konteks sosial dari kehidupan masyarakat nelayan, antara kegiatan produksi dan distribusi, sangat kuat unsur saling pengaruh mempengaruhi. Bahkan aspek distribusi merupakan wujud dari sistem ekonomi masyarakat, tampak pada gejala mekanisme pasar dan rekasi-reaksi harga. Sistem pasar dan mekanisme harga turut mempengaruhi biaya produksi, maka begitu pula sistem bagi hasil. Walaupun bagaimana produktivitas begitu tinggi sebagai

akibat pengelolaan tenaga dan teknologi, jika tidak dijamin oleh sistem distribusi yang baik, maka suatu saat akan mengalami penurunan atau tetap bertahan pada kondisi yang stagnan. Sepanjang pengamatan yang dilakukan terhadap kehidupan nelayan, nasib mereka ditentukan oleh mekanisme harga dan sistem pasar. Banyak contoh bisa dibandingkan, misalnya bila terjadi overproduksi pada musim-musim tertentu, bukannya mereka harus bergembira dengan harapan akan meningkatkan pendapatannya, melainkan harga jadi menurun. Tambahan pendapatan, mungkin diterima, jika melakukan 2 (dua) hal; 1). Menyebaraskan pasaran ikan sampai menjangkau daerah-daerah pedalaman yang jauh dengan cepat dan tetap menjaga kesegarannya, 2). Mengawetkan dengan cara tradisional.

Berbeda halnya pada organisasi produksi, maka dalam organisasi distribusi ini tidak terlalu rumit, namun cara kerja dan susunan keanggotaannya adalah sama. Perbedaan lain lagi, ialah pengawasan Ponggawa darat terhadap distribusi tidak terlalu ketat seperti halnya dalam produksi. *Pappalele* sebagai orang perantara atau penjaja, bisa saja tanpa ikatan dengan Ponggawa darat, ia memperoleh ikan dengan jalan bayar langsung.

Transaksi terjadi hanya sebagai penjual dan pembeli, apakah ia sebagai langganan dalam organisasi Ponggawa Sawi, ia sebagai orang yang dipercaya mengangkut produksi ke pasar di daerah-daerah pedalaman tertentu yang menjadi sarana distribusi. Pengangkutan dengan sepeda motor bagi daerah dekat yang bias dicapai sebelum kondisi ikan rusak, sedang pengangkutan dengan mobil bagi daerah yang jauh dalam jumlah yang banyak memerlukan pengawetan.

Semua transaksi jual beli dilakukan oleh *Ponggawa darat* terhadap *pappalele*, tanpa diketahui oleh nelayan. Dalam kegiatan ini, *Ponggawa darat* selalu membuktikan kejujurannya kepada *Ponggawa* laut bersama sawinya. Hal ini agak mudah mencarinya, jika keanggotaannya dalam organisasi distribusi sudah tertentu dan jelas peranan-peranan yang dilakukan. Dalam proses distribusi dikenal ada dua macam *pappalele* yaitu: *Pappalele* terikat, dan *Pappalele* mandiri. *Pappalele* terikat adalah anggota organisasi distribusi yang bertugas sebagai pengangkut hasil produksi kepasar-pasar. Sedangkan *Pappalele* mandiri adalah orang yang memang pekerjaannya menjaja ikan ke pasar-pasar atau konsumen yang menjadi langganannya. *Pappalele* mandiri membeli ikan pada *Ponggawa* darat, kemudian langsung dijual ke pasar dimana bertempat permanent. Ia membeli ikan kepada *Ponggawa* lain yang lebih murah, dijajakan dengan sepeda motor atau sepeda biasa. Mereka ini disebut *Paggandeng*.

Paggandeng adalah pekerjaan yang menawarkan jasa dan memberikan service (pelayanan) terhadap langganannya. Walaupun mereka tidak berada dalam suatu organisasi, namun mereka terikat dalam suatu profesi yang mempunyai pola kegiatan yang sama. Informasi tentang harga-harga di kalangan mereka sangat diperlukan, oleh karena mereka memperoleh **keuntungan** dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Selisih ini menjadi **tinggi** pada musim-musim pakeklik atau pada musim barat (penghujan). Berbeda halnya dengan *pappalele* atau *paggandeng* terikat pada *Ponggawa* darat, ia berfungsi sebagai pengangkut mengantarkan produksi tersebut ke penjual di pasar-pasar Kabupaten atau pasar Kecamatan. Bagaimana keputusan harga, ia sendiri tidak

tahu. Berapa nilai ikan yang diangkutnya itu, ia pun tidak tahu. Hanya dititipi pesan oleh Ponggawa darat untuk penjual dipasar tentang standar harga minimal. Dengan demikian ia bertugas menurut kemampuan tenaganya. Ada dua macam pengangkut: pertama pengangkut yang hanya mengandalkan tenaganya, sedang yang kedua adalah pengangkut yang sudah mempunyai alat angkut dan datang pada *Ponggawa* untuk menawarkan jasanya.

Teknik lain dalam distribusi ikan, ialah datang dari *pabbalu* (penjual) yang ada di pasar-pasar Kabupaten atau dari pasar-pasar Kecamatan. *Pabbalu* datang pada Ponggawa langganannya menjemput ikan dengan alat angkutnya sendiri atau alat angkut yang sudah menjadi langganannya pula. Keputusan harga akan menjadi lain dari pada yang disebutkan diatas, karena perhitungan biaya angkutan sendiri yang berbeda jika *Ponggawa* mengantarkan ikan ke pasar. Jadi ada dua macam cara pengangkutan, yakni; 1). Inisiatif dan kegiatan pengangkutan komoditi oleh *Ponggawa*, dan 2). Inisiatif dan kegiatan pengangkutan oleh *pabbalu*'. Yang pertama, Ponggawa mengirimkan komoditi kepada *pabbalu*' yang sudah menjadi client (langganan) dan terikat dalam organisasi distribusi, sedang yang kedua, tidak terikat dan *pabbalu*' tersebut sudah mempunyai modal besar, harga ikan yang diambil dari Ponggawa langsung dibayarnya dengan uang tunai. Berbeda halnya dengan yang kedua, tipe *pabbalu*, yang pertama adalah anggota dari Ponggawa dengan tanda bukti kwitansi (bukti kejujuran), secara berangsur-angsur setiap adanya penjualan. Sebelum komoditi ini habis di tangan *pabbalu*. *Ponggawa* berkewajiban mengirimkannya, agar

supaya tidak kehabisan dan pelayanan kepada konsumen atau kepadapengecer di pasar-pasar desa tetap berkesinambungan.

Dengan demikian sirkulasi ikan berjalan terus dari produsen ke konsumen melalui distributor (*pappalele* atau *paggandeng*). Sirkulasi ini berlaku sebagai suatu system yang sudah ada semenjak dahulu. Mungkin sekali system sirkulasi ini, bukan saja berlaku pada perdagangan ikan, melainkan berlaku pula pada barang kebutuhan sehari-hari. Adanya angkutan roda dua dan roda empat tidak merubah system ini, tetapi memperlancar jalannya sirkulasi dan memperpanjang jarak tempuhnya. Sama halnya juga dengan adanya perahu motor temple adalah memperlebar jarak jelajah para nelayan memburu ikan dan makin mempercepat olah gerak para pabelolang mengangkut ikan dari armada nelayan ke pantai (ke Ponggawa darat). Sistem sirkulasi ini berlaku bagi ikan segar dan ikan kering atau ikan yang sudah di asapi (*bale tapa*). Makin jauh jarak tempuh *paggandeng* dan *pappalele* menembus daerah pedalaman, maka makin tinggi harga ikan tersebut.

Peranan *Pabbalu* di daerah-daerah tingkat kabupaten, terlepas dari jaringan hubungan dengan *Ponggawa* darat, kita lihat cara kerja dan kegiatan para *pabbalu*, yang sudah mengakumulasi modalnya sebagai orang yang berusaha dalam komoditi perikanan. *Pabbalu* yang bermodal membentuk jaringan dengan pengecer-pengecer (*paggadde-gadde*) di pasar-pasar Kecamatan atau pasar desa yang ada disekitarnya. Ia berkedudukan di tingkat Kabupaten, menjalin hubungan dengan *Ponggawa* darat guna menyalurkan ikan segar atau ikan kering ke pasar-pasar. Ia berfungsi grocer atau

kekuatan modalnya sendiri dengan membentuk jaringan sendiri di pasar-pasar terdekat atau pasar yang mudah dijangkau.

Seorang *pabbalu* yang menyalurkan ikan sebagai salah satu bahkan kebutuhan pokok konsumen melalui pengecer di pasar-pasar desa. Ia harus mengetahui system sirkulasi hari-hari pasar di daerahnya, agar konsumen dapat dilayani secara teratur. Proses distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi terwujud dalam dua pola. Pola pertama adalah distribusi lewat TPI dan pola kedua adalah distribusi langsung yaitu hasil produksi langsung di distribusi kepada konsumen, baik di tengah laut maupun dibawa ke pasar, dan juga hasil produksi yang langsung dikonsumsi oleh keluarga nelayan sendiri. Pada pola distribusi lewat TPI, para nelayan yang baru datang langsung menyerahkan ikan hasil tangkapannya kepada TPI, dan para pembeli tidak boleh berhubungan dengan nelayan sebelum penjualan dilakukan, disinilah kadang-kadang nelayan “main mata” dengan tengkulak. Selanjutnya, setelah ikan ditimbang, barulah TPI menjualnya kepada pembeli yang sudah lama antri. Ini mekanisme yang diharapkan dan nelayan akan dikenakan iuran dan harga jual yang sudah ditetapkan oleh TPI. Pembeli yang langsung ke tengah laut dengan mempergunakan perahu sangat sulit diawasi. Adakalanya *papalele* (penampung ikan) membeli kepada nelayan dan menjual ikan ke pasar atau ke kota dengan mempergunakan mobil. Hal ini bisa terjadi karena ada sementara nelayan yang menganggap negatif tugas TPI. Disamping itu, nelayan menjual ikannya karena tergantung kepada *papalele* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Lewat pola-pola distribusi tadi proses sampainya barang produksi nelayan

ke konsumen terlihat lancar. Namun, tentu tidak dapat dilupakan peran dari faktor lainnya dalam proses tadi. Di samping TPI yang menentukan harga dasar untuk jenis-jenis produksi, juga adanya unsur penunjang seperti transportasi dan keamanan. Keamanan yang dimaksud, nelayan aman menjual tangkapannya kepada TPI tanpa adanya tekanan dari luar, misalnya tekanan dari *papalele*. Keamanan ini sudah diperhatikan dengan menempatkan tugas kepolisian dan aparat desa untuk mengawasi proses distribusi di setiap desa nelayan.

3. *Pola Konsumsi*

Pola konsumsi dari suatu sistem ekonomi suatu masyarakat sangat tergantung pada lingkungan yang bagaimana menandai kehidupan masyarakat tersebut. Di samping proses produksi dan distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi dan distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi, juga hasil produksi dari luar yang diperlukan sebagai barang konsumsi masyarakat tersebut, juga menentukan pola konsumsi yang ada (Sudana Astika dalam Suwitha, 1991). Pola konsumsi suatu masyarakat akan menggambarkan keperluan masyarakat tersebut akan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder bagi kehidupannya. Masyarakat memerlukan barang-barang kebutuhan primer (pangan, sandang, dan perumahan) dan barang-barang yang berhubungan dengan alat produksi, pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hiburan. Hal ini sebagian besar sudah dapat disediakan di desa, karena rata-rata transportasi relatif lancar dan dekat dengan kota. Begitu juga beras, sayur, dan buah-buahan terutama di daerah pegunungan. Demikian pula

kemampuan untuk membeli bahan konsumsi utama tersebut, sangat tergantung pada proses produksi yaitu produksi untuk dapat menghasilkan uang untuk membeli bahan kebutuhan primer tadi. Proses produksi sendiri sangat tergantung pada lautan dan perairan yang ada. Sandang dan kebutuhan primer lainnya disediakan oleh pasar desa, pasar kecamatan dan pasar kabupaten yang jaraknya beberapa kilometer saja dari tempat penangkapan ikan. Terutama pakaian anak-anak sudah dicukupi oleh pasar desa. Untuk kebutuhan membuat rumah diperlukan kayu, bambu, dan tripleks, juga sudah dapat disediakan disekitar desa dan kecamatan, sedangkan kayu-kayu yang baik didatangkan dari Kalimantan. Kebutuhan sekunder mencakup alat-alat produksi, pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hiburan juga telah disediakan oleh pasar desa. Alat-alat penangkap ikan dari plastik semua dapat disediakan di pasar desa dan pasar kecamatan. Kalau dulu ada beberapa peralatan tradisional, terutama dari benang dapat diusahakan di desa. Sekarang kapal (perahu) dibuat di desa, dengan harga kurang lebih Rp 2.000.000,00 tetapi kayu-kayu didatangkan dari Kalimantan atau hutan-hutan di pegunungan. Jaring nilon dan mesin tempel untuk perahu di pesan di Kota Kabupaten atau Makassar. Pola konsumsi yang ada pada masyarakat nelayan juga dipengaruhi oleh angkutan di darat (transportasi). Pengadaan barang-barang kebutuhan sudah di dapat di tingkat desa melalui jalur darat. Demikian juga hubungan antara sistem produksi pada masyarakat nelayan yaitu kemampuan daya beli untuk dapat mengkonsumsi sejumlah barang berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder tergantung pada kondisi laut. Artinya dalam kondisi tertentu daya beli meningkat karena produksi

naik, namun sebalik kadang-kadang daya beli turun drastid karena produksi rendah. Suatu hal yang cukup berperan dalam hal ini adalah unsur penunjang proses distribusi yang berupa transportasi darat yang dapat mendekatkan produsen atau sebaliknya.

Konsumsi dapat diartikan sebagai pemakai atau penggunaan dari hasil produksi. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan digunakan untuk:

- a. Pendapat untuk ekonomi: hasil yang didapatkan selain digunakan untuk kebutuhan primer (makan, minum, pakaina) juga untuk kebutuhanpelengkap (sekunder) seperti membeli kendaraan mewah, membangun rumah dan memperkuat modal usaha nelayan.
- b. Pendapatan untuk Sosial: hasil yang didapat digunakan untuk kebutuhan social seperti menyumbang ke mesjid, keluarga yang kesusahan atau tetangga.
- c. Pendapatan untuk aksiReligi: Pendapatan digunakan upacara-upacara adat atau acara syukuran apabila mendapatkan hasil tangkapan yang besar dan menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Kebutuhan sekunder juga dapat dilihat dari hiburan-hiburan tradisional seperti kesenian rebana, akan tetapi, hiburan pada malam hari jarang peminatnya karena sebagian besar penduduk pergi ke laut pada malam hari dan para wanita tidak baik untuk menontonsendiri. Dengandemikian, hiburan rumah tangga adalah televisi untuk keluarga dan tetangga sekitarnya,

C. Penutup

Dalam memahami perilaku ekonomi suatu kelompok masyarakat dalam profesi tertentu termasuk masyarakat nelayan, yang mencakup 3 hal yaitu pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi. Ketiga hal tersebut yang diutarakan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

- a. **Faktor produksi** : yang tercantum di dalamnya mengenai peralatan produksi, proses produksi dan upacara-upacara dalam proses produksi. Organisasi produksi dapat dibedakan atas empat kenyataan, yakni: Susunan keanggotaan organisasi : Keanggotaan dalam organisasi Ponggawa-Sawi, pada umumnya berasal dari ikatan pemukiman sama atau dari unit tetangga yang berdekatan. Namun demikian, keanggotaan yang dapat dipercaya adalah berasal dari lingkungan keluarga sendiri, sesuai dengan norma sosial, dari garis keturunan belineal dan hubungan perkawinan, juga termasuk generasi sepupu dan kamanakan. Selain ukuran keanggotaan tersebut, lebih utama pula dilihat dari segi moral dan fisik, yakni kejujuran dan kekuatan jasmani. Pemimpin organisasi adalah Ponggawa darat, seorang yang telah menyediakan modal kerja dan seperangkat teknologi (perahu layar /motor dan peralatan tangkap), modal dan teknologi: *Ponggawa darat* yang menyediakan modal dan teknologi, kemudian mengangkat *pongawa* laut untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Modal berupa uang, sedang teknologi terdiri atas perahu, layar/motor dan peralatan tangkap. Peralatan tangkap diadakan sesuai dengan kelompoknya, seperti pancing, romping dan

bagang. Pengawasan kekayaan, *Ponggawa darat* sebagai pemilik modal dan teknologi, dan sebagai pemimpin organisasi senantiasa mengawasi jalannya produksi dalam rangka usaha pengawasan kekayaan yang sudah ada. Ia harus meniti diatas tradisi masyarakat, yakni mempertebal keyakinan para anggotanya untuk bekerja lebih giat, agar keberhasilan dapat diperoleh yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Bagimanapun keberhasilan atau tidak berhasil, Ponggawa tetap memberikan respons emosional kepada mereka, agar semangat kerjanya tidak mengendur. Bagi hasil dan resiprositas; Sistem bagi hasil dalam masyarakat nelayan di Sulawesi-Selatan, dikenal 2 (dua) kategori yakni bagi hasil secara prosentase, dan bagi hasil komponen.

- b. **Faktor Distribusi:** yang tercakup di dalamnya mengenai cara dan proses pendistribusian, tempat dan alat pendistribusian hasil produksi. Distribusi terbagi dua yaitu, distribusi langsung dalam bentuk hasil tangkapan ikan disalurkan langsung ke konsumen tanpa perantara. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung, dimana hasil tangkapan ikan disalurkan ke konsumen melalui *kepabbalu*, *paggadde* dan *paggandeng*.
- c. **Faktor konsumsi** yang menyangkut mengenai perilaku konsumsi dari konsumsi hasil produksi. Hasil pendapatan digunakan untuk: Pendapatan untuk aksi ekonomi: hasil yang didapatkan selain digunakan untuk kebutuhan primer (makan, minum, pakaina) juga untuk kebutuhan pelengkap (sekunder) seperti membeli kendaraan, membangun rumah dan memperkuat modal usaha nelayan. Pendapatan untuk Sosial: hasil yang didapat

digunakan untuk kebutuhan social seperti menyumbang ke mesjid, keluarga yang kesusahan atau untuk membantu tetangga. Pendapatan untuk aksi Religi: Pendapatan digunakan upacara-upacara adat atau acara syukuran apabila mendapatkan hasil tangkapan yang besar dan menabung untuk menunaikan ibadah haji.





BAB III

ORGANISASI DAN KELEMBAGAN MARITIM MASYARAKAT BUGIS

A. Pendahuluan

Fakta geografis membuktikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri atas kurang lebih 1700 pulau besar maupun kecil terbentang dari Sabang sampai Merauke, ini berarti bahwa dari sekian banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya salah satunya adalah sumber daya laut. Demikian pula sumber daya manusia yang terlibat sebagai pekerja di bidang kelautan cukup tinggi, walaupun tanpa angka statistik, dapat diketahui bahwa jumlah kelompok-kelompok etnis atau suku yang mengelola sumber daya laut cukup banyak atau sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah nelayan. Sayangnya potensi sumber daya yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di seluruh pelosok nusantara. Perkembangan dunia kemaritiman Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara seperti Eropa dan Jepang. Dalam hal pemanfaatan teknologi,

Indonesia memang masih terkebelakang, namun dilihat dari jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan cukup banyak.

Banyak kajian yang telah dilakukan oleh berbagai ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menjelaskan tentang bagaimana eksistensi nelayan di Indonesia. Dalam konteks kajian ilmu social salah satu domain yang mendapat perhatian adalah pengkajian tentang masyarakat maritime dengan focus dimensi social budaya, ekonomi, politik dan kelembagaan kemaritiman, dimana dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat maritime memiliki pola social budaya, ekonomi, politik dan system organisasi kelembagaan yang bersifat spesifik karena dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan alam laut. Determinisme lingkungan laut terhadap keunikan pola budaya dan social ekonomi masyarakat maritime menyebabkan perbedaan dan dikotomi antara pola budaya, ekonomi, politik dan kelembagaan serta organisasi social masyarakat lain seperti, petani, pedagang dan peternak yang pada umumnya mengembangkan usaha di darat. Suatu fakta empiric yang menunjukkan bahwa masyarakat maritim terdiri dari sekelompok orang yang menggantungkan hidup dan kehidupannya dari lingkungan laut dan bertempat tinggal di pesisir pantai.

Pembahasan berikut diarahkan pada upaya menjelaskan bagaimana bentuk dan sifat kelembagaan serta organisasi social masyarakat maritime yang dipengaruhi oleh lingkungan laut. Dalam hal ini lingkungan dipilah menjadi dua bagian yaitu lingkungan yang bersifat umum dan lingkungan yang bersifat khusus. Lingkungan bersifat umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang kemungkinan atau tidak secara langsung mempengaruhi/berdampak kepada organisasi aktivitas organisasi

dalam mencapai tujuan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang langsung berdampak/mempengaruhi aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam mempelajari lingkungan perlu memperhatikan beberapa hal tersebut di bawah ini, yaitu:

Ketidakpastian lingkungan cenderung mengakibatkan kompleksitas yang tinggi, sejumlah masalah yang mungkin terjadi di laut, baik yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan, kegiatan transportasi, bahkan aktivitas di darat pun terpengaruh dengan ketidakpastian lingkungan tersebut. Berkenaan dengan situasi lingkungan laut yang kompleks dan dinamis, atau bahkan kadang-kadang disebut dengan istilah anomali itu, masyarakat nelayan mengembangkan suatu system organisasi atau pranata yang adaptif dan mampu mengatasi masalah yang terjadi dan mungkin terjadi. Untuk menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan kompleks, maka organisasi seyogyanya terdeferensiasi strukturnya melalui desentralisasi.

Lingkungan yang relatif lebih stabil kompleksitasnya lebih rendah, hanya menciptakan kebutuhan minimal untuk memberi tanggapan yang lebih cepat. Untuk menghadapi lingkungan yang relatif stabil, maka formalisasi yang lebih tinggi dapat dipergunakan. Dengan demikian diharapkan lingkungan dimana kita tempat tinggal kita pelihara agar kita tetap hidup dan lestari dalam alam tersebut. Alam selalu memberikan apa yang kita butuhkan, demikian pula lingkungan kemaritiman kita, alam sungguh memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kelangsungan hidup umat manusia lebih khusus lagi para nelayan dan pelaut ini.

B. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah mendiami suatu daerah tertentu dalam beberapa waktu yang cukup lama dan membentuk suatu kebudayaan yang menghasilkan adat-istiadat tertentu sebagaimana yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1980), adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Identitas tersebut ialah kebudayaan masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesatuan kelompok, golongan, komunitas, etnis/suku bangsa atau masyarakat bangsa.

1. Masyarakat Maritim

Suatu daerah, suku atau bangsa dikatakan sebagai masyarakat bahari atau masyarakat maritime apabila kesatuan masyarakat tersebut hidup dan menempati daerah pesisir dengan mata pencaharian utama yaitu nelayan. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di daerah-daerah yang merupakan gugusan pulau-pulau, baik kecil maupun besar. Masyarakat maritim merupakan kesatuan-kesatuan hidup manusia berupa kelompok-kelompok kerja yang sepenuhnya menggantungkan kehidupan ekonominya secara langsung dan tidak langsung pada sumber daya laut. Masyarakat maritime terdiri dari nelayan dan pelaut, serta pembuat alat transportasi laut (pembuat kapal atau perahu), suatu ikatan atau kelompok social yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memanfaatkan dan mengelola lingkungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keturunannya secara terus menerus. Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah kesediaan menerapkan system pengetahuan dan kepercayaan

dalam menjaga keseimbangan ekologis lingkungan laut agar laut sebagai tempat memenuhi kebutuhan hidup mereka terjaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi secara berkesinambungan. Dengan dasar itu maka ikatan social masyarakat maritime sangat kuat dan akibatnya sulit untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dengan menggantinya dengan pekerjaan lain dengan suatu pertimbangan bahwa apabila mereka beralih ke pekerjaan lain maka mereka akan mengalami kesulitan di dalam masalah penyesuaian terhadap pekerjaan yang tidak biasa mereka hadapi. Hal ini dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap masalah ekonomi maupun masalah kesejahteraan.

2. Karakteristik Sosial Masyarakat Maritim

Masyarakat maritime dengan ciri sebagaimana telah diuraikan di atas menempati ruang wilayah yang berdekatan atau memiliki akses dengan laut, sehingga dengan demikian secara khusus masyarakat maritime di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) menempati wilayah pesisir barat, timur dan selatan jazirah Sulawesi Selatan yang terdiri atas suku Bugis, suku Makassar, dan Suku Mandar. Pada umumnya membangun pemukiman mereka yang terbuat dari rumah panggung dengan posisi membelakangi laut. Beberapa ciri yang menonjol yang membedakannya dengan masyarakat lainnya yang bekerja sebagai petani, peladang, dan peternak di daerah pedalaman, antara lain adalah pola pemukiman, pola penggunaan waktu, pola aktivitas hidup yang dilakoni sehari-hari.

Suatu hal yang pasti dari eksistensi masyarakat maritime adalah ketergantungan hidup dan keterikatan secara emosi dan fisik sepenuhnya kepada lingkungan alam laut. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan, baik pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan sosial ekonomi dan kemasyarakatan tergantung dan terikat sepenuhnya pada system kelembagaan yang berciri utama maritime yakni semua produk dan jasa yang diadakan secara domestic berorientasi dan berciri laut, sedangkan produk dan jasa yang lain disediakan oleh pasar luar. Artinya semua produk yang dihasilkan dari dalam masyarakat maritime pasti berciri dan berkaitan dengan laut, sedangkan semua produk yang tidak terkait secara langsung dengan laut dipastikan merupakan produk dari luar komunitas maritime. Pertemuan antara barang dan jasa local dengan barang dan jasa luar berlangsung pada sebuah pasar. Keterlibatan pihak lain baik secara kelompok maupun individu dalam kegiatan-kegiatan nelayan bertemu dan bertransaksi melalui pasar tersebut. Jika terjadi konflik antara anggota masyarakat secara internal, maka proses penyelesaian konfliknya adalah dengan mengandalkan pranata local seperti kewibawaan pemimpin atau penerapan norma dan hukum local yang disepakati secara adat, sementara jika terjadi konflik sosial antar kelompok masyarakat maritim dengan kelompok masyarakat luar maka model penyelesaian konflik yang dipilih adalah pranata Negara dengan melibatkan alat kelengkapan hukum Negara.

Oleh karena adanya ciri-ciri tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat maritime adalah masyarakat yang sulit untuk meninggalkan lingkungan pekerjaannya dan apabila meninggalkan pekerjaannya maka akan sulit

atau bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ciri hidup dan watak masyarakat masyarakat maritime selalu dilihat keterkaitannya dengan sifat dasarnya yang melekat pada lingkungan laut, sehingga karakter dasar disosialisasikan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan laut seperti ombak dan badai, suhu, iklim, dan bahkan bau asinnya.

3. Pendekatan Pengkajian Masyarakat Maritim

Dalam mengkaji masyarakat maritime, oleh para ilmuwan dikembangkan sejumlah pendekatan yang dianggap mampu untuk menjelaskan karakter dari masyarakat maritime. Penjelasan tentang bagaimana pendekatan ini diterapkan, diambil contoh kasus pada masyarakat Merauke Papua. Pengambilan kasus ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan berdasar pada kasus dapat dipahami dengan mudah maksud dari penerapan pendekatan-pendekatan dalam memahami masyarakat maritime. Pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Strategis Adaptif

Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah pola-pola yang terbentuk dengan berbagai macam penyesuaian yang digunakan untuk memperoleh dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan memecahkan masalah langsung dan mendesak yang dihadapinya. Sebuah studi kasus yang dapat diangkat dari masyarakat maritime di Kabupaten Merauke adalah apabila masyarakat turun ke laut mencari ikan maka hasil tangkapannya dicukupkan hasilnya hanya untuk makan hari itu saja dan tidak untuk dijual. Demikian

maka masyarakat dapat tetap melestarikan ikan untuk hari esok dan keturunannya yang akan datang. Pendekatan adaptif dalam konteks ini diarahkan pada bagaimana terwujudnya kesesuaian antara perilaku anggota masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut. Pendekatan strategi adaptif tidak mengenal hasil tangkap lebih, tidak ada perlakuan destruktif terhadap lingkungan laut, tidak ada ancaman yang mungkin membahayakan keseimbangan lingkungan laut.

b. Pendekatan Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Dan Sumber Daya Lingkungan

Pendekatan ini berinti pada terwujudnya sebuah situasi dimana sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah lingkungan tetap terjaga dan lestari. Keterjagaan sumberdaya daya dimaksudkan untuk menjamin keserasian hubungan antara lingkungan dengan manusia. Suatu asumsi dasar yang terkandung dalam pendekatan ini jika manusia mampu mempertahankan dan memelihara sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan laut maka keuntungan yang terjadi akan kembali pada manusia itu sendiri. Sebagai contoh studi kasus dalam pendekatan ini bahwa masyarakat maritime di Kabupaten Merauke mulai menyadari adanya dampak penggalian pasir yang terjadi sebelumnya sehingga mulailah dibentuk sebuah gerakan ramah lingkungan dengan penanaman bakau di sepanjang pantai dengan tujuan utama untuk melindungi biota laut yang ada di lingkungannya.

c. Pendekatan Pranata Sosial

Pranata social sesungguhnya adalah aturan yang mengendalikan perilaku dan aktivitas individu dalam masyarakat agar dapat menjamin terwujudnya suatu tujuan yang bersifat spesifik. Dengan demikian ada norma dan aturan yang harus disepakati dan ditaati bersama, yang apabila karena satu dan lain hal seseorang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan itu, maka yang bersangkutan harus menerima denda atau hukuman. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah kelompok ini mengklaim bahwa kehidupan melaut dan menjadi nelayan di lingkungan perairan mereka adalah hak hidup bagi masyarakat Merauke sehingga orang lain yang berasal dari luar komunitas Merauke harus taat pada aturan dan system nilai yang mereka terapkan. Dengan demikian dapat diangkat sebagai contoh dalam studi kasus ini adalah bahwa pada saat orang luar yang datang dan mau untuk menangkap ikan di daerah mereka maka akan dikenakan berbagai aturan bahkan harus melalui ijin dari Ketua LMA. Masyarakat maritime di Kabupaten Merauke tidak ingin pihak luar menghancurkan lahan kehidupan mereka,

d. Pendekatan Sikap Dan Kepribadian Budaya Maritim

Kebiasaan masyarakat maritim di Kabupaten Merauke dalam kaitan dengan sikap kepribadian budaya maritime dapat diberikan sebuah contoh sebagai berikut, dalam melakukan penangkapan ikan biasa menggunakan jaring tarik serta kail yang dilakukan baik di laut maupun dikali-kali (sungai). Ada satu keistimewaan masyarakat disana bahwa pada musim kering atau kemarau masyarakat senang menangkap ikan dengan cara meraba-raba setelah kali dikuras airnya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan lingkungan, masyarakat selalu berupaya untuk memelihara daerah pesisirnya dengan menjaga tanaman bakau yang telah di tanaminya. Masyarakat lebih suka hidup dipesisir pantai dan tiduran pada pasir pantai di bawah pepohonan kelapa sepanjang pantai.

e. Pendekatan Wawasan Geo-Sosial Budaya Maritim

Masyarakat maritime di daerah ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok orang yang terisolir oleh dunia luar melainkan sangat terbuka bagi dunia luar. Mereka dapat menerima siapa saja yang datang untuk menangkap ikan dengan mematuhi aturan yang ada dalam kelompok ini. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa masyarakat maritime sangatlah peka dengan gejala-gejala alam yang terjadi pada lingkungannya, dapat mengetahui kapan cuaca baik untuk suatu penangkapan ikan dan untuk suatu pelayaran yang baik.

f. Pendekatan Simbolik

Pendekatan ini dapat diambil contoh yaitu bahwa masyarakat maritime di Kabupaten Merauke pada saat-saat tertentu melakukan suatu upacara tradisional yaitu tutup sasi laut, dimana suatu larangan yang berlaku umum untuk semua masyarakat dalam menangkap atau mengambil hasil laut di daerah tersebut hingga batas akhir pencabutan sasi yang disebut buka sasi laut. adapun yang menjadi tanda dari upacara tutup sasi ini yaitu diambil dari daun kelapa muda (yang berwarna kuning/janur). Dalam upacara buka sasi laut semua masyarakat diperkenankan untuk turun kelaut dan menangkap serta mengambil apa saja yang merupakan hasil laut.

C. Kebudayaan Maritim

1. Konsep Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari kata *Sanskerta* “*Buddhayah*” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan akal, atau kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karya. Kebudayaan atau *culture* (*Latin : colere*) yang berarti mengolah tanah atau segala tindakan untuk mengolah alam. Karena manusia adalah bagian dari alam, maka kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha manusia mengolah lingkungan alam dan social, atau usaha manusia mengolah lingkungan hidupnya.

Kebudayaan merupakan karya manusia berupa tiga wujud yaitu ide (*idea*), system social (*activities*) dan benda (*artifact*). Ide adalah pola pikir social yang merupakan system budaya (*cultural system*) atau adat istiadat. Sistem social adalah pola interaksi masyarakat berdasarkan system budaya. Benda adalah karya manusia yang berwujud fisik seperti candi, kuil, ataupun berbagai jenis bangunan, alat kerja dan sebagainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat.

Kebudayaan dapat berwujud symbol yaitu abstraksi dari kondisi objek. Ciri khas manusia adalah kemampuannya menciptakan dan menggunakan symbol yang mempunyai makna tertentu. Sehingga manusia disebut *animal symbolicum*. Kemampuan ini melahirkan pengetahuan alam dan social. Kebudayaan dapat berwujud makna atas objek yang dituangkan dalam symbol yang diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya secara turun temurun. Ia merupakan system konsep hidup sebagai alat manusia untuk komunikasi dan sebagai pedoman bersikap

dan berperilaku. Makna merupakan merupakan sarana yang paling efektif untuk menyampaikan konsep hidup dan sebagai dasar untuk memahami pernyataan (realisasi pemikiran).

Mengacu pada realita, kebudayaan ialah dunia kehidupan masyarakat manusia itu sendiri, yang berbeda dengan dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan. Perbedaannya ialah manusia memperoleh kebudayaannya melalui proses belajar dalam lingkungan masyarakatnya dan hanya dapat hidup dengan kebudayaannya itu, sedangkan binatang memperoleh cara hidupnya melalui pewarisan genetika berupa instink atau naluri yang alamiah. Itulah sebabnya dunia kehidupan binatang sifatnya general dan homogeny.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat, ialah system-sistem ide/gagasan, tindakan/praktik terpol, dan karya (sarana-prasarana fisik) manusia dalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri sendiri melalui proses belajar. Selanjutnya ia membedah kebudayaan kedalam tujuh (7) unsur yaitu sebagai berikut :

- Sistem pengetahuan
- Sistem bahasa
- Sistem organisasi social
- Sistem mata pencaharian (economy)
- Sistem peralatan hidup (technology)
- Sistem religi/agama dan kepercayaan
- Sistem kesenian

Selo Soemardjan dan Soelaeman Seomardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta

manusia. Selanjutnya E.B. Tylor mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan, sebagai berikut:

“Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.

Sedangkan dapat dikatakan bahwa kebudayaan mencakupi kesemuanya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup, merasakan dan bertindak.

Definisi yang menganggap bahwa kebudayaan dan tindakan kebudayaan merupakan segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Disini dapat kita bedakan antara kebudayaan dan peradaban (*civilization*) yang dipakai untuk menyebut bagian-bagian serta unsure-unsur dari kebudayaan yang sifatnya halus, maju dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang murni dan sering dipakai untuk menyebut sesuatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi.

2. Konsep Kebudayaan Maritim

Kompleksitas fenomena sosial budaya maritim, terutama berkaitan dengan beragamnya kelompok dan kategori sosial terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan laut serta beragam sektor mata pencaharian terkait laut menjadi alasan lebih cocok memilih term budaya ‘bahari’ daripada term-

term budaya ‘maritime culture’) dan budaya ‘marin’ (*maritime culture*) dalam rangkai pengkajian ilmiah. Term kedua menurut linguistic feeling Eropa mengacu kepada kegiatan pelayaran, sedangkan term ketiga kepada aktivitas menangkap ikan semata. Jika kedua term asing diaplikasikan secara konsisten, kedua wilayah studi tersebut akan saling eksklusif, sementara variasi aktivitas kebaharian lainnya tereduksi dalam kajian.

Konsep budaya bahari akan mencakup kompleksitas fenomena sehingga untuk pembatasan dan penyederhanaan subjek kajian kirannya dilakukan focus-focus studi pada satu atau beberapa momen saja diantara variasi yang kaya.

Kebudayaan bahari dipahami sebagai system-sistem ide/gagasan, perilaku/tindakan dan karya sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya (masyarakat bahari) dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya. Seperti halnya budaya dari kelompok/segmen-segmen masyarakat lainnya di darat, budaya maritime juga dicirikan dengan sifat-sifat kreatif dan dinamikanya secara terus menerus, cair, tersebar, homogeny atau berbeda-beda, hegemoni, bertahan, reformulasi, terbuka, parsial, melampaui batas-batasnya, bertahan dan berubah. Konsep tersebut mengasumsikan bahwa budaya, termasuk budaya maritime mencapai bentuk-bentuk tradisional karena bertahan dan modern karena berubah. Salah satu sumber utama dari dinamika ialah kreasi internal dan adopsi inovasi dari luar yang ditunjang dengan sifat-sifat budaya itu sendiri.

3. Unsur-Unsur Budaya Maritim

Kebudayaanmaritime terdiri dari komponen-komponen/ aspek-aspeknya yang saling terkait membentuk suatu keseluruhan. Aspek-aspek tersebut berupa system budaya (ide/gagasan, pengetahuan, kepercayaan, nilai dan norma/ aturan), bahasa, kelompok/organisasi social, ekonomi, teknologi, seni dan religi berkaitan dengan kemaritiman.

Berikut dapat kami sajikan secara singkat tentang aspek-aspek budaya maritime dengan menggunakan budaya nelayan dan pelayar sebagai material adalah sebagai berikut :

Sistem Budaya

Gagasan/ide, dalam budaya bahari tentu sangat luas, berkenan dengan pemanfaatan sumberdaya dan rekayasa jasa-jasa laut, dalam kebudayaan maritime Bugis, Bajo dan Makasar, Mandar dan Buton mengakar beberapa gagasan utama yang saling terkait yang banyak menjadi pedoman bagi keputusan/pilihan perilaku usaha nelayan.

Sejak kurang lebih dua decade terakhir ternyata juga sudah ada sebagian nelayan berubah pandangan ketika diperhadapkan pada berbagai realita, seperti populasi tripang, mutiara dan beberapa sepsis biota bernilai ekonomi tinggi lainnya yang sudah menjadi biota langka akibat eksploitasi manusia. Kemudian diketahui pula adanya banyak tempat terutama di Indonesia Bagian Timur milik komunal setempat yang tidak boleh dimasuki nelayan.

Sistem Pengetahuan, system pengetahuan kemaritiman dapat dikategorikan atas dua, yakni pengetahuan pelayaran dan kenelayanan. Pengetahuan pelayaran yang difungsikan

pelaut dalam aktivitas pelayaran meliputi pengetahuan tentang musim, kondisi cuaca dan suhu, kondisi dasar dan tanda-tanda alam lainnya untuk menentukan waktu-waktu memulai melakukan pelayaran, kelancaran, keberhasilan dan keselamatan. Masyarakat maritime, khususnya nelayan dan pelayar di nusantara ini, mempunyai pengetahuan tentang dua musim utama, yaitu musim barat dan musim timur, yang menentukan waktu-waktu intensif atau sepi nya aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut dan pelayaran.

Mengenai perubahan musim, cuaca dan suhu, kondisi air laut, kondisi dasar, yang mempengaruhi (positif dan negative) aktivitas pelayaran dan eksploitasi sumberdaya laut/ perikanan, pelayaran dan nelayan Bugis dan Makasar misalnya berpedoman pada perangkat pengetahuan mereka tentang tanda-tanda di laut dan dan angkasa berupa kilat, awan hitam, bunyi kemudi perahu, cahaya laut, yang dihubungkan dengan peristiwa atau hal datangnya angin kencang, angin tornando, adanya batu karang, makluk berbahaya seperti gurita, dan lainnya. Untuk hal-hak ini para nelayan mendasarkan pengetahuannya dengan dengan indra pakkita (penglihatan), parengkaling (pendengaran), paremmau (penciuman) panedding (firasat), dan tentuang (keyakinan). Berdasarkan pengalaman dan warisan pengetahuan, pelayar dan nelayan mempunyai perangkat pengetahuan tentang lokasi-lokasi berbahaya, seperti selat-selat dimana banyak pusaran air

Sistem Religi dan Keyakinan, berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya perikanan, banyak tempat di dunia, nelayan (kelompok ataupun individu) mempraktekan keyakinan-keyakinan, agama kepercayaan

yang dianutnya sebagai mekanisme pemecahan persoalan-persoalan lingkungan fisik dan social ekonomi yang dihadapi sehari-hari.

Sistem Norma/Aturan, dalam setiap kebudayaan termasuk kebudayaan maritime, tentu saja berfungsi mengatur secara khusus perangkat-perangkat tindakan kelompok atau pun individu. Untuk kegiatan-kegiatan pelayaran dan perikanan maka diperlukan peraturan-peraturan bagi hasil, bea cukai, dan lain-lainnya.

Sistem Nilai dalam suatu kebudayaan sangat berkaitan dengan system gagasan, pengetahuan, kepercayaan, aturan dan lainnya dalam kebudayaan yang bersangkutan. System nilai juga berfungsi sebagai pedoman bagi warga komunitas dalam menentukan sikap, tindakan, hal, atau benda yang dianggap baik, layak dan sebaliknya yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan, social, ekonomi, kepercayaan, teknologi, seni dan lain-lain.

Bahasa

Bahasa digunakan oleh komunitas-komunitas maritim tertentu tidak berbeda dengan bahasa (dalam hal gramatika) diucapkan kelompok-kelompok masyarakat dari etnis yang sama yang bergerak dalam sektor-sektor ekonomi berbeda-beda lainnya. Hal membedakannya adalah kosa kata atau istilah-istilah yang digunakan untuk klasifikasi pengetahuan lingkungan sekeliling dan sumberdaya alam dimanfaatkannya, social ekonomi, perilaku dan system interaksi, pengungkapan pengalaman dan perasaannya.

4. Organisasi Sosial Masyarakat Maritim

Organisasi social yang merupakan komponen masyarakat sekaligus juga isi kebudayaan. Penjelasmnya memang tumpang tindih, namun ada perbedaan penekanan masing-masing pada wujud nyatanya berupa interaksi social dan ide/gagasan (budaya) di belakangnya. Berdasarkan pada bahan etnografi dunia tentang kehidupan social budaya masyarakat maritime dimana-mana sejak dahulu hingga sekarang dan dalam semua tingkat peradabannya, nelayan dan pelayar memerlukan secara mutlak organisasi ekonominya. Contoh kelompok-kelompok kerjasama nelayan dan pelayar, antara lain seperti (*ship's*) *captain-crew* (komuniti-komuniti nelayan dan pelayar berbahasa Inggris), *Schipper-bemanning* (Belanda), *Juragang-Pandega* (Jawa), *Tanase-wanasae* (Maluku) dan *Ponggawa-sawi* (Bugis-Makassar). Sekurang-kurangnya ada empat fungsi utama dari kelompok-kelompok kerjasama (dengan bentuk yang varians) mutlak diperlukan, yaitu: Meningkatkan dan menyederhanakan pekerjaan berat dan rumit, Mekanisme perolehan modal dan pemasaran tangkapan, Media pewarisan pengetahuan dan sosialisasi ketrampilan, Sarana distribusi risiko bahaya kerugian ekonomi dan bahaya maut serta meringankan beban psikologis dan tanggung jawab social

5. Sistem Teknologi Dan Seni Kemaritiman

Meskipun dengan fungsi relative sama, namun tipe atau bentuk-bentuk teknologi pelayaran dan produksi serta perlengkapan bisa berbeda-beda atau bervariasi dari satu tempat dan masyarakat ke tempat-tempat dan masyarakat-masyarakat lainnya di dunia. Berbagai factor

menyumbang pada diversity dan variasi bentuk-bentuk teknologi kemaritiman bisa dikategorikan atas factor-faktor internal/local dan eksternal, berupa konteks social budaya, ekonomi, demografi, politik, lingkungan fisik, dan sumber daya alam/laut. Berbagai tipe/bentuk perahu tradisional milik kelompok-kelompok etnis di Indonesia, antara lain : P. Patorani (Makassar), Lambo (Mandar), Phinisi (Bugis), Sandeq, Pangkur, Bago (Mandar), Bagang (Bugis), Padewakang (Makassar) sedangkan Bodi-tipe kapal kayu baru 1980an (Bugis, Makassar, Bajo, Sulawesi Selatan), Jelloro-tipe perahu terbaru akhirn 1980an (Bugis, Bajo, Sulawesi Selatan), Lambo (Buton), Janggolan (Madura), Mayang (Jawa), Prahu jarring (Madura), Lis-alis, Golekan, Leti-leti (Jawa), Jukung (Jawa), Janggolan (Bali) dan Nade (Sumatra).

Perahu Jawa dan Bali dicirikan dengan ukiran dan gambar-gambar binatang dengan kombinasi warna cet. Gambar-gambar tersebut selain berfungsi sebagai seni juga memuat makna gagasan dan keyakinan-keyakinan religius. Phinisi adalah salah satu pipe perahu Bugis dengan kontruksi yang bagus, namun kurang dari segi seni ukiran, warna dan motif-motif bermakna. Kontruksi ini rupanya lebih mengutamakan nilai praktis berupa fungsi keseimbangan, daya muat, dan kecepatan.

6. Sistem Ekonomi Kemaritiman

System ekonomi dipahami sebagai saling keterikatan antara sub-sub system produksi, distribusi dan konsumsi dengan aspek-aspek social budaya local dan yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal (ekonomi pasar, demografi, institusi social, inovasi, teknologi, kondisi lingkungan fisik dan

sebagainya). Dalam pengertian sempit, setiap sector ekonomi masyarakat termasuk sector-sektor ekonomi kebaharian merupakan system-sistem ekonomi masing-masing.

Sumber daya alam laut dan statusnya kaya akan sumberdaya hayati dan non hayati yang dikandungnya merupakan salah satu faktor produksi terpenting bagi pengembangan dan bertahannya sector/bidang kehidupan ekonomi perikanan, khususnya perikanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Indonesia. Factor sumberdaya alam laut untuk ekonomi perikanan analogi dengan factor tanah dalam ekonomi pertanian. Berbeda dengan tanah, pemanfaatan wilayah laut dan isinya dipraktekan secara berbeda-beda menurut status hak penguasaan/ pemilikannya.

Modal dan pengelolaan dimana modal merupakan factor produksi terpenting menggerakkan suatu usaha perikanan, termasuk perikanan rakyat skala kecil tradisional. Adalah suatu keunikan bagi aktivitas penangkapan ikan, bahwa ketika sector ekonomi ini meningkat dari produksi subsistensi ke produksi pasar, yang berkorelasi dan seiring dengan perkembangan dari fungsinya sebagai aktivitas ekonomi sampingan ke usaha ekonomi dan sumber pendapatan utama, maka komponen modal menjadi mutlak tidak dapat dielakkan lagi kepentingannya bagi masyarakat nelayan. Sungguhpun usaha produksi masih semata diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan social sehari-hari. Keperluan akan alat-alat produksi dan besarnya biaya operasional serta pemeliharaan alat-alat produksi yang rentan terhadap resiko hilang atau kerusakan, menjadikan pedagang dan pengelola

modal usaha perikanan mutlak dilakukan secara terus menerus.

Tenaga kerja/pekerja merupakan salah satu factor produksi menentukan bagi suatu usaha ekonomi, tidak terkecuali sector perikanan laut. Untuk memahami aspek dan kondisi ketenagakerjaan perikanan rakyat di Indonesia, khususnya yang Sulawesi Selatan perlu dilihat karakteristik social budayanya yang meliputi asal usul, kelamin, usia dan kondisi fisik.

Pengetahuan dan ketrampilan teknis seperti halnya sumberdaya laut, modal, tenaga kerja, pengetahuan dan ketrampilan kerja merupakan factor-faktor penggerak usaha ekonomi, termasuk perikanan rakyat. Berbeda dengan usaha pertanian atau perikanan modern yang pengusaha dan tenaga kerjanya dibekali pengetahuan dan ketrampilan formal dan non formal, dalam perikanan rakyat Indonesia, terutama yang di KTI, aspek pengetahuan dan ketrampilan, baik berkaitan manajemen usaha maupun dalam proses-proses kerja di laut, pada umumnya bersifat tradisional yang diperolehnya melalui warisan dari generasi ke generasi, dan yang tak kalah penting akumulasi pengalaman dan adopsi inovaswi dari luar. Berbagai hasil survey social ekonomi desa-desa nelayan di Sulawesi Selatan misalnya menunjuk rendahnya pendidikan dan ketrampilan fromal dan non formal dimiliki penduduk nelayan.

D. Kelembagaan Masyarakat Maritim

1. Konsep Kelembagaan Masyarakat

Pengertian lembaga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuwan sosial. Bahkan lebih jauh Uphoff (1986), memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi. Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Israel (1990) memberikan penjelasan mengenai konsep umum tentang lembaga yang meliputi pada semua tingkatan lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan atau departemen pusat dan sebagainya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melembaga”. Huntington (1965), Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkatan dalam proses pelembagaan. Pelembagaan merupakan sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan kemantaban. Selanjutnya Uphoff (1986) mengatakan bahwa lembaga merupakan sekumpulan norma dan perilaku telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Lembaga kemasyarakatan merupakan asing social-institution dan dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga

ini mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi adat istiadat dan kemudian berkembang menjadi tata kelakuan yang dalam bahasa latin disebut mores. Lembaga social selalu menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Koentjaraningrat dalam Selo Sumarjan (2005:197) mengartikannya sebagai pranata social yang merupakan suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjuk pada suatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi cirri lembaga tersebut

R.M Mac Iver dan Charles H. Page dalam Abdulsyani (2002:75) mengatakan bahwa lembaga merupakan bentuk-bentuk atau kondisi-kondisi prosedur yang mapan, yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Selanjutnya oleh Polak JBAF menyatakan bahwa lembaga atau social institution adalah suatu kompleks atau system peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. W Hamilton mengemukakan pendapatnya bahwa lembaga adalah merupakan tata cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi pelbagai derajat sanksi. Kemudian Soerjono Soekanto menyimpulkan dari sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai

dengankepentingan-kepentinganmanusia dankelompoknya, sedangkan Summner melihatnya dari sudut pandang kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat disampaikan bahwa lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai taraf kebudayaan bersahaja atau modern. Karena setiap masyarakat tertentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan atau pun dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhaqn pokok di dalam kehidupan masyarakat dan sebagai wujud nyatanya adalah asosiasi.

Dalam mempelajari kelembagaan social perlu memperhatikan beberapa ciri umum yang menurut Gillin dan Gillin (Soerjono Soekanto, 2005 : 209), antara lain : Suatu lembaga masyarakat adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan, sedangkan untuk mencapai ciri umum tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Seringkali juga tidak sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai

alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut. Lambing-lambang juga merupakan symbol dari lembaga-lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis, yang merumuskan tujuan, tata tertib yang berlaku dan lain-lain.

Dalam mempelajari kelembagaan social dapat kita temukan tiga tipe lembaga kemasyarakatan yang diklasifikasikan sebagai berikut : Crescive institutions dan enacted institutions, yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. Crescive institutions juga disebut sebagai lembaga yang paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat mereka, seperti perkawinan, agama dan lainnya, sedangkan enacted institutions sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga pendidikan dan pelatihan.

Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Basic institutions yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga, agama, persekolahan dan negara. Dan subsidiary institutions dianggap kurang penting seperti kegiatan rekreasi dan lainnya.

Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social sanctioned institutions, adalah lembaga-lembaga yang dapat diterima masyarakat seperti sekolah-sekolah, perusahaan dagang, dan sebagainya sedangkan unsanctioned institutions, adalah lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, sekalipun agak sulit

memberantasnya, seperti para geng, penjahat dan lain sebagainya.

Perbedaan antara general institutions dengan restricted institutions, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada factor penyebaran, misalnya agama merupakan suatu general institution, karena dikenal oleh seluruh masyarakat dunia. Sudut fungsi terdapat perbedaan operative institutions dan regulative institutions. Operative institutions berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industrialisasi sedangkan regulative institutions bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri, seperti lembaga hukum, kejaksaan dan pengadilan.

Menurut Soejono Soekanto (Abdulsyani, 2002:79) bahwa secara umum lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Ia juga mengatakan bahwa pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain : Member pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. Menjaga ketertuhan dari masyarakat yang bersangkutan serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control) yang berarti system pengawasan daripada masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2. Kelembagaan Kekerabatan

Lembaga-lembaga kekerabatan seperti kelompok-kelompok keluarga inti (nuclear family) dan luas (extended family), kelompok-kelompok persepupuan terdekat (kindred groups) yang berarti bahwa kekerabatan masih tetap merupakan unsure penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Kelompok patrilineal dan system hubungan perkawinan yang merupakan sendi daripada system kekerabatan mereka yang kemudian kita kenal dengan istilah klen atau faam (marga) dan masih terbagi lagi dalam sub-sub marga. Marga-marga ini diketuai oleh seorang yang dianggap bijak dan terpuja dalam masyarakat dari marga tersebut. Mereka ini mempunyai hubungan emosional tertentu dengan cerita-cerita tentang nenek moyangnya bahkan sampai pada pantangan-pantangan yang sama pula.

Dalam penggolongan di atas para janda digolongkan kedalam kelompok patrilineal dari mendiang suaminya sesuai dengan status dalam adat istiadat masyarakat tersebut. Begitu pula dengan seorang gadis yang baru menikah, akan sendirinya tergolong dalam kelompok patrilineal ikut suaminya. Dalam kelompok patrilineal bila seorang pria (suami) meninggal tidak akan merubah dan mempengaruhi kedudukan seorang perempuan dalam kelompok tersebut, dan hak serta kewajibannya menurut adat berlangsung seperti biasa dan bertanggung jawab penuh atas anak-anak dan kehidupannya. Ada pula garis keturunan ibu atau matrilineal. Di Indonesia ada juga kelompok ini namun sangat terbatas seperti yang terjadi di daerah Padang. Di Padang kelompok matrilineal yang berkuasa, kebalikan dari kelompok patrilineal yang

hampir menguasai daerah-daerah di Indonesia ini. Hubungan kekerabatan tersebut menunjuk pada hubungan saudara, sepupu maupun kelompok keluarga suami maupun istrinya. Kadang-kadang istilah tersebut seolah-olah menjadi nama kelompok, hal mana sebenarnya menunjuk pada hubungan pu kelompok-kelompok tertentu terhadap orang atau kelompok tertentu pula.

Hal ini berlaku pula pada kekerabatan kelompok masyarakat nelayan. Terdapat sebagian masyarakat nelayan di mana kelompok-kelompok kerja samanya cenderung dari anggota-anggota keluarga inti kalau bukan keluarga luas. Terdapat juga sebagian masyarakat nelayan dimana nakhoda-nakhoda lebih suka merekrut kerabat atau saudara (sepupu atau pun ipar) atau bahkan tetangga yang telah di anggap saudara secara luas. Rekrutmen sering didasarkan pada pengaruh organisasi kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan baik dari kelompok patrilineal maupun matrilineal dan bahkan bilateral.

Di Indonesia sebagian besar mengikuti garis keturunan dari kelompok bilateral tentu mewarnai bentuk-bentuk kelompok kerja nelayan atau pelayar sehingga anggota-anggotanya direkrut dari keluarga dan sepupu dari kedua garis keturunan ayah dan ibu, hal ini hanyalah suatu kecenderungan belaka bukan sesuatu yang mutlak sifatnya.

3. Kelembagaan Politik

Menjadi kenyataan dalam masyarakat bahari dimana lembaga-lembaga politik formal belum banyak bermain memainkan peranan meyelok khususnya dalam kehidupan

ekonomi nelayan. Ada kecenderungan munculnya sikap acuh tak acuh dan menghindari dari sebagian besar masyarakat nelayan terhadap berbagai kebijakan politik formal, kecuali dianggapnya menguntungkan. Sikap ini menjadi salah satu ciri khas yang lagi berkembang dalam masyarakat nelayan. Peraturan-peraturan formal seperti ijin dan larangan mengambil ataupun menangkap biota-biota langka bernilai ekonomi, larangan-larangan menggunakan alat-alat tangkap tertentu yang sudah akrab dengan para nelayan, penyetoran pajak, bagi sebagian besar nelayan, kali ini dialaminya sebagai factor penghambat.

Sebaliknya mereka cenderung memantapkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata tradisionalnya sebagai lembaga-lembaga yang bersifat ganda, termasuk didalamnya fungsi politik. Di Indonesia masih kuat dan bertahanya fungsi politik dari lembaga-lembaga ekonomi, kekerabatan, atau agama local menggantikan peranan lembaga-lembaga formal dan non formal baru terutama disebabkan oleh belum ada atau masih kurangnya prestasi ditunjukkan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat nelayan pesisir dan pulau-pulau.

4. Kelembagaan Keagamaan

Religi atau agama kepercayaan mengandung arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berada di luar kekuasaan atau jangkauan manusia. Adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang gaib dikarenakan manusia mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap kekuasaan yang luar biasa di alam sekelilingnya. H.M. Yamin yang dikutip oleh H. Hadikusuma (2004 : 32) menyatakan bahwa

sampai tahun 1931 Van Vollenhoven hanya menyangka, bahwa beberapa tatanan hukum adat seperti hak lingkungan desa dan negara adalah penjelmaan pikiran atau kepercayaan luhur, sedangkan hukum adat itu berasal dari zaman jahiliyah purbakala Malaio-Polinesia. Baru dalam tahun 1931 beliau berkata bahwa hukum adat itu berdasarkan kepercayaan istimewa kepada kesaktian.

Selanjutnya H.M. Yamin mengemukakan bahwa ada lima sifat kesaktian dalam masyarakat tradisional, yaitu : Benda Kesaktian adalah benda halus yang dianggap dan dirasakan mengisi segala ruangan atau barang yang juga disebut zat kesaktian atau mujizat sakti. Paduan Kesaktian adalah zat kesaktian yang lepas atau terikat dalam keadaan terpadu, yang lepas tidak terikat terdapat di goa, mata air, gunung, pohon beringin dan candi, sedangkan kesaktian yang lepas bebas seperti Penunggu Nagari, Ratu Lara Kidul, Sang Hyang Desa dan sebagainya. Kesaktian yang terikat terdapat pada benda atau bagian badan manusia, rambut, kepala, kuku, air ludah dan sebagainya. Sari Kesaktian terikat misalnya dalam tubuh manusia yang disebut *semangat, nyawa, hawa*, misalnya pada raja, dukun-dukun yang tingkatannya berbeda-beda. Sang Hyang Kesaktian merupakan kesatuan kesaktian, yang dikuasai hanya satu tenaga sakti yang disebut Sang Hyang Widhi, Tuhan, Allah, dan sebagainya. Pengantara Kesaktian ialah seperti dukun, datu, wali, yogiswara dan lainnya.

Dalam perkembangannya manusia percaya bahwa adanya alam semesta dan segenap isinya, karena kekuasaan kesaktian yang mengadakan dan menentukannya. Wujud dari kepercayaan itu nampak manusia melaksanakan acara

pemujaan, permohonan, dan upacara keagamaan lainnya dengan berbagai cara. Ada yang dilakukan manusia orang perorang, ada yang bersama dalam kelompok dan ada yang memakai perantara. Ada yang nampak sebagai sikap perilaku yang berwujud hormat dan khidmat dalam berhubungan dengan yang suci atau supra natural yang disebut *religi* (latin : *religio*) yang merupakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan ajaran-ajaran yang disampaikan para Nabi dan Rasul yang mempunyai mujizat, kemudian dilanjutkan oleh para Wali, guru agama, yang sesudah meninggal dikeramatkan atau dimuliakan.

Ada pula yang sifatnya karena kagum terhadap sesuatu yang aneh atau *Mirakel* (latin : *Miraculum*) lalu timbul perilaku pemujaan, misalnya terhadap bangunan kuno yang indah, yang besar dan megah, termasuk penghormatan kepada alat-alat senjata, peralatan adat dan juga pakaian kuno yang mempunyai kesaktian. Ada pula yang disebut *Magi* (Yunani : *Mageia*) yang merupakan ilmu sihir (sihir : tipuan) dikarenakan seseorang mempunyai daya pikir dan perilaku yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib, dengan menggu nakan benda atau tanpa benda yang disebut jimat. Kalau bertujuan baik disebut *magi putih* dan kalau bertujuan tidak baik disebut *magi hitam*.

Bidang-bidang ekonomi kebaharian menunjuk secara nyata aktivitas-aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa laut yang berat, rumit dan berbahaya. Dalam mengelola usaha-usaha kebaharian, terutama perikanan dan pelayaran, masyarakat nelayan dimana-mana banyak menggunakan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek

religious dan magic dalam mengatasi persoalan-persoalan fisik di laut dan perolehan keuntungan. Keyakinan dan praktek-praktek tersebut biasanya diwadahi dalam lembaga-lembaga agama dan kepercayaan tradisional. Bagi mereka, aspek keyakinan, praktek upacara, bacaan mantra, pantangan, dan lain-lain sekurang-kurangnya dipraktikkan secara individual ataupun kelompok di rumah ataupun di tempat-tempat dimana para nelayan tersebut beraktivitas.

Di Indonesia berdasarkan berbagai hasil penelitian dan cerita terdapat kecenderungan bahwa unsure upacara religius banyak dipraktikkan nelayan dan pelaut dimana praktek-praktek keyakinan agama dan kepercayaannya diterapkan dengan harapan mendapat restu, hasil dan keselamatan.

E. Penutup

Organisasi dan kelembagaan masyarakat maritime tumbuh dan berkembang untuk memenuhi fungsi secara spesifik terkait dengan berbagai masalah yang muncul dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut. Pola-pola kelembagaan yang ada tentu saja memiliki karakter kemaritimannya karena secara determinan dipengaruhi oleh lingkungan laut. Unsur kelembagaan dan organisasi yang paling menonjol pada masyarakat maritim di Sulawesi Selatan adalah kelembagaan *pongawa sawi*. Setiap kebudayaan dan masyarakat di dunia, tidak terkecuali kebudayaan dan masyarakat maritime, cepat atau lambat akan mengalami suatu perubahan dan perkembangan dimana lingkungan laut dengan kondisi sumberdaya yang potensial berfungsi sebagai faktor perangsang terhadap pertumbuhan dan pengembangan budaya kemaritimannya masyarakat manusia kawasan pantai dan pulau-pulau

di dunia khususnya di Indonesia. Sebaliknya, masyarakat manusia memberi respons budaya secara aktif, arif dan bijak terhadap lingkungan dan potensi sumberdaya laut itu dengan berbagai gagasan dan wawasan, tindakan, teknik-teknik pemanfaatan bagi kehidupannya. Melalui perjalanan waktu yang panjang dan proses pembentukan yang lambat atau cepat, maka akan terbentuk suatu system budaya, social, dan teknologi masyarakat manusia yang berbeda-beda berkenan dengan pemanfaatan sumberdaya perairan dan jasa-jasa laut yang disebut budaya kemaritiman.





BAB IV

DIMENSI POLITIK MARITIM ORANG BUGIS

A. Pendahuluan

Organisasi politik secara fungsional mengacu pada sarana yang secara intern digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk memelihara ketertiban (*order*), melalui pengaturan penguasaan dan kewenangan serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat, dan secara ekstern berfungsi untuk mengatur urusan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh tambahan kekuatan (*resources*) dari luar untuk memperkuat berlangsungnya tatanan yang stabil dalam masyarakat. Secara structural organisasi politik adalah suatu susunan hirarkis dari orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam mengatur hubungan antar orang atau lembaga dalam suatu masyarakat. Organisasi seperti itu mungkin secara relatif terdesentralisasi dan bersifat informal, seperti yang terdapat pada gerombolan (*band*) dan suku bangsa atau tersentralisasi dan

bersifat formal, seperti dalam masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku atau dalam negara.

Istilah organisasi politik dalam perspektif formalistik mengacu pada aspek-aspek organisasi sosial yang khusus berhubungan dengan penanganan masalah-masalah kebijakan umum masyarakat. Dengan kata lain, organisasi politik adalah suatu sistem hubungan sosial mengenai koordinasi dan pengaturan perilaku sejauh perilaku itu ada hubungannya dengan pemeliharaan tata tertib umum. Penetapan kebijakan sebagai dasar bagi struktur organisasi politik menetapkan tindakan-tindakan politik menjadi sangat penting karena merupakan perwujudan kewenangan struktural yang dimiliki oleh mereka diberi kepercayaan untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Sedangkan system pemerintahan sebagai sarana system politik dan organisasi politik menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat terdiri dari suatu sistem administratif dengan sejumlah tenaga kerja spesialis yang merupakan atau tidak merupakan bagian organisasi politik, tergantung pada kompleksnya masyarakat yang bersangkutan. Dalam semua masyarakat pasti ada suatu bentuk organisasi politik, tetapi organisasi itu tidaklah selalu merupakan pemerintah, karena pemerintah atau pemerintahan adalah bentuk pengorganisasian kegiatan pelayanan yang berdasar atau rekomendasi dari satu atau gabungan system politik.

Secara ekologis dan geografis masing-masing wilayah atau kawasan memiliki suatu bentuk organisasi politik sesuai dengan kondisi ekologis dan geografis daerah tersebut. Dalam kehidupan masyarakat maritim, secara teoritis konseptual tentu memiliki suatu system organisasi politik yang bercorak spesifik yang

disebabkan oleh determinasi lingkungan laut. Ini berarti bahwa bagaimana distribusi kekuasaan dan kewenangan dalam rangka menciptakan harmonisasi masyarakat maritime berdasar atas karakter dan prinsip hidup kebaharian. Demikian pula struktur organisasi politik didasari oleh kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan lingkungan laut. Memang benar bahwa dalam kerangka kerja antropologis dipahami bahwa kebudayaan dimana salah satu komponen dasarnya adalah system politik menjadi acuan bagi suatu masyarakat dalam menentukan pola tindakan dan aktivitas dalam berhubungan dengan lingkungannya. Dengan demikian kerangka acuan yang digunakan untuk berhubungan dengan laut dan memanfaatkan lingkungan laut adalah kebudayaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsudi Suparan yang bahwa: hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dipunyai masyarakat. Dengan menggunakan kebudayaan ini masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan proses penyesuaian ini masyarakat mengelola lingkungan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki pendidikan formal yang rendah. Mereka melakoni kehidupan dengan berpegang teguh pada pranata social yang dimiliki, system nilai-nilai moral dan etika, pola pandangan hidup (*worldview*) dan system pengetahuan. Pranata social mengatur perilaku setiap orang dalam suatu situasi untuk memenuhi suatu tujuan yang bersifat spesifik. Dengan masing-masing individu dalam suatu kelompok manusia tertentu untuk pada system norma dan aturan yang disepakati maka akan terwujud keserasian social menuju terwujudnya tujuan bersama. Sistem nilai moral dan etika merupakan sebuah standar perilaku yang menentukan baik atau buruknya tindakan

seseorang. Frame atau bingkai untuk menilai sesuatu perilaku baik adalah dengan mengacu pada norma kebiasaan dan kewajaran menurut pola yang telah disepakati bersama. Apabila seseorang melakukan perilaku menyimpang dari standar moral, maka ia akan memperoleh sanksi atau hukuman, berat ringannya sanksi tergantung dari besar ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, sanksi atas pelanggaran itu mulai dari yang paling rendah berupa cibiran atau cemoohan sampai pada hukuman yang paling berat seperti dibunuh atau dipaksa meninggal kampung halaman. Sedangkan pandangan hidup adalah sistem pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari bagaimana suatu kelompok masyarakat tertentu memandang, mempersepsikan dunia mereka.

Sebuah masyarakat dengan struktur yang berskala besar memerlukan organisasi politik yang mungkin lebih rumit dan terpusat, yang meliputi hirarki organisasi untuk bidang eksekutif, yang disertai kewenangan untuk menjalankan undang-undang dengan menetapkan sejumlah kebijakan. Selanjutnya hirarki legislative yang memiliki fungsi legislasi pembuat undang – undang sebagai acuan untuk mengatur keserasian sejumlah besar kepentingan sehingga semua dapat berlangsung secara fungsional. Dan yang ketiga adalah yudikatif yang berfungsi untuk mengadili setiap pelanggaran atas undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Keseimbangan fungsi struktur menentukan efektivitas perwujudan keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat.

Dalam masyarakat lokal seperti masyarakat maritime, kompleksitas struktur politik boleh jadi tidak merepresentasikan pola ideal dalam struktur formal seperti dijelaskan di atas, namun yang pasti bahwa fungsi struktur sedemikian itu mewujudkan dalam format yang berbeda dengan fungsi baik secara langsung

maupun tidak menunjukkan adanya persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah terutama dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat local tersebut melalui pola kerja dari tiga elemen system politik dan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan masyarakat maritime fungsi pemerintahan dalam bentuk mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan perwujudan strategi penciptaan situasi kondusif harus ada, demikian pula penekan hukum dan system peraturan harus mendapatkan jaminan yang tegas dalam sebuah masyarakat local, bahkan elemen struktur yang diberi kewenangan untuk menciptakan system aturan local juga dipastikan hadir. Pola struktur politik dalam masyarakat local pada umumnya diatur secara informal melalui kewenangan yang diberikan pada tokoh informal di dalam masyarakat tersebut.

B. Sistem Kepemimpinan

1. Kriteria Pemimpin

Kriteria pemimpin adalah tipologi sifat dan karakter dasar yang dimiliki oleh seseorang, dimana sifat dan karakter tersebut dianggap mampu menggerakkan setiap orang untuk bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ini berasumsi bahwa tidak semua orang memiliki karakter yang tepat dan cocok untuk memimpin, hanya mereka yang dikaruniai atau mampu memiliki karakter tertentu yang bias menjadi pemimpin. Kepemimpinan sendiri bermakna bagaimana kekuatan untuk menggerakkan orang untuk secara sadar mencapai tujuan sesuai apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Sudah pasti bahwa, tidak semua orang mampu dan memiliki sifat dan karakter kepemimpinan karena ia

merupakan sesuatu yang boleh jadi diturunkan dari orang tua yang memiliki sifat dan karakter kepemimpinan. Bahkan sebagian dari sifat atau karakter seorang pemimpin dipelajari atau dilatihkan sehingga hanya orang yang memiliki riwayat keturunan kepemimpinan dan hanya mereka yang mau belajar dan berlatih yang memiliki sifat dan karakter pemimpin.

Dalam kehidupan masyarakat maritime, secara umum mentalitas pemimpin banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek perilaku para tokoh yang ada dalam cerita rakyat. Mentalitas seorang pemimpin bagi kalangan Suku Bangsa Bugis – Makassar di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh empat sifat. Dalam lontara dan cerita lisan disebutkan bahwa ada empat sifat yang harus dimiliki setiap pemimpin yang baik. Keempat sifat tersebut jika dimiliki oleh seseorang maka orang tersebut diberikan julukan sebagai manusia bersegi empat (*to sulapa eppa*). Empat sisi atau empat segi adalah symbol keutuhan dari sifat yang dimiliki oleh seseorang. Empat sifat yang harus atau secara ideal dimiliki oleh pemimpin suku BUGIS-Makassar adalah pertama, berani (*warana atau barani*) adalah memiliki sifat pemberani mampu menundukkan dan mengalahkan perasaan ragu, tidak pernah merasa ragu apalagi takut, terutama karena mereka selalu dan memang sifat dan tindak tanduknya benar. Kedua ialah sifat cerdas, atau pintar (*macca*) adalah orang yang memiliki kemampuan memahami melalui kemampuan untuk menganalisis sebuah fenomena secara tepat. Demikian pula orang yang memiliki kemampuan ini mampu memprediksi dengan tepat situasi dan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Dengan kapasitas ini seorang orang cerdas (*to macca*) selalu tetap dalam menentukan langkah dan tindakan sesuai dengan konteks

keberadaannya. Ketiga adalah memiliki sifat jujur (*malempu*) yakni mampu senantiasa berjalan pada garis kebijakan yang telah disepakati dan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jujur adalah bertindak sebagaimana seharusnya (*kedo-kedo sitteppena*) tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan sesuatu baik karena kepentingan pribadi atau karena kepentingan golongan tertentu. Sifat yang keempat adalah tegas dalam bersikap (*magetteng*) yakni memiliki kemampuan untuk mempertahankan apa dianggap benar sungguhpun harus menghadapi tantangan dan resiko besar, bahkan lebih memilih mati daripada berubah pendirian.

Sosok manusia seperti itulah yang oleh orang Bugis-Makassar dikenal sebagai seorang pemimpin yang ideal. Dalam aktualitasnya, seiring dengan perkembangan zaman dan telah masuknya berbagai pengaruh dari luar, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan kapitalisme modern menyebabkan kadang-kadang seorang pemimpin tidak memenuhi karakter ideal seperti tersebut.

Prototipe utama orang pemberani (*to – warani*) bagi orang Bugis ditemukan dalam karya sastra yang sangat terkenal yakni dalam epos *Lagaligo* yaitu *Sawerigading*, sepanjang episode cerita, peperangan *Sawerigading* selalu dilatar belakangi oleh upaya untuk menegakkan keadilan. Adapun *to – macca* orang pintar dapat pula diartikan sebagai seorang yang ahli atau cerdas. Dalam tradisi cerita orang Bugis unsur tokoh ‘*peripu*’ dalam cerita epos tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam cerita-cerita lisan, kepandaian merupakan suatu kapasitas untuk menyelesaikan (*problem solving*) secara bertanggung jawab.

Kepandaian atau kecerdasan berbeda dengan kecerdikan atau kelicikan, karena kadang penyelesaian masalah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas ini kadang-kadang bersifat pragmatis dan tidak bertanggung jawab.

Selain karakter yang telah disebutkan pemimpin dalam konteks kekinian memiliki harta kekayaan. Idealisasi dari harta kekayaan sebagai prasyarat menjadi pemimpin merupakan konsekuensi logis dari suatu system demokrasi yang membutuhkan dukungan formal dari masyarakat. Berkaitan dengan itu banyak kalangan yang menganggap usaha memperkaya diri sebagai suatu kewajiban yang syah-syah saja dilakukan oleh setiap orang, sepanjang dilakukan secara jujur dan halal, karena memungkinkan seseorang membantu sesama yang kurang beruntung, sehingga mereka dapat memperoleh predikat sebagai orang dermawan (*to Malabo*) yang tentu saja sangat disukai oleh masyarakat sehingga secara demokratis memiliki peluang untuk menjadi seorang pemimpin lewat pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat.

Unsur kepemimpinan atau karakter lain yang secara ideal harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah *panrita* (*to -saleh*), adalah mereka yang menguasai dan mempraktekkan ilmu-ilmu keagamaan yang menifestasi sifat dan tindakannya mewujudkan dalam bentuk tawaduh, bijaksana, rendah hati, jujur dan bersedia dengan ikhlas menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Meskipun berasal dari bahasa sansekerta (pandita, pendeta atau pertapa), akan tetapi setelah agama islam diterima, istilah *to-panrita* dianggap sepadan dengan bahasa Arab ‘ulama’ yang dianggap tidak

pernah berbuat salah atau tidak memetingkan diri sendiri (Pelras, 2006 : 355 – 259).

Selain unsur-unsur atau sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin seperti yang telah disebutkan diatas, ada hal –hal yang bersifat spesifik harus dimiliki pemimpin pada masyarakat maritim. Pengetahuan yang banyak tentang lingkungan, kondisi alam, mitos-mitos bahkan proses ritual dalam **pengelolaan** dan pemanfaatan lingkungan laut, bahkan hal berkenaan dengan kepiawaian dalam pembuatan perahu sangat sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin di lingkungan masyarakat maritim. Karena peran pemimpin sangat mempengaruhi kemampuan dan keberhasilan masyarakat maritim dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian dalam bergelut dengan lingkungan laut. Sektor dominan dalam kegiatan kelautan antara lain meliputi kegiatan menangkap ikan dan biota laut lainnya sebagai nelayan, demikian pula kegiatan yang berkaitan dengan mengarungi lautan untuk melakukan perdagangan atau menetap pada wilayah lain dengan memanfaatkan laut sebagai sarana yang oleh Abu Hamid disebut dengan istilah pelayar (*passompe*). Demikian pula dengan kegiatan dalam bentuk pembuatan perahu, baik dalam skala besar maupun kecil untuk kepentingan sendiri.

Dalam konteks pelayaran ditemukan istilah atau konsep yang disebut dengan **perahu atau kapal** sebagai sebuah institusi utuh (*total institution*). Menurut Tobing yang dikutip oleh Abu Hamid (2004) perahu yang sedang dalam pelayaran dianggap sebagai desa. Nahkoda dianggap sebagai kepala desa. Untuk itu seorang pemimpin harus membekali dirinya dengan

keberanian menentang badai, atau berpegang pada pesan-pesan orang tuanya. Harus mempunyai bekal setumpuk pengetahuan tentang kelautan, selain itu pemimpin harus jujur dan berwibawa.

Bagi masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai tukang atau pembuat perahu, seorang yang sudah dipredikat kepala tukang (*punggawa*) harus telah memiliki pengetahuan tentang taktik pembuatan perahu juga pengetahuan tentang mantra-mantra, pantangan-pantangan serta ritual yang biasa dilakukan pada saat membuat perahu ataupun pada saat akan digunakan. Hubungan antara kepemimpinan dengan kapasitas pengetahuan dan kepercayaan baik yang rasional maupun yang bersifat mistik dengan kepemimpinan adalah bahwa, mereka yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang mumpuni pasti selalu mampu mengatasi semua masalah yang baik dirinya hadapi maupun anggota masyarakat yang lain. Dengan demikian orang seperti itu selalu dimintai tolong oleh anggota masyarakat lain, sehingga oleh masyarakat orang seperti ini memiliki wibawa yang tinggi dalam masyarakat. Kepemimpinan memerlukan kewibawaan untuk mampu menggerakkan orang lain.

Berbagai pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang pemimpin merupakan kriteria yang patut dipertimbangkan. Kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik di darat maupun di laut dipandu dan di bimbing oleh seorang pemimpin. Aktivitas masyarakat maritim akan bisa berjalan dengan baik jika pemimpinnya dapat mengarahkan kegiatan mereka dengan baik. Dengan menjalankan berbagai aturan yang mereka pahami. Kemampuan memandu

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan diri yang dimiliki.

2. Proses Pemilihan Pemimpin

Proses pemilihan pemimpin yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tatacara yang dilakukan atau digunakan oleh masyarakat dalam memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Menentukan bagaimana proses harus berlangsung dimaksudkan agar dalam memilih dan menentukan pemimpin dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kehendak bersama atau yang diinginkan oleh mayoritas penduduk. Jika suatu kelompok dalam priode waktu tertentu keliru dalam memilih pemimpin maka akibat negative yang dirasakan berlangsung sepanjang masa kepemimpinan dari pemimpin itu. Itulah sebabnya orang yang memilih pemimpin seharusnya memahami dengan baik kategori dan karakter seorang pemimpin yang baik. Kategori pemimpin dalam masyarakat terbagi atas dua dalam garis besar yakni pemimpin formal yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengendalikan system pemerintahan pada suatu wilayah atau lokalitas tertentu, seperti kepala desa dan jajarannya. Kategori yang kedua adalah pemimpin informal yang mengendalikan pranata-pranata social local yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk mengatur kepentingan yang bersifat khusus. Seiring berkembangnya waktu proses memilih pemimpin telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan.

Dalam suatu proses memilih pemimpin yang terjadi pada masyarakat maritim saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari suatu system dimana proses

menentukan pemimpin bersifat sederhana karena tinggal melihat dan menentukan diantara anak pemimpin atau kerabat pemimpin (terutama pada zaman kerajaan) dalam hal ini raja yang mewarisi karakter kepemimpinan dari ayahnya, ke suatu pola dimana tidak lagi berdasarkan keturunan seperti pada masa pemerintahan kerajaan. Pada saat ini untuk memilih pemimpin, suatu masyarakat akan menghubungkannya dengan kriteria pemimpin yang diharapkan dan dianggap baik bagi masyarakat tersebut.

Dalam konteks kepemimpinan masyarakat Bugis-Makassar, konsep dan system yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya berdasarkan sistem patron klien. Patron artinya mereka yang berstatus sebagai pemimpin yang bertugas dan berfungsi untuk mengayomi atau melindungi klien. Sedangkan klien adalah mereka yang berposisi sebagai anak buah tunduk dan taat pada semua kebijakan dan perintah sang patron. Hubungan patron – klien dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar dikenal dengan istilah “*joa-ajjoareng*”. Prana hubungan antara *joa-ajjoareng* bersifat holistic dan menyeluruh karena sekali seorang *ajjoareng* menyatakan kesetiaan kepada *joa* nya maka mereka menegaskan diri dalam posisi yang siap menerima perintah, petunjuk atau apapun namanya dari seorang *joa*. Sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya yang saling kait-mengait dan bersifat menyeluruh, kecuali dalam hal yang bersifat personal dan terkait dengan kehidupan rumah tangga para *ajjoareng*. Meskipun orang Bugis-Makassar merupakan salah satu suku bangsa di Nusantara yang memiliki sistem hirarkis paling rumit dan tampak kaku, akan tetapi sisi lain pretise

dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi baik melalui jabatan maupun kekayaan, dimensi tersebut akan tetap merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial masyarakat mereka (Pelras, 2006 ; 5).

Sistem patron klien sangat berpengaruh dalam proses pemilihan pemimpin. Orang Bugis mengikat diri pada pemimpin sesuka hatinya, tetapi menunjukkan ketaatan dan kesetiaan tiada tara. Mereka kerap berganti pemimpi, tetapi jarang sekali mereka mengkhianati mantan pemimpinnya. Persekutuan mereka yang kecil pun dapat bertahan terus berkat keteguhan rasa kasih dan kehangatan jiwa mereka.

Hubungan antara pemimpin dan pengikut, patron dan klien, terjalin secara suka rela dan hanya berdasarkan kontrak tak tertulis. Hubungan ini bisa berakhir kapan saja, dan sepanjang klien tidak memilih hutang kepada patronnya, maka disetiap saat dapat pindah ke patron lain (Pelras, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dengan leluasa menentukan dengan siapa dia akan bekerjasama. Khususnya dalam aktivitas masyarakat maritim. Tidak terdapat suatu proses pemilihan pemimpin secara formal seperti halnya pada pemilihan kepala Desa. Proses pemilihan pemimpin yang dimaksud disini adalah bagaimana seseorang menentukan pilihan untuk bekerjasama dengan orang lain dan akan menjadi pemimpinnya ketika melakukan aktivitas sebagai masyarakat maritim. Biasanya hubungan kerjasama dapat dengan mudah terjalin apabila terdapat hubungan kekeluargaan. Seseorang yang ingin melakukan pekerjaan tertentu akan mengajak keluarganya

yang lain untuk bekerjasama. Begitu juga dengan seseorang yang ingin bekerja, terlebih dahulu meminta bantuan atau peluang dari keluarganya. Setelah itu kedekatan seseorang yang menjadi rekan kerja sangat dituang dengan sikap saling percaya.

Hubungan kerja antara nelayan dalam suatu kelompok *pongawa sawi* didasarkan atas kekeluargaan yang bersifat fungsional. Dalam kelompok ini ada empat peranan yang diperankan anggota-anggotanya. Pertama, perangkat peranan yang menyediakan modal yang dijalankan oleh ponggawa darat. Kedua adalah perangkat peranan pengguna modal yang dijalankan oleh ponggawa laut dibantu oleh sawi, ketiga adalah perangkat peranan memasarkan produksi dan mengorganisasikan anggota-anggota yang dijalankan oleh ponggawa darat dan pengecer, dan keempat adalah kelompok sawi yang berfungsi sebagai tenaga bantu dalam seluruh proses kenelayan, mulai dari mempersiapkan proses penangkapan, melakukan proses penangkapan, bahkan sampai pada proses distribusi dan pengangkutan yang berlangsung di dermaga atau di tempat pelelangan ikan, (Abu Hamid dalam Syarif 1995). Komponen yang terkait dalam system kenelayan di Sulawesi Selatan itu merupakan satu kesatuan integrative dan saling membutuhkan secara fungsional dan structural.

3. Hubungan Kekuasaan dan Kepemimpinan

Kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua sisi dari satu mata uang. Artinya kekuasaan tidak bias dilepaskan dari kepemimpinan. Seseorang yang memimpin pasti dalam dirinya terdapat kekuasaan, karena kekuasaan itu merupakan perwujudan dari dari suatu kepemimpinan. Tidak aka nada

arti apa-apa bagi seorang pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan, itulah sebabnya kekuasaan itu disebut pula dengan power atau outority. Dengan kata lain kekuasaan adalah energy penggerak dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak akan mampu menggerakkan orang menuju tujuan yang diinginkan jika dalam dirinya tidak diberikan kekuasaan. Demikian pula bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh seseorang menentukan efektivitas kekuasaan yang dimiliki untuk apakah mampu menggerakkan orang atau tidak menuju sesuatu yang dikehendaki oleh seorang pemimpin. Kekuasaan adalah masalah hubungan antara pemimpindengan orang yang dipimpin, hubungan ini boleh jadi mendapat tanggapan positif atau mungkin sebaliknya tanggapan negative dari orang yang dipimpin. Hubungan antara individu-individu atau unit-unit dan orang-orang yang mereka kuasai. Adams yang dikutip oleh Keesing (1981 : 50) mendefenisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu unit sosial untuk mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang lain. Manifestasi hubungan antara kekuasaan dan pemimpin bagi masyarakat maritime di Sulawesi Selatan dapat ditemukan dalam fenomena hubungan antara punggawa dengan sawi. Punggawa adalah mereka yang memiliki otoritas, baik dalam bentuk materi atau modal maupun dalam bentuk kekuatan supernatural seperti kepercayaan gaib. Sedangkan saawi adalah tenaga kerja yang bekerja dibawah komando punggawa untuk membantu punggawa dalam menjalankan unit produksi penangkapan, atau kegiatan lain yang relevan dalam dunia kenelayanan dan kemaritiman.

Dalam organisasi *pongawa sawi* yang terdapat pada masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan, tata hubungan antara *pongawa* dengan *sawi* mengacu pada tradisi yang ada atas dasar hubungan sosial ekonomi yang menjelmakan pada hutang budi. Dengan demikian prinsip-prinsip resiprositi masih berlaku untuk memperkuat hubungan sosial antara anggota sehingga pemberian tidak pernah dihitung secara material atau uang tetapi dibalas dengan memberikan suatu barang walaupun dalam bentuk yang berlainan.

Hubungan *pongawa sawi* mengandung interaksi yang saling menguntungkan dan keduanya saling membutuhkan. *Pongawa* butuh hasil tangkapan yang dapat dijual, sedangkan *sawi* butuh modal. Kebutuhan *pongawa* dikuasai oleh *sawi*, sebaliknya kebutuhan *sawi* dikuasai oleh *pongawa* sehingga keduanya terpaut pada ikatan pada saat berada dilaut maupun pada saat beradati didarat. Hubungan ini dijalin tidak hanya antara *pongawa* dan *sawi* saja tetapi juga dengan anggota keluarga mereka.

Pongawa biasanya memberikan upah lebih dari yang telah disepakati kepada *sawi* yang sedang kekurangan, karena menganggap bahwa dengan berbuat seperti itu, *sawi* akan berbuat baik dan tetap bisa menjalin hubungan kerjasama lebih lama. Sebagai imbalan, *sawi* tersebut akan merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap *pongawanya* dan akan membantu secara suka rela pada berbagai kesempatan. Pemimpin dapat memberikan perhatian dan hubungan yang baik kepada anggotanya baik didalam aktivitas kerja mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Pada tesis Abu Hamid dijelaskan secara jelas mengenai pola kepemimpinan nelayan serta hubungannya dengan sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin dalam wilayah kekuasaannya. Pemimpin organisasi adalah *pongawa* darat, seorang yang telah menyediakan modal kerja dan seperangkat teknologi (perahu layar / motor dan peralatan tangkap). Seorang *pongawa* darat, bukanlah orang luar biasa, melainkan orang yang berhasil dan berpengalaman mengenai seluk-beluk perikanan, ia berhasil mengakumulasi modal dan memiliki posisi sosial tertentu dalam lingkungan masyarakatnya. Ia bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Ia mempunyai budi pekerti luhur, jujur dan ulet serta ramah terhadap semua orang, tidak pernah diketahui melakukan perbuatan dusta, curang, pemabuk, dan judi. Ia seorang yang berani mengambil keputusan dan menanggung resiko atas keputusannya. Ia mempunyai sifat-sifat pemimpin dengan tutur kata yang menarik dan berani berkorban untuk orang lain. Satu kata dengan perbuatan, sehingga ia dapat memelihara kepercayaan orang kepadanya. Apabila seorang *pongawa* darat tidak dapat memelihara kepercayaan, berarti *pongawa* darat akan kehilangan mitra kerja, dimana ini dapat bermakna yang bersangkutan kehilangan pekerjaannya, disebabkan karena pihak *pongawa* laut tidak akan bekerjasama dengan mereka. Lebih dari itu seorang yang terlanjur tidak dipercaya oleh masyarakat akan menjadi buah bibir dilingkungan masyarakatnya.

Dilihat dari bagaimana proses menjadi *pongawa* darat, secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tipe yakni seseorang yang karena memiliki modal yang mampu membiayai satu atau lebih unit usaha kenelayanan, yang kemudian

bekerjasama dengan seorang ponggawa laut membentuk suatu kesepakatan melakukan usaha penangkapan dimana seluruh modal operasional ditanggung oleh ponggawa tersebut. Tipe kedua adalah seorang *ponggawa* darat adalah seorang wiraswasta yang tumbuh dari bawah, memulai usaha dari skala kecil sebagai pedagang perantara ataupun mulai dari *ponggawa* laut yang kemudian karena memiliki akumulasi modal yang memadai sehingga mampu membiayai sebuah unit penangkapan, maka ia berubah menjadi seorang ponggawa darat. Akhir-akhir ini, tidak kurang orang menjadi *ponggawa* darat dari kalangan pegawai negeri yang tiba-tiba mempunyai modal atau pinjaman kredit dari bank atas pengaturan tertentu. Ia dapat menyediakan modal kerja dan teknologi serta menghimpun sawi untuk bekerja padanya. Para sawi tertarik padanya, bukanlah karena sifat-sifat baik yang melekat padanya, melainkan ia menggunakan wibawa jabatannya dalam birokrasi. Tidak kurang pula orang menjadi ponggawa darat seketika, karena mempunyai hubungan dengan pengusaha non – pribumi sebagai pemberi modal dan fasilitas lainnya.

Adapun *ponggawa* darat muncul secara mendadak ini sesungguhnya bukanlah ia lahir dari suatu preference ideal, karena pemunculannya memang semata-mata terdorong oleh prinsip untung – rugi. Tidak melihat adanya kebersamaan dan saling menghidupkan. Citra dari idealisme pedesaan menjadi ternodai, sehingga banyak tindakan-tindakan ekonomi mereka cenderung bersifat eksploitasi tenaga manusia.

Selanjutnya fenomena yang terkait dengan *ponggawa* laut, dimana ponggawa laut merupakan pemimpin unit operasi

penangkapan yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses yang berlangsung. Bahkan secara ideal seorang ponggawa laut bertanggung jawab terhadap keselamatan unit penangkapan termasuk semua sawi yang terlibat dalam penangkapan. Peran ponggawa laut dalam posisinya sebagai pemimpin yang juga memiliki kekuasaan tersendiri bagi sawi yang dipimpinnya. Seorang dapat menduduki posisi sebagai *ponggawalaut* karena alasan kemampuan yang dimiliki berupa kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam arti dapat menggerakkan semua elemen penangkapan untuk melakukan aktivitas penangkapan dengan baik. Selain itu, seseorang dapat menjadi ponggawa laut karena penguasaan pengetahuan yang sangat memadai berkaitan dengan segala dimensi dunia kelautan. Biasanya seorang dari kalangan *sawi* yang dipercayai menjadi ponggawa laut karena kejujurannya dan pengalamannya serta kemahirannya dalam mengelola seluk beluk kemaritiman serta dunia perikanan. Dari kepercayaan untuk menjalankan perahu bersama seperangkat peralatan tangkap, seorang sawi yang diangkat menjadi ponggawa laut bisa saja berasal dari kalangan sawi yang sudah lama bekerja di bawah asuhan ponggawa darat atau berasal dari ponggawa darat lain. Faktor kejujuran dan kemahiran dilaut menjadi pertimbangan utama bagi pengangkatan tersebut.

Tipologi lain terkait dengan relasi antar pelaku dalam pengelolaan laut atau dunia kenelayan adalah jika ada orang yang mempunyai pengalaman dari kalangan nelayan mandiri yang sudah mempunyai perahu, sedang ia ingin menambah, merubah atau membeli peralatan baru guna mengganti yang sudah rusak/hilang, datang pada ponggawa darat meminta modal kerja dan membuat perjanjian untuk menyerahkan

hasil tangkapannya. Pada saat perjanjian itu dibuat, mulai saat itu pula ia tidak lagi sebagai nelayan mandiri, tetapi menjelma jadi nelayan terikat sampai pada batas waktu tak tertentu , tergantung dari pelunasan modal yang telah diterimanya atau menurut keinginan untuk bermitra dengan pomggawa darat yang lain.

Integrasi antar elemen dalam system kenelayanan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan bersifat structural fungsional. Dalam pandangan struktur terdapat system aturan atau norma yang mengendalikan hubungan antara status, system aturan tersebut menjamin keberlangsungan yang berfungsi antar masing-masing elemen. Sedangkan pandangan fungsional, masing elemen dalam system kenelayanan memainkan peran sesuai dengan status yang diembannya, dengan suatu jaminan bahwa peran-peran tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan system kenelayanan. Dalam pandangan system, bila terjadi perubahan pada salah satu unsur system, maka unsur system lainnya berusaha melakukan penyesuaian, dan pada level tertentu terjadi proses adaptasi, namun pada level yang lain jika proses penyesuaian tidak mungkin dilakukan, maka akan terjadi perubahan pada dimensi system.

4. Sistem Politik Dan Stratifikasi Sosial

1. Pengaruh sistem politik terhadap stratifikasi sosial

Sistem stratifikasi adalah suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat dimana setiap orang atau kelompok orang ditetapkan dalam sebuah status yang kemudian status itu diurut secara berjenjang sesuai dengan yang mana dianggap

lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Asas penentuan mana yang lebih tinggi dibanding dengan lain berdasar atas apa sesuatu yang dianggap bernilai dan berharga oleh masyarakat yang bersangkutan. Itulah sebabnya pada suatu masyarakat tertentu yang menduduki posisis tertinggi dalam stratifikasi adalah kalangan bangsawan, *arung*, *karaeng*, *andi*, *petta* dan sebagainya, ini terjadi karena masyarakat yang bersangkutan memberi bobot nilai tertinggi dan berharga terhadap darah atau keturunan (dalam konteks masyarakat Bugis –Makassar disebut *maddara takku*). Sementara pada masyarakat lain yang menempati posisi paling tinggi adalah *to sugi*, *to kalumannyang* atau penamaan lain dari mereka yang berhasil mengumpulkan atau mengakumulasi materi atau kekayaan, ini terjadi karena nilai materi atau harta benda atau kekayaan diberi bobot lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Demikian halnya terdapat masyarakat dimana posisi tertinggi dalam stratifikasinya adalah mereka yang bergelar kiyai, guru, ulama, anre gurutta atau mungkin pendeta, karena masyarakat seperti ini memberi bobot nilai tertinggi pada ilmu pengetahuan. Kemungkinan lain yang menduduki stratifikasi tertinggi adalah kalangan penguasa, pejabat pemerintah, atau komandan militer, disebabkan karena masyarakat yang bersangkutan memberi bobot tinggi terhadap kekuasaan, pangkat atau jabatan disbanding dengan nilai yang lain.

Masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan pada beberapa decade yang lampau menganut system stratifikasi social dalam tiga tingkatan utama yaitu, posisi tertinggi diduduki oleh kalangan bangsawan, adalah mereka karena keturunan atau karena “darah” sehingga diberitas otoritas

untuk memimpin atau mengendalikan stratifikasi yang ada dibawahnya. Kemudian menyusul stratifikasi “orang biasa” (*tau samara*) adalah mereka yang memiliki dirinya sendiri tidak diperintah oleh orang lain, namun tidak juga memiliki otoritas untuk memerintah orang lain. Selanjutnya stratifikasi ketiga yakni kalangan budak (*ata*) yakni golongan yang karena sesuatu hal sehingga menjadi abdi dari pihak lain. Pada umumnya kaum bangsawan yang berhak memiliki abdi atau budak. Implikasi stratifikasi dalam pola tindak dan perilaku masyarakat selalu menempatkan stratifikasi yang lebih tinggi dengan perlakuan lebih terhormat disbanding dengan yang lain.

Namun dalam perkembangan kekinian model stratifikasi yang berlaku pada masyarakat Bugis-Makassar telah mengalami perubahan yang signifikan karena kalangan bangsawan tidak lagi secara dominan mendominasi posisi tertinggi dalam strata. Dalam hal pemberian penghargaan, kadang-kadang ditemukan orang kaya atau pejabat lebih dihargai dibanding dengan mereka yang memiliki darah biru atau *andi* atau *karaeng*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk stratifikasi yang ada pada masyarakat Bugis-Makassar saat ini lebih dinamis yang berpola pada ideology materialism dan kapitalisme.

Dalam sistem stratifikasi sosial tradisional orang bugis menempatkan status seseorang berdasarkan keturunan, sementara dalam system stratifikasi aktual dimana sistem pemerintah yang membagi masyarakat kedalam unit-unit wilayah dengan raja atau penguasanya masing-masing dua sistem yang menyebabkan tingginya tingkat stabilitas sosial.

Karena mengalokasikan kepada setiap individu tempat yang permanen dalam suatu bagian masyarakat tertentu. Terdapat pula sebuah sistem yang selama berabad-abad memungkinkan terjadinya mobilitas sosial, persaingan diantara mereka yang sederajat, kerjasama antara strata sosial dan integrasi dalam berbagai kelompok, yang biasanya tak memperhitungkan batas wilayah. (Pelras, 2006).

Stratifikasi sesungguhnya berbeda dengan kategori atau golongan sosial, dimana pada masyarakat nelayan kategori sosial, bisa saja berdasarkan peralatan tangkap yang digunakan. Seperti nelayan pancing, nelayan pukat, nelayan bagan dan sebagainya. Bisa pula berdasarkan pemilihan modal dan sarana produksi. Dalam kenyataan, nelayan yang memiliki peralatan tangkap berupa pukat dan perahu motor lebih kaya daripada nelayan yang memiliki alat pancing dengan perahu layar bercadik.

Nelayan bagan, baik bagan tancap maupun bagan perahu (bagan apung), memiliki tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding nelayan pancing. Membuat sebuah bagan, diperlukan modal besar dan biasanya nelayan meminjam kepada orang yang punya modal dengan bunga yang tinggi. Oleh karena itu nelayan yang mandiri berswadaya tidak mampu kalau hanya mengadakan kekuatannya sendiri, sehingga pengadaan peralatan dilakukan dengan membangun kerjasama atau hubungan konsi terhadap ponggawa yang bermodal.

Dengan demikian stratifikasi masyarakat nelayan Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan menjadi nelayan pemilik, nelayan pemilik - penggarap, dan nelayan buru. Stratifikasi

di atas menunjukkan pembagian derajat seorang nelayan berdasarkan pemilikan sarana produksi. Jaringan-jaringan hubungan dalam masyarakat nelayan tampak dengan jelas pada organisasi *pongawa sawi*. Meskipun tidak semua nelayan teridentifikasi dalam system *pongawa sawi*, namun sebagai sebuah system kenelayanan mereka terpengaruh pada pola relasi organisasi ini. Dalam mekanisme kerja mereka berhubungan antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, mungkin dari segi penetapan harga ikan, sewa-menyewa peralatan dan utang piutang serta pembagian keuntungan atau bagi hasil, (Abu Hamid 1984: 88).

Seorang *pongawa* bisa juga menjadi pemuka masyarakat atau pemimpin informal dan menjadi orang terpandang bagi sawinya dan masyarakatnya. Dalam kelompok masyarakat *passompe*, organisasi kelompok profesi terdiri atas; Pemilik perahu yang disebut *pongawa*, ialah orang yang menyediakan perahu layar yang dioperasikan oleh nahkoda bersama beberapa orang sawi. Ada kemungkinan si pemilik sendiri menahkodai perahunya jika ia memiliki pengetahuan dan berpengalaman tentang seluk-beluk pelayaran. Unsur kedua adalah nahkoda, yaitu pemimpin dari sawi dan bertanggungjawab atas keselamatan barang dan penumpang selama pelayaran. Sedangkan unsur selanjutnya adalah sawi yaitu semua orang yang menumpang diatas perahu tersebut. Ada empat macam sawi, yakni sawi tetap, sawi bebas, sawi penumpang, dan orang yang menumpang.

Dalam system relasi kerja antara *pongawa* dengan sawi atau antara pemimpin dengan pengikutnya, seorang *pongawa* atau pemimpin dapat memberhentikan sawi atau pengikutnya

jika tidak memenuhi kewajiban. Namun dalam realitasnya, kedua pihak selalu berusaha menjaga agar hubungan mereka tidak berakhir dengan konflik. Jika seorang pengikut merasa cukup kuat untuk mandiri tanpa perlindungan pemimpinnya, dia berhak memisahkan diri, bahkan dapat menjadi pemimpin pada organisasi kerja yang lain dengan pengikutnya sendiri. Memiliki banyak pengikut dapat meningkatkan status sosial. Seseorang beserta kerabatnya, dan merupakan modal penting menghadapi persaingan, untuk memperoleh kehormatan, jabatan atau kekayaan. Sebaliknya, semakin tinggi gelar atau jabatan, atau semakin melimpahnya harta benda seorang pemimpin, semakin besar pula kebanggaan, manfaat dan keuntungan yang diperoleh anggotanya. Berhubung jabatan politis dalam sistem pemerintahan Bugis-Makassar tidak berdasarkan pewarisan mutlak dan satu-satunya persyaratan suksesi kekuasaan adalah status kebangsawanan dan keanggotaan dalam silsilah yang longgar, malah kadang-kadang dari garis keturunan yang sudah amat jauh. Maka nilai lebih mereka yang bersaing untuk menduduki suatu jabatan akan ditentukan pola peluangnya oleh besarnya jumlah dan pengaruh pengikutnya. (Pelras, 2006 : 207).

2. Hubungan Antara Pemimpin dan Masyarakat

Dari penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa hubungan kerjasama pada masyarakat nelayan tidak hanya antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kenelayanan saja tapi juga melibatkan anggota keluarga mereka. Demikian halnya, kepemimpinan dari suatu system *pongawa-sawit* tidak hanya pada saat berada dilaut tapi juga pada saat berada di darat dengan mengutamakan bagaimana seorang *punggawa*

memiliki sifat dan karakter kepemimpinan sehingga ia dapat dipercaya dan memiliki charisma dan kewibawaan. Bahkan seorang *pongawak* karena kewibawaan dan kharisma yang dimiliki juga bisa menjadi pemuka atau tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian, seorang *pongawa* juga harus menjalin hubungan yang baik bukan hanya kepada *sawinyabeserta* kerabat dan keluarga mereka saja, tapi juga dengan seluruh masyarakat yang berada dalam lingkungan tempat tinggalnya, walaupun mereka bukan bermatapencaharian sebagai nelayan.

Seorang pemimpin yang dekat dengan masyarakat sekitarnya biasanya memiliki pengaruh serta menjadi refresentasi atau mewakili masyarakat yang bersangkutan dalam mengemukakan pandangan dan pandangan berkaitan dengan situasi yang mereka hadapi kepada pihak pemerintah, ysnng kemudian informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula seorang *pongawa* yang bijaksana menjadi penengah atau pemberi penyelesaian (*problem solving*) terhadap sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat, sebelum diselesaikan secara formal melalui aparat penegak hukum. Selain itu, *pongawa* yang memiliki pengetahuan yang luas baik menyangkut tentang kehidupan kemasyarakatan maupun kehidupan keagamaan dipercaya oleh anggota masyarakat sebagai pemimpin upacara adat atau upacara kemasyarakatan yang dilakukan oleh nelayan. Pada saat melakukan upacara adat atau ritual dalam aktivitas nelayan maupun pembuatan perahu, masyarakat yang lain akan turut memberikan peran untuk penyelenggaraan

upacara tersebut. Kepemimpinan seorang ponggawa yang menyebabkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat akan ikut menentukan suksesnya upacara adat yang dilakukan.

Bentuk keterlibatan masyarakat pada suatu upacara adat pada masyarakat maritim bisa dilihat mulai dari persiapan upacara sampai pada penyelenggaraan upacara tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat menjadikan upacara adat yang dilenggarakan tersebut sebagai bentuk liburan bagi mereka. Karena adanya kemeriahan pada acara upacara tersebut, maka upacara dapat berfungsi sebagai media social dalam rangka menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Kaitan antara kepemimpinan dengan keserasian hubungan yang terjaalin dalam masyarakat adalah bahwa, dalam pelaksanaan suatu upacara adat atau pesta nelayan yang kental mewarnai pelaksanaan upacara pada masyarakat nelayan adalah penerapan nilai-nilai kebersamaan kegotong – royongan pada masyarakat tersebut. Juga terjalinnya keakraban yang lebih mendalam dalam suatu masyarakat. Semakin baik kepemimpinan seorang pemimpin, maka akan semakin baik pula relasi social dan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat.

Kepemimpinan yang baik ternyata memiliki sisi timbal balik, bukan hanya kebaikan itu diterima oleh anggota masyarakat dalam bentuk kedamaian dan keserasian social sehingga anggota masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari, melainkan seorang pemimpin yang baik akan mendapatkan imbalan dari masyarakat. Selain dalam upacara adat atau pesta nelayan,

seorang pemimpin yang mempunyai hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya, akan mendapat bantuan secara sukarela dari anggotanya ketika melakukan suatu hajatan. Misalnya pesta perkawinan, menempati rumah baru dan lain-lain. Begitu juga dengan masyarakat yang lain yang ada dilingkungannya. (Pelras, 2006).

Masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan mengenal konsep *matane ri pataneki* yakni konsep yang menjelaskan bahwa jika seseorang mendapat bantuan dari orang lain, siapa dia, maka orang Bugis selalu memikirkan bagaimana membalas kebaikan yang diterima itu. Pada umumnya mereka membalas kebaikan selalu melebihi dari kebaikan yang diterima. Prinsip hidup orang Bugis-Makassar adalah bahwa kau memperlakukan kamu baik, maka kami berusaha membalas kebaikan itu lebih dari apa yang anda berikan, namun jika anda memberikan kami kejelekan maka menjadi kewajiban bagi kami untuk membalas.

5. Sistem Politik dan Masalah Ligitimasi

Bentuk apa pun yang dicapai oleh sistem politik suatu masyarakat, dan bagaimanapun masyarakat ini menangani urusan-urusannya, selalu yang pertama-tama adalah menemukan sesuatu cara agar dipatuhi oleh rakyat. Dalam sistem desentralisasi, dimana setiap orang berperan serta dalam menentukan semua keputusan, loyalitas dan kerjasama diberikan secara suka rela, karena setiap orang dipandang sebagai bagian dari sistem politik yang bersangkutan. Akan tetapi, kalau kelompoknya bertambah besardan organisasinya menjadi lebih formal, masalah-masalah yang berhubungan

dengan usaha untuk mendapatkan dan memelihara dukungan rakyat menjadi lebih besar.

Dalam sistem politik yang tersentralisasi orang lebih banyak bersandar pada paksaan sebagai cara pengendalian sosial. Akan tetapi, ini cenderung mengurangi efektivitas suatu sistem politik. Misalnya tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan kekerasan sering harus berjumlah besar dan dapat menjadi kekuatan politik sendiri. Mengandalkan kekerasan juga dapat menimbulkan kebencian pada pihak yang ditindak dan dengan demikian mengurangi kerjasama. Oleh karena itu, pilihan untuk menyelesaikan masalah pada penegakan hukum negara seperti polisi menjadi pilihan terakhir setelah penyelesaian masalah yang berbasis pada tokoh masyarakat dan pemangku adat gagal mencapai kesepakatan.

Konsep yang juga sangat mendasar dalam proses politik adalah konsep legitimasi, atau hak pemimpin politik untuk memerintah. Seperti kekerasan, legitimasi juga suatu bentuk pendukung sistem politik. Berbeda dengan kekerasan, legitimasi bertumpu pada nilai-nilai yang dianggap paling penting oleh masyarakat tertentu. Legitimasi memberi hak untuk memiliki, menggunakan, dan memberi kekuasaan. Kekuasaan yang didasarkan atas legitimasi dapat dibedakan dari kekuasaan yang didasarkan atas kekerasan : Ketaatan pada yang pertama berasal dari kepercayaan bahwa ketaatan itu 'tepat', sedang tunduk pada kekuasaan yang didasarkan atas kekerasan adalah akibat takut akan kehilangan kemerdekaan, kesehatan fisik, hidup dan harta benda. Dengan demikian kekuasaan yang berdasarkan legitimasi bersifat simbolis dan

tidak tergantung pada suatu nilai yang hakiki, tetapi pada harapan-harapan positif dari mereka yang mengalami dan tunduk kepadanya. Kalau harapan-harapan itu terus-menerus tidak dipenuhi berlakulah legitimasi tokoh berkuasa yang dialami dan dapat pula runtuh (Flavilend : 1988 : 186).

Dimensi berlangsungnya kekuatan politik bukan hanya pada hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai dalam konteks politik sebuah bangsa, melainkan juga pada suatu wilayah masyarakat yang sederhana dan terbatas, bahkan kekuatan politik dan legitimasi berlangsung dalam kehidupan suatu rumah tangga, sungguhpun dalam wujud yang sangat abstrak. Fenomena ini dapat dilihat pada keluarga yang merupakan unit sosial terkecil di desa, ia pula merupakan unit produksi dan konsumsi. Demikianlah nelayan subsistence mengupayakan kegiatan-kegiatan bersama anggota-anggotanya, sedapat mungkin memperoleh hasil maksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Tradisi kerjasama ini mewarnai kehidupan nelayan, sehingga apa saja yang menjadi beban anggotanya turut ditanggung bersama. Sebaliknya pula terjadi, apa saja yang dihasilkan anggotanya turut meringankan yang lainnya. Pengaturan-pengaturan yang berlangsung dalam kehidupan rumah tangga seperti itu diatur dan dikendalikan oleh sebuah kekuatan politik dan legitimasi yang diterima secara bersama.

Aplikasi dari kekuatan politik dan legitimasi pada masyarakat nelayan tampak dengan jelas pada hubungan ponggawa sawi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara ponggawa dan sawi adalah kerjasama yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan

melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan anggotanya tanpa adanya unsur kekerasan atau pun pemaksaan agar tetap bisa bekerjasama. Hubungan kekeluargaan yang terjalin antara pengawa sawi beserta anggota keluarganya dapat juga menempatkan seorang ponggawa menjadi pemuka masyarakat dan pesan-pesan atau perannya di masyarakat tidak hanya didengar atau didukung oleh anggotanya tapi juga oleh anggota masyarakat yang lain. Dalam mempertahankan kekuasaan biasanya akan terkait juga dengan sistem perkawinan. Seseorang yang akan menjadi pemimpin atau ingin tetap berkuasa melakukan hubungan perkawinan dengan pihak-pihak yang memungkinkan untuk seseorang dapat terus mempertahankan kekuasaannya. Misalnya seorang ponggawa menikahkan anaknya atau keluarganya dengan anak dari ponggawa yang lain. Atau memilih seseorang yang mempunyai kekayaan sebagai anggota keluarga melalui perkawinan.

6. Pengendalian Sosial

Pengendalian social atau dikenal dalam bahasa inggris dengan istilah *social control* adalah suatu organ dalam kehidupan bersama yang berfungsi untuk memastikan terwujudnya keserasian dan keseimbangan kehidupan dalam masyarakat, melalui cara mengendalikan dan mengontrol serta memastikan tindakan setiap orang agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dalam suatu tatanan organisasi politik keserasian menjadi penting karena menjamin kemungkinan terwujudnya tujuan bersama. Itulah sebabnya dalam organisasi politik suatu masyarakat selalu berhubungan dengan pengendalian sosial. Organisasi

politik selalu berusaha menjamin agar tindakan orang selalu mengikuti cara-cara yang dapat diterima dan menentukan tindakan yang dapat diambil secara tepat. Dalam masyarakat yang dipimpin dan negara, ada semacam kekuasaan pusat yang berwenang mengatur urusan masyarakat. Akan tetapi dalam kelompok dan suku, orang pada umumnya berbuat seperti apa yang diharapkan tanpa ada campur tangan langsung dari suatu kekuasaan pusat. Sampai pada batas-batas isyu, kritik, ketakutan terhadap kekuatan – kekuatan supernatural dan semacamnya, merupakan alat pencegah yang efektif terhadap perilaku antisosial. (Haviland, 1988 : 171). Dalam masyarakat maritime, selalui melalui bentuk-bentuk penetapan hukun dan norma untuk mewujudkan keserasian social, bentuk pengendalian social dapat pula berupa system kepercayaan yang bersifat supernatural, dalam bentuk adanya sanksi yang mungkin diterima atau menimpa seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan kebiasaan masyarakat. Berbagai bahaya dan kepatalan hidup yang mungkin menimpa seseorang karena pelanggaran terhadap adat dan kebiasaan. Hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat nelayan, jika terjadi kecelakaan di laut yang mungkin membawa resiko kematian atau resiko tidak mendapat hasil tangkapan yang memadai sebagai peringatan atau sanksi dari suatu kekuatan natural atas pelanggaran yang telah diperbuat oleh mereka.

a. Masalah dan Konflik

Pokok masalah dapat dimulai dengan melihat rumah tangganelayan, dalam arti nelayan yang merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu faktor

rendahnya penghasilan nelayan adalah rendahnya produksi perikanan laut dibanding dengan potensi maritimnya, hal ini disebabkan antara lain :Terbatasnya sarana produksi, cara processing dan pemasaran, teknologi dan peralatan tangkap yang masih sederhana, dan terbatasnya modal kerja yang dimiliki oleh nelayan. Hal yang lain adalah belum berfungsinya koperasi dan TPI (tempat pelelangan ikan) secara baik yang belum membuat keuntungan berpihak pada nelayan. Unit kerja ponggawa sawise sebagai organisasi nelayan belum menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Jangkauan jelajah dan daerah operasi masih terbatas. Produksi yang bersifat memusim dan berskala kecil, waktu melakukan operasi penangkapan ditentukan dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca.

Masalah tersebut diatas, adalah bertolak dari sudut pandangan sosial ekonomi yang menaruh harapan bagi nelayan supaya memusatkan tenaga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas mereka. Segala waktu dan kesempatan dimanfaatkan sedemikian rupa, agar peningkatan produksi akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Pandangan seperti ini pada satu pihak, secara teoritis ada kebenarannya, sementara di lain pihak masih perlu dipikirkan masalah mendasar yang melilit kehidupan nelayan sebagai mana realitas yang kita jumpai sekarang.

Cukup mendasar dan rasional pula kalau dikatakan bahwa kaum nelayan itu adalah mereka itu tenaga kerja yang memerlukan gizi yang baik bersama anggota keluarganya. Pemenuhan kebutuhan hidup secara sederhana memerlukan dana yang harus dipersiapkan seperti; untuk pemukiman,

pendidikan dan kesehatan keluarganya. Ponggawa darat sebagai pemilik modal dan teknologi penangkapan dan juga sebagai pemimpin organisasi senantiasa mengawasi jalannya produksi dalam rangka usaha meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Ia harus meniti diatas tradisi masyarakat, yakni mempertebal keyakinan para anggotanya untuk bekerja lebih giat, agar keberhasilan dapat diperoleh dan bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Bagaimanapun berhasil atau tidaknya para *sawi* dalam menjalankan tugas kenelayanan untuk meningkatkan produktivitas, *pongawa* tetap memberikan respon emosional dan bertanggung jawab kepada mereka, agar semangat kerjanya tidak mengendur. Dengan demikian tampak dengan jelas seorang ponggawa dalam struktur masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan memiliki fungsi yang berdimensi luas, karena bukan hanya terkait dengan kegiatan kenelayanan semata, melainkan juga terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan lebih dari itu seorang ponggawa menjadi gantungan bagi *sawi* dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul dalam kehidupan mereka.

Fungsi lain dari ponggawa, terkait dengan politik dan penyelesaian masalah adalah, bagaimana ponggawa mampu mendidik *sawi* dan anggota masyarakat lainnya dalam menegakkan aturan dan kedisiplinan. Melalui cara memberi penghargaan jika nelayan berdedikasi dan berkinerja baik adalah salah satu fungsi dari ponggawa. Sebaliknya pula bila terjadi pelanggaran, dan ketidak disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, misalnya jika seorang *sawi* menjual produksi secara sembunyi-sembunyi kepada orang lain, maka ponggawa

memberikan ganjaran sewajarnya. Ganjaran yang bersifat mendidik dimulai dari hukuman yang ringan yang kemudian berangsur-angsur menjadi ganjaran yang berat. Biasanya jika pelanggaran sudah berulang dilakukan, misalnya telah tiga kali melakukan pelanggaran maka ganjaran berat sudah pantas diberikan. Ganjaran berat bagi sawi yang kedapatan menjual hasil tangkapan secara sembunyi-sembunyi kepada ponggawa darat lain adalah dengan pemecatan. Berbagai masalah yang mungkin terjadi, yang kemudian menimbulkan pelanggaran atau sebaliknya justru menunjukkan kesetiaan dan kejujuran seorang sawi dapat dideteksi oleh ponggawa. Kalau terjadi musibah, misalnya perahunya terdampar di daerah lain, sehingga produksinya dijual di daerah itu, maka harus diperlihatkan kwitansi penjualannya kepada ponggawa darat. Kalau peralatan tangkap hanyut dibawa arus, misalnya rompong yang sudah dipasang menghilang, maka semua anggota menanggung resiko bersama ponggawa darat.

Bila terjadi musim barat, ombak dan angin kencang yang memungkinkan musibah atau produksi akan berkurang, maka di pilih lebih baik tidak melaut daripada melaut yang merugikan. Biaya produks akan lebih tinggi daripada nilai produksi. Armada harus istirahat dan semua resiko ditanggung oleh ponggawa darat.

b. Aturan dan Sanksi

Dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat maritime di Sulawesi Selatan, terdapat sejumlah aturan yang berlaku untuk setiap segmen atau kelompok kegiatan kalautan seperti kegiatan kenelayanan, kegiatan pelayaran, kegiatan perniagaan di laut, bahkan kegiatan budidaya di laut dan

di darat. Seperti pada uraian berikut dijelaskan tentang kelompok masyarakat *passompe* di Sulawesi Selatan saat ini telah mengalami kemajuan. Mereka telah menggunakan mesin sebagai tenaga bantu untuk mendorong perahu disamping bantuan layar. Mekanisme ini menyebabkan tambahan konstruksi dalam pembuatan Phinisi atau Lambo sebagai perahu layar. Namun pola hubungan kerja dan organisasinya masih mengikuti aturan-aturan tradisional. Kelompok kerja *passompe* terdiri atas sejumlah elemen dasar yang secara fungsional menjalankan tugas serta peranan yang berbeda. Organisasi kelompok profesi ini terdiri atas pemilik perahu yang disebut *pongawa*. Dia adalah orang yang menyediakan perahu layar yang akan dioperasikan oleh nahkoda bersama beberapa orang sawi. Adakalanya si pemilik sendiri menahkoda perahunya jika dia berpengalaman tentang seluk beluk pelayaran.

Kemudian nahkoda, yaitu yang memimpin dari sawi dan bertanggung jawab atas keselamatan barang dan penumpang selama pelayaran. Selanjutnya sawi yaitu, semua orang yang menumpang diatas perahu tersebut. Ada empat macam sawi, yakni sawi tetap, sawi bebas, sawi penumpang dan orang yang menumpang empat kategori ini menentukan status mereka dan peranannya dalam pelajaran. Meskipun empat macam sawi, akan tetapi hanya tiga kategori saja yang berhak mendapat predikat sawi, sedang kategori ke empat disebut saja tomanumpang yakni orang yang menumpang.

Setiap orang yang berlayar adalah pedagang. Mereka harus membayar sewa perah. Namun mereka harus pula bekerjasama menjalankan pelayaran. Karena tak seorang

pun harus dilayani. Setiap sawi membawa barang dagangan, karena itu mereka adalah pedagang. Apabila suatu perjanjian disepakati, maka berarti terbentuk suatu jaringan hubungan kerja. Hubungan kerja antara nahkoda dengan para sawinya dalam pula sebagai berikut : Pola 1, ponggawa ikut sendiri berlayar dan berfungsi sebagai nahkoda, serta dibantu oleh sawi. Hal ini terjadi jika dia tidak menemukan orang yang dapat dipercaya melayarkan perahunya. Sedang dia sendiri mahir tentang seluk-beluk pelayaran dan perdagangan. Pola 2, sistem kongsi, yaitu sebuah perahu yang dimiliki oleh beberapa orang , kemudian dipercayakan kepada seorang nahkoda untuk dijadikan sebagai perahu niaga. Pola 3, seorang ponggawa menyerahkan perahunya kepada seorang nahkoda bersama sawi yang telah dipilihnya untuk dijadikan sebagai perahu niaga. Aturan dalam hubungan kerja seperti tersebut diatas turut mempengaruhi sistem bagi hasil, antara tiga komponen passompe. Bagian pendapatan bagi ponggawa, nahkoda / jurangan dan bagian pendapatan bagi para sawi. Kategori status sawi di atas perahu mempengaruhi pula pendapatannya dalam sistem bagi hasil. Seorang sawi bisa saja memperoleh hasil akhir lebih besar, jikalau mereka membawa dagangan lebih besar jumlahnya atau lebih tinggi nilainya. Ditambah pula lebih pintar berdagang di negeri orang.

Sistem bagi hasil terhadap keuntungan yang diperolehnya dalam sekali trip (antara 4 sampai dengan 5 bulan). Perhitungannya, semua keuntungan, dikurangi semua ongkos-ongkos perawatan dan perbaikan perahu selama pelayaran, kemudian di bagi dua. Ponggawa memperoleh 50 persen dan nahkoda bersama sawinya juga 50 persen sebagai bagian passompe. Dari hasil bagian nahkoda, dibagi dua lagi,

yaitu 50 persen untuk nakhoda dan 50 persen dibagi rata untuk beberapa orang sawi. Jumlah sawi dalam sebuah perahu layar, ditentukan oleh besar dan tipe perahu tersebut, apakah tipe phinise atau tipe lambo.

Sementara suami sebagai sawi pada perahu yang sedang berlayar, maka istri-istri mereka jika mengalami kesukaran biaya atau biaya hidup atau biaya yang harus dikeluarkan secara tiba-tiba, mereka datang pada istri nakhoda atau para istri ponggawa minta bantuan. Sebaliknya, jika istri nakhoda atau ponggawa mengalami kesukaran, musibah atau keperluan lain maka ia minta bantuan tenaga dari istri-istri sawi.

Ketergantungan hidup mereka terhadap pelayaran, mendorong melakukan kerjasama, baik di laut maupun di daratan. Pantangan utama setiap passompe, adalah berselisih atau bertengkar di tengah lautan. Pantangan ini pula berlaku bagi istri-istri yang ditinggalkan oleh karena itu, suasana desa dan perahu senantiasa dijalin kerja sama dan kedamaian. Setiap konflik yang akan muncul, harus diredam dan diusahakan menyelesaikan melalui mufakat dan kedamaian. Disinilah letak pentingnya wibawa seorang nakhoda dikalangan sawinya. Ia adalah seorang pemimpin, baik dilaut maupun didarat, senantiasa bersikap mengawasi, menuntun dan melihat keselamatan para sawinya.

Ponggawa yang akan mengangkat seorang nakhoda, bukan saja mengutamakan hubungan kekeluargaan, melainkan kebijaksanaan dan keahliannya tentang pelayaran. Seorang nakhoda harus memiliki sikap pendidik terhadap sawinya. Mengajarkan kepada mereka bersikap waspada, hemat – cermat, ulet dan kerja keras, berani dan jujur, memperkecil

resiko dan mengutamakan kerjasama. Dibelakangi semua itu, mereka berpegang pada sebuah prinsip, yakni prinsip, dahulukan selamat dari pada memaksimumkan penghasilan. Prinsip ini harus dipegang teguh, baik pada waktu sedang dalam pelayaran, maupun pada waktu menginjakkan kaki disebuah negeri asing.

Lapangan hidup sebagai pasompe adalah suatu lapangan yang penuh risiko, penuh bahaya mengintip kematian. Namun budaya mereka memberikan resep tentang bagaimana melakukannya. Kesadaran mereka atas kemungkinan datangnya bahaya angin badai dan ombak di tengah lautan yang tak mungkin diatasi, maka mereka meredam kekuatan dengan sikap ‘menyatu dengan alam’, sikap ini adalah refleksi dari prinsip ‘dahulukan selamat’.

Sistem pengetahuan kemaritiman, secara tradisional diwarisi turun-temurun, adalah suatu usaha dari kebudayaannya untuk melengkapi diri sebagai masyarakat passompe. Sejak mereka berniat untuk berlayar, dipilihlah hari-hari baik guna memulai suatu pekerjaan dan diusahakan menghindari hari buruk, yaitu hari nahasek (nahas). bahkan dianggap, bahwa setiap hari itu mengandung makna sendiri secara kualitatif berbeda dengan hari-hari yang lain, berdasarkan terbitnya bulan (qamariyah). Pada umumnya hari yang baik untuk mulai berlayar ialah hari kedelapan terbitnya bulan. Sistem pengetahuan hari baik dan hari buruk disebut kutika.

Mereka juga memiliki sistem pengetahuan astronomi dan oceanologi tradisional. Pengetahuan ini didasarkan atas gejala-gejala alam, yaitu terbit dan terbenamnya bintang-

bintang, posisi bintang dilangit menurut cycle waktu, gerakan ombak dan tanda-tanda ermukaan laut. Semua gejala – gejala tersebut diketahui melalui *pakkita* (penglihatan), *perengkalinga* (pendengaran), *paremmau* (penciuman), *penedding* (firasat) dan *tentuanag* (keyakinan). Nakhoda yang sudah berpengalaman, mengetahui badai topan yang akan dijumpainya dan tahu adanya batu karang di hadapannya, maka haluan perahu segera dibelokkan. Pengetahuan seperti ini masih dimiliki oleh passompe dewasa ini.

Kepercayaan terhadap penguasa laut yang disebutnya Nabi Hiderek (Nabi Haidir) amat mengikap pikiran mereka. Nabi Hederek dianggap orang yang hidup di air dan di darat, sering kali menampakkan dirinya dipermukaan laut dengan memakai sorban hijau dan dapat menjelingkan dirinya dimana saja dan kapan saja. Kepercayaan itu berakar dalam masyarakat passompe, sehingga mereka seantiasa waspada dan menyiapkan mantra atau sesuatu perbuatan yang mencegah mara bahaya yang timbul. Apabila mereka mengadakan upacara, hasil keuntungan yang diperolehnya selama pelayaran dalam semusim, tidak lupa menyiapkan sajian terhadap Nabi Hideret yang diantar ketengah laut.

Hantu laut yang dipercayai sering membahayakan di tengah laut, amat diketahui oleh passompe. Asal mula hantu laut dari arwah manusia yang mati di laut karena tenggelam atau karena sebab-sebab lain, misalmnya menabrak baru karang, kena angin topan, kena laso – anging (tornado) atau perahunya kena sulili air berputar akibat pertemuan arus). Nakhoda yang berpengalaman, dapat mengusir hantu laut ini cukup dengan membaca mantra tertentu disertai asap

kemenyan. Usaha mencegah bahaya dari peristiwa alam tersebut yang dapat menenggalamkan perahu, resepnya telah memiliki oleh para passompe. Misalnya *laso-anging* (tornado) dapat dicegah atau dihindarkan cukup seorang *sawi* telanjang bulat berdiri dianjungan perahu dengan menunjuk *laso-anging* tiga kali, maka pasti akan menghindar, berarti perahu sudah diselamatkan.

Seorang nakhoda yang dianggap paling ahli dan berpengalaman, jika ia memiliki suatu kepercayaan kuat dan tak diragukan *pake pettu*. Yakni semacam ilmu kebatinan yang menyatu dengan dirinya, dimana disebut *pake-pettu*, oleh karena sekali dipakai maka harus jadi. Digunakan pada saat-saat perahu mengalami ancaman bahaya yang tak dapat dielakkan. Pada saat itu nakhoda mengacungkan tangannya disertai suara keras, menunjuk ombak yang memiringkan perahu, bermain-main di atas geladak, angin kencang memutar-mutar *baluan*, maka pada saat itu pula segera angin dan ombak kembali tenang dan menunjukkan hormatnya kepada sang makhoda. Inilah yang disebut sekali dipakai maka harus jadi. Namun kejadian ini, harus dibuat upacara guna memulihkan apa yang telah dipaksakan oleh nakhoda terhadap kehendak gejala alam daalam pelajarannya. (Abu Hamid : 2004, 51-62).

Masyarakat nelayan yang menggunakan kebudayaan sebagai pedoman dalam beraktivitas tentunya akan menggunakan aturan–aturan dan sanski berdasarkan budaya yang mereka miliki. Sebelum mereka melakukan aktivitas melaut, mereka biasanya melakukan ritual-ritual tertentu dan jugatidak melanggar pantangan–pantangan yang mereka

percaya dapat mendatangkan musibah ataupun menyebabkan hasil tangkapan berkurang.

Aturan dan sanksi yang digunakan berdasarkan pada sistem pengetahuan yang mereka miliki dan sistem kepercayaan yang mereka anut dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan. Sanksi yang diperoleh juga biasanya berupa musibah atau malapetaka jika mereka melanggar pantangan-pantangan yang mereka percaya.

7. Kesimpulan

Sulapa eppa (segi empat) adalah empat sifat yang mendominasi mentalitas orang Bugis yang harus dimiliki setiap pemimpin yang baik. Selain berasal dari keturunan yang tepat, orang yang ingin menjadi pemimpin yang baik harus pula *warani* (berani), *macca* (cerdas), *sugi* (kaya), dan *panrita* (saleh). Pada masyarakat maritim harus membekali diri dengan pengetahuan yang banyak tentang kemaritiman dan masalah-masalah kelautan. Di samping itu ia juga harus mengerti petuah-petuah dan pantangan-pantangan yang menjadi kepercayaan masyarakat nelayan.

Hubungan kerjasama yang baik antara *pongawa* dan *sawit* tidak hanya pada saat berada di laut tapi juga di darat. Dasar kerjasama ini berhubungan dengan sistem kepemimpinan yang ada pada masyarakat maritim yang mempunyai prinsip dahulukan selamat. Juga berpengaruh pada legitimasi dan kekuasaan yang dimiliki pemimpin. Stratifikasi sosial masyarakat nelayan biasanya didasarkan pada kemandirian seorang nelayan dalam melakukan aktivitas sebagai nelayan.

Masalah-masalah yang dihadapi nelayan diatur berdasarkan sistem kepercayaan dan pengetahuan masyarakat nelayan dan sanksi yang mungkin dari terima juga akan berhubungan dengan adanya pelanggaran dari pantangan – pantangan yang dipercaya.





SISTEM TEKNOLOGI MARITIM ORANG BUGIS

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dipandang sebagai makhluk yang memiliki ketergantungan dengan makhluk manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Secara sederhana, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki kesempurnaan sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang berkembang sesuai dengan kondisi realitas dalam kehidupan. Realitas yang dipandang manusia adalah bagaimana perkembangan pengetahuan manusia dalam menyesuaikan dengan kebutuhan yang senantiasa mengandung nilai dalam perkembangan peradaban.

Perkembangan pengetahuan manusia, pada dasarnya merupakan sumber terciptanya ilmu pengetahuan teknologi. Pada dasarnya pengetahuan teknologi merupakan suatu bentuk pemahaman manusia akan suatu cara pemenuhan kebutuhan manusia dalam menciptakan kehidupan yang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebagai makhluk yang berpengetahuan.

Penjelasan tentang kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan diantara lain : bahwa, manusia dalam pengertiannya, merupakan makhluk yang memiliki keinginan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dalam pengertiannya secara luas bahwa manusia memang pada hakekatnya memiliki kekuatan yang mampu dalam pemenuhan hidup, namun pada saat bersamaan tenaga dan kemampuan manusia terbatas atas kerja maupun aktifitasnya. Persoalan inilah yang secara jelas dapat menciptakan rasa kegelisahan dan ketidakpuasan manusia dalam hal memproduksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang dipandang bahwa, segala hasil produksi yang dilakukan tidak menciptakan kepuasan didalamnya. Manusiapun sadar atas keterbatasannya dalam pemenuhan kebutuhan, dengan keterbatasan inilah, manusiapun mencari pemahaman tentang keterbatasan tersebut, dan mencari jawaban atas masalah tersebut. Kunci dari jawaban tersebut adalah bagaimana memperoleh pengetahuan manusia dengan rasa keingintahuan, proses inilah disebut dengan proses belajar manusia untuk mencapai pemahaman. Proses belajar inilah yang merupakan kunci terciptanya pengetahuan manusia dalam pemenuhan hidup, secara sederhana dapat diartikan bahwa jika halnya manusia memiliki pengetahuan maka secara langsung manusia dapat mengapresiasi mengaktualisasikan, dan menginterpretasikan terhadap lingkungannya baik secara tindakan perilaku maupun berupa benda atau hasil pengetahuan. Ilmu pengetahuan teknologi tidak terlepas dengan budaya manusia, sehingga pengetahuan manusia merupakan kunci dalam penciptaan ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan sistem pengetahuan manusia, dan faktor yang paling mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi adalah faktor

kesadaran diri, sifat, atas rasa ketidakpuasaan manusia dengan apa yang mereka miliki. Faktor inilah yang merupakan sumber utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

Kelahiran dan perkembangan IPTEKS, secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan yang bersumber dari pengetahuan manusia. Dalam hal ini bahwa perkembangan pengetahuan manusia yang disesuaikan dengan realitas kehidupannya akan menciptakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang saya pahami dan yakini bahwa definisi atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci dalam menjawab kelahiran dan perkembangan IPTEKS itu sendiri. Dalam pemahaman saya bahwa Ilmu pengetahuan disini dipandang sebagai hasil pemahaman manusia tentang suatu realitas kehidupan, teknologi merupakan hasil dari pemahaman atau pengetahuan manusia yang diapresiasi melalui suatu tindakan benda atau materi dalam pemenuhan kebutuhan.

Dengan definisi dan pengertian diatas maka jelas dapat dikatakan bahwa kelahiran dan perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi merupakan hasil dari perkembangan pengetahuan manusia. Namun yang perlu diingat disini bahwa perkembangan IPTEKS tidak akan pernah berhenti disaat manusia masih memerlukan pengetahuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Disaat manusia mendapatkan pengetahuan baru maka secara langsung manusia itupun menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dalam menerapkan pengetahuan mereka dengan menyesuaikan kondisi, dan peradabannya.

1. Konsep Masyarakat Bahari

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang berdiam dalam suatu lingkungan hidup yang

saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia pada kenyataannya memiliki suatu kegiatan dalam lingkungan tersebut, sehingga pemahaman tentang masyarakat tergantung dari lokasi dan tempat individu maupun kelompok berdiam. Seperti, sekelompok orang atau masyarakat yang hidup di daerah yang mempunyai banyak sumber kehidupan seperti masyarakat yang hidup sekitar wilayah pertanian, maka disebut masyarakat agraris dan sama halnya dengan masyarakat yang hidup bergantung dengan hasil kekayaan sumber daya laut, maka masyarakat tersebut disebut dengan masyarakat bahari.

Kehidupan masyarakat bahari tentu sangat tergantung dengan namanya laut, yang dimana merupakan sumber kelangsungan hidupnya. Masyarakat bahari rata-rata merupakan seorang yang bermata pencaharian sebagai seorang nelayan dan pelayar. Dalam pemahaman kami, masyarakat bahari terbagi menjadi dua kelompok, dimana masyarakat yang terjun langsung dengan kehidupan alamnya dan masyarakat yang bersifat tidak langsung. Masyarakat bahari yang dilihat secara langsung adalah masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan alamnya, seperti nelayan, dan pelayar, dimana nelayan dan pelayar tersebut secara langsung mengambil sumber daya laut dan beberapa hasil kekayaan lainnya kemudian membudidayakan hasil laut yang didapatkan. Sedangkan, masyarakat bahari yang dilihat secara tidak langsung, adalah seseorang yang hanya berdiam dalam lingkungan bahari atau lingkungan lainnya tetapi terikat dengan proses kerja masyarakat nelayan, seperti seseorang yang menanamkan modal kepada pengusaha

laut untuk melengkapi aktifitas dengan sarana teknologi yang lebih maju.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, masyarakat bahari merupakan kesatuan hidup manusia yang sebagian besar atau sepenuhnya menggantungkan kehidupan ekonominya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya hayati dan non hayati laut, serta jasa-jasa laut yang bercirikan dan berpedoman dari kebudayaannya.

2. Konsep Budaya Bahari

Kebudayaan bahari dipahami sebagai sistem-sistem gagasan/ide, perilaku/tindakan dan karya/sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat pendukungnya (masyarakat bahari) dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan merakayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya.” Seperti halnya budaya dari kelompok segmen-segmen masyarakat lainnya di darat, budaya bahari juga dicirikan dengan sifat-sifat kreatif dan dinamikanya secara terus-menerus, cair, tersebar, homogen atau berbeda-beda, hegemoni, bertahan, reformulasi, terbuka, parsial, melampaui batas-batasnya, bertahan dan berubah (Sanjek& Borofosky, dalam Lampe 2005). Konsep tersebut mengasumsikan bahwa budaya, termasuk budaya bahari, mencakup bentuk-bentuk tradisional karena bertahan dan modern karena berubah. Salah satu sumber utama dari dinamika ialah kreasi internal adopsi inovasi dari luar yang ditunjang dengan sifat-sifat budaya itu sendiri.

Kebudayaan bahari terdiri dari komponen-komponen/aspek-aspeknya yang saling terkait membentuk suatu

keseluruhan. Diasumsikan bahwa keterlibatan dan hubungan manusia didasari dengan pengetahuan dan gagasannya tentang arti dan fungsi (konsumtif dan non konsumtif) dari sumberdaya dan lingkungan laut bagi kehidupannya. Gagasan yang muncul kemudian ialah diperlukannya kerjasama dan kelembagaan untuk mengusahakan berbagai keperluan mutlak (sarana/prasarana fisik berupa perahu/kapal, sarana eksploitasi sumberdaya, modal, sarana perlengkapan lainnya). Pokoknya pola pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut melibatkan sistem-sistem budaya (kognitif), kelembagaan (organisasi/kelompok, aktivitas, aturan), sarana dan prasarana pengangkutan dan teknologi eksploitasi sumberdaya (fisik/material).

a. Sistem Gagasan/Ide

Gagasan budaya nelayan tentang kondisi laut dan sumberdaya adalah bervariasi antara lain seperti isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua, sumberdaya laut untuk semua tetapi hanya sebagian bisa memanfaatkannya, laut luas tetapi tidak semua bias dimasuki. Gagasan bahwa isi laut melimpah dan diperuntukkan bagi semua adalah salah satu gagasan yang melekat dalam pandangan budaya bahari sebagian besar nelayan Bugis, Bajo, Makassar, Buton, Mandar dan mungkin juga Madura, kelompok-kelompok tersebut menurut Horidge (dalam Lampe, 2007) merupakan kelompok-kelompok pewaris budaya maritim dari Melayu-Polinesia spesialis pembuatan dan pecinta perahu sejak 2000 tahun yang lalu. Beberapa nelayan Bugis dan Pulau Sembilan mengungkapkan gagasannya sebagai berikut:

Pertama, ikan di laut dalam kondisi melimpah “tidak akan habis sepanjang/selama daun-daun pohon di darat belum habis”. Laut luas dengan segala isinya tidak ada orang tertentu yang memilikinya, ini diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan doa dan usaha keras. Dengan teknologi eksploitasi apa saja tidak akan menghabiskan isi laut, kecuali hanya mengurangi populasinya. Usahakan dan manfaatkanlah rahmat/berkah atau pemberian Yang Maha Pencipta tersebut, janganlah memancing ikan-ikan kecil di pinggir laut, tetapi pergilah ke laut dalam menangkap ikan agar usahanya berkembang.

Sumberdaya laut untuk semua, tetapi hanya sebagian bisa memanfaatkannya dianut oleh komunitas-komunitas nelayan Bugis, Makassar, Bajo dan Buton. Ini bisa ditunjukkan pada sekurang-kurangnya tiga kategori akses pemanfaatan sumberdaya dimiliki kelompok-kelompok nelayan tertentu, yaitu 1) akses nelayan tertentu bernasib baik pada pemanfaatan sumberdaya laut, 2) akses sebagian nelayan pada pemanfaatan sumberdaya laut di lokasi-lokasi yang medannya sulit dan dianggap keramat, dan 3) kontrol dan dominasi para ponggawa darat, pedagang lokal, pedagang atau pengusaha besar/bos terhadap masyarakat nelayan dan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada yang keluarga-keluarga nelayan pada umumnya peroleh.

“Laut luas, tetapi tidak semua bisa dimasuki” merupakan suatu kesadaran atau pandangan budaya bahari dianut sebagian masyarakat nelayan Bugis, Makassar dan Bajo justru tumbuh dari pengalaman-pengalaman nelayan berhadapan dan bersentuhan dengan institusi-institusi pengelolaan

pemanfaatan sumberdaya laut, baik dipraktekkan dalam dan dalam perairan Sulawesi Selatan pada umumnya, maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia sejak dua atau tiga dasawarsa terakhir. Institusi-institusi dimaksudkan seperti pemilikan individual/privat, komunal, dan kontrol/penguasaan negara, dan lain-lain.

Sistem keyakinan atau kepercayaan. Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya perikanan, di banyak tempat di dunia nelayan mempraktekkan keyakinan-keyakinan dari agama atau kepercayaan yang dianutnya sebagai mekanisme pemecahan persoalan-persoalan lingkungan fisik dan sosial yang dihadapi sehari-hari.

b. Teknologi Kebaharian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.508 pulau dan terkenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*bioversity*) laut terbesar di dunia karena memiliki ekosistem-ekosistem pesisir: hutan mangrof (*mangrove ecosystem*), terumbu karang (*coral reef ecosystem*) dan padang lamun (*sea grass beds ecosystem*) yang sangat luas dan beragam. Sumberdaya ikan diperkirakan terdapat kurang lebih 7000 jenis ikan terkandung dalam perairan pesisir dan dalam Indonesia. Perairan Indonesia merupakan laut tropis subur mengandung stok sumberdaya biotik melimpah yang dapat dieksploitasi hingga 6 juta ton per tahun tanpa membahayakan kondisi keberlangsungan sumberdayanya, demikian juga sumberdaya tidak dapat pulih seperti minyak bumi dan gas mineral dan bahan tambang lainnya, masih banyak yang belum terjamah

dan dimanfaatkan secara optimal (Lampe, 2005). Dalam rangka memanfaatkan lingkungan laut, masyarakat nelayan mengembangkan seperangkat kebudayaan dalam bentuk idea, gagasan, aktivitas atau tindakan, serta teknologi yang berupa materi dan cara-cara atau strategi tertentu penerapan ilmu pengetahuan yang mereka miliki (Abu Hamid dalam Naping, 2004). Pemanfaatan konsep teknologi sebagai pusat orientasi yang mengarahkan pembahasan ini, mengacu pada pemahaman operasional bahwa teknologi, khususnya teknologi penangkapan harus dijelaskan dan dipahami dengan menekankan pada bagaimana anggota masyarakat memberi tanggapan dan harapan, serta bagaimana anggota masyarakat memberi tanggapan dan harapan, serta bagaimana mekanisme pemanfaatannya seperti yang dilakukan masyarakat itu sendiri (Abu Hamid dalam Naping, 2004).

Teknologi pada hakekatnya dipahami sebagai sebuah cara mengerjakan suatu hal (Masher, 1970: 127), yaitu cara yang dipakai manusia untuk beberapa kegiatan dalam kehidupannya. Teknologi terutama terlihat dalam pendayagunaan potensi sumber daya yang ada di sekitar manusia. Oleh karena itu, teknologi merupakan satu diantara sekian banyak hasil budaya manusia dan merupakan cermin daya kreatif dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pengertian tersebut berdasarkan pada pemahaman teknologi terlihat sebagai penerapan gagasan atau pengetahuan, pengertian, dan keyakinan seseorang dalam pendayagunaan sumber daya alam yang dikenalnya, yang umumnya berada di sekitarnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memecahkan masalah. Jadi, teknologi sebagai buah dari budi

dan daya seseorang atau masyarakat nelayan merupakan bayangan kebudayaan suatu masyarakat nelayan yang menghasilkannya. Teknologi dapat dijadikan ukuran atau cermin tingkat kebudayaan dan kreativitas suatu masyarakat nelayan. Disamping itu teknologi juga dipahami sebagai sebuah stimulan bagi terjadinya sejumlah perubahan, termasuk perubahan sosial budaya masyarakat. Pemahaman konseptual seperti ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh Ogburn (dalam Naping, 2004) yang mengatakan bahwa teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan. Setiap teknologi secara bertahap menciptakan lingkungan hidup manusia yang sama sekali baru. Teknologi adalah kekuatan yang sangat besar dan tidak terbandung pengaruhnya terhadap perubahan (Lauer dalam Naping, 2004).

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, serta untuk memudahkan pembahasan tentang teknologi bahari masyarakat nelayan, maka teknologi dalam suatu masyarakat nelayan dapat diamati dari keadaan sumber daya alam dan pemanfaatannya, bahan baku yang tersedia, peralatan yang dipakaidarikeadaansumberdayaalamyangada,kemungkinan sarana untuk menghasilkan peralatan tersebut, serta matapencaharian masyarakat nelayan tersebut. Teknologi bahari masyarakat nelayan Pancana lebih mudah ditelusuri dari sejarah peralatan dan matapencaharian mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam dilingkungan mereka. Pada dasarnya keluarga masyarakat nelayan Pancana sejak zaman bahari telah melakukan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat nelayan Pancana juga menguasai bermacam-macam teknologi, teknologi yang

dimaksud disini meliputi 1) teknologi yang digunakan dalam aktivitas penangkapan, 2) teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung transportasi, 3) teknologi lain yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kegiatan penangkapan dan distribusi, serta 4) semua cara-cara yang secara konsisten digunakan kaum nelayan dalam aktivitas kenelayanan.

B. Teknologi yang digunakan oleh masyarakat nelayan

a. Nelayan dan Teknologi Penangkapan Ikan

Usaha modernisasi dalam bidang perikanan, dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan rakyat melalui introduksi teknologi baru yang mencakup program motorisasi. Termasuk juga didalamnya pembinaan keterampilan melalui penyuluhan-penyuluhan bantuan permodalan, dan perbaikan pola pemasaran lewat pendirian tempat pelelangan ikan (TPI). Dengan usaha-usaha ini diharapkan potensi sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pancana. Dalam penerapan teknologi baru ini, diharapkan para nelayan Desa Pancana dapat melipatgandakan hasil produksinya, meningkatkan kemampuannya untuk mengolah atau memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia, dan juga melipatgandakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sumantri dalam Suwitha, 1991). Untuk itulah diperlukan manusia pengelola yang lebih maju, manajemen dan teknologi yang lebih efektif, dan suasana kegiatan yang lebih menguntungkan. Modernisasi dalam bidang ini menjadi sesuai dengan pendapat nelayan di Desa Pancana adalah

pergantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih modern (Schoorl dalam Suwitha, 1991). Telah dikatakan bahwa jenis perikanan usaha di Desa Pancana pada umumnya merupakan usaha utama dalam skala besar. Ia merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Pada sebagian golongan nelayan tidak ditemui kehidupan yang serba berkecukupan (mewah). Mereka pada umumnya hidup dalam keadaan yang sederhana, bahkan terdapat diantaranya yang hidup miskin dan serba kekurangan.

Umumnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan adalah lelaki. Pendapatan mereka relatif rendah. Dengan usaha ini, mereka mengharapkan memperoleh penghasilan yang cukup, guna menunjang kelangsungan hidup keluarga. Nelayan Desa Pancana masih tetap sebagai nelayan murni, belum melakukan diversifikasi. Nelayan di daerah ini hanya menangkap ikan saja, tidak pernah mencoba usaha sambilan lainnya.

Di daerah ini selain suami yang bekerja di laut, istri juga terkadang bekerja di sektor lain. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa menggantungkan hidup dari hasil perikanan ternyata tidak mencukupi dan sering tidak menentu. Pada musim ikan antara April-Oktober penghasilan para nelayan mencukupi antara April-Oktober penghasilan para nelayan mencukupi, tetapi di luar bulan-bulan tersebut para nelayan sudah sering berhutang pada punggawa.

Dari seluruh nelayan di daerah ini, tampaknya sebagian kecil saja yang memiliki unit pengangkatan ikan modern secara lengkap (penangkapan ikan secara sistem motorisasi).

Sebagian besar lainnya tidak dapat memiliki sebuah unit peralatan penangkapan ikan modern yang lengkap. Bagi mereka ini biasanya ditempuh melalui cara patungan (kerjasama sama dalam pemilikan).

Sistem patungan untuk memiliki sebuah unit penangkapan ikan, dapat dilakukan oleh satu keluarga. Umpamanya, bapak yang memiliki perahu, anaknya melengkapi dengan mesin tempel, sedangkan saudaranya yang lain mengusahakan jaring nilon sebagai sarana penangkapan ikan. Pemilikan secara patungan, selain dapat dilaksanakan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga, dapat pula dilakukan oleh sesama nelayan. Sistem patungan tidak hanya berlaku untuk pemilikan satu unit saja, melainkan berlaku dalam hal ingin memiliki satu sub unit. Misalnya untuk memiliki sebuah perahu, nelayan-nelayan dapat memperoleh dengan cara patungan. Dalam hal ini patungan biasanya berupa pemasukan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara mereka.

Di Desa Pancana terdapat beberapa kategori status nelayan, antara lain: 1) nelayan yang memiliki perahu dan peralatan penangkap ikan modern lengkap, 2) nelayan yang mempunyai perahu, tetapi tidak memiliki peralatan penangkap ikan, 3) nelayan yang tidak memiliki perahu, tetapi mempunyai alat penangkap ikan, 4) nelayan yang tidak mempunyai perahu dan peralatan penangkap ikan. Dari keempat golongan tersebut kelompok ketiga dan keempatlah yang memiliki jumlah yang terbanyak di Desa Pancana, sedangkan mereka yang tergolong dalam kelompok satu dan dua, yaitu yang memiliki peralatan lengkap atau minus alat

penangkapannya lebih kecil jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemilikan unit penangkapan ikan di Desa Pancana masih rendah. Kecuali itu, nelayan yang tergolong dalam kelompok satu, tidak semua peralatan merupakan milik mutlak. Beberapa orang diantara mereka pemilikannya masih berstatus kredit, namun ada kalanya beberapa nelayan berhasil memiliki semuanya. Jadi program modernisasi dan motorisasi di bidang perikanan, masih sangat diperlukan campur tangan pemerintah, terutama mengenai kredit investasi dan pemilikan peralatan di bidang perikanan.

Alat untuk menangkap ikan yang digunakan, seperti jaring ikan besar (jaring gae), gelnet (jaring nilon), jaring udang (klitik), jaring ikan kecil (pancing), bagang, dan lain-lain. Dari beberapa macam alat itu, jaring gae adalah alat penangkap ikan yang paling tinggi produktivitasnya, jika dibandingkan dengan penggunaan peralatan lain.

b. Penyebaran Teknologi Baru Dari Lapisan Atas Ke Lapisan Bawah

Sejak pelita III, khusus untuk nelayan, pemerintah sudah mencanangkan untuk menerapkan sistem modernisasi di kalangan nelayan agar bisa meningkatkan produksi ikan. Di Desa Pancana modernisasi perikanan seperti motorisasi penangkapan ikan dan penggunaan jaring nilon (nilonisasi), sudah mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. Bahkan, para nelayan sudah mencoba sejak tahun 1975 berdasarkan pada cerita-cerita nelayan di Kalimantan. Usaha pemerintah untuk menggalakkan motorisasi mendapat tanggapan positif dan menggembirakan dari sebagian besar masyarakat Desa Pancana. Program pemerintah itu mendapat tanggapan

positif dari masyarakat, mengingat ikan merupakan sumber kehidupan yang utama bagi sebagian masyarakat Desa Pancana. Hal ini disebabkan oleh karena pertanian tidak bisa dikembangkan lagi, mengingat jumlah lahan pertanian sangat terbatas. Untuk meningkatkan hasil ini, seperti halnya modernisasi pertanian dalam masyarakat agraris (Birowo dalam Suwitha, 1991).

Penerimaan teknologi baru di Desa Pancana tidak terjadi secara bersamaan. Nelayan yang satu lebih cepat menerima daripada nelayan lain. Pada mulanya hanya beberapa orang yang mencoba menerapkan teknologi di Desa Pancana, tetapi lambat laun menjadi semakin meningkat. Program baru itu diterima pertama-tama oleh nelayan yang berasal dari lapisan atas. Setelah mereka berhasil kemudian diinformasikan kepada petani lain agar mereka mau memanfaatkan teknologi baru. Petani yang kurang mampu atau miskin biasanya menerima program teknologi baru secara lambat (Sayogyo dalam Suwitha, 1991).

Ada suatu masalah umum yang timbul, hanya mereka yang berkecukupan yang dapat mengambil keuntungan dari kesempatan baru itu. Teknologi untuk pembangunan perikanan memerlukan biaya yang mahal, seperti jala, motor, kapal/perahu, sehingga nelayan kecil tidak dapat menjangkau. Di samping itu peralatan yang baru lebih cepat rusak dari pada peralatan lama (tradisional) (Pollanac dalam Suwitha, 1991).

Penyebaran teknologi baru dikalangan nelayan Desa Pancana menggunakan nelayan maju sebagai partisipan. Tokoh-tokoh ini langsung berhubungan dengan pihak yang berwenang dalam bidang perikanan, seperti dinas

perikanan, PPL bidang perikanan, dan KUD. Tokoh-tokoh ini diharapkan dapat menyebarkan inovasi tersebut pada nelayan di Desa. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai cukup pendidikan dan disegani oleh masyarakat, serta bisa memberikan tanggapan yang baik terhadap perbaikan produksi nelayan miskin (Sayogyo dalam Suwitha, 1991).

C. Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

1. Aspek Organisasi Sosial

Perubahan nyata yang terjadi pada kehidupan sosial nelayan Desa Pancana terlihat pada sistem kehidupan yang modern. Cara-cara hidup sosial terutama dalam bentuk organisasi atau kelompok nelayan tidak kelihatan terlalu menonjol. Aktivitas kehidupan nelayan tradisional dalam kehidupan sosial tradisional, aktivitas kerja ke laut hanya dilakukan dalam bentuk *kerjasama* yang meliputi anggota dalam lingkungan keluarga. Sebagai kesatuan produksi atau dengan jumlah anggota 2-3 orang, karena adanya hubungan tempat tinggal yang dekat. Hal ini erat kaitannya dengan sistem menangkap ikan yang pada hakikatnya masih menggunakan teknologi yang sederhana, dan pada umumnya dapat diusahakan sendiri oleh nelayan, baik dalam pemilikan maupun dalam pemakaiannya. Menurut Koentjaraningrat (2004) bahwa sistem mata pencaharian hidup sebagai nelayan sangat tergantung pada perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dengan munculnya modernisasi perikanan terutama melalui pengenalan peralatan modern, maka kehidupan nelayan tradisional telah pula mengalami perubahan yang mengarah ke pembaharuan, melalui pergantian teknik

produksi dari cara-cara tradisional menuju cara-cara modern. Cara-cara melakukan pekerjaan ke laut yang pada mulanya dilakukan secara individu atau kerjasama dalam lingkungan keluarga yang terdiri atas 2-3 orang, kini berubah menjadi kelompok dan lebih besar dan lebih permanen, dengan anggota kelompok berkisar 8-15 orang. Dalam melakukan pekerjaan ini dibagi dalam unit-unit kerja, setiap unit terdiri atas 6-12 orang dengan alat penangkapan prosesien. Sampai saat ini, kelompok-kelompok nelayan masih tergabung dalam organisasi tradisional punggawa: sawi. Hubungan punggawa sawi ini dan juga TPI berperan untuk mengkoordinasikan hal pemasaran atau pun keperluan-keperluan lainnya. Sistem pembagian hasil antara kelompok punggawa dengan sawinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hubungan ini, yakni dari jumlah penjualan melalui pelelangan setelah dikurangi biaya eksploitasi/operasi, kemudian dibagi rata diantara anggotanya. Sementara itu, tidak terlihat adanya pengaruh yang bergerak terhadap organisasi tradisional yang bergerak dalam usaha perikanan, karena pada mulanya (sebelum adanya modernisasi) bentuk organisasi sosial masih dalam lingkup keluarga. Dalam hubungan ini tampak, bahwa modernisasi perikanan tampaknya dapat mengubah pola tingkah laku nelayan melalui hubungan interaksi yang lebih kompleks. Diperkenalkannya mesin perahu (motorisasi perahu) membutuhkan pekerjaan tambahan yang berupa ahli mesin. Ahli mesin menambah kompleksnya organisasi dalam pengkapan ikan ini.

Hubungan punggawa-sawi merupakan bentuk kesatuan kerja bertujuan mencari dan menangkap ikan ke laut. Keanggotaan organisasi ini \pm 15 orang dan merupakan

kesatuan kerja dari kaum kerabat keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Sebab pada hakekatnya baik keluarga inti maupun keluarga luas merupakan kelompok sosial yang menata ekonomi rumah tangga yang merupakan kesatuan yang produktif. Hal seperti ini tampak dalam kehidupan penduduk baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun dalam aktivitas menangkap ikan ke laut, mereka akan mengutamakan kerabat keluarga terdahulu.

Dengan masuknya kredit ke pedesaan (KIK) terlihatlah pengaruh terhadap kehidupan organisasi tadi berubah menjadi suatu kesatuan kerja yang lebih modern yang disebut dengan kelompok. Kelompok ini keanggotaannya lebih besar dan lebih luas, yaitu terdiri dari 3-4 orang dan bukan hanya terbatas pada kaum kerabat, melainkan orang lain bukan kerabat pun sudah masuk dalam kelompok-kelompok kerja baru ini. Terbentuknya kelompok kerja ini adalah atas dasar alasan ekonomi yang itu dapat dikembalikan pada proses masuknya KIK. Karena KIK ditangani pihak Bank dan Bank menuntut adanya jaminan, maka mereka menggabungkan diri sesama nelayan. Mereka yang mempunyai kapal (perahu) bergabung dengan mereka yang mempunyai jaringan atau motor untuk dijadikan jaminan atas kredit yang akan diterimanya. Tiap-tiap gabungan akan menerima suatu paket kredit yang pada akhirnya merupakan kesatuan-kesatuan kerja baru yang disebut kelompok.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi perikanan yang akan diuraikan di Desa Pancana mencakup pengertian: Bagaimana proses produksi ikan, distribusinya, dan konsumsi yang dijalankan lingkungan

masyarakat tersebut. Sistem ekonomi di Desa Pancana yang merupakan desa pantai berjalan sesuai keadaan. Seperti misalnya: sumber produksi ikan yang utama yang berasal dari Desa ini. Demikian juga distribusi ke tempat lain dan distribusi barang-barang kebutuhan lain ke Desa Pancana lewat perairan sekitar dan juga lewat darat. Demikian juga pola-pola konsumsi yang ada pada masyarakat yang sangat tergantung dan sesuai dengan pola konsumsi yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya.

3. Aspek Permodalan

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam usaha pengembangan perikanan rakyat adalah lemahnya permodalan untuk investasi. Nelayan sebagai bagian dari masyarakat selalu berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam mengikuti perkembangan modernisasi perikanan terutama untuk peningkatan produktivitas kerja melalui penggunaan peralatan modern, seperti mesin tempel sebagai alat motorisasi, porsensine, perahu dan lain-lain, sedikit-tidaknya menuntut adanya kebutuhan modal uang relatif lebih besar dibandingkan kebutuhan modal dalam pemakaian peralatan tradisional.

Untuk memahami kebutuhan modal, nelayan berusaha mendapatkannya, baik melalui fasilitas KIK yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun dengan cara lain. Karena pemanfaatan teknologi baru di samping bertujuan meningkatkan penghasilan nelayan itu sendiri, sekaligus untuk mendukung program pembangunan di tingkat regional (desa) ataupun nasional. Adanya kebijaksanaan perkreditan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu usaha

ekonomi lemah, terlihat sebagian besar nelayan yang pernah melakukan peminjaman modal dengan memanfaatkan program KIK yang disalurkan oleh BRI. Realisasinya kadang-kadang melalui kelompok atau individu tergantung dari jumlah permohonan. Adanya kebutuhan modal yang lebih besar dapat mengarahkan nelayan untuk berpikir ekonomis, karena mereka harus berhadapan dengan pola perhitungan ekonomi yang lebih terinci, sekaligus dapat mengubah sikap dan perilaku nelayan terhadap lingkungan yang lebih luas melalui realisasi lembaga-lembaga yang terkait, seperti BRI, Dinas Perikanan, dan lain-lainnya.

Aspek modal sangat menentukan maju mundurnya nelayan di samping alat tangkap yang dipergunakan. Dalam banyak contoh, hanya mereka yang mempunyai modal kuat yang mengambil keuntungan dan kesempatan baru ini. Apalagi akhir-akhir ini meningkatnya biaya alat-alat produksi dan peralatan baru lebih cepat rusak (Pollanac dalam Suwitha, 1991).

- ***Proses Produksi***

Sebagai suatu daerah pemukiman nelayan, mata pencaharian utama dari penduduknya adalah mencari ikan dan hasil laut lainnya dan juga budi daya ikan di tambak-tambak desa. Dengan demikian, proses produksi di lingkungan masyarakat Desa Pancana sangat tergantung pada perairan laut di sekitarnya.

Para nelayan yang mencari ikan di laut memerlukan adanya sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti perahu, jaring dan alat perlengkapan lainnya. Tanpa adanya persiapan

sarana dan prasarana tadi maka kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan atau mengalami hambatan. Hambatan juga muncul dari keadaan dan situasi musim dan alam. Pada musim penghujan antara bulan Oktober sampai April proses produksi tidak dapat berjalan atau terpaksa berhenti karena para nelayan tidak berani mengambil resiko yang mungkin dapat timbul. Ketenagakerjaan yang dilibatkan dalam proses produksi ini adalah sejumlah anak buah kapal (sawi) antara 8-15 orang yang dikepalai oleh punggawa laut. Tinggi rendahnya hasil produksi ikan memang sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya ialah faktor peralatan yang dipakai. Jika dibandingkan produksi ikan dalam satu musim yang sama (penangkapan ikan) baik menggunakan peralatan modern maka terlihat adanya perbedaan jumlah yang cukup menonjol. Penggunaan peralatan tradisional mempunyai kapasitas daya tangkap yang terbatas, dan pemakaiannya sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia yang terbatas, sedangkan peralatan modern, selain kapasitas daya tangkapnya lebih besar juga lebih memungkinkan untuk menambah frekwensi turun ke laut (dengan menggunakan mesin tempel).

Pada tahun 1976 produksi ikan mencapai jumlah 134,402 ton, pada saat ini penggunaan teknologi modern hampir belum ada, sedangkan produksi tahun 1980, pada saat modernisasi perikanan telah masuk, jumlah produksi mencapai 920,175 ton. Sementara itu agar peningkatan produksi ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan ekonomi nelayan, perlu diimbangi dengan cara pemasaran yang lebih efektif. Dalam hal ini perbaikan pola pemasaran lewat sistem pelelangan di TPI dapat membantu memudahkan para nelayan memasarkan

hasil produksinya dalam menghindarkan mereka dari jeratan para tengkulak yang biasanya merugikan nelayan.

Adanya peningkatan produksi ikan yang disertai dengan pola pemasaran dan pengolahan pasca panen yang lebih efektif, berarti pula dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan, disamping meningkatnya swasembda pangan pada bidang perikanan.

- ***Proses Pemasaran atau Distribusi***

Proses distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi terwujud dalam dua pola. Pola pertama adalah distribusi lewat TPI dan pola kedua adalah distribusi langsung yaitu hasil produksi langsung di distribusi kepada konsumen, baik di tengah laut maupun dibawa ke pasar, dan juga hasil produksi yang langsung dikonsumsi oleh keluarga nelayan sendiri.

Pada pola distribusi lewat TPI, para nelayan yang baru datang langsung menyerahkan ikan hasil tangkapannya kepada TPI, dan para pembeli tidak boleh berhubungan dengan nelayan sebelum penjualan dilakukan, disinilah kadang-kadang nelayan “main mata” dengan tengkulak. Selanjutnya, setelah ikan ditimbang, barulah TPI menjualnya kepada pembeli yang sudah lama antri. Ini mekanisme yang diharapkan dan nelayan akan dikenakan iuran dan harga jual yang sudah ditetapkan oleh TPI. Pembeli yang langsung ke tengah laut dengan mempergunakan perahu sangat sulit diawasi.

Adakalanya *papalele* (penampung ikan) membeli kepada nelayan dan menjual ikan ke pasar atau ke kota dengan mempergunakan mobil. Hal ini bisa terjadi karena ada sementara nelayan yang menganggap negatif tugas TPI. Disamping itu, nelayan menjual ikannya karena tergantung

kepada *papalele* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Lewat pola-pola distribusi tadi proses sampainya barang produksi nelayan ke konsumen terlihat lancar. Namun, tentu tidak dapat dilupakan peran dari faktor lainnya dalam proses tadi. Di samping TPI yang menentukan harga dasar untuk jenis-jenis produksi, juga adanya unsur penunjang seperti transportasi dan keamanan. Keamanan yang dimaksud, nelayan aman menjual tangkapannya kepada TPI tanpa adanya tekanan dari luar, misalnya tekanan dari *papalele*. Keamanan ini sudah diperhatikan dengan menempatkan tugas kepolisian dan aparat desa untuk mengawasi proses distribusi di Desa Pancana.

- ***Pola Konsumsi***

Pola konsumsi dari suatu sistem ekonomi suatu masyarakat sangat tergantung pada lingkungan yang bagaimana menandai kehidupan masyarakat tersebut. Di samping proses produksi dan distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi dan distribusi yang berlangsung bagi hasil produksi, juga hasil produksi dari luar yang diperlukan sebagai barang konsumsi masyarakat tersebut, juga menentukan pola konsumsi yang ada (Sudana Astika dalam Suwitha, 1991). Pola konsumsi suatu masyarakat akan menggambarkan keperluan masyarakat tersebut akan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder bagi kehidupannya.

Masyarakat Desa Pancana memerlukan barang-barang kebutuhan primer (pangan, sandang, dan perumahan) dan barang-barang yang berhubungan dengan alat produksi, pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hiburan. Hal ini sebagian besar sudah dapat disediakan di Desa, karena

transportasi relatif lancar dan dekat dengan kota. Begitu juga beras, sayur, dan buah-buahan terutama di daerah pegunungan. Demikian pula kemampuan untuk membeli bahan konsumsi utama tersebut, sangat tergantung pada proses produksi yaitu produksi untuk dapat menghasilkan uang untuk membeli bahan kebutuhan primer tadi. Proses produksi sendiri sangat tergantung pada lautan dan perairan yang ada. Sandang dan kebutuhan primer lainnya disediakan oleh pasar desa, pasar kecamatan (PekaE) dan pasar kabupaten yang jaraknya beberapa kilometer saja dari Desa Pancana. Terutama pakaian anak-anak sudah dicukupi oleh pasar desa. Untuk kebutuhan membuat rumah diperlukan kayu, bambu, dan tripleks, juga sudah dapat disediakan disekitar desa dan kecamatan, sedangkan kayu-kayu yang baik didatangkan dari Kalimantan. Karena belum ada rumah tembok, bahan seperti semen, pasir tidak terlalu diperlukan. Kebutuhan sekunder mencakup alat-alat produksi, pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hiburan juga telah disediakan oleh pasar desa. Alat-alat penangkap ikan dari plastik semua dapat disediakan di pasar desa dan pasar kecamatan. Kalau dulu ada beberapa peralatan tradisional, terutama dari benang dapat diusahakan di desa. Sekarang kapal (perahu) dibuat di desa, dengan harga kurang lebih Rp 2.000.000,00 tetapi kayu-kayu didatangkan dari Kalimantan atau hutan-hutan di pegunungan. Jaring nilon dan mesin tempel untuk perahu di pesan di Kota Kabupaten atau Makassar. Pola konsumsi yang ada di desa tergantung pada angkutan di darat (transportasi). Pengadaan barang-barang kebutuhan sudah di dapat di tingkat desa. Demikian juga hubungan antara sistem produksi masyarakat yaitu kemampuan menghasilkan untuk dapat

mengonsumsi sejumlah barang yang berupa kebutuhan pokok dan sekunder tergantung pada lautan dan perairan. Suatu hal yang cukup berperan dalam hal ini adalah unsur penunjang proses distribusi yang berupa transportasi darat yang dapat mendekatkan produsen atau sebaliknya.

4. Aspek Peralatan

Nelayan di Desa Pancana secara turun-temurun berusaha menangkap ikan di daerah-daerah pasang surut, lebih banyak mengandalkan keterampilan tradisional dan tenaga manusia semata-mata. Disebut demikian, karena di dalam menjelaskan aktivitasnya, dalam menangkap ikan masih menggunakan alat-alat dan cara-cara yang masih sederhana. Pekerjaan ini dilakukan terus-menerus tanpa ada perusahaan yang berarti, sehingga seolah-olah menjadi naluri atau tradisi mereka.

Sistem peralatan tradisional masih kentara sekali dipergunakan oleh sebagian penduduk. Hal tersebut tampak dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan tingkat penghasilan yang rendah, maka peralatan yang digunakan untuk pergi melaut setiap hari masih sederhana baik mengenai bentuk maupun mengenai bahannya. Peralatan tersebut diantaranya jukung merupakan hasil gotong-royong bersama. Jukung tersebut merupakan titik pusat dalam susunan perekonomian penduduk dalam arti bahwa pembuatan ukung memerlukan kerjasama, orang harus bergotong-royong menebang pohon kayu dan mengerjakan kayu tersebut. Dalam hal ini sejumlah orang, pada umumnya terdiri atas para tetangga para kerabat dekat datang untuk (membantu mengerjakan) bila ada seseorang menebang kayu atau membuat jukung. Demikian pula dengan peralatan

yang lainnya, mereka membuatnya sendiri, seperti yang terbuat dari bambu dan benang yang merupakan hasil usaha nelayan sendiri. Juga jala yang terbuat dari benang yang biasanya dilengkapi dengan boton, semua ini digolongkan sederhana.

Laju perkembangan industri modern telah menyebabkan terciptanya berbagai macam produksi baru. Seperti dalam bidang perikanan muncul mesin tempel sebagai alat penggerak perahu/jukung serta jaring gillnet sebagai alat penangkap ikan. Melalui program KIK nelayan mulai mensubsidi peralatan seperti tampak pada penggantian limat/kantih sebagai alat penggerak jukung yang diganti dengan mesin tempel. Juga alat-alat seperti jala diganti dengan berbagai macam jaring gillnet. Dengan demikian KIK mampu mempengaruhi sistem peralatan kaum nelayan dari sistem peralatan tradisional sampai pada peralatan yang lebih modern.

Para nelayan pada waktu masih menggunakan peralatan tradisional yang mereka produksi sendiri hampir keseluruhan dari sistem peralatannya tetapi sebaliknya mereka harus membeli, bila ingin memakai sistem peralatan modern. Dengan kata lain bahwa program KIK mampu mempengaruhi pola tingkah laku nelayan dari nelayan produsen menjadi nelayan konsumen di bidang peralatan terutama peralatan perikanan.

Ada beberapa alasan para nelayan, mengapa setelah KIK masuk mereka selalu memberi peralatan perikanan. Hal ini disebabkan oleh faktor: 1) ingin memiliki peralatan modern dan peralatan ini tidak bisa dibuat sendiri, 2) sudah tersedia uang yang didapat dari pinjaman KIK. Sejahtera

dengan keinginan untuk membeli peralatan modern, mereka mempunyai harapan yang lain yaitu dengan peralatan modern ini mereka akan mampu meningkatkan hasil produksi ikannya, diharapkan pula mampu meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan hidup nelayan tercapai.

Kesadaran dan kesiapan sebagian besar nelayan semakin meningkat untuk menerima penggunaan teknologi baru dalam penangkapan ikan. Meskipun harus diakui bahwa masih terdapat beberapa nelayan tertinggal dalam proses modernisasi. Keberhasilan dan kegagalan modernisasi akan semakin jelas jika didekati dari gambaran kehidupan keluarga nelayan.

D. Reaksi Terhadap Modernisasi

Modernisasi yang terjadi di Desa Pancana, telah menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat, meskipun tidak tampak secara terang-terangan. Dalam hubungan ini masyarakat nelayan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu nelayan yang lebih maju yang sudah menerima penggunaan teknologi dalam menangkap ikan. Kelompok kedua nelayan miskin atau yang tradisional, tetapi tertinggal, sehingga seakan-akan bersikap menolak terhadap penggunaan teknologi baru ini. Sesungguhnya kelompok ini menolak karena ketidakmampuan memiliki teknologi baru ini.

Apalagi bila harga-harga peralatan naik, masyarakat yang tadinya homogen mulai menunjukkan tanda-tanda berstratifikasi sosial. Meningkatnya biaya-biaya alat produksi yang berkenaan dengan modernisasi telah menciptakan kelas

baru dalam masyarakat yaitu kelas pemilik alat-alat. Meskipun alat-alat modern meningkatkan hasil secara keseluruhan, tetapi meningkatnya biaya modal telah menimbulkan penurunan yang berarti dalam penghasilan nelayan. Jelaslah bahwa pengenalan teknologi baru yang relatif mahal dapat memperbesar jurang pendapatan dan stratifikasi sosial. Ini tentunya memendamkan potensi-potensi konflik yang dapat mengganggu keseimbangan sistem sosial.

Perbedaan kepentingan di kalangan nelayan pada situasi tertentu menciptakan situasi konflik yang merugikan nelayan itu sendiri. Reaksi yang muncul di kalangan nelayan tradisional sudah menampilkan tanda-tanda sejak tahun 1970-an yaitu tonggak pertama digunakan teknologi baru. Situasi konflik menjadi lebih tajam karena pengaruh dan kehadiran kelompok-kelompok kepentingan baru terutama partai-partai politik. Rupanya situasi konflik tidak berakhir sampai di situ. Selain diwarnai oleh pengaruh momen-momen penting dalam penentuan arah politik pada tingkat nasional, konflik didasari oleh faktor dan reaksi, terhadap kehadiran teknologi baru.

Masuknya teknologi baru ditambah lagi dengan usaha menjelang pemilihan umum tahun 1971-1977, dan juga tahun 1982 mengakibatkan semakin intensnya keresahan masyarakat. Oleh karena itu, pihak keamanan turun tangan mengatasi keresahan serta mengadakan pembinaan yang terus-menerus. Akibat daripada semua ini banyak penduduk Desa Pancana yang pindah ke kota, ke daerah-daerah lain atau bahkan merantau ke daerah seperti Kalimantan dan sebagainya.

E. Perubahan-perubahan sosial lain

a. Perubahan Ekologi

Perubahan ekologi di Desa Pancana mulai semakin tampak sejak tahun 1960-an. Perubahan ini tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungannya. Desa ini kebetulan dilalui jalan raya Makassar, Pare-Pare, Toraja dan jaraknya tidak jauh dari Kota Kecamatan yang berjarak hanya satu kilometer. Juga dari kota Kabupaten hanya \pm lima kilometer. Paling tidak kondisi ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Misalnya penduduk sebelah kiri dan akan jalan raya atau yang tinggal di dekat jalan raya itu, seperti penduduk di Dusun Butung, Cendrapole, dan Kawaro. Penduduk di dusun-dusun itu telah memanfaatkan rumahnya yang berada di tepi jalan raya yaitu dengan membuka atau mendirikan warung atau kios yang kemudian mempengaruhi pendapatannya. Di samping itu warung atau kios di tepi-tepi jalan itu juga memberi rangsangan kepada penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari jalan raya untuk bekerja dalam sektor informal lainnya serta ada sebagian penduduk yang ingin menjadi pedagang-pedagang. Jarak yang makin dekat dengan kota sangat berpengaruh juga terhadap mobilitas penduduk desa ke kota. Mereka yang melanjutkan sekolah dan bekerja di kota Kabupaten dapat dengan memanfaatkan lancarnya transformasi darat dengan laju dari desa ke kota (Mantra dalam Suwitha, 1991). Laju pertumbuhan penduduk juga kelihatan meningkat, demikian juga dari segi pemilikan tanah, baik di tanah pekarangan maupun di tanah persawahan juga mengalami perubahan. Jumlah penduduk setelah tahun 1987 kelihatan konstan. Jadi paling tidak sebelum

tahun 1987, jumlah itu mempengaruhi perubahan tempat pemukiman secara kuantitas, dan setelah itu perubahan pemukiman secara kualitas.

Dengan adanya modernisasi perikanan di Desa Pancana terjadi juga perubahan struktural. Hubungan punggawa-sawi sudah bergeser, dan tidak semata-mata faktor ekonomi, seorang menjadi sawi karena merasa harga dirinya dapat dijaga dan perutnya juga bisa kenyang (berisi). Tidak jarang pula orang menjadi sawi karena ingin memperoleh pengalaman melaut, dan dengan demikian berdasarkan faktor moral (Muhlis dalam Suwitha, 1991).

b. Perubahan Struktural

Perubahan struktural nelayan di Desa Pancana tercermin pada semakin melebarnya jurang antara Punggawa (nelayan) kaya dengan sawi yang mengarah ke fragmentasi. Keadaan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Makin sedikitnya ikan yang dapat ditangkap karena pemilihan alat-alat penangkapan ikan yang kalah bersaing dengan nelayan kaya dengan peralatan yang lebih canggih. Hal ini mengakibatkan terdesaknya nelayan pedesaan atau nelayan yang tidak mampu mengikuti perkembangan modernisasi, baik dalam arti fisik maupun dalam arti pola pikir. Hubungan kerja punggawa-sawi sudah sejak lama dikenal di daerah ini. Namun nampaknya, gejala ini semakin berkembang (kompleks) mengingat semakin tampaknya perbedaan yang terjadi. Demikian juga empang atau tambak yang ada di desa ini hampir semua dimiliki oleh orang kota atau pemilik modal yang kuat. Pengerjaan atau pengelolaan tambak diserahkan

kepada petani tambak dari desa dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

Perubahan struktur nelayan pancana yang terjadi akibat teknologi motorisasi. Dengan adanya motor, sebagai tenaga untuk menggerakkan perahu, menggeser tenaga kerja. Perahu motor sekarang sedikit memerlukan tenaga kerja, dalam arti sawi diperlukan terbatas. Dengan demikian muncul tenaga ahli mesin. Perubahan-perubahan struktural ini dirasa merugikan lapisan sosial miskin (sawi).

Perubahan struktural ini juga tercermin pada perubahan stratifikasi sosial sebagai akibat mobilitas sosial karena pendidikan. Stratifikasi sosial pada saat ini bukan lagi hanya golongan bangsawan atau priyayi, termasuk di dalamnya pamong desa dan orang kaya, tetapi juga warga “biasa” yang mempunyai pekerjaan layak seperti pegawai negeri atau swasta karena tingkat pendidikan relatif tinggi. Bagi warga desa yang tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang relatif tinggi biasanya bertahan sebagai nelayan, pedagang di desa maupun luar desa dan yang berpendidikan tinggi (SMTA) ataupun perguruan tinggi) bekerja sebagai pegawai maupun swasta yang pada umumnya bekerja ke kota bahkan luar kota sebagai migran permanen. Sedangkan sebagai penglaju (komuter) beberapa bekerja dalam sektor jasa seperti tukang bengkel. Selain itu, beberapa pelajar perguruan tinggi banyak yang ke kota Makassar dengan indekost di kota (migran semi permanen). Perubahan kelembagaan terutama menyangkut perubahan kelembagaan formal yang berasal dari pemerintah, seperti dibentuknya posyandu, PKK, BRI, KUD, dan kelompok-kelompok simpan pinjam. Kembali pada

kerangka demikian, di Pancana terjadi transformasi struktural sebagai proses esensial dalam modernisasi. Inovasi teknologi di Desa Pancana mempunyai dampak pada fungsi hubungan sosial antara unsur-unsur komunitas sehingga akhirnya terjadi perubahan struktural. Lembaga-lembaga sosial di Desa Pancana (lembaga tradisional) memerlukan apa yang disebut Sartono Kartodigdo memerlukan destrukturalisasi agar dapat disesuaikan pada fungsi baru yang memadai (Sartono dalam Suwita, 1991).

c. Perubahan Kultural

Pembangunan secara sederhana dapat dilihat sebagai usaha terencana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, sederhana pula pembangunan dapat dilihat sebagai usaha terencana untuk mengubah kebudayaan, dalam arti kognitif dan behaviorisme, yaitu pola pikir atau ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada pada setiap manusia atau masyarakat (Koentjaraningrat dalam Suwita, 1991).

Namun, sebelum kita melangkah untuk melihat bagaimana bentuk perubahan kebudayaan (kultural) yang ada di Desa Pancana, dalam kaitannya dengan proses pembangunan dewasa ini. Perlu suatu acuan yang lebih mendalam mengenai apakah kebudayaan itu?.

Salah satu pengertian kebudayaan, adalah keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk

mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan (Parsudi Suparlan dalam Suwitha, 1991).

Pengertian yang lain, kebudayaan adalah keseluruhan perwujudan tanggapan manusia terhadap lingkungan dalam arti luas merupakan suatu sistem yang utuh dan menyeluruh yang terdiri dari unsur-unsur yang saling mengisi (Boedisantoso dalam Suwitha, 1991). Dengan mengacu pada konsep kebudayaan di atas, dalam melihat setiap aspek kehidupan di Desa Pancana akan nyata apakah ada perubahan kebudayaan. Aspek-aspek yang dilihat di Desa Pancana dalam kaitannya dengan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Daya Kerja (*Literacy*)

Secara umum dapat dideskripsikan mengenai literacy (daya kerja) di Desa Pancana bahwa dalam perkembangan pembangunan dewasa ini, sudah pasti akan merubah tingkah laku penduduk, walaupun tidak secara langsung. Mengenai tingkat pendidikan, di Desa Pancana sangat menonjol, sehingga kelihatan adanya orientasi kerja para penduduk yang mengarah pada bentuk mata pencaharian lain, seperti pegawai dan sebagainya dimana dulunya sebagian besarnya mengenal bidang nelayan dan pertanian.

2. Cara Membesarkan Anaka (*Child Reaning*)

Ibu sudah mulai mengenal adanya produksi susu yang bisa dipakai untuk mengganti air susu ibu (ASI) atau untuk menambah konsumsi air susu pada bayi. Ini semua adalah sebagai akibat dari adanya pengaruh program-program PKK. Bahkan sering diadakan penimbangan-penimbangan bayi,

yang berarti nilai kesehatan pada anak di Desa Pancana sudah meningkat atau diperhatikan.

3. *Health Preferences*

Dalam hal health preferences di Desa Pancana walaupun sudah ada perubahan-perubahan, tetapi pengaruh dukun masih ada (dalam bersalin). Akan tetapi, kebanyakan hanya pada dukun bersalin yaitu dukun yang membantu dalam bidang persalinan dan mendapat penataran dari dokter atau juru rawat. Hal ini pun hanya para orang-orang tertentu saja, utamanya orang-orang yang kurang mampu, sedangkan orang-orang yang menderita sakit lainnya sudah sebagian besar berobat ke Balai Pengobatan di desa atau ke dokter Puskesmas. Bentuk perubahan lainnya yang nampak di Desa Pancana adalah kebanyakan penduduk sudah mengenal lingkungan sehat yakni tampak adanya Kesadaran membuat MCK (mandi, cuci, kakus) di setiap rumah.

4. *Gaya Hidup (Life Style)*

Life style (gaya hidup) penduduk di Desa Pancana, khususnya dalam segi berpakaian dan perumahan kelihatannya sudah memiliki gaya umum atau gaya kota. Artinya, pakaian-pakaian penduduk menampakkan adanya pengaruh dari luar, seperti celana dan baju yang sudah diproduksi-produksi luar. Sedangkan bentuk rumah, sudah mengarah ke perubahan yang dulunya beratap rumbian, berdinding bambu tanpa jendela, sekarang semua sudah memiliki atap genteng (seng), meskipun masih rumah panggung dan sudah mengenal kamarisasi serta jendela yang lengkap. Perubahan-perubahan ini tidak lepas dari pengaruh

pentuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh anggota PKK. Barang-barang lux, seperti televisi, motor, radio, bahkan mobil di Desa Pancana sudah ada. Dan ini sangat ditunjang oleh masuknya listrik di desa tersebut ditambah dengan sarana perhubungan yang semakin baik, sehingga tampak bahwa di Desa Pancana sudah tampak perubahan akibat adanya modernisasi, baik fisik maupun non fisik.

5. Penggunaan Waktu Luang (Leisure Time Activities)

Penggunaan waktu luang penduduk di Desa Pancana, kelihatannya tidak lagi bertumpu pada bidang pekerjaan (khususnya di bidang nelayan), tetapi sudah ada sebagian waktunya digunakan untuk berolah raga dan berekreasi, walaupun baru terbatas pada anak-anak muda. Walaupun ada kecenderungan pada anak muda untuk lebih banyak santai. Sebab setelah pulang sekolah, mereka (para anak muda) tidak mau lagi turun ke laut untuk membantu orang tua bekerja, dan kelihatan orang tua menerima keadaan ini, sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan penduduk untuk beralih orientasi kerja.

6. Media Participation

Pada saat ini, masyarakat Desa Pancana sudah mengenal adanya bentuk-bentuk media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Dengan adanya bentuk media massa ini, secara interpretasi akan mempengaruhi sebagian tingkah laku masyarakat. Dahulu masyarakat Desa Pancana mengenal waktu ngobrol antara sesama tetangga di waktu malam, tetapi sekarang mereka lebih banyak bersantai dengan menyaksikan acara-acara televisi sebagai suatu sarana hiburan.

7. Ritual Activity

Secara umum dapat dideskripsikan bahwa ritual activity (aktivitas upacara nelayan) di Desa Pancana masih ada misalnya upacara turun ke laut, upacara menurunkan kapal, upacara-upacara agama, dan lain-lain, masih sering dilakukan. Walaupun secara kognitif tidak sama lagi nilainya, dengan waktu-waktu dahulu. Bahkan ada sebagian orang melakukan hanya dalam bentuk pengetahuan tingkah laku saja, sedangkan mengenai maknanya, mereka tidak begitu diketahuinya lagi. Sedangkan yang sering dilakukan dan kelihatan paling bermakna upacaranya dalam setiap ada upacara di Desa pancana adalah upacara-upacara besar negara, seperti 17 Agustus.

F. Kesimpulan

Perubahan teknologi dan modernisasi merupakan proses perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi nelayan. Dalam kehidupan sosial terlihat makin meningkatnya jumlah kelompok-kelompok sosial berupa kerja kelompok dalam aktivitas penangkapan ikan yang keanggotaanya tidak hanya terbatas dalam lingkungan keluarga dan kerabat. Modernisasi perikanan terutama melalui introduksi teknologi baru menuntut modal uang yang lebih besar untuk investasi, karena hal ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan ekonomis nelayan melalui pengenalan KIK, dan Bank. Khusus dalam usaha pemerintah memberikan bantuan permodalan dalam bentuk kredit untuk menjadikan nelayan mampu mengembangkan usaha-usahanya.

Modernisasi dalam bidang peralatan seperti: mesin tempel, jaring, gillnet dan lain-lain. Ini terjadi institusi dalam bidang peralatan tradisional ke sistem peralatan modern. Terjadinya pergantian ini mengimplikasikan pula perubahan dalam pola tingkah laku nelayan yang biasanya mereka buat sendiri/bersama-sama (peralatannya) sekarang mereka membeli dalam hal ini mencakup organisasi seperti terbentuknya unit-unit kelompok kerja, yang sebelumnya merupakan kesatuan-kesatuan kerja yang bersifat tradisional. Demikian pula KIK berpengaruh pada bentuk organisasi sosial yang lain yang meleburkan diri menjadi unit-unit kelompok penerima KIK yang selanjutnya menjadi nelayan produktif. Dengan demikian, terjadinya dinamika dan perubahan-perubahan dalam aktivitas dan perilaku nelayan, mereka mulai berkenalan dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank, Jawatan Perikanan, PPL, TPI, Bengkel dan lain-lain. Berkenalan dengan Bank berarti telah mengetahui sistem kerja Bank. Hal ini berpengaruh pula pada perilaku nelayan, mereka mulai membiasakan diri menyalurkan/menabungkan sejumlah penghasilan untuk keperluan pembayaran kredit yang diterima.

Program modernisasi dan motorisasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan sekaligus menjalin kelestarian sumber hewani ikan dan sebagainya, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Keseluruhan usaha tersebut, pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh kehidupan masyarakat di sektor perikanan serta membantu mewujudkan pemerataan pendapatan secara nasional.

Penggunaan teknologi baru di bidang penangkapan ikan di Desa Pancana, ternyata hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil

dari seluruh nelayan yang ada di daerah tersebut, sedangkan jika dilihat dari kelompok nelayan berdasarkan pemilikan unit perahu bermesin tempel juga sangat kecil. Dengan demikian, penerapan teknologi baru di bidang perikanan belum sepenuhnya terwujud.

Lampiran



Gambar 1: Salah satu peralatan pancing, yaitu Tasi yang nanti disambungkan dengan mata Pancing.



Gambar 2: Ikan Sunu, Salah satu hasil Tangkapan dengan Menggunakan Pancing.



Gambar 3: Ikan Tembang, salah hasil tangkapan dari bagang Berdiri



Gambar 4: Jala, salah satu alat yang digunakan dalam bagang Berdiri



BAB VI

ASPEK SENI MARITIM ORANG BUGIS

A. Pendahuluan

Dalam Anthropologi Sosial dan Ilmu Sosiologi, studi tentang komunitas sangatlah penting disebabkan karena melalui studi tentang komunitas diperoleh pemahaman tentang eksistensi suatu kelompok manusia tertentu yang spesifik memiliki ciri yang menonjol dan berbeda dengan kelompok manusia lainnya yang juga terintegrasi dalam komunitas lain. Dikatakan bahwa komunitas adalah sebagai pilar dari masyarakat kuno, dimana pada periode awal pembentukan masyarakat manusia masing-masing teridentifikasi dalam sebuah komunitas dengan ciri antropologis dan sosiologis yang berbeda. Selanjutnya kelompok komunitas tersebut terintegrasi kedalam kelompok yang lebih besar dan kemudian dinamakan masyarakat (*society*). Orang-orang dibagi ke dalam komunitas yang berbeda dan saling membagi tanggung jawab.

Dalam perkembangannya, istilah komunitas digunakan secara lebih luas oleh ahli sosiologi guna membentuk kelompok yang lebih besar dimana anggota-anggotanya saling berbagi identitas, minat-minat khusus, nilai dan peran dengan tetap memiliki dan terdiri dari perasaan menghargai satu sama lainnya. Sifat dasar suatu komunitas adalah adanya wilayah dan cinta pada wilayah serta kepribadian kelompok itu merupakan dasar dari perasaan patriotisme, nasionalisme dan hidup dalam kondisi yang tenteram dan damai.

Konsep komunitas memiliki relevansi yang berdasar pada realita empirik yang kuat dan obyektif jika dilengketkan pada suatu kelompok manusia yang bekerja dan menggantungkan kehidupannya pada lingkungan laut yang disebut nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan, baik di laut, selat, teluk atau danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan berburu atau menggunakan perangkap. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri dan karakter yang relatif sama sebagai konsekuensi logis dalam berinteraksi dengan lingkungan laut. Pada umumnya karakter dasar yang dimiliki oleh komunitas nelayan adalah gigih dan akrab dengan kehidupan di laut yang memiliki sifat yang keras dan penuh tantangan.

Relevan dengan apa yang dikatakan oleh seorang pakar antropologi budaya, dikatakan bahwa masyarakat nelayan adalah sekelompok manusia yang hidup dan memiliki keterkaitan dan orientasi dengan lingkungan laut, karakter dasar dan kepribadiannya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan laut, mereka bermatapencaharian sebagai penangkap ikan dan hidup pada wilayah pantai atau tempat tinggalnya

memiliki akses dengan laut (Mattulada dalam Arif. 1978 : 9). Sebagai sebuah komunitas memiliki karakter yang sama pada semua situasi dan kondisi, salah satu ciri yang dimiliki secara bersama adalah mereka pada umumnya mengembangkan pekerjaan sebagai penangkap ikan dan biota air lainnya, dan pekerjaan ini dimanapun memiliki unsur persamaan yakni merupakan pekerjaan yang cepat mendatangkan hasil yang dapat dikomversi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam komunitas nelayan dikenal prinsip bahwa hari ini bekerja hari ini pula mereka dapat segera melihat dan merasakan hasilnya.

Pada intinya nelayan adalah orang-orang yang terlibat dalam mata pencarian menangkap dan mencari ikan dan biota lainnya, atau dapat pula mencari dan menggali sumber-sumber kekayaan alam yang banyak bertebaran di laut. Masyarakat seperti ini, dan tentu saja kelompok masyarakat lainnya memegang teguh tradisi budaya mereka secara turun temurun. Itulah sebabnya setiap aspek kehidupannya yang bersifat religius, sosial dan ekonomi sering diwarnai dengan beberapa tradisi atau kebiasaan yang berurat, berakar didalam kehidupannya. Dengan tradisi budaya ini menjadikannya sebagai kelompok yang terikat pada suatu prinsip kehidupan, yakni memegang teguh apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun.

Di antara berbagai tradisi dan prinsip hidup yang dimiliki oleh komunitas nelayan adalah seni. Seni atau kesenian adalah unsur universal dari kebudayaan yang dimiliki oleh umat manusia, demikian halnya dengan kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan memiliki sejumlah unsur yang bersifat universal. Semua unsur universal dari kebudayaan tersebut pasti memiliki sifat fungsional dalam menata dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang

bersangkutan, baik yang bersifat materil maupun yang berdimensi spritual dan kerohanian. Pada dasarnya, seni merupakan alat untuk menelaah pandangan dunia dari suatu komunitas. Secara khusus, seni etnik yang masih eksis dalam suatu komunitas menandakan bahwa seni etnik tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat. Mempertahankan seni etnik sama halnya berpegang teguh pada nilai- nilai yang luhur.

Oleh karena unsur kesenian dalam suatu kebudayaan merupakan salah satu unsur universal maka dapat dipastikan bahwa tidak ada kebudayaan manusia di dunia ini yang tidak memiliki kesenian. Kesenian atau unsur seni dalam segala dimensinya dapat mewujudkan dalam bentuk yang sangat abstrak yang hanya dapat dinikmati dan dirasakan melalui proses perenungan mendalam (kontemplasi), unsur ini merupakan jiwa atau sukma mendalam dalam suatu unsur seni yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Wujud lain dari suatu unsur seni dalam suatu masyarakat adalah aktivitas dan tindakan yang terstruktur memiliki makna baik yang bersifat langsung maupun yang bersifatmetaforis, dimana gerakantersebutdiciptakandalam bentuk irama gerak yang indah sehingga memiliki makna seni dan dapat dihayati dan dimengerti oleh pendukung kebudayaan yang bersangkutan dan dapat dipelajari oleh pendukung kebudayaan lain yang berminat. Selanjutnya wujud kesenian adalah dalam bentuk benda materil yang kadang berfungsi untuk menunjang berlangsungnya seni gerak dan seni lainnya yang relevan. Wujud seni yang bersifat materil dapat dilihat dalam bentuk ukiran dan lukisan pada benda tertentu yang juga memiliki makna baik yang simbolik maupun metaporis dengan menganggap sebagai perwujudan dari suatu lambang tertentu.

Bagi komunitas nelayan atau pelaut Bugis di Sulawesi Selatan eksistensi unsur seni melekat pada kegiatan ritual yang berkaitan dengan laut, aktivitas dan perilaku dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan laut, maupun dalam konteks teknologi yang dimanfaatkan dalam aktivitas penangkapan dan pelayaran di laut. Dengan demikian keberadaan unsur seni bagi komunitas nelayan atau pengguna lingkungan laut suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki makna praktis. Namun dapat dikatakan bahwa, meskipun kesenian itu selalu diciptakan untuk keperluan praktis yang bermanfaat, seni sesungguhnya adalah penggunaan kreatif imajinasi manusia untuk menerangkan, memahami, dan menikmati kehidupan. Meskipun gagasan untuk tentang seni untuk tujuan yang tidak berguna dan tidak praktis tampaknya tertanam dalam-dalam pemikiran orang Barat modern, dalam kebudayaan-kebudayaan lain seni seperti halnya pada kebudayaan pelaut Bugis sering digunakan untuk keperluan yang dianggap penting dan praktis.

Para ahli antropologi telah menemukan bahwa seni mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan perhatian yang bersifat spesifik dari suatu masyarakat. Khusus kesenian yang berkaitan dengan segmen seni yang terkait dengan verbal – mitos, legenda, dan dongeng-dongeng, memiliki nilai yang bermanfaat sebagai penguat spirit atau mempertebal keyakinan akan kemampuan kekuatan supernatural mengatasi masalah yang terjadi dan mungkin terjadi pada saat melakukan aktivitas penangkapan dan pelayaran di laut. Dengan pemahaman seperti itu, para ahli Antropologi dapat menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana suatu bangsa mengatur dunianya dengan memanfaatkan unsur seni yang mereka miliki. Demikian juga, musik dan seni rupa, seperti seni patung, dapat menjadi sarana untuk memahami

pandangan dunia seseorang, dan melalui studi distribusiional, kesenian dapat memberi gambaran tertentu tentang sejarah suatu bangsa.

Dalam sebuah studi dan pengamatan empiric jelas terlihat bahwa masyarakat nelayan atau pelaut Bugis di Sulawesi mempunyai unsur kesenian yang diperoleh secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya dan disepakati untuk dirawat dan dilestarikan untuk. Unsur seni tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, khususnya yang berhubungan dengan laut sebagai sumber kehidupan sehari-hari.

B. Bentuk dan Teknik Pembuatan, Motif Perhiasan dan Gaya Benda – Benda Kesenian

Karya seni tidak hanya dinilai semata-mata sebagai karya seni saja, atau seni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan praktis saja, melainkan juga seni atau kesenian perlu kombinasi khusus yang menyerupai antara lambang atau symbol yang mewakili bentuk dan ungkapan perasaan yang merupakan imajinasi kreatif. Se jauh kreatifitas dalam menggunakan kemampuan manusia untuk menciptakan lambang itu bersifat universal, dan merupakan wujud atau terbentuk oleh nilai-nilai dan perhatian kebudayaan, tepat dan pentinglah bahwa semua itu merupakan bidang penelitian antropologi.

Kebudayaan adalah keseluruhan strategi hidup sebagaimana usaha dan hasil usaha manusia mempertahankan kehidupannya, mengembangkan kesejahteraan dan memfasilitasi di dalam interaksinya dengan lingkungan alam yang ada disekitarnya secara berkelompok dalam suatu kurung waktu tertentu. Hal ini berarti,

bahwa kebudayaan yang dikembangkan itu adalah perwujudan dari tanggapan manusia yang didorong oleh kehidupannya atau tantangan lingkungannya, sesuai dengan kemampuan pendukungnya. Masyarakat atau kelompok masyarakat adalah wadah dari kebudayaan sedangkan warga kelompok tersebut merupakan pendukungnya. Sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih rendah, kecuali harus diukur kemajuan kebudayaan dari segi kesempatan membuat sejarah dan perkembangan teknologi. Teori relativisme budaya menjelaskan kepada kita bahwa semua kebudayaan bermakna fungsional dan memiliki makna terbaik dan tertinggi serta dijunjung tinggi oleh pendukungnya, pendukung atau pemilik kebudayaan lain tidak boleh membandingkan antara kebudayaan yang dimiliki dengan kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Tidak ada kebudayaan yang bernilai rendah bagi masing-masing pendukungnya, melainkan dia merupakan perwujudan dari kapasitas kreatif dan adaptif yang mampu dicapai oleh kelompok masyarakat tertentu. Peranan kesejahteraan dan perkembangan teknologi dapat mempercepat ataupun memperlambat suatu kebudayaan.

Para ahli sepakat untuk mengatakan bahwa yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya ialah, bahwa manusia mempunyai kebudayaan, sedangkan semua makhluk tidak memiliki kapasitas berbudaya karena tidak memiliki kemampuan berpikir, melainkan seluruh tindakan dan prilakunya hanya berdasarkan atas naluri yang diturunkan dari makhluk induk melalui proses pewarisan genetic. Sedangkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini yang dilengkapi dengan suatu kemampuan luar biasa berupa potensi untuk berpikir, sehingga semua tindakan dan aktivitasnya adalah

hasil dari suatu proses berpikir. Kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia berkembang melalui proses belajar (*learning process*) sehingga menyebabkan perkembangan dan kemampuan pikir manusia dapat berbeda antara satu dengan yang lain, dan antara satu tempat atau masyarakat dengan tempat atau masyarakat lain. Adalah merupakan fakta empiric bahwa potensi pikir manusia telah ada sejak ia dilahirkan di bumi ini, yang kemudian potensi itu uterus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Itulah sebabnya mengapa suatu masyarakat berkembang dengan semata-mata mengandalkan rasionalitas dan menerima kebenaran jika hal itu diterima dan dirasakan oleh indera manusia, sementara masyarakat lain pada umumnya, di samping menerima sesuatu yang rasional juga dapat memahami kebenaran yang bersifat dogmatis dalam bentuk mitos dan bahkan kebenaran transesental yang bersifat religious. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa suatu masyarakat tertentu, karena kapasitas rasionalnya masih sangat terbatas sehingga strategi pemecahan masalah yang didapati dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak rasional seperti mitos dan kepercayaan lainnya. Bahkan anggota suatu masyarakat sejak dilahirkan dia sudah dikelilingi dan diliputi oleh kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai tertentu (Soedjito 1986). Mitos sebagai sebuah sumber kebenaran pada masyarakat nelayan / pelaut di Sulawesi Selatan dapat diaktualisasikan dalam praktek pembuatan dan pemanfaatan perahu pinisi. Dalam proses pembuatan perahu pinisi terdapat sejumlah keharusan dan pantangan yang harus ditaati oleh para pandita lopi yang sumbernya dari mitos. Demikian pula pada saat mengarungi samudra mereka memanfaatkan mitos sebagai sarana dan strategi mengatasi sejumlah masalah yang timbul atau yang mungkin timbul dalam pelayaran.

1. Aktualisasi Mitos Pada Pembuatan Perahu Pinisi

Mitos adalah cerita tentang peristiwa-peristiwa semihistoris yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia, Mitos pada dasarnya bersifat religious, karena memberi rasionalitas pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Fungsi Mitos adalah untuk menerangkan sesuatu kejadian pada masa lampau dan menjadi sumber kebenaran bagi kelompok masyarakat pendukungnya. Salah satu bentuk mitos berfungsi memberi gambaran dan penjelasan tentang alam semesta yang teratur, yang merupakan latar belakang perilaku yang teratur pula. Mitos adalah produk imajinasi kreatif, dan merupakan suatu karya seni maupun suatu pernyataan religious yang potensial. Penciptaan mitos merupakan suatu jenis kreatifitas manusia yang sangat penting, dan studi tentang proses penciptaan mitos serta hasilnya dapat memberi petunjuk-petunjuk yang berharga mengenai bagaimana orang mengartikan dan berpikir tentang dunia mereka. Oleh karena itu kebenaran mitos hanya dimiliki oleh mereka yang mendukungnya, dan boleh jadi sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain yang tidak berkorelasi dengannya. Masyarakat nelayan atau pelaut di Sulawesi Selatan memiliki dan mempercayai sejumlah besar mitos dalam dunia kelautan dan pelayaran yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh mereka.

Perahu pinisi adalah hasil budaya leluhur dari nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Pinisi adalah salah satu tipe perahu di Sulawesi Selatan yang konstruksinya memang unik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perahu pinisi kurang dilengkap dengan nilai

seni yang memadai, dalam arti kurang dari segi ukir-ukiran dan motif-motif gambar bermakna bila dibandingkan dengan perahu nelayan yang ada di Jawa dan Bali yang penuh dengan ukir-ukiran dan gambar-gambar binatang, menggunakan kombinasi warna mengandung makna dan symbol (Mungsi, Lampe, dikutip dari [www. melayu on line](http://www.melayuonline.com) 20 Des 2008).

Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kampung Tanah Beru, Kabupaten Bulukumba sangat terkenal dengan kemampuan membuat perahu pinisi, bahkan kemampuan ini dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga kadang-kadang pemesanan pembuatan perahu pinisi ada yang datang dari luar negeri. Pembuatan perahu pinisi di daerah ini telah berlangsung dalam kurung waktu yang sangat lama dan kemampuan membuat perahu pinisi diwariskan secara turun temurun kepada ahli waris dari kelompok pembuat perahu ini. Anggota masyarakat yang mengembangkan pertukangan perahu pinisi adalah mereka yang sejak dahulu sejak beberapa generasi telah menekuni pekerjaan ini, dan kemampuan untuk membuat perahu tersebut adalah kemampuan yang dapat menggabungkan antara kemampuan teknis dan kemampuan menguasai system pengetahuan dan kepercayaan yang bersifat religious dan transcendental. Mereka yang menguasai kemampuan ini disebut oleh masyarakat local dengan sebutan *sanro lopi* atau *panrita lopi*. Dalam system teknologi pembuatan perahu pinisi ada beberapa rangkaian kegiatan tradisional tertentu yang merupakan suatu struktur kegiatan sebagai suatu system produksi, baik yang berdasarkan atas suatu system pengetahuan tradisional yang dapat ditemukan unsur rasionalitasnya, maupun kegiatan yang semata-mata berdasar pada system kepercayaan atau mitos yang unsur relevansinya

hanya mereka yang terlibat dalam system pembuatan perahu pinisi yang memahami. Salah satu rangkaian kegiatan yang cukup prinsip dalam system produksi perahu pinisi adalah saat sebelum peluncuran yang dilakukan pada waktu malam hari, yaitu AMMOSSI (memusat atau melubangi pertengahan perahu), kegiatan ini terkait erat system kepercayaan atau mitos yang memiliki makna budaya yang sangat relevan dengan keselamatan dan keberfungsian secara ideal dari eksistensi perahu pini yang dibangun.

Di samping itu, bagi masyarakat Tana Beru ada prosesi adat yang harus dilalui sebelum pembuatan sebuah Kapal atau Perahu Phinisi dilakukan. Mereka menyebut prosesi adat itu dengan sebutan “*Ruling*”, yakni tata cara adat istiadat untuk membuat sebuah perahu atau kapal phinisi, sudah termasuk di dalamnya diatur mengenai pencarian dan penebangan pohon untuk bahan pembuatan kapal/perahu, lalu mengenai pemotongan dan pengeringan kayu, kemudian perakitan, pemasangan tiang kapal serta peluncuran kapal/perahu pinisi.

Dari prosesi *Ruling* inilah bisa kita ketahui, bahwa masyarakat Tana Beru sudah sejak dahulu selalu berusaha menjaga kelestarian alam beserta segala isinya, karena mereka mempunyai aturan tersendiri, yang tidak memperbolehkan menebang sembarangan pohon untuk membuat sebuah perahu. Pohon yang bakal ditebang, haruslah pohon yang benar-benar sudah tua dan layak untuk dijadikan sebuah kapal/perahu.

Prosesi *Ruling* ini lahir karena masyarakat Tana Beru, terutama yang berprofesi sebagai pembuat perahu,

menganggap dirinya beserta komunitasnya sebagai bagian dari jagad raya, ibaratnya mereka adalah mikrokosmos dan jagad raya adalah makrokosmos. Di mana hubungan kedua kosmos ini diatur oleh peraturan abadi yang sakral, dan dilembagakan oleh para leluhur mereka sebagai adat istiadat yang wajib dijaga keutuhannya. <http://hariyantowijoyo.blogspot.co.id/2014/05/tana-beru-surga-pembuat-kapal-phinisi.html#ixzz4E4FMBYtH>dikutiptgl.11Juli2016. Pembuatan kapal/perahu phinisi adalah kombinasi dari pengetahuan dan pengalaman tradisional warisan leluhur yang harus diikuti untuk memastikan keamanan di laut. Masyarakat Tana Beru yang berprofesi sebagai pengrajin perahu/kapal harus melakukan penghitungan hari baik untuk memulai pencarian kayu sebagai bahan baku. Hitungan itu biasa jatuh di hari kelima atau ke tujuh pada bulan yang berjalan. Angka lima atau *naparilimai dalle'na* yang bermakna rezeki sudah di tangan, dan angka tujuh atau *natujuangngi dalle'na* memiliki makna selalu dapat rezeki.

Adapun prosesi ritual Ruling dipimpin oleh tokoh adat yang juga ahli membuat kapal/perahu yang disebut "***Pandita Lopi***". Sedangkan untuk pelaksana teknis dan fisik pembuatannya dipimpin oleh Kepala Tukang yang biasa disebut "***Punggawa***", dibantu oleh tukang atau disebut "***Sawi***" serta calon "***Sawi***". Punggawa dan Sawi inilah yang bekerja menyelesaikan sebuah kapal/perahu phinisi dengan berbagai macam ukuran dan tonase. Tidak seperti pembuatan kapal pada umumnya, dimana rangka kapal dibuat terlebih dahulu, baru kemudian menyusul pembuatan dindingnya, kapal/perahu phinisi memiliki keunikan tersendiri dalam pembuatannya, yaitu pembuatannya dimulai dengan

pembuatan dinding kapal, baru setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan rangka kapal. <http://hariyantowijoyo.blogspot.co.id/2014/05/tana-beru-surga-pembuat-kapal-phinisi.html#ixzz4E4FMBYtH> dikutipgl.11 Juli 2016.

Jenis kapal/perahunya pun macam-macam, yaitu kapal penumpang atau kargo yang disebut “*Lamba/Lambo*”, phinisi modern yang sudah dilengkapi dengan mesin motor diesel sebagai penggerak utamanya. Lalu ada juga yang disebut “*Palari*”, yang ukurannya lebih kecil dari jenis *Lamba*. Selain perahu/kapal penumpang dan kargo, ada juga jenis yang lebih kecil, yaitu Perahu *Pajala* dan Perahu *Jolloro*, yaitu perahu nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan, disamping itu ada juga perahu tanpa lunas yang disebut *Lepa-lepa*, *Soppe* dan *Jarangka*. Ada juga kapal/perahu yang merupakan versi besarnya dari perahu/kapal phinisi terdahulu yang dikenal sebagai Perahu/Kapal *Padewakang*, yaitu perahu/kapal kuno pertama dimana dindingnya terdiri dari kepingan-kepingan papan yang tersusun, selanjut ada juga kapal/perahu kuno yang disebut *Patorani*. <http://hariyantowijoyo.blogspot.co.id/2014/05/tana-beru-surga-pembuat-kapal-phinisi.html#ixzz4E4FMBYtH> dikutipgl.11 Juli 2016.



Original Link from: <http://hariyantowijoyo.blogspot.co.id/2014/05/tana-beru-surga-pembuat-kapal-phinisi.html#ixzz4E4FMBYtH> dikutip tgl. 11 Juli 2016.

Mengacu pada pendapat Koentjaraningrat (1990) seorang ahli antropologi Indonesia yang menyatakan bahwa bahwa: “benda-benda atau system peralatan yang biasa dibuat dan dipergunakan oleh anggota sesuatu masyarakat tertentu semuanya dapat dipandang sebagai unsur kebudayaan materiil”. Dengan demikian system teknologi atau system peralatan perahu pinisi adalah hasil kreasi budaya masyarakat nelayan / pelaut di Tanah Beru Sulawesi Selatan yang mempunyai unsur seni, baik yang berfungsi secara praktis maupun dalam memenuhi kebutuhan akan keindahan yang secara subyektif dirasakan oleh masyarakat pendukungnya.

Teknologi dapat pula dipahami sebagai cara-cara yang dilakukan oleh anggota kelompok masyarakat dalam mewujudkan suatu karya atau hasil karya tertentu, pada

aktivitas pembuatan perahu phinisi terdapat kegiatan dimana masing-masing pekerja menyusun papan ruas setelah ada *kalebiseang* (lunas) dan menghasilkan suatu bentuk perahu penisi yang tepat dan simetris atau memiliki derajat keseimbangan antara bagian kanan dan bagian kiri. Aktivitas ini adalah contoh dari wujud kebudayaan teknologi tak mewujud yang berbentuk aktivitas, termasuk teknologi dalam hal ini aktivitas memperhitungkan kebutuhan kayu secara tepat, setelah diketahui berapa ton ukuran perahu yang hendak dibuat. Masyarakat pembuat perahu phinisi memiliki seperangkat teknologi dalam wujud benda atau materi yang dimuat oleh system pengetahuan dan strategi menerapkan atau memanfaatkan teknologi kebendaan itu dalam rangka menghasilkan suatu benda budaya yang dalam hal ini perahu phinisi dengan segala muatan makna simbolis yang melekat pada dirinya.

Demikian pula perangkat teknologi non kebendaan mewujud dalam bentuk etika pergaulan antara sesama actor dalam suatu system pembuatan perahu, maupun dengan actor lain yang terkait dengan aktivitas mereka, dalam hal ketat diatur hubungan atau tatacara berinteraksi antara kepala tukang dan anak buah atau sesama tukang, terlebih lagi antara tukang dan *Sambalu* (pemilik perahu) harus selalu terjalin keakrabaan selama proses pembuatan perahu berlangsung. Penataan dan tatakrama pergaulan antar actor yang terlibat dalam proses pembuatan perahu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan kelancara proses pembuatan perahu yang sedang berjalan, sebab jika terjadi sebaliknya diyakini oleh mereka akan menimbulkan akibat buruk bagi perahu tersebut, dan akan gagal dalam peluncuran, atau

karam di Bandar, akan tenggelam dalam pelayaran sebelum mendapatkan hasil.

2 Eksistensi Seni Perbal Bagi Pelaut dan Nelayan Bugis

Kesenian verbal meliputi cerita, drama, puisi, nyanyian, peribahasa, teka-teki, permainan kata-kata, dan bahkan memberi atribut untuk prosedur, pujian, dan hinaan, apabila itu semua mempunyai bentuk-bentuk yang rumit dan khusus. Cerita itu agaknya merupakan salah satu jenis kesenian verbal yang paling mudah dicatat dan dikumpulkan. Pada umumnya cerita tersebut dibagi menjadi tiga kategori pokok yang terus menerus berulang: mitos, legenda, dan dongeng.

a. Dongeng dalam masyarakat nelayan di Sulawesi

Dongeng adalah cerita kreatif yang secular murni, tidak historis, dan diakui sebagai khayalan untuk keperluan hiburan, meskipun juga memuat wejangan atau member pelajaran praktis. Manfaat dongeng bagi Antropologi adalah dapat mengetahui adanya proses penyebaran suatu unsur budaya dengan unsur budaya lain dimana penyebaran itu member bukti tentang adanya kontak atau isolasi kebudayaan, dan memberi petunjuk tentang pengaruh dan keterpaduan kebudayaan.

Dalam masyarakat nelayan dan masyarakat Bugis pada umumnya mengenal tradisi lisan yang merupakan tatacara para anggota masyarakat dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan yang mereka ingin sampaikan kepada orang lain. Tradisi lisan ini memiliki beberapa bentuk menurut isi dan maksud serta idea yang terkandung di dalamnya meliputi

dongeng (*paupau rikadong*), cerita rakyat, sejarah (*attau riolong*), kepercayaan, dan adat kebiasaan dalam kebudayaan. Yaitu tentang salah satu tradisi nelayan yang menyangkut pengetahuan tentang posisi yang berdasarkan pada bintang. Pengetahuan tentang hari baik dan hari buruk untuk turun ke laut dan melaksanakan upacara *Tinja'na to Palebbo* (pesta nelayan) yang biasa disebut *allo macoa* dan *allo karras* dalam tradisi pesta nelayan. Kesenian verbal lainnya yang ada dalam masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan yaitu Folklor, adalah cerita atau nyanyian yang mengandung makna dan nilai kehidupan orang Bugis, muatannya boleh jadi dalam bentuk petuah atau nasehat hidup atau pun lagu-lagu yang memiliki makna simbolik disamping lagu yang berguna untuk menghibur hati yang lara.

b. Folklor dan Fungsinya Bagi Masyarakat Nelayan dan Pelaut.

Folklor berasal dari kata *folk* dan *lore*. Folk dapat diartikan dengan kolektif, sedangkan kata *lore* bermakna tradisi. Dengan demikian kata folklor secara istilah dapat diartikan sebagai sebuah bentuk tradisi rakyat, merupakan dokumen budaya tradisi yang amat tinggi nilainya. Tradisi folklore yang dimiliki oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan adalah sebuah bentuk penanda atau penciri sekali menjadi pembeda antara kelompok masyarakat Bugis Makassar dengan kelompok masyarakat lain yang ada di wilayah ini.

Menurut Dundes (Danandjaja, 1998:53) folk adalah kelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal, baik secara fisik, social dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok yang lainnya. Ciri fisik, antara lain berujud warna

kulit. Ciri lain yang tidak kalah pentingnya adalah mereka memiliki tradisi tertentu yang telah turun-temurun. Tradisi inilah yang sering dinamakan lore. Tradisi' semacam ini yang dikenal dengan budaya lisan atau tradisi lisan. Tradisi tersebut telah turun-temurun, sehingga menjadi sebuah adat yang memiliki legitimisasi tertentu bagi pendukungnya. Folklor adalah milik kolektif kebudayaan. Misalkan saja menurut Bascom, folklor terdiri dari: budaya material, organisasi sosial dan politik, serta agama dan religi.

Menurut Espinosa folklor terdiri dari: kepercayaan, adat, takhayul, teka-teki, mitos, magi, ilmu gaib dan sebagainya. Untuk mengenali apakah yang akan diteliti tersebut folklor atau bukan, ada beberapa ciri tertentu, yaitu: (a) penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut, dan kadang-kadang tanpa disadari; (b) bersifat tradisional, artinya disebarkan dalam waktu relatif lama dan dalam bentuk standar, (c) folklor ada dalam berbagai versi-versi atau varian, (d) bersifat anonim, penciptanya tidak diketahui secara pasti, (e) biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola, (f) mempunyai kegunaan dalam kehidupan kolektif, (g) bersifat pralogis, yaitu memiliki logika sendiri yang tidak tentu sesuai dengan logika umum, (h) menjadi milik bersama, (i) biasanya bersifat polos dan lugu (Dananjaya, 1986:3-5).

Menurut Bascom (Sudikan, 2001:100) ada beberapa fungsi folklor bagi pendukungnya, yaitu: (a) sebagai sistem proyeksi, (b) sebagai alat pengesahan kebudayaan, (c) sebagai alat pendidikan, dan (d) sebagai alat pemaksaan pemberlakuan norma-norma.

Selanjutnya Alan Dundes menambahkan fungsi lain, yaitu: (a) untuk mempertebal perasaan solidaritas kolektif, (b) sebagai alat pembenaran suatu masyarakat, (c) memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat mencela orang lain, (d) sebagai alat memprotes keadilan, (e) sebagai alat yang menyenangkan dan memberi hiburan.

Dari fungsi tersebut berarti folklor dapat memuat aneka ragam fungsi, seperti fungsi kultural, hukum, politik, dan keindahan. Fungsi-fungsi tersebut tentu saja bisa berubah dan atau berkembang dalam kehidupan pemilik folklor. Oleh karena folklor merupakan bagian kebudayaan suatu kolektif. Bentuk-bentuk folklor yang perlu mendapat perhatian peneliti budaya, menurut Brunvand (Danandjaja, 1990:98) ada tiga, yaitu *mentifact* (folklor lisan), *sociofact* (sebagian lisan), dan *non mentifact* (folklor bukan lisan). Masyarakat nelayan biasanya tertarik bentuk folklor sebagian lisan, seperti kepercayaan rakyat, teater rakyat, tradisi ritual rakyat, adat istiadat, dsb.

Karena, dalam folklor terkandung unsur-unsur budaya yang dimanfaatkan oleh pendukungnya. Unsur-unsur budaya lisan tersebut harus berimbang dalam kajiannya. Artinya, peneliti tidak hanya menitikberatkan masalah folk namun juga unsur lisan. Kedua unsur ini saling jalin-menjalin dan membentuk sebuah komunitas budaya yang unik.

Perlu memaknakan kebudayaan sebagai “proses” dan “produk”. Kebudayaan sebagai proses perlu dicermati terjadinya transmisi pesan budaya dari waktu ke waktu. Sedangkan kebudayaan sebagai produk merupakan warisan generasi masa lalu ke generasi sekarang. Baik kebudayaan

sebagai “proses” maupun “produk” sama-sama pentingnya dalam kajian folklor.

Seni kebaharian bisa pula berupa nyanyian. Nelayan Urk (Belanda) kaya dengan lagu-lagu berfungsi seni dan doa-doa kepada Tuhan meminta rejeki ekonomi dan keselamatan di laut. Nelayan Torani (ikan terbang) dari Galesong (Makassar) mempunyai lagu-lagu mengandung kekuatan supernatural memikat ikan-ikan untuk datang sendiri melompat masuk kedalam perahu-poerahu patorani dioperasikannya. Sebuah nyanyian nelayan dan pegaram yang miskin berfungsi pelipurlara, seperti berikut ini:

*“Bulang sumarakko naik
Na nu seorok ballaku
Na kacinikang
Somberek kasiatiku
Bintoeng paleng mammumba
Kukana wari-waria
Ku tuju mata
Kuparek pannyaleori*

Artinya:

Bulan bersinarlah engkau
Dan sorotilah rumahku
Sehingga tampak kemiskinannku
Bintang rupanya yang timbul
Kukira sang kejora
Kutatap, kujadikan pelipurlara

Lagu-lagu bagi masyarakat nelayan mengandung makna kekuatan supernatural memikat ikan-ikan untuk datang sendiri melompat masuk ke dalam perahu-perahunya.

Penangkapan ikan dengan bagang adalah bentuk penangkapan ikan yang paling banyak dilakukan, selain penangkapan ikan dengan menggunakan gae atau pukat, lepa-lepa atau perahu dengan mamakai alat mancing. Biasanya nelayan mulai turun ke laut pada sekitar jam 15.00 WITA. Antara jam 22.00 WITA dan jam 02.00 WITA atau sebelum jaring diangkat, nelayan bagang menghabiskan waktunya dengan bercerita atau ada yang tidur kecuali yang sedang mendapat giliran jaga.

Nyanyian juga dapat berfungsi seperti itu, dalam batas-batas yang ditimbulkan oleh bentuk musik. Dan setiap bentuk kesenian dapat menambah eratnya ikatan solidaritas masyarakat yang bersangkutan. Nyanyian laut dapat memberikan hiburan yaitu berfungsi untuk menghilangkan rasa bosan waktu mengerjakan tugas-tugas itu.

3. Seni Musik dan Fungsinya Bagi Masyarakat Nelayan Bugis di Sulawesi Selatan

Studi tentang musik dengan pengumpulan nyanyian-nyanyian rakyat disebut etnomusikologi membicarakan music suatu kebudayaan, serupa pentingnya dengan mengerti bahasa musik, yaitu kebiasaan-kebiasaannya.

Fungsi musik bagi masyarakat mengungkapkan nilai-nilai dan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok. Ada perasaan – perasaan yang diteruskan secara simbolis dan mudah diingat-ingat serta disebarluaskan. Dengan demikian

kelompoknya menjadi bermakna dan barangkali ada perasaan bahwa pengalaman mereka, apapun pengalaman itu mempunyai bentuk dan makna.

Pada masyarakat nelayan pada saat pelaksanaan pesta nelayan atau Tinja'na To Palebbo terdapat campuran musik baik musik tradisional atau tabuhan bersama-sama dengan musik modern (musik dangdut). Penggunaan musik dalam pelaksanaan pesta nelayan itu mempunyai makna untuk memeriahkan suasana pelaksanaan pesta nelayan dan sebagai ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat- Nya yaitu diberikan hasil tangkapan ikan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.







4 Hubungan Antara Seni Dengan Aktivitas Kenelayanan

Penangkapan ikan dengan bagang adalah bentuk penangkapan ikan yang paling banyak dilakukan, selain penangkapan ikan dengan menggunakan gae atau pukut, lepa-lepa atau perahu dengan memakai alat mancing. Alat tangkap bagang yang dikenal oleh nelayan bugis ada dua yakni bagang tancap biasa juga disebut dengan bagang berdiri (*bagang tettong*) karena memang terbuat dari bambu yang ditancapkan berdiri di tengah laut, dan bagang perahu atau biasa disebut dengan bagang bergerak (*bagang lolo*) karena bagang ini menggunakan perahu atau kapal sebagai wadah yang menyanggah sehingga jenis bagang ini lebih dinamis karena bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dalam bahasa bugis disebut *lolo* atau *lette*.

Kedua jenis bagang ini memiliki unsur seni, baik yang terkait dengan fungsi langsung karena nilai seni terdapat pada bentuk dan asesoris yang melekat pada benda-benda yang dimanfaatkan seperti bentuk perahu atau kapal yang digunakan merupakan suatu karya artistik dengan ciri spesifik yang melambangkan asal usul atau etnis yang membuat atau memanfaatkannya, itulah sebabnya kita dapat mengetahui suatu jenis perahu atau kapal darimana dia berasal atau dimiliki oleh suku bangsa apa dari bentuk kapal itu, sehingga tampak jelas perbedaan antara perahu atau kapal orang Jawa, Orang Madura, Orang Bugis dan orang Mandar. Selain itu biasa pula terdapat hiasan, baik yang terletak pada layar atau pada anjungan kapal dalam bentuk lukisan dan hiasan yang memiliki makna tertentu. Bagang sebagai alat tangkap bagi nelayan bugis di Sulawesi Selatan memiliki sistem operasi

yang berbeda dengan sistem tangkap yang lain, waktu antara penarikan jaring dengan penarikan jaring berikutnya memiliki interval waktu dimana pada interval waktu yang lowong tersebut tidak ada kegiatan yang berarti terkait dengan sistem penangkapan, sehingga waktu yang ada biasanya dimanfaatkan oleh para sawi mengungkapkan cerita dalam bentuk seni yang fungsinya untuk mengisi waktu dan untuk menikmati suasana sambil menunggu waktu penarikan jaring berikutnya.

Selain cerita dalam bentuk lagenda atau cerita-cerita rakyat yang berfungsi untuk mengisi kekosongan sambil menunggu waktu penarikan jaring seperti telah diuraikan di atas, dalam sistem operasi penangkapan bagang dikenal pula macam dalam bentuk seni musik atau nyanyian daerah dapat berfungsi sebagai hiburan selama penangkapan di laut, supaya tidak bosan dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari – hari di laut. Eksistensi seni musik atau nyanyian ini sangat besar maknanya karena dapat mengembalikan semangat kerja atau menambah gairah kerja para sawi sehingga boleh jadi melalui seni musik atau nyanyian di tenag laut yang didendangkan pada waktu menanti waktu menarik jaring dapat meningkatkan produktifitas, atau paling tidak dapat menambah semangat kerja sehingga mereka menjadi lebih mencintai dan merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas kenelayan mereka.

Keterkaitan lain antara seni dengan aktivitas penangkapan bagi nelayan atau bagi aktivitas kelautan bagi masyarakat bugis di Sulawesi Selatan adalah adanya suatu bentuk seni musik daerah berupa tetabuhan dengan menggunakan alat

music gendang yang ditabuh secara berirama menghasilkan suatu bunyi yang bersahut-sahutan berfungsi sebagai pemberi semangat dalam pelaksanaan pesta nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa nelayan bugis senantiasa menyelenggarakan pesta berselang saat dimulai perlombaan perahu. Perahu – perahu nelayan yang akan berlomba dihiasi dengan ornamen warna-warni yang berarti keindahan dan kemeriahan diiringi oleh tabungan yang berirama sebagai tanda kegembiraan, kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia yang diberikan, yairu atas keberhasilan penangkapan ikan pada masyarakat.

5. Pesta Nelayan *Tinja'na Palebbo* Sebagai Wujud Seni Nelayan dan Pelaut Bugis Di Sulawesi Selatan

Mereka masih menyakini bahwa upacara pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* disamping mengandung unsur-unsur mistik yang dipadukan dengan unsur-unsur keagamaan. Kepercayaan mengadakan upacara pesta nelayan *Tinja'na Palebbo* agar memulai aktivitas melaut hasil tangkapan mereka semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

a. Proses pelaksanaan *Tinja'na Palebbo*

Tahap persiapan: menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pesta nelayan.

Tahap menyiapkan panganan dan makanan untuk pesta, seperti *Tetu* (kue berbentuk perahu), *loka ro'do* (makanan pokok pengganti nasi yang terbuat dari pisang yang muda, rasanya gurih), serta panganan tradisional lainnya seperti

cucur, baje’ (panganan ringan yang terbuat dari ketan putih dicampur dengan gula merah), *doko-doko unti* (panganan ringan yang terbuat dari beras dan pisang), dan tumpengan yang dihiasi dengan telur warna-warni, serta makanan pada pesta pada umumnya. Makna dari nasi tumpeng adalah lambang kesejahteraan di mana pada nasi tumpeng ini terdapat semua unsur makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia. Makna yang terkandung dari semua panganan yang dibuat yaitu dengan adanya rasa seperti rasa manis, rasa asin, rasa gurih, yang kemudian dimaknai sebagai kondisi dan situasi kehidupan yang dialami oleh mereka, makna metaporis dari rasa itu dikatakan bahwa seperti itulah roda kehidupan para nelayan, ada senang juga ada *susah*.

b. Tahap pelaksanaan upacara

Pesta nelayan ini berlangsung selama 1 hari, yaitu dari jam 07.00 – 16.00 WITA. Sebelum dilaksanakan pesta ini pada malam harinya melakukan upacara dengan pembacaan barasanji diakhiri dengan makan bersama-sama. Pada saat mulai acara pesta nelayan mereka melakukan pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh pemuka agama. Pembacaan naskah lontara yang merupakan pelaksanaan upacara oleh salah seorang pemuka adat. Hal ini harus dilakukan karena didalamnya terkandung cerita dan mitos-mitos mengenai *Tinja*”na *Palebbo* yang merupakan janji para nelayan untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan dan alam semesta, yang telah memberikan karunia sehingga para nelayan berhasil menangkap ikan pada tahun ini dan pada tahun-tahun selanjutnya akan semakin bertambah, dengan

demikian kesejahteraan mereka akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

Setelah didahului dengan doa-doa dan acara seremonial lainnya, mereka menyantap makanan yang dibawa. Acara makan-makan ini dimulai dengan menyajikan persembahan untuk para leluhur berupa nasi tumpeng dan telur serta panganan tradisional lainnya yang ditaruh dibawah pohon sebelum para peserta upacara meninggalkan tempat upacara.

Setelah itu dimulai acara perlombaan perahu. Perahu – perahu nelayan yang akan berlomba dihiasi dengan ornamen warna-warni yang berarti keindahan dan kemeriahan diiringi oleh tabungan yang berirama sebagai tanda kegembiraan, kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia yang diberikan, yaitu atas keberhasilan penangkapan ikan pada masyarakat. Walaupun para nelayan tidak mendengar atau melihat langsung arwah leluhurnya, namun mereka yakin arwah para leluhur pasti dapat dan mampu menolongnya dalam musim penangkapan ikan tahun berikutnya. Setelah upacara ini selesai para nelayan dan peserta upacara kembali kerumah masing-masing untuk mempersiapkan diri melaut keesokan harinya.

Isi naskah lontara *Tinja'na To Palebbo* adalah sebagai berikut: “Kami dipesankan oleh para leluhur secara turun temurun apabila engkau berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang cukup banyak hendaknya kamu menyampaikan dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pemelihara alam semesta dalam bentuk suatu upacara *Tinja'na To Palebbo* (pesta nelayan) di laut dan upacara ini harus kamu laksanakan setiap tahunnya secara rutin pada awal akan turun melaut

janganlah kamu melanggar aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang telah ditetapkan dan disepakati.”

Kepercayaan masyarakat secara turun temurun tersebut, memberi keyakinan bahwa kelalaian melaksanakan acara ini, dapat mengakibatkan malapetaka dan ancaman bahaya laut yang disebabkan adanya angin ribut, topan dan hilangnya tangkapan ikan dari perairan.

c. Pantangan-pantangan dalam upacara

- Para peserta upacara pantang mengucapkan kata-kata kasar. Apabila seseorang dalam upacara ini mengeluarkan kata-kata kasar maka arwah para leluhur yang ada di laut dapat menjadi murka dan menurunkan bala atau marabahaya yang bisa berbentuk angin tau gelombang besar yang mengakibatkan bencana bagi nelayan.
- Pantang bagi peserta upacara bertengkar. Berdasarkan kepercayaan masyarakat nelayan apabila terjadi pertengkaran mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka meyakini bahwa jika ada dua orang saling bertengkar maka pasti mereka dan kelompok penangkapannya tidak mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan bahkan kadang-kadang mereka tidak mendapat hasil samasekali. Bahkan lebih dari itu, akibat dari terjadinya pertengkaran antara seseorang dengan orang lain dapat menyebabkan berpindahnya ikan ke tempat yang lain, dan pada akhirnya dapat merugikan para nelayan itu sendiri.

- Tidak boleh menegur atau mengomentari setiap benda yang dianggap aneh atau tidak biasa bagi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat kadang-kadang menemukan sesuatu yang tidak lazim dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk gejala alam, tindakan dan perilaku manusia, maupun munculnya benda-benda aneh secara tiba-tiba. Apabila mereka menemukan hal tersebut, maka mereka harus mendiamkan saja dan tidak memberi komentar apapun. Menurut kepercayaan para nelayan apabila para peserta upacara menegur benda atau sesuatu yang dianggap aneh tersebut maka akibatnya mereka dapat mengalami kesurupan dan mungkin pingsan.
- Tidak boleh tidur pada saat upacara berlangsung. Menurut kepercayaan para nelayan apabila mereka tidur pada saat upacara Tinja'na *ToPalebbo* berlangsung mereka dapat diganggu oleh roh-roh halus yang ada di laut, yang menyebabkan mereka bisa kerasukan seperti orang gila dan tentunya mengganggu proses pelaksanaan upacara pesta nelayan tersebut. Untuk mencegah setiap peserta upacara agar terhindar dari rasa kantuk, maka dilakukan berbagai aktivitas yang dapat merangsang seseorang untuk bergerak atau berpikir.
- Tidak boleh makan pangan sebelum tiba waktunya. Menurut kepercayaan masyarakat nelayan para leluhur, murka dan upacara yang berlangsung tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan para nelayan.

Apabila mereka turun kelaut setelah melakukan upacara tersebut.

- Tidak boleh berpikiran yang buruk pada saat upacara berlangsung. Apabila ada peserta upacara berpikiran buruk, menurut kepercayaan para nelayan dapat terjadi musibah yang mengganggu peserta upacara tersebut. Misalnya terserang penyakit tiba-tiba apabila telah sampai di rumah masing-masing.
- Peserta upacara tidak boleh berkata dusta. Apabila ada seseorang yang berkata dusta dalam proses melaksanakan upacara ini, sesuai dengan kepercayaan para nelayan, mereka kemungkinan mendapatkan malapetaka berupa kehilangan sesuatu barang-barang berharga yang dimilikinya.
- Tempat menyimpan ikan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan kosong. Menurut kepercayaan mereka jika tempat menyimpan ikan dibiarkan dengan sengaja atau secara kebetulan dalam keadaan kosong, maka harus cepat diisi dengan sesuatu, mereka meyakini bahwa jika tempat penyimpanan ikan kosong maka mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan.
- Dilarang bagi siapapun menghamburkan makanan dilaut. Mengotori laut dan pesisir pantai menurut kepercayaan para nelayan, ikan-ikan yang masih ada di laut dapat meninggalkan wilayah pemukiman dan tempat operasi penangkapan mereka, sehingga pada saat turun kelaut mereka tidak mendapatkan hasil yang memadai, bahkan boleh jadi mereka tidak memperoleh samasekali hasil tangkapan.

Demikianlah sejumlah pantangan-pantanganyang muncul dalam pelaksanaan kegiatan upacara tersebut di atas, secara prinsip mengandung makna berupa upaya untuk menjaga dan menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang antara lingkungan alam laut dengan manusia sebagai pengendli lingkungan. Dalam kesadaran mereka tertanam suatu kearifan local (*local wisdom*) bahwa manusia yang memelihara lingkungan alam dimana mereka hidup, maka lingkungan alam pun pasti memelihara mereka, sehingga ada kebutuhan yang bersifat timbal balik antara lingkungan alam dengan manusia.

6. Hubungan Antara Kesenian Dengan Pelaksanaan Kegiatan Religi dan Upacara Keagamaan Bagi Masyarakat Nelayan dan Pelaut Di Sulawesi Selatan.

Masyarakat tradisional Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan khususnya percaya terhadap adanya suatu tatanan, aturan tetap, yang mengatur segala apa yang terjadi di alam dunia yang dilakukan oleh manusia. Tatanan atau aturan itu bersifat “Stabil”, “Selaras” dan “Kekal”. Aturan itu merupakan tatanan “budaya” sebagai sumber segala kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Apapun yang dilakukan manusia harus sesuai atau selaras dalam tatanan kehidupan alam sekitarnya. Apabila tidak bertentangan dengan alam, niscaya hidupnya menjadi tenang dan damai. Bagi mereka yang menyimpang dari tatanan dan aturan merupakan “dosa” yang patut menerima sanksi atau hukuman.

Perbuatan manusia selalu berdimensi dua, “dwimatra”; yaitu “mistik” dan “simbolik”. Untuk megungkap kepercayaan

terhadap makna hidup, manusia memakai tanda–tanda atau elemen simbolik yang menandai eksistensi mereka, dua macam tanda penting, pertama: “mitos” asal, atau tafsir tentang makna hidup berdasarkan asal kejadian masa lalu. Kedua: “Ritual” upacara berupa perlakuan simbolis yang berfungsi untuk memulihkan harmoni tatanan alam dengan manusia, agar manusia terhindar dari malapetaka dan memberikan keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Inilah dasar-dasar filosofi yang mengatur “Budaya” masyarakat tradisional.

Pola pemikiran masyarakat tradisional pada umumnya hidup dalam budaya “kosmologi”. Awalnya, kehidupan manusia hanya terbatas pada kehidupan dirinya sendiri, “Egocentrum”. Kemudian manusia mengembangkan dorongan naluri dan nalarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kehidupan “egocentrum” akan menjadi bagian integral dari kehidupan Habitat sekitarnya, yang diatur dalam sebuah tatanan “budaya” atau “kebudayaan”. Masyarakat tradisional sering dianggap sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana kepercayaan leluhur yang di pengaruhi oleh “ethos budaya” dan mempunyai sifat-sifat khusus, antara lain kekhususan itu ditandai dengan jalan mempertahankan suasana hidup selaras, harmonis dan seimbang dengan kehidupan “habitat” sekitarnya. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, pola hubungan antar manusia. Hubungan manusia dengan habitat sekitarnya didasarkan pada anggapan bahwa eksistensinya hidup dalam kosmos alam raya dipandang sebagai suatu tatanan yang “teratur” dan “tersusun” secara “hirarkis” dalam sebuah “tatanan budaya” yang terjaga. Dalam pembahasan makalah ini, Mitos

masyarakat nelayan Saya hubungkan dengan pantangan-pantangan atau Pemali di laut.

1. Mitos Sebagai Seni dan Kepercayaan

Mitos adalah cerita tentang peristiwa-peristiwa semi historis yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia, Mitos pada dasarnya bersifat religious, karena memberi rasio pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Mitos adalah produk imajinasi kreatif, dan merupakan suatu karya seni maupun suatu pernyataan religius yang potensial. Penciptaan mitos merupakan suatu jenis kreatifitas manusia yang sangat penting, dan studi tentang proses penciptaan mitos serta hasilnya dapat member petunjuk-petunjuk yang berharga mengenai bagaimana orang mengartikan dan berpikir tentang dunia mereka.

Fungsi Mitos adalah untuk menerangkan. Mitos memberi gambaran dan penjelasan tentang alam semesta yang teratur, yang merupakan latar belakang perilaku yang teratur. Untuk mewujudkan keteraturan alam semesta yaitu dengan laut, masyarakat nelayan menyakini adanya keharusan dan pantangan-pantangan atau pemali-pemali selama proses penangkapan ikan di laut.

2. Fungsi Pemali Dalam Kebudayaan Nelayan dan Pelaut Bugis Di Sulawesi Selatan.

Kroeber (1974) mengatakan, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tatacara, gagasan dan nilai-nilai dan diwariskan dari perilaku yang ditimbulkannya. Demikian pula Herkovits mengungkapkan, bahwa

kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan dan persepsi abstrak tentang jagad raya yang berada dibalik perilaku manusia, dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di kalangan masyarakat. Kebudayaan dipelajari melalui sarana bahasa, bukan sesuatu yang diwariskan secara keseluruhan yang terpadu. Orang mempertahankan dan merawat kebudayaannya dalam rangka untuk menangani masalah dan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain satu-satunya peralatan yang dimiliki oleh manusia untuk menunjang dan mempertahankan kehidupannya dan dalam rangka menciptakan harmonisasi dengan lingkungan adalah kebudayaan.

Akhirnya kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk berubah agar dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang juga senantiasa berubah. Kemampuan berubah bagi sebuah kebudayaan ditandai oleh kapasitas yang dimiliki oleh pemangku kebudayaan yang bersangkutan, unsur penunjangnya dapat berupa adanya inovasi dan kreativitas serta kemampuan meniru sesuatu yang baru dari unsur kebudayaan lain.

Pada tiap suku bangsa dan kelompok masyarakat (komunitas) memiliki kebudayaan yang merupakan pedoman dalam setiap tingkah laku manusia dan kebudayaan tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan

jaman. Setiap individu (manusia) dalam berhubungan dengan yang lainnya, apakah berhubungan dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan maupun kepada Tuhannya, terdapat hal-hal tertentu yang diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan. Yang dilarang itulah yang termasuk dalam golongan PEMALI. Pemali ini merupakan larangan atas kebiasaan-kebiasaan dan merupakan unsur kepercayaan yang dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan manusia. Eksistensi pemali terkait dengan sanksi dan “pahala” bagi pendukungnya. Artinya, jika seseorang mampu menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang maka mereka diyakini pasti selamat dari kemungkinan dan ancaman bahaya yang mungkin terjadi.

Pada proses penangkapan ikan, nelayan bagang juga mengenal adanya suatu aturan-aturan, baik dalam bentuk sebuah keharusan yang mesti dan wajib dilakukan maupun dalam bentuk pamali-pamali yang tidak boleh atau dilarang dilakukan selama memulai kegiatan penangkapan ikan atau jika mereka berada di atas bagang, yaitu :

- Sebelum melaut mereka mengenal aturan yang harus mereka lakukan yaitu berdoa pada saat akan turun melaut. Untuk menghindari mabuk laut sebelum naik ke atas perahu mereka biasanya melakukan suatu cara yaitu membasuh muka mereka dengan air laut dan mencicipinya kemudian berniat lalu naik ke atas perahu .
- Pada saat berada di atas bagang, ada juga aturan yang tidak membolehkan orang untuk bertindak

sembarangan seperti buang air kecil disembarang tempat, apalagi di tengah bagang karena itu disediakan tempat pada sisi bagang. Menurut mereka bila pantangan itu dilanggar maka hasil tangkapan tidak akan banyak karena mereka menganggap bahwa dengan buang air kecil di tengah-tengah bagang sama saja dengan mengotori rejeki yang mereka cari yaitu ikan-ikan yang telah terperangkap dalam jaring dan ikan-ikan yang belum masuk dalam jaring.

- Pantangan yang lainnya adalah tidak boleh mengguyur sembarangan selama berada di atas bagang. Mereka beranggapan bahwa siapa tahu yang mereka tegur itu adalah penguasa laut. Maksudnya terkadang mereka melihat hal-hal yang aneh atau masih baru di laut, maka hal itu tidak boleh ditegur.
- Dilarang membawa uang bila akan turun melaut. Hal ini dianggap bahwa sebelum ada tangkapan sudah ada yang mau membeli. Hal tersebut mereka anggap takabur. Maksudnya hasil penangkapan belum diperoleh sudah ada yang mau membeli padahal mereka percaya kalau rejeki itu tergantung dan ditentukan oleh Sang Pencipta. Jadi dengan membawa uang, seakan-akan bahwa mereka akan memperoleh hasil tangkapan yang banyak.
- Seorang nelayan dipantangkan pergi melaut atau melakukan kegiatan penangkapan ikan jika ada orang meninggal dunia dikampung mereka, baik dari keluarga sendiri ataupun orang lain. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menyakini dan menjadikan acuan bahwa, jika ada seseorang atau sekelompok orang

yang pergi menangkap ikan ataupun pergi berlayar tiba-tiba ada orang yang meninggal baik dirumah sendiri maupun dirumah orang lain (tetangga), maka pemali untuk tetap pergi, mereka pasti mengambil keputusan untuk menunda perjalanan untuk beberapa saat. Mereka percaya sepenuhnya berdasar atas pengalaman mereka bahwa jika sewaktu mau berangkat tiba-tiba ada orang yang meninggal, tetapi tetap pergi dan sepanjang perjalanan selalu bertemu dengan orang yang meninggal begitu pula setelah tiba di tempat tujuan ada lagi orang yang meninggal.

- Kalau sedang berada di tengah laut. Apakah itu pergi menangkap ikan atau pergi berlayar, maka pemali ada yang membuang abu gosok ke laut, karena menurut kepercayaan mereka penjaga tempat tersebut pasti marah dan hal tersebut diyakini menimbulkan malapeta.
- Kalau sedang melakukan perjalanan lalu menegur (Makkakparang) apa saja yang dianggap keramat adalah merupakan pemali yang sama sekali tidak boleh, karena akibatnya bisa celaka (kualat).
- Kalau sedang berada di tengah laut dan kebetulan dirasakan tidak ada angin, maka orang-orang yang berada diatas kapal pemali meminta-minta angin baik disengaja maupun tidak, karena biasanya tiba-tiba datang angin bertiup dengan sangat kencang yang kemungkinan besar menimbulkan bencana.
- Apabila sedang memasak nasi di atas kapal atau perahu dan membuang gelembung-gelembung airnya ke laut

adalah pemali juga bagi pelaut, karena mereka percaya bahwa tidak lama kemudian bahaya datang.

- Menimba air atau mencuci panci / periuk ke laut dengan menjulurkan panci atau periuk tersebut ke dalam laut adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga yang sementara berada di tengah-tengah laut karena sering terjadi tanpa diduga datang angin kencang yang serupa hitamnya dengan pantat panci atau periuk tersebut.

Dalam segala segi kehidupan, mereka meletakkan pemali sebagai dasar, baik yang berhubungan dengan usaha pencaharian hidup yang menentukan kesejahteraan hidup maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pantang-pantangan seperti itu sama sekali tidak pernah mereka langgar karena mereka beranggapan dan menyakini bahwa laut penuh dengan misteri dan disanalah tempat mencari rejeki dan menjadi sandaran hidup. Untuk itu mereka harus menghormati dan menghargai yang ada didalam laut. Semua itu demi untuk menjaga dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Fungsi Kesenian Bagi Kehidupan Nelayan dan Pelaut Bugis Di Sulawesi Selatan

Kompleksitas fenomena sosial budaya bahari, terutama berkaitan dengan beragamnya kelompok dan kategori social yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan laut serta beragamnya sektor mata pencaharian terkait laut.

Kebudayaan bahari terdiri dari komponen-komponen / aspek-aspeknya yang saling terkait membentuk suatu keseluruhan. Gagasan / ide-ide dalam budaya bahari (perikanan, kenelayanan, kepelayaran) tentu sangat luas. Berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya dan rekayasa jasa-jasa laut, dalam kebudayaan maritim Bugis, Bajo dan Makassar, Mandar dan Buton mengakar beberapa gagasan utama saling terkait yang banyak menjadi pedoman bagi keputusan / pilihan perilaku usaha nelayan, yaitu :

1. Ikan di laut dalam kondisi melimpah “tidak akan habis sepanjang/ selama daun-daun pohon di darat belum habis.
2. Laut yang luas dengan segala isinya tidak ada orang tertentu memilikinya, ini diciptakan oleh Tuhan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan usaha keras
3. Dengan teknologi eksploitasi seperti apapun tidak mampu menghabiskan isi laut kecuali hanya mengurangi populasinya.
4. Usahakan dan manfaatkanlah rahmat / berkah atau pemberian Yang Maha Pencipta tersebut, janganlah menangkap/memancing ikan-ikan kecil di pinggir laut, tetapi pergilah ke laut dalam memancing ikan-ikan besar di sana agar usaha berkembang.

4. Fungsi Kesenian Pesta Nelayan Tinja'na Palebbo

Mereka masih menyakini bahwa upacara pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* disamping mengandung unsur-unsur mistik yang dipaukan dengan unsur-unsur keagamaan

dalam pelaksanaannya merupakan salah satu kebiasaan yang tidak mungkin bisa dihapuskan begitu saja. Kepercayaan mengadakan upacara pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* bagi nelayan yaitu agar pada saat mulai aktivitas melaut hasil tangkapan mereka semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

Disamping merupakan kenikmatan pada hidup sehari-hari, kesenian yang beraneka ragam mempunyai sejumlah fungsi, antara lain:

a. Fungsi hiburan

Upacara pesta nelayan terdapat hiburan berupa adanya perlombaan perahu yang dilakukannelayan. Hal ini tercermin pada hiruk pikuknya para undangan pada saat menjelang perlombaan dimulai. Mereka berteriak-teriak memberikan dukungan kepada perahu andalannya yang meraka jagokan. Undangan ini terdiri dari para remaja, orang tua, dan anak-anak. Gadis-gadis remaja merupakan salah satu penari bagi kaum remaja putra maupun laki-laki perjaka untuk turut dalam acara *Tinja'na ToPalebbo*, bahkan terjadi perkenalan antara mereka dan tidak jarang sampai kepelaminan.

Fungsi hiburan lainnya dari upacara *Tinja'na ToPalebbo* dapat dilihat dari adanya aktivitas perlombaan perahu yang dihiasi dengan berbagai ornament. Kegiatan ini diselingi berbagai kegiatan seperti musik dangdut yang merangsang peminat untuk bergoyang dan berhura-hura dan diselingi music modern lainnya membantu tercapainya fungsi upacara sebagai fungsi hiburan. Dengan pelaksanaan upacara ini sungguh merupakan suatu kesempatan bagi

warga masyarakat menikmati berbagai hiburan dan sekaligus mengantar mereka melupakan sejenak kesibukan dalam keseharian sebagai nelayan atau pengembara di laut.

b. Fungsi solidaritas

Pesta nelayan *Tinja'na ToPalebboyang* semula fungsi dan tujuan utamanya adalah perwujudan dan pengucapan rasa syukur kepada Tuhan dan arwah nenek moyang atas keberkahan dalam melakoni hidup dan kehidupan dalam satu tahun berjalan. Upaya masyarakat nelayan untuk menghadirkan pesta upacara dengan harapan lebih meriah dalam penyelenggaraan mengandung unsur solidaritas yaitu rasa kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini diharapkan berdampak pada tingginya rasa solidaritas dan kebersamaan diantara mereka.

c. Fungsi Religius

Keyakinan anggota masyarakat umum, khususnya para nelayan mengenai kedudukan para Sanro maupun para leluhur arwah dalam kehidupan para nelayan. Kedudukan sanro bagi nelayan dikenal sebagai unsure penyampaian doa-doa yang berhubungan langsung dengan arwah leluhur para nelayan yang bersemayam di laut. Namun demikian hubungan antara manusia dengan alam gaib. Selaon itu Sanro yang melakukan doa-doa keselamatan kepada arwah para leluhur dan kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa agar para nelayan selamat di laut dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam mengarungi lautan.

Nelayan mentaati semua janji dan pesan-pesan serta menghindari segala pantangan yang ditetapkan, maka para nelayan diharapkan semakin berhasil dalam penangkapan ikan dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

d. Fungsi Sosial

Upacara Fungsi Upacara *Tinja'na ToPalebbo* tidak hanya dilakukan secara perorangan di rumah nelayan masing-masing tetapi dilakukan bersama-sama di pantai. Tercermin juga pada pola kerjasama baik untuk menyiapkan berbagi macam makanan maupun menyiapkan perahu-perahu yang biasanya mereka pakai dan menghiasinya dan menyiapkan biaya penyelenggaraan upacara tersebut.

Fungsi sosial dari upacara *Tinja'na ToPalebbo* adalah memantapkan hubungan sosial dalam masyarakat melalui pertunjukannya. Pertunjukan lomba perahu yang dilakukan oleh para laki-laki (*Tauurane*), para warga masyarakat baik yang berusia lanjut, tua, maupun muda, wanita dan laki-laki berbondong-bondong datang menyaksikan pertunjukan upacara.

Para peserta dan penonton memberikan semangat kepada jagonya lebih cepat memacu perahunya dengan tepuk tangan meriah dan memberi semangat agar cepat mencapai finish dan memenangkan perlombaan.

e. Fungsi ekonomi

Isi naskah lontara yang selalu dibacakan dalam upacara *Tinja'na ToPallebbo* tersebut terkandung suatu gagasan tentang

pola penataan ekonomi rumah tangga yang ideal. Dalam hal ini para leluhur menghindari agar setiap nelayan tidak melakukan monopoli atas sumber daya alam laut, melainkan harus membaginya secara merata sesuai dengan jasa dari kerja masing-masing orang. Para leluhur nelayan menurut pesan – pesan para leluhur, khususnya menyangkut tatacara pengaturan ekonomi rumah tangga. Tidak menyenangkan suasana rumah tangga para nelayan yang gemar menghambur-hamburkan nasi, memperbutkan makanan, makan secara sembunyi-sembunyi, bersifat boros dan sebagainya

Selain itu nelayan tidak boleh bersifat pemboros dan pelit. Sehingga tercipta kehidupan ekonomi yang stabil sekaligus mendorong timbulnya kesejahteraan bersama dan kemakmuran di kalangan anggota masyarakat nelayan.

Selain itu, isi naskah lontara menyebutkan tentang larangan bagi ibu-ibu rumah tangga mengosongkan periuk nasi, mengosongkan gentong tempat air, mengosongkan tempat beras. Semua itu merupakan symbol yang mempunyai makna khusus, bahwa setiap orang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing untuk mencari rejeki yang halal.

Berdasarkan pesan-pesan tersebut jelaslah bahwa dalam pelaksanaan upacara *Tinja'na ToPalebbo* terkandung fungsi-fungsi ekonomi, termasuk mendorong timbulnya etos kerja yang tinggi bagi nelayan. Nelayan dilarang membiarkan nyala api mati, sebab nyalanya tersebut merupakan metafora dari nelayan tidak boleh terlena dalam tidurnya yang panjang di malam hari. Hal ini berarti pula bahwa setiap nelayan harus bekerja secara giat untuk mencari sumber penghidupan

untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi mereka sendiri.

f. Fungsi pengikat antar generasi tua dan generasi muda

Fungsi upacara *Tinja 'na To Palebbo* yang cukup menonjol adalah pemantapan hubungan solidaritas masyarakat untuk lebih menambah keterikatan antara satu dengan lainnya. Upacara ini menjadi sarana sosialisasi berbagai ikatan normah dan nilai adat istiadat serta kebiasaan warga masyarakat bagi generasi pelanjut. Dalam hal ini warga masyarakat termasuk kaum remaja dan anak-anak secara langsung dapat mengambil alih atau mewarisi berbagai normah - normah, disamping nilai-nilai budaya luhur yang dipesankan melalui upacara ini.

Secara psikologis pengalaman di masa kecil biasanya meninggalkan kesan cukup dalam hingga anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Mereka menyimak dan memperhatikan pesan-pesan pesan-pesan leluhur melalui pembacaan naskah lontara, dengan sendirinya mereka dapat mengetahui tentang sifat positif, norma-norma sosial serta nilai-nilai luhur yang sejak lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya. Selain itu melalui upacara tersebut yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat, segala seluk – beluk proses pelaksanaan upacara itu, generasi muda dapat secara langsung merekamnya dalam pikiran mereka.

Maka secara berangsur-angsur tatacara upacara *Tinja 'na To Palebbo* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pengalaman individu masing-masing peserta upacara.

7. Dampak Sosial Budaya dari Pelaksanaan Upacara *Tinja'na ToPalebbo* Terhadap Kehidupan Nelayan

Pelaksanaan Upacara *Tinja'na ToPalebbo* mempunyai dampak terhadap agama, ekonomi, seni, dan solidaritas, masing – masing unsur dampak tersebut digambarkan sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Agama

Pelaksanaan Upacara *Tinja'na ToPalebbo* mempunyai dampak positif terhadap nilai-nilai keagamaan serta pemujaan martabat nelayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap arwah leluhur yang memberikan petunjuk atau petunjuk. Dalam hal ini masyarakat nelayan Mamuju menganggap perlu untuk tetap melestarikan dengan melaksanakan setiap tahun ritual upacara *Tinja'na To Palebbo*. Keyakinan kepada Tuhan yang dituangkan dalam rasa syukur dan pembacaan doa-doa berdasarkan kitab suci Al Quran serta penyertaan rasa patuh kepada para leluhur dengan membacakan doa-doa keselamatan arwah mereka yang telah mendahului kita semoga selamat dan diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut keyakinan nelayan, bahwa Tuhan sebagai pencipta dan penentu nasib manusia. Refleksi dari hal tersebut adalah dilaksanakannya pelaksanaan upacara *Tinja'na ToPalebbo* secara bersama-sama dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur kepada arwah para leluhur. Dampaknya bahwa ini dapat mempertebal iman dan silaturahmi antara masyarakat nelayan.

b. Dampak Terhadap Ekonomi

Mantapnya Etos kerja, salah satu dampak positif upacara *Tinja'na ToPalebbo* terhadap aspek ekonomi nelayan adalah bangkitnya rasa percaya diri serta tingginya semangat para nelayan untuk bekerja keras turun ke laut untuk menangkap ikan. Asumsinya bahwa berkat pelaksanaan upacara tersebut mereka memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak daripada tahun yang lalu. Semangat tersebut termasuk salah satu nilai utama yang dipandang sebagai motivasi dalam pembinaan ekonomi masyarakat nelayan, disamping kerja keras mereka harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan.

c. Dampak Terhadap Seni

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* adalah upacara tradisional para nelayan yang telah ada dan secara turun temurun, upacara sederhana yang mengandung nilai spiritual ini salah satu bagian pelaksanaannya adalah mengandung unsur seni yang berdampak luas untuk menarik komunitas para nelayan untuk hadir bersama-sama menyelenggarakan pesta ini menjadi lebih meriah. Unsur-unsur seni yang terkandung dalam upacara nelayan. Disamping sebagai daya tarik untuk mengumpulkan komunitas nelayan berdampak pula terhadap rasa keindahan dan keikhlasan, kegembiraan yang semakin menambah semaraknya upacara *Tinja'na ToPlebbo*.

Terdapat unsur seni dalam upacara tradisional ini adalah untuk menggugah perasaan baik ditinjau dari seni. Pembacaan doa-doa (Barasanji) terdapat juga unsur-unsur

magis yang memaknai sebuah upacara tradisional yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat nelayan.

Kegiatan kesenian dalam upacara ini adalah kesenian tradisional yang mengandung unsure-unsur dan nilai-nilai keagamaan seperti pembacaan doa-doa, pembacaan seni lontara, hiasan warna-warni pada perahu, yang dapat membnagkitkan imajinasi para peserta upacara tentang kebesaran Tuhan dan rahmat yang diberikan kepada ummatnya. Penyelenggaraan kesenian pada upacara ini dapat berdampak pada lapisan masyarakat; luas diluar komunitas nelayan yang pada akhirnya membuat pesta setiap tahunnya menjadi semakin meriah. Perlombaan perahu sande' merupakan salah satu bagian dari ritual upacara nelayan *Tinja'na ToPalebbo*.

d. Dampak Solidaritas.

Pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* adalah pesta nelayan yang fungsi dan tujuan utamanya adalah pengucapan rasa syukur kepada Tuhan dan arwah nenek moyang. Upacara masyarakat nelayan untuk menghadirkan peserta upacara dengan harapan dapat lebih meriah dalam penyelenggaraanya adalah upaya untuk membangun solidaritas, rasa kebersamaan kekeluargaan, dan persaudaraan. Hal ini mampu berdampak pada tingginya rasa solidaritas dan kebersamaan diantara mereka.

Baik dalam persiapan penyelenggaraan seperti pembuatan makanan dan panganan, menghiasi perahu, maupun dalam aktivitas lainnya. Sehingga terbangun rasa solidaritas, gotong royong, dan semakin memprkokoh rasa persaudaraan dan

kekeluargaan dalam membina keutuhan para komunitas nelayan dan menghadapi hari esok yang lebih baik.

Sampai sekarang masyarakat nelayan menyakini bahwa upacara pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo* sebagai adat- istiadat pesta nelayan yang dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan di laut. Bahwa keberhasilan dalam penangkapan ikan tidak hanya tergantung pada teknologi penangkapan ikan yang dipakai, tetapi juga dikaitkan dengan pelaksanaan ritual kegiatan pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo*.

8. Kesimpulan

Seni adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menerangkan, memahami, dan menikmati hidup. Ini berdasarkan kemampuan yang hanya khusus terdapat pada manusia untuk *menggunakan lambang* guna memberi bentuk dan arti kepada alam fisik yang tidak hanya sekedar untuk keperluan yang bermanfaat. Ahli antropologi berkepentingan dengan kesenian sebagai *pencerminan nilai-nilai kebudayaan* dan sesuatu yang penting bagi rakyat.

Kesenianlah yang memberi sarana dan bahan untuk permainan imajinatif kita, dan dengan demikian membantu menegakkan kehidupan. Oleh karena itu, menurut jalan pikiran ini kesenian bukan suatu kemewahan yang hanya dimiliki dan *dinikmati* oleh sekelompok kecil seniman atau pelamun, tetapi sejenis *perilaku sosial* yang perlu, dimana setiap orang yang normal dan aktif ikut berperan serta.

Dalam masyarakat nelayan mengenal Tradisi lisan meliputi dongeng, kepercayaan, dan adat kebiasaan dalam kebudayaan. Sedangkan kesenian verbal mencakup cerita

dan nyanyian rakyat yang terlihat pada saat pelaksanaan pesta nelayan *Tinja'na ToPalebbo*. Kesenian verbal pada umumnya meneruskan adat kebiasaan dan nilai-nilai kebudayaan.

Mitos pada dasarnya religius, dengan isi yang mengenai masalah-masalah besar dalam kehidupan manusia. Dengan memaparkan suatu alam semesta yang teratur, mitos berfungsi sebagai pembentuk ukuran perilaku yang teratur. Mitos masyarakat nelayan dapat ditelaah melalui pantangan-pantangan atau pamali-pamali para nelayan pada saat hendak dan telah sampai kembali ke rumah selama penangkapan ikan. Legenda adalah cerita semihistoris, yang menceritakan perbuatan-perbuatan para pahlawan, perpindahan penduduk, dan pembentukan alat kebiasaan setempat. Masyarakat nelayan mempunyai legenda yaitu legenda pembuatan perahu Penisi.

Pelaksanaan upacara *Tinja'na ToPalebbo* didasarkan pada adanya konsep kepercayaan dan pandangan hidup tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib yang berada di laut bahkan menghuni setiap tempat-tempat, benda-benda yang ada di alam ini. Kekuatan tersebut dapat menguntungkan atau bersahabat dan bisa juga merugikan, jika manusia tidak dapat menjalin hubungan baik dengan alam. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk berhubungan baik dengan mereka, adalah melalui pelaksanaan upacara adat sebagai wadah berkomunikasi pada kekuatan gaib dan Tuhan untuk mendapatkan suatu keberhasilan atas sesuatu yang diinginkannya.

Salah satu tradisi nelayan yang menyangkut pengetahuan tentang posisi yang berdasarkan pada bintang. Pengetahuan

tentang hari baik dan hari buruk untuk turun ke laut dan melaksanakan upacara *Tinja'na ToPalebbo* (pesta nelayan) yang biasa disebut *allo macoa* dan *allo karras* dalam tradisi pesta nelayan.

Dari sudut fungsional maka upacara yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Mamuju terdiri dari fungsi religi, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi hiburan dan fungsi edukatif. Sedangkan dilihat dari nilai-nilai budaya maka didalamnya terkandung nilai-nilai keagamaan, nilai solidaritas, nilai seni, dan ekonomi. Kesenian harus dihubungkan sebagai kegiatan atau jenis perilaku yang menambah kesejahteraan dan membantu memberi bentuk dan arti pada kehidupan.

Segala jenis kesenian dapat diharapkan mencerminkan nilai-nilai dan perhatian rakyat yang menciptakan dan menikmatinya.



BAB VII

BUDAYA PASOMPE BAGIORANG BUGIS

Catatan untuk Bab ini:

*Ingin saya tunjukkan bakti yang tinggi kepada guru kami Prof. Abu Hamid yang telah menulis dan mempresentasikan tulisan di salah satu seminar Internasional di Belanda, maka tulisan ini (Bab VII dan **Bab VIII**) saya sertakan dalam buku ini, mengingat pembahasannya sangat relevan dengan inssu yang dibahas dalam buku ini, tentu saja dengan penyesuaian seperlunya. Semoga almarhum guru kami Prof. Dr. Abu Hamid, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT.,
Amiin ya Rabbal Alamin*

A. Pendahuluan

Bahwa nenek moyang pada abad-abad yang silam berani menjelajah lautan dengan perahu sederhana sampai ke kamboja, Malaysia, philipina dan Australia, melainkan didorong oleh pikiran-pikiran ilmiah tentang kemahiran dan keterampilan mereka mengarungi samudrahanya dengan menggunakan perahu-perahu layar kecil yang dibuat secara tradisional. Berbagai pustaka

telah menyebutkan demikian itu, bahkan lebih mengherankan lagi jika ditemukan dalam kepustakaan Melayu, bahwa beberapa Sultan dan pembesar Melayu berasal dari keturunan Bugis, seperti halnya Sultan Johor, Selangor, Trenggano dan Sultan Pahang.

Tulisan Prof. Mr. G.J Resink dalam harian “Pedoman” di Jakarta tanggal 5-9-1960 mengatakan, bahwa orang dapat pula memperoleh gambaran mengenai ketangkasan orang Bugis dilautan di waktu yang lampau. Ketangkasan orang Bugis di lautan senantiasa ingin diperingati, sebagaimana halnya dalam bulan Agustus 1960, diadakan racing perahu-perahu Pinisi dari pelabuhan Makassar ke Jakarta dengan sejumlah muatan tertentu, harus di tempuh selambat-lambatnya 70 jam.

Semangat kebaharian pula telah teruji pada tahun 1986, setelah Phinisi Nusantara menyelesaikan pelayarannya dari Jakarta ke Vancouver Kanada, melalui samudra pasifik dengan menempuh jarak ± 10.600 mil⁻¹).

Fakta-fakta tersebut diatas, kiranya cukup beralasan jika pada kesempatan ini saya memilih topic “ Pasompe bagi orang Bugis di Sulawesi Selatan”, yaitu suatu usaha untuk mengungkapkan budaya maritime masyarakat Sulawesi Selatan. Pasompe dari bahasa Bugis yang berarti orang yang berlayar. Berasal dari kata “sompe”, yaitu layar dan mendapat awalan pa yang bermakna pelaku dari orang yang melakukan pekerjaan berlayar. Jika dilihat dari segi istilah, maka pasompe bisa berarti pelayar, tetapi tidak semua pelayar dapat dikategorikan sebagai pasompe dari segi maknanya. Orang yang melakukan mata pencaharian di lautan sedapat mungkin menggunakan layar sebagai tenaga pendorong, tetapi tidak semua itu dapat disebut sebagai pasompe. Jadi kata pasompe mengandung makna pelaut-pedagang yang berlayar dari

pulau ke pulau atau dari satu negeri ke negeri lainnya. Sementara sebagian ahli mengatakan bahwa pasompe bermakna pengembara atau perantau ke negeri orang, dihubungkan dengan kegiatan migrasi. Akhirnya di tarik kesimpulan bahwa orang Bugis itu mempunyai budaya migrasi karena ketangkasannya berlayar.

Sehubungan dengan makna pasompe tersebut, para penulis asing dan sama halnya juga penulis bangsa Indonesia sendiri, sejak lama menganggap bahwa kegiatan pasompe itu adalah kegiatan berdagang dengan berlayar antar pulau atau antar negeri pesisir. Terutama dihubungkan dengan Hukum pelayaran dan perdagangan yang dianut oleh mereka dalam melakukan kontrak kerja, perkongsian, upah muatan/ penumpang, utang-piutang dan masalah kontak dagang lainnya. Para penulis tersebut, seperti halnya L.J.J. Caron (1937), H.J.Friedericy (1931), P.A.Leupe (1849), Prof. Dr. Koher (tanpa tahun) dan Ph. O. L. Tobing (1961).

Para ahli yang telah berjasa menyampaikan informasi kepada kita, rasanya cukup jelas dan memancing minat untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi, agar warisan kebahariawan tersebut dapat memberi sumbangan bagi kemajuan bangsa dan dunia ilmu pengetahuan. Tulisan ini tidak akan memperdalam uraian tentang perdagangan dari kegiatan pasompe, akan tetapi mungkin lebih berguna jika dikaitkan dengan sistem teknologi pembuatan perahu tradisional (sebuah kasus) dalam sistem pengetahuan pasompe sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya maritime.

B. Latar belakang Sejarah Kebaharian

Jawaban yang paling mendasar atas pertanyaan, kenapa orang Bugis, orang Makassar dan Mandar gemar dan tangkas berlayar, maka selalu dikembalikan pada epos La Galigo, yaitu

episode pengembaraan dan pelayaran Sawerigading di kepulauan Indonesia dank ke Cina. Jawaban seperti ini, dianggap tidak logis jika tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis dari karangan para ilmunan.

Demikian dikatakan oleh L.A. Emanuael (1945) Assisten Resident Bone dalam Memorie van Overgave, sebagai berikut ;

“...Deze vrijmoedigheid van het boegineesche volk is een gevolg van hare minder geslotenheid in vergelijk met die der meeste Oostersche volkeren, waardoor wij tevens in staat orden gesteld spoediger hun grieven te leren kennen, ...deze vrijmoedigheid gepaard met hun vroolijkeheid en aankelijkszin maakt het Boegineesche volksympathiek ... Verdermoet nog gewezen worden op hun ondernemingszin, special opeconomisch gebied, waar dit verband houd met handel, nijverheid en transport (kustvaart, landstransport) ... dat de Boegineesche maatschappij sedert circa 900 jaar intensiever met het wereldverkeer in contact is gekomen. De oudste statenvorming aan de golf van Bone heft naar schatting in den 12e eew plaats gehad (Loewoe)” 2)

Digambarkan tentang sikap-sikap orang Bugis dan suasana ekonominya yang berkisar pada pelayaran yang telah dimilikinya sejak beberapa abad lamanya. Selanjutnya Dr. Ch. Pelras yang mengutip tulisan Tome Pires, antara lain menyatakan ;

“... Kepulauan Macacar terdapat kira-kira empat atau lima hari pelayaran lewat pulau yang baru kita sebut (Borneo), di tengah jalan kalau kita dari Malaka ke Maluku Pulau itu berdagang dengan Malaka, Jawa, Brunei, negeri Siam dan juga dengan semua tempat yang terdapat antara Pahang dan negeri Siam. Tidak ada bangsa yang lebih menyerupai orang Siam kecuali mereka ... Mereka kafir, gagah dan

suka berperang. Disitu banyak bahan makanan. Orang dari pulau itu adalah perampok paling hebat di seluruh dunia, kekuatannya sangat besar dan perahunya banyak. Mereka berlayar untuk merampok dari negeri mereka sampai ke Pegu, ke Maluku dan Banda, dan di semua pulau di sekitar Jawa ... Mereka berlayar keliling pulau Sumatera. Pada umumnya mereka bajak laut, oleh orang Jawa mereka disebut Bajau atau orang selat. Barang rampasannya mereka bawa ke Jumaia dekat Pahang, tempat mereka berjualan dan mengadakan pasar terus menerus” 3)

Pelayaran orang-orang Bugis dan Makassar di kepulauan Indonesia dan Manila yang dikaitkan dengan hukum pelayaran dan perdagangan yang dijadikan pedoman, lebih lanjut di lukiskan oleh Dr. F. W. Stapel (1937), katanya ;

“Reed in de 15de eeuw waren zij waren zij de vrachtvaarders van den Indischen archipel. Uit een Wetboek voor Zeevarenden in het Koninkrijk Mangkassar en Bougie, op het eiland Celebes, dat Mahmoed Sjah, die van 1424 tot 1445 of 1450 als soeverein over Malaka heerschte, opscreef uit den mond van Makassaarsche zeelieden die de havens van zij rijk bezochten, is komen vast te staan dat Makassaren, destijds in hun gevolgte Boegineezen in die tijden geregeld voeren op Timor, Soembawa, Java, Bandjarmasin, Palembang, Bengkoelen, Atjeh, Perak, Djohor en Manilla “4)

Lebih khusus lagi Prof. Ph. O.L. Tobing telah membukukan Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa dalam tahun 1961 dimana bahan-bahannya diambil dari lontara (no. 107 YKSS)⁵⁾ sesudah membandingkan 18 buah lontara. Dikatakannya, betapa kehebatan pelayaran dan perdagangan orang Bugis masa

lalu membudaya dalam masyarakatnya, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam kedudukannya sebagai Antropolog, beliau memandang isi teks dalam hukum pelayaran tersebut, adalah diciptakan oleh dan untuk orang yang pandangan hidupnya berlainan dengan pandangan hidup orang di dunia moder. Pandangan hidup itu berkisar pada pikiran dan perasaan totalitet, bahwa di dalam hukum pelayaran dan perdagangan orang Bugis itu, pikiran dan perasaan totalitet nyata dengan jelasnya.

Adapun jalur dan musim pelayaran, L.V. Vuuren (1917) menulis dalam artikelnya⁶⁾ tentang pelayaran orang Bugis dan Mandar di pantai barat Sulawesi, bahwa pelayaran langsung menuju Singapura dan setelah mereka kembali ke Sulawesi, dilanjutkannya ke Maluku. Jika angin baik, maka pelayaran ke Singapura memakan waktu 14 hari, dilakukan dalam bulan Oktober, saat musim timur akan berakhir. Dalam bulan Desember, musim barat (penghujan) sudah mulai keras dan bulan Januari mereka berlayar lagi ke arah timur untuk memasarkan barang-barang yang dibawanya dari Singapura. Jalur ke timur itu melalui pulau Spermonde ke Sinjai (teluk Bone) langsung ke Ambon dan kepulauan Maluku lainnya, sedang jalur yang lain menuju utara ke Konawe (Kendari) dan ke Bungku (Selat Tomini) yang biasanya bertemu di Ternate. Menjelang musim barat berakhir, mereka berlayar pulang ke Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan angin tenggara. Awal musim kemarau, mereka berlayar ke arah barat, yaitu ke Gima (Bima), Sumbawa, Jawa, Sumatera dan langsung ke Singapura juga Malaysia. Jalur yang lain menuju Banjarmasin, Pontianak, Mempawa, kemudian menyeberang ke Malaysia dan ada kalanya langsung ke Indocina. Pelayaran ini berkisar enam bulan lamanya dan mereka pulang ke Sulawesi jika musim barat mulai bertiup

C. Pola Hubungan Kerja

Kelompok masyarakat Pasompe dewasa ini di Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan, khususnya penggunaan mesin sebagai tenaga bantu untuk mendorong perahu disamping bantuan layar. Mekanisasi ini menyebabkan tambahan konstruksi dalam pembuatan Pinisi atau Lambo sebagai perahu layar. Namun pola hubungan kerja dan organisasinya masih mengikuti aturan-aturan tradisional.

Organisasi kelompok profesi ini terdiri atas ; a. Pemilik perahu yang disebut Ponggawa, ialah orang yang menyediakan perahu layar yang akan dioperasikan oleh Nakhoda bersama beberapa orang Sawi. Ada kalanya si pemilik sendiri menakhodai perahunya jika ia berpengalaman tentang seluk beluk pelayaran. b. Nakhoda, yaitu pemimpin dari Sawi yang bertanggung jawab atas keselamatan barang dan penumpang selama pelayaran. c. Sawi, yaitu semua orang yang menumpang di atas perahu tersebut. Ada empat macam Sawi, yakni Sawi tetap, Sawi bebas, Sawi penumpang dan orang yang menumpang. Empat kategori Sawi ini menentukan status mereka dan peranannya dalam pelayaran. Meskipun empat macam Sawi, akan tetapi hanya tiga kategori saja yang berhak mendapat predikat Sawi, sedangkan kategori ke-empat, disebut saja tomanumpang, yakni orang yang menumpang. Setiap orang yang ikut berlayar adalah pedagang, mereka harus membayar sewa perahu. Namun mereka harus pula bekerja sama menjalankan pelayaran, oleh karena tak ada seorang pun yang harus dilayani. Setiap orang Sawi membawa barang dagangan, karena itu mereka adalah pedagang.

Pertalian kekerabatan ikut memperkuat ikatan kelompok pasompe, walaupun mereka tidak bermukim bersama dalam

suatu komunitas. Ponggawa memilih seorang nakhoda dari kalangan keluarganya yang diberi kepercayaan untuk melayarkan perahunya. Demikian pula Nakhoda yang disebut pula Juragang, memilih Sawi dari kalangan kerabatnya dan tetangganya dengan suatu perjanjian sesuai aturan-aturan pelayaran dan perdagangan.

Apabila suatu perjanjian telah disepakati, maka berarti terbentuklah suatu jaringan hubungan kerja, yaitu hubungan kerja antara Ponggawa dengan Nakhoda/Juragang dan hubungan kerja antara Nakhoda dengan para Sawi dalam pola sebagai berikut ;

- Pola 1, Ponggawa ikut sendiri berlayar dan berfungsi sebagai Nakhoda, dan dibantu oleh Sawi. Hal ini terjadi, jika ia tidak menemukan orang yang dapat dipercayainya melayarkan perahunya, sedang ia sendiri mahir tentang seluk beluk pelayaran dan perdagangan.
- Pola2, Ponggwamengadakanperjanjindenganbeberapa orang Nakhoda/Juragang. Hal ini terjadi bila Ponggawa tersebut memiliki beberapa buah perahu layar.
- Pola 3, Sistem kongsi, yaitu sebuah perahu yang dimiliki oleh beberapa orang, kemudian dipercayakan kepada seorang Nakhkoda untuk dijadikan sebagai perahu niaga.
- Pola4, seorang *Ponggawa* menyerahkan perahunya kepada seorang Nakhoda bersama *Sawi* yang telah dipilihnya untuk dijadikan sebagai perahu niaga.

Aturan-aturan dalam hubungan kerja, seperti tersebut diatas turut mempengaruhi sistem bagi hasil diantara tiga komponen pasompe, yaitu bagian pendapatan bagi Ponggawa, Nakhoda/ juragang dan bagian pendapatan para Sawi. Kategori status Sawi di atas perahu, mempengaruhi pula pendapatannya dalam sistem

bagi-hasil. Seorang Sawi, bisa saja memperoleh hasil akhir lebih besar, jikalau mereka membawa barang dagangan lebih besar jumlahnya atau lebih tinggi nilainya, ditambah pula lebih pintar berdagang di negeri orang.

Sistem bagi-hasil terhadap keuntungan yang diperoleh dalam sekali trip (antara 4 sampai dengan 5 bulan), yakni dihitung semua keuntungan, dikurangi ongkos-ongkos perawatan dan perbaikan perahu selama pelayaran, kemudian dibagi dua. Ponggawa memperoleh lima puluh persen dan Nakhoda bersama Sawinya juga lima puluh persen sebagai *tawa pasompe*. Dari hasil bagi Nakhoda, dibagi dua lagi, yaitu lima puluh persen untuk Nakhoda dan lima puluh persen pula dibagi rata untuk beberapa orang Sawi. Jumlah Sawi dalam sebuah perahu layar, ditentukan oleh besar dan tipe perahu tersebut, apakah tipe *pinisi* atau tipe *lambo*.

D. Karakter dan Budaya Maritim

Penelitian kita tentang bentuk-bentuk perahu dan sistem teknologinya serta kaitannya dengan kebudayaan maritime di Indonesia, masih dalam taraf awal. Hanya saja, karya C. Nootboom yang berjudul *De boomstamkano in Indonesie* (1932), memperkenalkan pada kita, bahwa bentuk-bentuk perahu itu mempunyai makna. Pendapat ini lebih diperjelas lagi oleh Tobing (1977:111) yang melihat perahu itu dari segi teori *Totaliter way of Thinking*, bahwa perahu di Indonesia merupakan mikrodessa. Peraturan-peraturan yang berlaku di perahu harus dipandang sebagai tata-tertib mikrokosmos. Suasana di perahu harus bercermin pada suasana di desa⁷⁾. Dengan demikian, budaya maritim yang dikembangkan harus bersifat menyatu dengan

struktur sosial dengan segala sistem organisasi yang terjalin di dalamnya.

Bagaimana karakter mereka sebagai pelaut yang berani dan ulet mengarungi samudra, hanya dengan perahu layar sederhana yang dibuat dari kayu, tercermin jiwa lautnya dalam bahasa ungkapan mereka dibawah ini ;

“Pittek cina uala ranreng lopi
Jarung sipeppak uala balonga
Nakusompek mua
Somperenng-E uala paddaga-raga
Tasik-E uala lino pottanang
Lolangeng ri masagenaa-E

Nalawa mua salareng riwu
Nakuguncirik gulikku
Kuola mui tellenng-E natowali-E
Dua sompe kupattinja
Dua guling kupattejjok
Dua balango kupanngatta
Makkarewangeng maneng”

Artinya :

Benang-cina kujadikan tali temali perahu
Jarum sebatang kujadikan jangkar
Aku berlayar jua

Pelayaran kujadikan sebagai hiburan
Lautanlah kujadikan sebagai alam daratan
Pengembaraan yang penuh kebebasan

Biar aku dihadang oleh angin topan
Aku akan putar kemudiku
Aku memilih tenggelam dari pada kembali

Dua layar kusiapkan
Dua kemudi kutancapkan
Dua jangkar kusediakan
Semuanya akan turut terpasang

Kelompok masyarakat pasompe yang terbesar di pantai barat maupun di pantai timur Sulawesi Selatan, menampilkan taraf hidup lebih baik dari pada nelayan. Strata sosial mereka mencerminkan hubungan-hubungan kerja, seperti Ponggawa dipandang lebih tinggi statusnya, oleh karena kemampuan mereka memiliki perahu dan modal. Menyusul nakhoda atau Juragang, memperoleh kewibawaan karena keahliannya tentang kelautan dan mempunyai banyak pengalaman di negeri orang. Nakhoda yang kemudian menjadi kaya, akhirnya memberi perahu layar dan membentuk kelompok pasompe baru, statusnya meningkat jadi Ponggawa. Sementara suami sebagai Sawi pada sebuah perahu sedang berlayar, maka isteri-isteri mereka jika mengalami kesukaran biaya hidup atau biaya yang harus dikeluarkan secara tiba-tiba, mereka datang pada isteri Nakhoda atau pada isteri Ponggawa minta bantuan. Sebaliknya, jika isteri Nakhoda ataupun Ponggawa mengalami kesekaran, musibah atau keperluan lain, maka ia meminta bantuan tenaga dari isteri-isteri Sawi.

Kertergantungan hidup mereka terhadap pelayaran, terdorong melakukan kerja sama, baik di laut maupun di daratan. Pantangan utama setiap pasompe, adalah berselisih atau bertengkar di tengah lautan. Pantangan ini pula berlaku bagi isteri-isteri

yang di tinggalkan. Oleh karena itu, suasana desa dan perahu senantiasa dijalin kerja sama dan kedamaian. Setiap konflik yang akan muncul, harus diredam dan diusahakan menyelesaikannya melalui mufakat dan kedamaian. Disinilah letak pentingnya wibawa seorang nakhoda di kalangan Sawinya. Ia adalah seorang pemimpin, baik di lautan maupun di darat, senantiasa bersikap mengawasi, menuntun dan melihat keselamatan para Sawinya. Ponggawa yang akan mengangkat seorang Nakhoda, bukan saja mengutamakan hubungan kekeluargaan, melainkan kebijaksanaan dan keahliannya tentang pelayaran⁸⁾. Seorang Nakhoda harus memiliki sikap mendidik terhadap Sawinya, mengajarkan kepada mereka bersikap waspada, hemat-cermat, ulet dan kerja keras, berani dan jujur, memperkecil resiko dan mengutamakan kerja sama. Dibelakang dari semua itu berpegang pada sebuah prinsip, yakni prinsip “**dahulukan selamat” dari pada memaksimumkan penghasilan**”. Prinsip ini harus dipegang teguh, baik pada waktu sedang dalam pelayaran, maupun pada waktu menginjakkan kaki di sebuah negeri asing.

Lapangan hidup sebagai pasompe adalah suatu lapangan yang penuh resiko, penuh bahaya yang mengintip kematian, namun budaya mereka memberikan resep tentang bagaimana melakukannya. Kesadaran mereka atas kemungkinan datangnya bahaya angin badai dan ombak di tengah lautan yang tak mungkin diatasi, maka mereka meredam kekuatan dengan sikap “menyatu dengan alam”. Sikap ini adalah refleksi dari prinsip “mendahulukan selamat”.

Sistem pengetahuan kemaritiman, secara tradisonal diwarisi turun temurun, adalah suatu usaha dari kebudayaannya untuk melengkapi diri sebagai masyarakat pasompe. Sejak mereka

berniat untuk berlayar, dipilihlah hari-hari baik guna memulai suatu pekerjaan dan diusahakan menghindari hari buruk, yaitu hari nahasek (nakhas)⁹⁾. Bahkan dianggapnya, bahwa setiap hari itu mengandung makna sendiri secara kualitatif berbeda dengan hari-hari yang lain, berdasarkan terbitnya bulan (qamariyah). Pada umumnya hari yang baik untuk mulai berlayar ialah hari ke 8 (delapan) terbitnya bulan.

Selain sistem pengetahuan tentang Kutika, yaitu mengenai hari-baik dan hari-buruk, mereka juga memiliki sistem pengetahuan astronomy dan oceanology tradisional. Pengetahuan ini didasarkan atas gejala-gejala alam, yaitu terbit dan terbenamnya bintang-bintang, posisi bintang di langit menurut cycle waktu, gerakan ombak dan tanda-tanda permukaan laut. Semua gejala-gejala tersebut diketahui melalui pakkita (penglihatan), parengkalinga (pendengaran), paremmau (penciuman), penedding (firasat) dan tentuang (keyakinan). Nakhoda yang sudah berpengalaman, mengetahui badai topan yang akan dijumpainya, tahu adanya batu karang dihadapannya, maka haluan perahu segera dibelokkan. Pengetahuan seperti ini, masih dimiliki oleh pasompe dewasa ini di kecamatan Malluettasi, Barru, Kajuara dan mungkin pula pasompe orang Bugis Makassar di daerah lain. Kepercayaan terhadap penguasa laut yang disebutnya Nabi Hiderek, amat mengingat pikiran mereka. Nabi Hiderek dianggap orang yang hidup di air dan di darat, sering kali menampakkan dirinya di permukaan laut dengan memakai serban hijau dan dapat menjelmakan dirinya dimana saja dan kapan saja. Kepercayaan ini berakar dalam masyarakat pasompe, sehingga mereka senantiasa waspada dan menyiapkan mantra atau sesuatu perbuatan guna mencegah marabahaya yang akan di timbulkannya. Apabila mereka mengadakan upacara, akibat

keuntungan yang diperolehnya selama pelayaran dalam semusim, tidak lupa menyiapkan sajian terhadap Nabi Hiderek yang di antar ke tengah laut.

Hantu laut yang dipercayainya sering membahayakan di tengah laut, amat ditakuti oleh pasompe. Asal mula hantu laut dari arwah manusia yang mati di laut karena tenggelam atau karena sebab-sebab lain, misalnya menabrak batu karang, kena angin topan, kena *laso-anging* (tornado) atau *perahunya* kena *sulili* (air berputar akibat pertemuan arus) Nakhoda yang berpengalaman, dapat mengusir hantu laut ini cukup membaca mantra tertentu disertai asap kemenyan. Usaha mencegah bahaya dari peristiwa alam tersebut yang dapat menenggelamkan perahu, resepnya telah dimiliki oleh para pasompe. Misalnya *laso-anging* (tornado) dapat dicegah atau dihindarkan cukup seorang Sawi telanjang bulat berdiri di anjungan perahu dengan menunjuk laso-anging tersebut tiga kali, maka pasti ia akan menghindar, berarti perahu sudah diselamatkan.

Seorang Nakhoda yang dianggap paling ahli dan berpengalaman, jika ia memiliki *pakepettu*¹⁰⁾, yakni semacam ilmu kebatinan yang menyatu pada dirinya. Disebut pake-pettu, oleh karena “sekali dipakai maka harus jadi”, digunakan pada saat-saat perahu mengalami ancaman bahaya yang tak dielakkan. Pada saat itu Nakhoda mengacungkan tangannya disertai nada suara keras, menunjuk ombak yang memiringkan perahu, bermain-main di atas geladak, angin kencang memutar-mutar haluan, maka pada saat itu pula segera angin dan ombak kembali tenang dan menunjukkan hormatnya kepada sang Nakhoda. Inilah disebut sekali dipakai maka harus jadi. Namun kejadian ini, harus

dibuat upacara guna memulihkan apa yang telah dipaksakan oleh Nakhoda terhadap kemauan gejala alam dalam pelayarannya.

E. **Sistem Teknologi Perahu Pinisi (kasus Phinisi Nusantara)**

Salah satu aspek dari kehidupan budaya maritim bagi orang Bugis dan orang Makassar dan Mandar, adalah keahliannya membuat perahu layar. Dalam sub. Bab latar belakang sejarah kebaharian, seperti telah dijelaskan lebih dahulu, akan kembali menyatakan dirinya dalam sejarah, jika diikuti pelayaran Phinisi Nusantara ke Vancouver, Kanada, menempuh jarak bermil-mil jauhnya. Baiklah dicantumkan ucapan Sularto Hadisuwarno (harian Kompas, Jakarta 4 Maret 1987),

“Pengalaman **para awak kapal** dalam pelayaran ekspedisi Jakarta –Vancouver (Kanada) menempuh jarak lebih kurang 11.000 mil laut menyebarang Samudra Pasifik, juga menunjukkan bahwa bangunan kapal kayu dengan sistem dan pemilihan **bahan** seperti yang diwarisi oleh nenek moyang bangsa bahari bangsa Indonesia ini, memang tangguh. ... Ketangguhan kapal ini yang menyatu dengan ketangguhan awaknya, kemudian memang terbukti, ketika pada 15 September 1986 (dinihari waktu Indonesia) pinisi sandar dengan selamat di dermaga Marine Plaza, lokasi Expo’ 86 di Vanvouver. Pengalaman para awak ketika berlayar dalam suasana angin kencang tidak kurang dari 30 knot, dikepung ombak dengan tinggi **gulungan** sekitar 3 meter, empat hari empat malam setelah lepas Honolulu, Hawaii, juga menunjukkan bahwa konstruksi lambung kapal kayu ini dapat diandalkan. Dengan berhasilnya Phinisi Nusantara bersama para awaknya menyeberang Samudra Pasifik, dapat disimpulkan bahwa suatu perpaduan antara teknologi tradisional dengan teknologi masa kini, adalah

mungkin. Teknologi tradisional adalah bagian dari budaya bangsa yang jelas merupakan kekayaan asset nasional yang tidak ternilai harganya”.(Lih. Gambar No.1 dan 2)

Expedisi Phinisi Nusantara tersebut merupakan bukti sejarah dan tidak perlu lagi dikomentari, bahwa jiwa kebaharian dan keahlian membuat perahu, tidak dapat diragukan lagi. Pameran pembuatan pinisi secara utuh tradisional di *Vancouver*, ternyata sukses besar. Phinisi Nusantara dibongkar, kemudian diluncurkan kembali di *Vancouver*, ternyata berhasil dengan baik. Meskipun pada mulanya agak mendebarkan, oleh karena peluncuran pertama kalinya di Sulawesi Selatan, bangunan tradisional ini diramu dengan ramuan tradisional dan di tengah-tengah masyarakat tradisional pula, sedang peluncuran kedua kalinya awal Agustus 1986 di Marine Plaza, berada di tengah-tengah masyarakat Barat yang sudah berpandangan maju dan tanpa ramuan tradisional. Mungkin lebih menarik, kalau uraian berikut diarahkan pada sistem pembuatan perahu perahu pinisi menurut teknologi tradisional, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Bugis-Makassar di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, seperti ;

1. Alam pikiran Mithis

Perkembangan pola pikir kehidupan maritim masyarakat Sulawesi Selatan, sejak lama dipengaruhi oleh alam pikiran mithis. Hal ini tampak, utamanya mengenai hal-hal yang lebih teknis, segala sesuatunya mulai dari awal kegiatan sampai selesainya perahu tersebut, dikaitkan dengan kepercayaan mereka terhadap mithos serta kekuatangaib lainnya.

Demikianlah keterikatan pikiran mereka terhadap tokoh budaya Saweregading (*opunna Warek*)¹¹). Diceritakan bahwa

Saweregading jatuh cinta terhadap adik kembarnya yang bernama *We Tenriabeng*, karena keduanya dibesarkan secara terpisah. Setelah *Saweregading* melihat adiknya itu, ia berusaha mengawininya. Orang tuanya bersama penghulu-penghulu adat di kerajaan Luwu menasehatinya, bahwa hal mengawini saudara sendiri adalah perbuatan *incest* (sumbang) dilarang oleh adat dan negara akan hancur. kemudian disarankan kepadanya untuk berangkat ke negeri Cina mengawini sepupu sekalinya *We Cu Dai*. Parasnya dan bentuk tubuhnya sama dengan *We Tenriabeng*. *Saweregading* mengikuti nasehat orang tuanya dan penghulu adat, kemudian berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, ia bersumpah tidak akan kembali lagi ke Luwu. Pelayarannya ke negeri Cina dengan perahu yang dibuat dari kayu *Walenreng*, sedang perahu itu sendiri amat besar, diberi nama *Wakka Tana*. Pelayarannya ke Cina beberapa kali dihadap oleh bajak laut, namun *Saweregading* berhasil kawin dengan *We Cu Dai*.

Suatu ketika *Saweregading* bersama isterinya berlayar kembali ke Luwu, karena didorong oleh rasa rindu terhadap orang tuanya. Ia sudah lupa sumpah yang telah diucapkannya. Di tengah pelayaran, perahunya pecah dan tenggelam. Ia bersama isterinya turun ke benua bawah. Rangka dan papan perahunya hanyut terpencar dan akhirnya terdampar di desa Ara, desa Lemo-lemo dan tanjung Bira.

Demikianlah penduduk ke tiga desa ini, meniru model perahu *Saweregading* dan lambat laun memiliki keterampilan membuat perahu. Sampai sekarang ini, orang Ara termasyhur di Sulawesi Selatan, bahkan di Nusantara karena keterampilannya. Bukan saja keterampilan teknis tradisional,

melainkan lebih dari itu adalah kemampuan dan kekuatan mistik yang dimilikinya pada saat pembangunan perahu. Hal ini terlihat pada saat peletak lunas pertama, disertai acara ritual yang amat khidmat. Peletakan lunas pertama, amat penting artinya bagi penentuan suasana yang akan dialami oleh perahu. Misalnya, umur perahu, ketahanan dan nasib yang akan dialaminya.

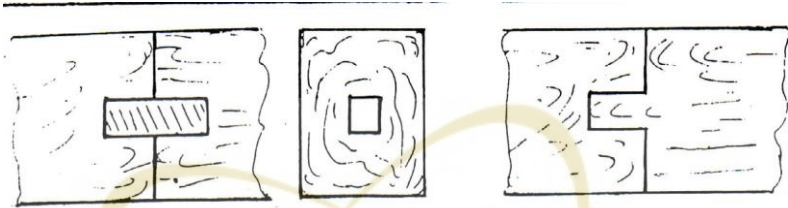
2. Teknologi Tradisional Pembuatan Perahu Pinisi

Dalam pembuatan perahu dengan cara tradisional, pada umumnya dilakukan sebagai berikut ;

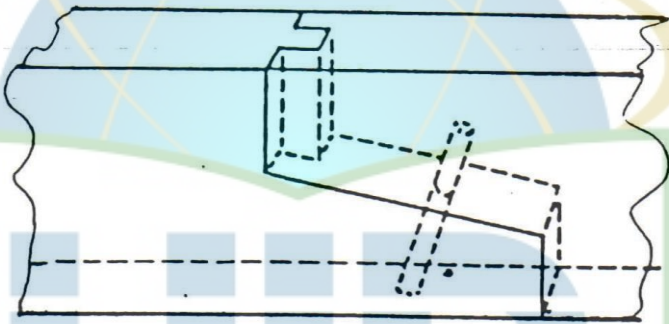
- a. Mencari kayu ; kayu jati pada umumnya paling disukai dan memang ternyata kuat bagi perahu. Pertama dicari adalah kayu untuk *kalebiseang* (lunas), kemudian kayu lengkung untuk *gading-gading* (frame). Apabila sebatang kayu telah ditemukan di hutan untuk lunas, maka kepala tukang yang ahli mulai menebangnya dengan penuh daya mistik, kemudian digantikan oleh tukang-tukang lainnya. Kayu tersebut diangkut ke galangan untuk digergaji menjadi balok-balok, kayu lengkung dan papan. Upacara dilakukan, terutama pada saat peletakan *kalebiseang* (lunas). Balok-balok lunas dipotong kedua ujungnya menurut ukuran panjang dan besarnya perahu yang akan dibuat. Sebelum dipotong *panrita lopi* (ahli perahu) membaca mantra dengan asap kemenyan, lalu mulai memahat sebagai tanda. Potongan bagian depan dibuang ke laut dengan maksud sebagai *tulak bala*, sedang potongan bagian belakang, disimpan di rumah pemilik perahu dengan maksud sebagai harapan, agar perahu selamat digunakan mencari rezeki.

b Sambungan lunas, stem dan stern

Pada umumnya cara sambungan yang digunakan pada *kalebiseang* (lunas), adalah sambungan tumpul atau sambungan laso dan sambungan honga (Lih. Gambar 1 dan 2).



Gambar 1 : Sambungan laso

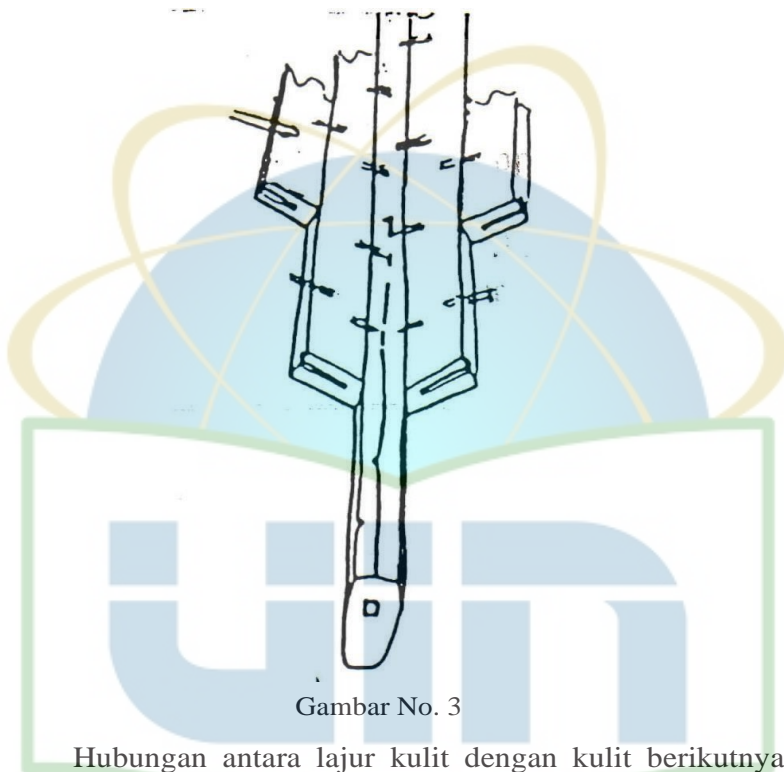


Gambar 2 : Sambungan honga

c Pemasangan kulit dan gading-gading

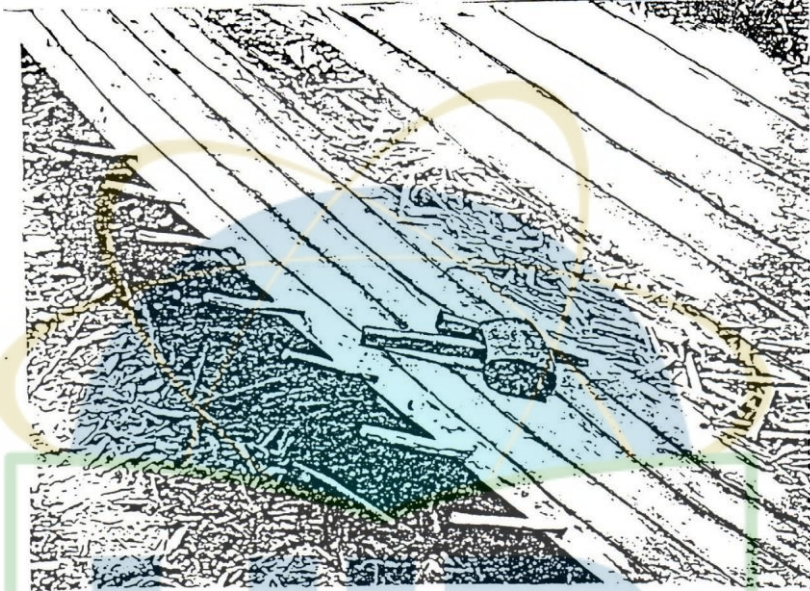
Setelah selesai pemasangan sambungan lunas, dilakukan pemasangan kulit. Salah satu ciri khas teknologi tradisional yang menonjol, adalah didahulukan pemasangan kulit perahu dari pada gading-gading (frame), sebagaimana yang dikenal oleh teknologi modern.

Dalam teknologi tradisonal, kulitlah memegang peranan penting, bukan gading-gading, sehingga kulit harus lebih tebal dari pada menurut ukuran modern. Lajur kulit yang pertama dipasang ialah pangepe (garboard strake) yaitu lajur kulit dasar yang berhubungan dengan kalebiseang (lunas) dan sebagai pengapit lunas, diikat dengan pasak. (Lih. Gambar no.3)



Hubungan antara lajur kulit dengan kulit berikutnya diikat pula dengan pasak kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*) kemudian dirapatkan. Pasak yang digunakan pada Phinisi Nusantara adalah paku-putih (*galvanized*) menggantikan kayu ulin. Demikian pula, sistem sambungan laso dan honga yang sering dipraktekkan pada perahu tradisonal, sedikit dimodifikasi dengan sistem “bibir miring ganda” pada Phinisi

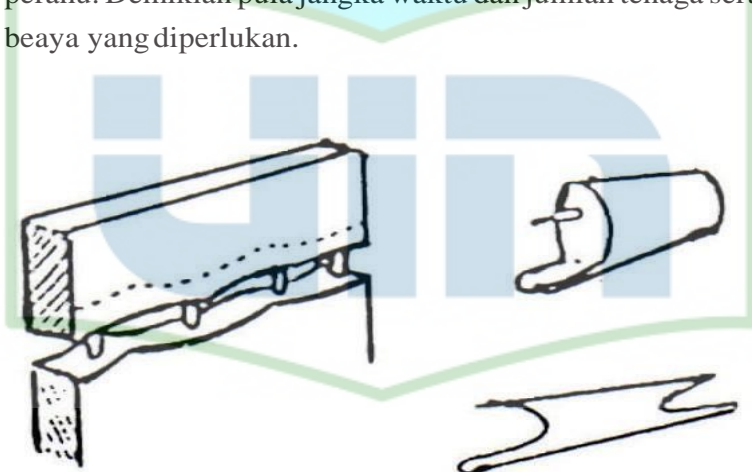
Nusantara. Sebelum papan kulit dirapatkan, diberi baruk gallang sebagai bahan untuk memperkedap papan kulit terhadap air laut. *Baruk gallang* adalah dari kulit kayu yang tahan terhadap air laut dan jika terkena air akan mengembang dan memperbesar daya kedap papan. (Lih. Gambar No. 4).



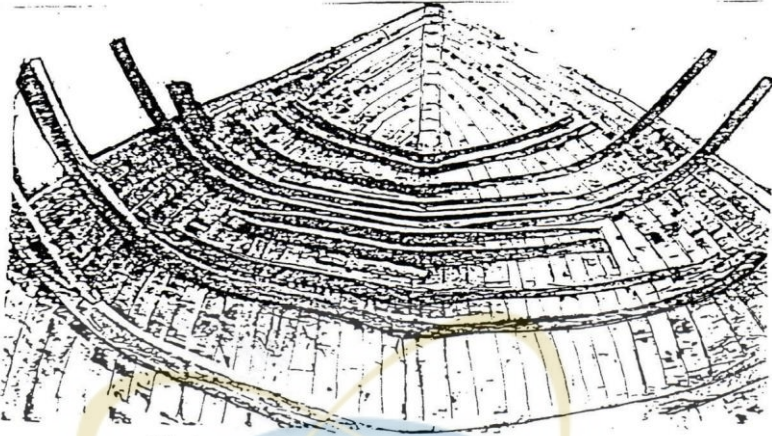
Gambar No. 4

Sistem sambungan bibir miring ganda, seperti pada gambar No. 5 dibawah ini, menyusun papan kulit sampai sekitar 10 (sepuluh) lajur disebelah kanan dan kiri secara bersamaan, maka gading-gading (frame) sudah bisa dipasang. Bagaimana bentuk kemiringan dan lengkung kulit, para tukang tidak mempunyai ukuran tertentu, kecuali ukuran itu digunakan menurut panjang depan, hanya untuk mengetahui panjang dan lebar perahu. Kemiringan dan lengkungan kulit, cukup berdiri di bagian depan dan buritan melihat keseimbangan

antara papan kulit kanan dan kiri. Sementara seorang atau dua orang tukang bekerja menyusun papan kulit, tukang yang lainnya pula memasang gading-gading mengikuti kulit yang sudah terpasang. Dalam gambar no. 6 berikut, memperlihatkan teknologi tradisional pembuatan perahu yang berbeda dengan sistem modern, yaitu lebih dahulu memasang kulit dari pada gading-gading, dipasang menurut pengalaman yang sudah berulang kali membuat perahu. Dasar pandangan mereka adalah bagaimana mencipta “keseimbangan” diantara gaya berat dengan berat jenis dan tekanan-tekanan angin dan air. Kebanyakan tukang-tukang tersebut buta huruf, sehingga penentuan ukuran-ukuran hanya berdasarkan pengalaman. Misalnya, jika seseorang memesan sebuah perahu, maka ia cukup memberitahukan pada tukang orang Ara tentang besarnya tonase yang diinginkan. Ahli tukang sudah dapat memperkirakan ukuran-ukurannya, yaitu panjang dan lebar perahu. Demikian pula jangka waktu dan jumlah tenaga serta biaya yang diperlukan.



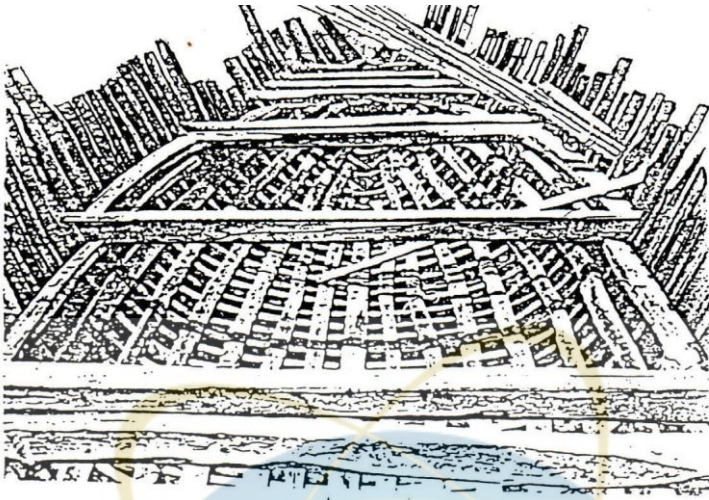
Gambar No. 5



Gambar No. 6

d Pemasangan Balok-balok katabang(deck)

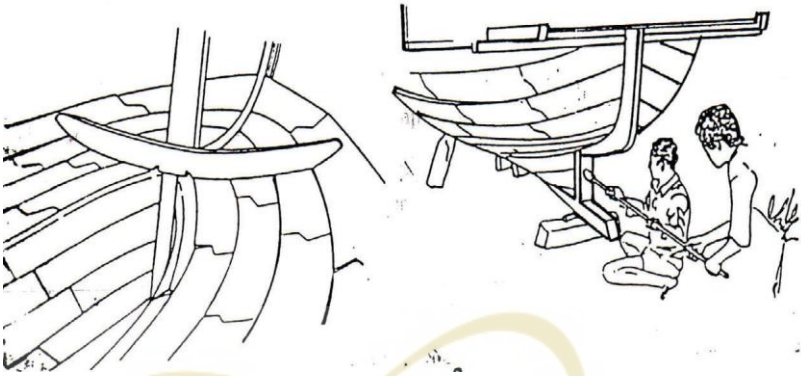
Apabila semua gading-gading (frame) sudah terpasang, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan lepe-lepe (stringer) memanjang, kemudian dipasang balok-balok dan papan *katabang* (deck) yang diberi *baruk gallang* diantara papan-papan. Dalam gambar 7 adalah pemasangan balok-balok katabang yang disebut pula kalang



Gambar No.7

Sampai pada tahap ini, sudah tampak sebuah bentuk perahu pinisi. Pekerjaan selanjutnya ialah pembuatan anjong dibagian depan sebagai tempat bertumpunya 3 (tiga) lembar layar depan, dan pembuatan ambing (anjungan bagian belakang), sangkilang (tempat kemudi), kamarak (kamar-kamar) dan pallajareng (tiang layar). Bila semua proses pembuatan ini sudah selesai, maka pekerjaan berikutnya sudah tidak ada yang berat, namun para tukang tetap giat menyelesaikan pelicinan katabang, tali temali dan layar.

Perahu Layar Motor (PLM) Phinisi Nusantara merupakan perpaduan teknologi tradisional dengan modern oleh karena diberi mesin bantu untuk membantu layar mendorong perahu, maka konstruksi bagian butiran dimodifikasi sedemikian rupa untuk tempat mesin, seperti pada gambar no. 8.



Gambar No. 8

Demikianlah tahap-tahap pembuatan Perahu Layar Motor (PLM) Phinisi Nusantara yang dilakukan oleh kelompok Tukang dari Desa Ara, Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Haji Damang (45 th) di galangan kapal P.T. Industri Kapal Indonesia Ujung Pandang dari bulan Pebruari sampai dengan tanggal 15 Juni 1986. Perahu pinisi tersebut kemudian menjadi amat terkenal dengan nama PLM Phinisi Nusantara. Hasil perhitungan menurut teori-teori modern dari para ahli perkapalan, bahwa sistem teknologi tradisional perahu tersebut setelah selesai dibangun, ternyata adalah sebuah bentuk kapal dibawah garis air yang dapat digolongkan sebagai kapal dengan kecepatan tinggi, tujuh knots dan menghasilkan stabilitas kapal yang cukup tinggi. Inilah hasil teknologi tradisional yang menggunakan peralatan sederhana.

Ukuran-ukuran Phinisi Nusantara, sehingga disebut mempunyai kecepatan tinggi dalam kelasnya, seperti; Panjang perahu 37,50 m, panjang garis air 25.00 m, panjang antara garis tegak 23.10 m, lebar geladak 8.50 m dan sarat air 2.20 m. Dikatakan pula, bahwa sistem teknologi tradisional itu hanya

berdasarkan “pengalaman” oleh karena tidak memiliki : 1. Ship design, 2. Working/manufacturing drawing dan ukuran stabilitas, 3. Gambar lantai(deck), 4. Pemeriksaan mutu bahan-bahan kayu, dan 5. Pengawasan mutu bangunan.

3. Kelebihan dan Kelemahan Perahu Pinisi

Hasil studi terhadap perahu pasompe dan sistem teknologinya beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa Skripsi mahasiswa Antropologi Universitas Hasanuddin, menunjukkan bahwa bentuk perahu pinisi mempunyai kekurangan disamping kelebihanannya, seperti;

- a. Ukuran (scantling) beberapa elemen konstruksi bila dibandingkan dengan peraturan konstruksi kapal kayu menurut klasifikasi modern, sebagian kurang memenuhi persyaratan. Dilainpihak, berlebihantebal papan kulit dan papan geladak (deck) serta kerapatan tulang (frame spacing) lebih kuat.
- b. Kekuatan konstruksi memanjang dan melintang bagi perahu pinisi cukup untuk mengatasi tegangan yang terjadi karena tekanan ombak, baik dalam posisi hogging maupun posisi sagging. Demikian pula stabilitasnya lebih dari cukup, karena memiliki tinggi metasentra lebih dari 2 (dua) meter dan sudut karam lebih dari 70 derajat.
- c. Kelemahan pada konstruksi pinisi, terletak pada sistem sambungan, baik antara papan-papan maupun antara bagian-bagian konstruksi. Tidak memiliki dinding sekat pembagi ruang perahu guna mempertinggi daya apung bila terjadi kebocoran.

Kelemahan lain lagi, terdapat pada lubang palka dan lubang pintu agak rendah, sehingga mudah dimasuki air bila ombak naik di atas deck. Inilah kelemahan pinisi secara umum, dan sebagian sudah diperbaiki pada Pinisi Nusantara.

F. Kesimpulan

Beberapa ahli sejarah dan ahli pemerintahan yang pernah bekerja atau berkunjung ke Indonesia, mengakui dalam tulisannya, bahwa suku bangsa yang mendiami Sulawesi Selatan adalah bangsa bahari yang berani menjelajah lautan dengan perahu yang dibuatnya sendiri. Terutama orang Bugis, tidak disangkal bahwa mereka adalah pasompe yang tangkas, pelaut pedagang yang ulung, berdagang dari satu pulau ke pulau lainnya, bahkan berhubungan dengan benua Asia di Asia Tenggara, singgah di beberapa negeri dan bergaul dengan suku bangsa yang dijumpainya. Berbulan-bulan lamanya dalam pengembaraan, barulah mereka pulang setelah berhasil membawa Lapangan hidup ini, sudah dilakukannya sejak abad-abad sekitar zaman Sriwijaya di Indonesia. Mereka adalah entrepreneurship yang ulet, baik di laut maupun di darat dengan berani mengambil resiko atas keberaniannya mengarungi lautan. Keberanian melakukan lapangan hidup mereka, karena itu budaya maritime yang diwarisinya memberikan abstraksi berfikir dan resep tentang sistem pengetahuan; a. pengetahuan astronomy dan oceanology, dan b. teknologi pembuatan perahu pasompe. Sistem pengetahuan tersebut, kita sebut sekarang dengan istilah sistem pengetahuan tradisional.

Lapangan hidup sebagai pasompe, adalah salah satu lapangan hidup yang utama di Sulawesi Selatan, diantara pallaonruma

(petani) dan pakkaja (nelayan). Kelompok masyarakat pasompe tersebar di pesisir barat dan timur Sulawesi Selatan, mereka membagi masyarakatnya atas tiga lapisan, yakni Ponggawa, Nakhoda/Juragang dan sawi. Lapisan ini, bukan saja berlaku dalam pelayaran, melainkan tercermin pula dalam pergaulan sehari-hari di daratan. Dewasa ini, kegiatan pasompe, diordinasi oleh Pelayaran Rakyat (PELRA) dibawah Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan dimasukkan sebagai masyarakat ekonomi lemah. Sejak lama, kegiatan pasompe dibimbing oleh sebuah hukum yang disebut Adek Allopi-loping ri bicaranna Pakbalu-E, yaitu hukum pelayaran dan perdagangan, masih ditaati sampai sekarang, ditambah aturan-aturan Nasional mengenai aturan keselamatan pelayaran.

Teknologi pembuatan parahu layar dewasa ini, cenderung diintegrasikan dengan sistem teknologi modern dan akan mengalami kemajuan pada masa-masa mendatang guna melayani angkutan barang di Nusantara. Hal ini disadari, setelah PLM Phinisi Nusantara (170 to) menyelesaikan pelayarannya dari Indonesia ke Vancouver, Kanada dengan menempuh jarak ± 10.600 mil melalui samudra Pasifik. PLM Phinisi Nusantara menjadi saksi sejarah dan ketangguhan para Sawinya, membuktikan orang-orang Sulawesi Selatan di Indonesia memiliki budaya maritime yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Hasil konstruksi pembuatan pinisi yang dibangun oleh para tukang-tukang orang Bugis dan Makassar pula membuktikan bahwa sistem teknologi mereka dan sistem kepercayaan yang dimilikinya, secara bulat menyatu dalam kebudayaannya dan sebagai bangsa bahari.

CATATAN

1. Lihat harian Kompas, Jakarta dari tanggal 1 Desember 1986 sampai dengan 5 Januari 1987. Perahu Layar Motor (PLM) Phinisi Nusantara mulai bertolak dari Muara Baru Jakarta pada hari Rabu sore 9 Juli 1986 melalui Hawaii, akhirnya tiba di Vancouver, Kanada pada tanggal 15 September 1986
2. L. A. Emanuel dalam *Memorie van Overgave van den Afgetreden Assistant Resident van Bone*, periode 25 Oktober 1945 sampai dengan 20 April 1948. *Memorie* ini didapat dari arsip Kerajaan Bone pada tahun 1963, saat kami mengadakan penelitian tentang “Alat-alat Kerajaan Bone”
3. Dikutip dari ceramah Dr Ch. Pelras yang berjudul “Sumber Kepustakaan Eropah Barat mengenai Sulawesi Selatan”, dalam buku *Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke XXXI*, tanggal 3 Maret 1973.
4. Dr F. W. Stapel dalam bukunya “*De Geschiedenis van Nederlandsch-Indie, deel III*”, 1937. Lihat juga “*Nota Over Zuidd Celebes (tanpa tahun)*” oleh Gouverneur Couvreur. *Nota* ini terdaftar pada Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan (YKSS) No. 2698 halaman 1.
5. Prof. Tobing telah membandingkan 18 (delapan belas) buah lontara yang mengandung tentang Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, tetapi yang dipilih untuk ditranskripsi adalah Lontara No. 107 milik YKSS.

Selanjutnya Prof. A. Zainal Abidin Farid S.H menulis dalam tahun 1976 (masih stensilan) tentang Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa itu yang diambilnya dari Lontara Wajo. Menurut beliau, bahwa tidak sependapat Stapel yang mengatakan bahwa Hukum Pelayaran Amanna Gappa

- tersebut diambil oleh orang Bugis dari Hukum Pelayaran orang Melayu pada saat kesultanan Mahmoed syah.
6. L.V.Vuurendalamartikelnnyayangberjudul“DePrauwenvaart en de Inlandsche Handel van West-Celebes “ dimuat dalam Tijdschrift van Economische Geographie No. 8, halaman 160-162, tahun 1917. Artikel ini diterjemahkan oleh Robert L. Welsch dalam th. 1986 yang mengadakan penelitian di Mandar.
 7. Lihat karangan Ph. O. L. Tobing yang berjudul “ Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, cetakan ke 2, th. 1977, dikatakan bahwa prinsip pembagian masyarakat desa bersandar pada prinsip pembagian kosmos. Dianggapnya bahwa orang Bugis dan Makassar memandang makrokosmos terbagi atas tiga bagian, yakni benua atas, benua tengah dan benua bawah. Dalam hubungan ini, beliau menunjuk karya Friedericy, De Standen bij de Boeginezenen Makassar en, yang membagi masyarakat dalam tiga strata sosial.
 8. Dalam lontara “ Adek Alloping-loping ribicaranna Pakbalu-E, Amanna Gappa yang dijadikan dasar dari buku Tobing, tercantum pada Pasal ke 6 mengenai syarat-syarat untuk menjadi seorang Nakhoda, yaitu ada 15 macam.
 9. Lihat tulisan B. F. Matthes yang berjudul De Makassarische en Boeginesche Kotika's, dimuat dalam buku H. Van Den Brink “ Dr Benjamin Fredirik Matthes, zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, hal, 458 th. 1943
 10. Hasil wawancara terhadap informan Haji Ambo Cantek (57 th) di kecamatan Mallusektasi, Kabupaten Barru, th. 1985. Dikatakan bahwa pake-pettu itu tidak sembarang digunakan, oleh karena bila sudah dipakai dan terbukti khasiatnya, harus

diupacarakan. Jika tidak diupacarakan karena lupa, biasanya minta resiko, misalnya anak atau isteri harus meninggal.

11. Nama Saweregading terlukis dalam epos La Galigo yang masyhur itu karena gaya sasteranya yang panjang dan menarik, menurut epos ini, ayah Saweregading adalah Batara Lattu, putera Batara Guru, putera Patoto-E. Adik kembar Saweregading bernama We Tenriabengkawindengan Remmang ri langi.





BAB VIII

KONSEP RUANG DAN WAKTU ORANG BUGIS/MAKASSAR TENTANG KEBAHARIAN

A. Sekelumit Sejarah Kebaharian

Apabila kita mendengar bahwa nenek moyang orang Bugis/Makassar pernah menjelajah lautan dengan perahu buatannya sendiri sampai ke Cina, Madagaskar, Pilipina, Australia, Taiwan, Malaysia dan pulau-pulau Asean, agaknya kita tidak akan percaya. Lebih mengherankan lagi, kalau diketemukan dalam kepustakaan Melayu, bahwa beberapa Sultan dan pembesar Malaysia mempunyai silsilah keturunan berasal dari Bugis/Makassar. Bahkan sekarang ini, diketemukan beberapa kelompok masyarakat Bugis/Makassar di Malaysia sebagai warga Negara telah bermukim beberapa abad lamanya. Mereka meninggalkan Sulawesi sebagai migrant spontan ke Malaysia dan pulau-pulau sekitarnya dengan perahu layar yang dibuatnya sendiri.

Ceritera dari Gervais (1688) seorang Belanda, guru bahasa Perancis, menggambarkan pelabuhan Makassar dalam abad ke 17 sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Letaknya

paling sesuai untuk mengumpulkan bahan-bahan dari daerah lain, seperti pulau Timor, Banda, Ambon, Ternate, Bhuton, Borneo, Kamboja, Kocincinadan Philipina, sedang hasilnya yang diekspor oleh pulau Sulawesi sendiri adalah hasil bumi yang melimpah.

Kutipan Christian PELRAS (1973) dari buku Tome Pires, seorang pengembara Portugis yang pernah berkunjung ke Indonesia pada abad ke 16, menceritakan kehebatan orang Bugis/Makassar di lautan dengan perahunya yang dianggapnya sebagai bajak laut, dikatakan ;

“ Kepulauan Macacar (Makassar) terletak kira-kira empat atau lima hari pelayaran lewat pulau yang baru kita lewati (Borneo). Di tengah jalan (dari Malaka ke Maluku) kita dapati Sulawesi. Pulau itu berdagang dengan Malaka, Jawa, Brunai, Negeri Siam dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan negeri Siam. Tidak ada bangsa yang lebih menyerupai orang Siam, kecuali mereka. mereka kafir, gagah dan suka berperang. Disitu banyak bahan makanan. Orang dari pulau itu adalah perampok yang paling hebat, kekuatannya sangat besar dan perahunya banyak. Mereka berlayar dari negeri mereka sampai ke Pegu, ke Maluku dan Banda di semua pulau sekitar Jawa, datang ke Malaka membawa barang jualan dengan perahu yang dinamakan Pangjawas yang besar dan dibuat dengan baik. Mereka membawa banyak makanan, beras yang putih sekali dan sedikit emas. Mereka membawa pulang banyak kain bertanggi, kain dari Cambay (Bombai) dan sedikit dari Benggal dan Keling, bersama banyak Lubhana (kemenyan) jawi dan dupa. Mereka berlayar kian kemari dan ditakuti di mana-mana 1).

Demikian kutipan ini pernah dialami oleh orang asing tersebut dalam kedudukannya sebagai perantau dan petualang

dengan perahu juga, lukisannya seolah-olah melebih-lebihkan. Sama halnya lukisan dalam sejarah Melayu tentang penyerangan negeri Malaka oleh Karaeng Samarluka dari negeri Balului (salah sebuah negeri di Makassar) pada abad ke 16. Penyerangan Karaeng Samarluka bersama Armadanya yang berkekuatan sekitar 200 buah perahu besar dan kecil ²⁾. Mulai mereka berlayar dari ujung selatan jazirah Sulawesi Selatan, beberapa hari lamanya menuju Malaka. Tujuan utama penyerangan adalah untuk membuka jalur-jalur perdagangan yang telah didominasi oleh Portugis.

Dalam *memorie van overgave van den Afgetreden Assistant Resident van Bone*, L.A. Emanuel melukiskan bahwa sistem ekonomi orang Bugis adalah berkisar pada pelayaran, disamping pertanian, telah dimilikinya beberapa abad lamanya. Sikap-sikap mereka dalam melakukan pelayaran dan perdagangan menunjukkan kemahiran dan keberanian ³⁾.

Para penulis sejarah lainnya, seperti L.J.J. caron dan J. Noorduyn menyebutkan bahwa orang Bugis dan Makassar mempunyai sejarah pelayaran yang sudah tua dengan menggunakan perahu 'pinisi'. Suku bangsa ini dikenal sebagai pelaut yang tangkas dan berani mengarungi lautan sampai ke Asia Tenggara, Madagaskar dan Australia, berlayar sebagai pedagang dan pengangkut hasil-hasil bumi. Sejak jauh sebelum masuknya Agama Islam di Sulawesi Selatan awal abad ke 17, mereka sudah mengenal hamper semua negeri pesisir Nusantara ini. Lapangan hidup mereka itu, disebut pasompe yaitu pelaut-pedagang, diwarisi turun temurun. Dalam warisan budaya, dikembangkan sistem pengetahuan kepelautan dan hukum pelayaran yang mengatur perjanjian sewa-beli, hubungan Ponggwa disatu pihak dan Nachoda-sawi dilain pihak.

Lapangan hidup yang utama masyarakat Sulawesi Selatan selain sebagai ‘pasompe’, adalah petani dan nelayan. Pasompe ini kebanyakan menjadi saudagar yang berusaha di bidang exporter. Pelaut pedagang antar pulau atau dari pulau ke pulau selama satu musim. Apabila datang musim timo’ (kemarau), mereka berlayar ke arah barat dan bila datang musim bare’ (penghujan), pulang ke kampungnya.

Kehidupan ‘pasompe’ adalah membudaya pada masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan kegiatan ini ditafsirkan sebagai perantau. Sejak dominasi VOC dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia, terutama kerajaan Gowa didesak untuk merubah kegiatannya di laut menjadi kerajaan agraris, maka kegiatan ‘pasompe’ mulai surut. Dalam perang dunia ke II, terjadi kemunduran pelayaran, oleh karena perahu-perahu dagang yang berlayar antar pulau masa itu, mengalami kerusakan. Keadaan ini berlanjut sampai Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusul oleh revolusi fisik, kemudian diikuti oleh berbagai macamsituasi yang tidak memungkinkan bangkitnya suatu kegiatan ‘pasompe’ yang memadai, sebagaimana sedia kala. Meskipun dewasa ini, pelayaran rakyat tetap menunjukkan keberadaannya, namun kegiatan tersebut tidak menjadi tumpuan harapan bagi suatu lapangan hidup penduduk yang bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga.

B. Pola Hubungan Kerja

Kelompok masyarakat ‘pasompe’ dewasa ini di Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan, khususnya penggunaan mesin sebagai tenaga bantu untuk mendorong perahu, disamping penggunaan layar. Mekanisme ini menyebabkan tambahan konstruksi dalam

teknologi pembuatan perahu ‘pinisi’ atau ‘lambo’ sebagai perahu layar. Namun pola hubungan kerja dan organisasinya masih mengikuti cara-cara tradisional.

Organisasi kelompok ‘pasompe’, terdiri atas; a. Pemilik perahu yang disebut pongawa, ialah orang yang menyediakan perahu layar miliknya yang akan di layarkan oleh ‘Nakhoda’ bersama beberapa orang sawi. Dalam bahasa ara, pongawa disebut pungkaha, yaitu kepala tukang perahu. Adakalanya si pemilik sendiri meNakhodai perahunya jika ia menguasai ilmu pelayaran (navigation). b. Nakhoda, yaitu pemimpin dari sawi dan bertanggung jawab atas keselamatan perahu, barang dan penumpang selama pelayaran, dan c. Sawi yaitu semua orang yang menumpang diatas perahu. Ada 4 (empat) macam sawi, yakni sawi tetap, sawi bebas, sawi penumpang dan orang yang menumpang. Empat kategori sawi ini menentukan status mereka dan peranannya dalam pelayaran. Diantara empat kategori sawi, hanya tiga kategori saja yang mendapat predikat sawi, sedang kategori keempat, disebut saja to-manumpang, yakni orang yang menumpang. Setiap orang yang ikut yang berlayar adalah pedagang, mereka harus membayar sewa perahu. Namun mereka pula harus bekerja sama menjalankan pelayaran, oleh karena tidak ada seorang pun yang harus dilayani. Setiap sawi membawa barang dagangan, karena itu mereka adalah pedagang.

Pertalian kekerabatan ikut memperkuat ikatan kelompok pasompe, meskipun mereka tidak bermukim bersama dalam suatu komunitas. Pongawa memilih seorang Nakhoda dari kalangan keluarganya yang diberi kepercayaan melayarkan perahunya. Demikian pula Nakhoda (biasa disebut pula juragang), memilih sawi dari kalangan keluarganya atau kerabat dan tetangganya

dengan suatu perjanjian menurut norma-norma pelayaran dan perdagangan.

Sementara dalam pelayaran, fungsi semua orang diatas perahu, senantiasa melakukan kerjasama dan bertujuan untuk keselamatan. Konsep ‘mendahulukan keselamatan’ dari yang lainnya, adalah pegangan setiap awak perahu. Oleh karena itu, peranan dibagi menurut status atau tiga pembagian dasar, yakni Nakhoda sebagai pemimpin, juru mudi yang memegang kemudi dan juru batu yang mengendalikan haluan. Masing-masing status ini mengikuti struktur perahu, yakni bagian depan, tengah dan buritan. Setiap status harus diperankan oleh sawi yang memiliki seperangkat pengetahuan kepelautan yang dikenal mereka dari tradisi budaya. Pembagian struktur ini ada 3 (tiga) dimensi, adalah bersumber dari pandangan kosmogoni, yakni benua atas, benua tengah, dan benua bawah, sehingga dianggap bahwa sebuah perahu adalah sama secara kualitatif dengan sebuah desa. Tradisi budaya yang dianut di atas perahu, senantiasa sama dengan di desa. Dengan demikian hubungan fungsional dalam desa, harus tercermin pula di atas perahu.

C. Konsep Ruang dan Waktu

1. Pandangan tentang eksistensi manusia

Eksistensi manusia, harus dilihat dari segi paham atau persepsi manusia itu sendiri dalam memandang dirinya diantara makhluk lainnya dan terhadap Tuhan. Dalam kata lain, manusia memandang kedudukannya sebagai makhluk di tengah-tengah alam raya ini. Mempelajari manusia, dapat dilakukan dengan menghubungkannya dengan makhluk lain, oleh karena hanya dengan cara itu manusia memperistiwakan

diri sebagai pernyataan eksistensi kemanusiaannya. Bobot interaksi dan makna peristiwa yang ditimbulkannya, banyak ditentukan oleh kualitas hidup dan kemanusiaannya, bahwa sejauh mana ia secara individual dan sosial mampu mengelola dan mengatasi tantangan hidup guna memenuhi kebutuhan dan harapan-harapannya.

Dalam alam, terdapat berbagai macam hal yang mengherankan, namun yang paling mengherankan adalah “pengetahuan” (knowledge) yang dimiliki oleh manusia. Suatu keyakinan bahwa alam ini mengandung manusia, disamping alam itu termasuk dalam pikiran manusia. Manusia “tahu” karena berhubungan dengan alam, sedang pengetahuannya sendiri tidak mengandung apa-apa, kecuali dalam rangka hubungan itu. Kita membedakan antara “pengetahuan” dan “kebenaran” (truth). Kebenaran adalah suatu sifat tentang proposisi. Kalau orang berkata, bahwa “hukum alam berada dalam waktu dan ruang yang azali”. Walaupun pernyataan ini benar atau salah, namun proposisi ini melekat dalam “pengetahuan”. Apa yang diketahui, turun melalui proposisi berupa konsep-konsep berpikir yang mengandung makna tertentu. Konsep yang mengandung makna adalah operasionalisasi dari pesan “pengetahuan”, menyebar dan terjaring dalam struktur sosial. Jaringan makna dalam masyarakat biasanya terwakili dalam bentuk simbol-simbol atau proposisi dalam wujud konsep-konsep. Makna yang terjaring dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk norma-norma, bahkan menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Pengetahuan, konsep dan kepercayaan merupakan isi kognisi yang dialami dan diwarisi oleh manusia secara sosial, sehingga menurunkan persepsi-persepsi terhadap

lingkungan, ruang dan waktu. Lingkungan budaya, termasuk di dalamnya lingkungan alam dan lingkungan sosial, berada dalam suatu ruang tertentu dan batas waktu tertentu pula. Dengan demikian, lingkungan budaya berbeda-beda setiap kelompok masyarakat atau etnik, karna perbedaan waktu dan ruang. Setiap lingkungan budaya mengembangkan alam pikiran mitis dan warisan budaya generasi berikutnya yang dilestarikan lewat modifikasi, tanpa menghilangkan nilai luhurnya.

2 Pandangan Makrokosmos-Mikrokosmos

Bentuk perahu (pinisi atau lambo), dibangun atas dasar sebuah pandangan hidup atau bentuk itu menjelmakan sebuah model kosmos. Model perahu adalah meniru model makrokosmos yang dianggapnya terdiri atas tiga benua, yakni benua atas, tengah dan benua bawah. Dengan demikian perahu dipandang sebagai mikrokosmos, sama secara kualitatif dengan model desa atau rumah (panggung). Sama halnya makrokosmos mempunyai suatu pusat, yakni boting langi’, maka perahu pula sebagai mikrokosmos mempunyai posi’ (pusat). Demikian pula pemukiman yang berbentuk desa dan rumah panggung sebagai mikrokosmos mempunyai pusat (posi’ butta dan posi’ balla).

Semua tata tertib dan adat istiadat yang berlaku dalam perahu, tidak berbeda dengan adat istiadat yang berlaku dalam rumah, maupun dalam desa. Dengan demikian, perilaku dan teknik-teknik pembuatan perahu harus tunduk pada alam pikiran ini yang beredar dalam masyarakat melalui pesan-pesan dan wasiat-wasiat yang dipercayai mengandung makna sakral. Perubahan bentuk bukan tambahan dan pengurangan

tata tertib, merupakan femali atau pantangan yang harus dihindari, agar tetap terjalin ‘harmonisasi’ antara kuasa-kuasa makrokosmos dengan manusia dan terpelihara ‘penyatuan diri dengan alam’.

Sistem pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan ini, menjadi pedoman bagi perilakunya serta interaksinya secara sosial. Itulah sistem budaya yang digunakan mengembangkan strategi dan teknik-teknik kehidupannya, khususnya pembuatan perahu. adanya pantangan perbuatan, makanan dan bahasa dalam sistem pengetahuan, merefleksikan tata tertib tentang hal yang baik dan yang buruk (etika) dan tentang hal yang benar dan salah (logika)

Lebih lanjut dikatakan oleh Tobing (1977) sifat-sifat orang Indonesia ;

“Orang Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa segala sesuatu dalam masyarakatnya ada dalam kosmos berhubungan secara organisasi dan oleh karena itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Hal ini berlaku juga terhadap dirinya sendiri, yang mengakibatkan, bahwa dia sedapat mungkin menyesuaikan dirinya dengan makrokosmos dan tata tertibnya”⁴⁾

Apa yang digambarkan oleh Prof. Tobing mengenai sifat-sifat orang Indonesia, mungkin tidak terwakili oleh sebagian masyarakat desa sepenuhnya, disebabkan pengaruh teknologi modern, namun dasar-dasarnya masih dihormati. Hal ini masih terbukti pada upacara pembuatan perahu, yakni mulai penebangan pohon untuk dijadikan kalebiseang (lunas), pemotongan ujung lunas, membuat lubang pusat (ammosi) dan upacara peluncuran perahu. Empat kegiatan

upacara senantiasa dilakukan untuk menjalin harmonisasi dan penyatuan diri dengan tata tertib makrokosmos dan mikrokosmos, agar perahu dapat selamat dan menyelamatkan pemakainya.

3. Sistem pengetahuan kepelautan

Seorang pelaut-pedagang, bukan saja harus membekali dirinya dengan keberanian menentang badai atau berpegang pada pesan-pesan orang tuanya, melainkan harus membekali dirinya setumpuk pengetahuan tentang kepelautan yang berkisar pada;

- a. Pengetahuan tentang hari-hari baik dan buruk
- b. Pengetahuan tentang letak bintang-bintang
- c. Pengetahuan tentang tanda-tanda di laut

Sistem pengetahuan tersebut melekat dalam keyakinannya atas dasar sistem kepercayaan dan pandangan kosgoni yang dianutnya, bahwa alam ini mengandung kekuatan dan berjalan menurut hukumnya sendiri. Kepercayaan tentang adanya hari baik dan hari buruk untuk memulai pekerjaan, oleh karena bisa mempengaruhi keberhasilan dan semua urusan. Pengetahuan tentang hari baik/buruk adalah berdasarkan terbitnya bulan qamariyah, bahwa setiap hari secara kualitatif mengandung makna sendiri bagi kehidupan. Hari-hari dibagi atas 5 (lima) bagian hari nakhas yang pantang dilanggar, yakni;

- a. Nakhas tujuh (hari ke tujuh). Tujuh hari nakhas dalam sebulan (qamariyah), yakni malam pertama, ketiga, kesembilan, kesembilanbelas, keduapuluh sembilan, hari rabu terakhir setiap bulan dan tanggal 1 Muharram.

Tujuh hari ini pantang memulai perjalanan dan membuat perahu.

Selain dari hari nakhas ini, setiap hari dianggap mempunyai kualitas sendiri, sehingga diklasifikasi menjadi ele (subuh), abbuweng-baribbasa ' (pagi), tangasso (tengah hari), lesang esso (lewat tengah hari) dan araweng-karuweng (sore). Pantang memulai perjalanan atau urusan yang menyangkut keberuntungan pada hari Jumat subuh, hari Sabtu tengah hari dan hari Senin sore, karena biasa menimbulkan kematian.

- b. Pengetahuan tentang letak bintang di langit, dihubungkan dengan datangnya angin kencang, hujan dan petir, seperti
- 1). Bintang sulo bawiE, selalu muncul di timur dan terbenam pada awal malam, tanda akan datangnya angin timur.
 - 2). Bintang wara-waraE, bintang tunggal agak terang di tengah langit, tanda panas terik akan datang.
 - 3). Bintang tanraE, berjumlah 3 (tiga) buah, tanda akan datang angin kencang.
 - 4). Bintang manuE, berjumlah 6 buah sebagai tanda bahwa musim kemarau masih pertengahan
 - 5). Bintang woromporonngE, berjumlah 7 buah muncul di timur, adalah tanda bahwa musim kemarau mulai datang
 - 6). Bintang LambaruE, berjumlah 6 buah, muncul disebelah timur adalah tanda bahwa musim barat mulai datang, jika sudah terbenam di barat, berarti musim barat (penghujan) sudah berakhir

- 7). Bintang tellu-telluE, berjumlah 3 buah yang berjajar sama tinggi utara-selatan, dijadikan pedoman untuk berlayar ke arah barat atau sebaliknya.
- c. Pengetahuan tentang kepelautan, terutama untuk menentukan adanya batu karang dan daratan, maka pelaut mendasarkan pengetahuannya dengan indera pakkita (penglihatan), parengkalinga (pendengaran), paremmau (penciuman), penedding (firasat) dan tentuang (keyakinan), sebagai berikut ;
- 1). Kilat yang mendatar di permukaan laut atau bersinar ke atas, adalah tanda bahaya angin kencang
 - 2). Awan hitam di haluan perahu lalu berubah cepat jadi terang, tanda angin kencang akan bertiup seketika dan membahayakan
 - 3). Udara berbau anyir dan terlihat gumpalan awan yang hitam berekor sebelah bawah yang membayang di permukaan laut, berarti laso angin akan datang, maka semua awak harus bersiap-siap.
 - 5). Sorotan lampu berwarna hijau atau kebiruan tampak di permukaan laut yang tenang bercampur minyak pada waktu bulan remang-remang, berarti ditempat itu ada binatang kurita yang membahayakan, maka haluan segera dibelokkan.
 - 6). Tampak cahaya kilat di waktu terang bulan dan di waktu siang tampak berwarna putih ditambah bau anyir, adalah tanda adanya batu karang, maka segera haluan dirubah.

Demikian sistem pengetahuan yang terkait dengan kepelautan, tidak terlepas dari alam pikiran yang

mendasarinya. Sistem ini digunakan pengembara di lautan, disamping mereka menganut pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelayaran.

Persepsi tentang “waktu” seperti paham tradisional tersebut diatas, sebagiannya sudah mengalami pergeseran atau sudah dirasionalisasi, namun berbagai pola perilaku bermakna masih tetap dipengaruhi oleh anggapan kualitas waktu tersebut. Pesta perkawinan, membangun rumah baru, mulai turun sawah, mulai membuka usaha dagang dan mulai membuat perahu, masih tampak dipengaruhi oleh pilhan hari-hari yang baik untuk melakukannya. Memang pandangan demikian berada dalam posisi transisi, yaitu transisi dari paham tradisional ke paham modern. Paham modern yang menghargai waktu, belum seluruhnya teralih seperti citra modern tersebut, namun anggota masyarakat sudah mengetahui fungsi waktu dan kegiatan-kegiatan yang ditargetkan menurut waktu.

D. Kesimpulan

Semua sejahrawan dunia dan peneliti yang pernah bekerja di Indonesia, mengakui dalam tulisan mereka bahwa suku bangsa yang mendiami Sulawesi Selatan, adalah bangsa bahari yang berani mengarungi samudra dengan perahu sederhana yang dibuatnya sendiri. Tidak disangkal lagi bahwa mereka adalah pelaut-pedagang, berhubungan dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, singgah di beberapa negeri dan bergaul dengan bangsa-bangsa yang dijumpainya. Berbulan-bulan lamanya dalam pengembaraan, barulah mereka kembali ke negerinya setelah membawa hasil yang memadai.

Lapangan hidup ini sudah membudaya yang diwarisinya dari nenek moyangnya sejak abad-abad sebelum dan sesudah Sriwijaya di Indonesia. Mereka adalah wiraswastaan yang ulet dan berani mengambil resiko atas keberaniannya mengarungi samudra. Keberanian itu didukung oleh sistem pengetahuan astronomi dan oceanologi tradisional. Pengetahuan tentang hari-hari baik dan buruk, letak bintang dan tanda-tanda di lautan, adalah hasil pengalaman yang terakumulasi, digunakan mengelola kehidupannya. Demikian pula, sistem pengetahuan dan teknologi pembuatan perahu (pinisi dan lambo), merupakan akumulasi pengetahuan dari hasil pengalaman dalam perkembangan budayanya.

Kualitas ruang dan waktu, dalam arti lingkungan budaya, merupakan tata tertib mikrokosmos, sama secara kualitatif dengan tata tertib desa, maupun rumah. Dengan demikian, sistem pengetahuan dan teknologi adalah isi dari ruang dan waktu, termasuk keseluruhan sistem-sistem dan cara-cara hidup kelompok masyarakat atau suku bangsa, yang berbeda dari satu ruang/waktu dengan yang lainnya. Perbedaan isi ruang/waktu, oleh karena perbedaan lingkungan budaya. Demikian suku bangsa di Sulawesi Selatan dan lebih khusus kelompok masyarakat Ara yang mahir membuat perahu, telah mewarisi berbagai sistem pengetahuan dalam masyarakat yang memungkinkan mereka trampil dalam teknologi perahu.

Betapapun kemahiran sebagai ‘pasompe’ (Bugis) atau ‘pasombala’ (Makassar) yang didukung oleh warisan budaya, tanpa didukung oleh :undang-undang pelayaran” (ade’ alloping-lopings), maka kemahiran tidak akan berkembang. Oleh karena itu, orang Bugis dan Makassar disebut memiliki budaya bahari, disebabkan

adanya lembaga pasompe, alt perahu yang digunakan dalam melakukan lapangan hidupnya, serta nila-nilai yang menjadi acuan dari keseluruhan perilaku kebaharian.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Daftar Catatan.

1. Ch. PELRAS dalam ceramahnya yang berjudul, “Sumber-sumber Kepustakaan Eropah Barat tentang Sulawesi Selatan” dalam Dies Natalis ke XXI Fakultas HUKUM, Universitas Hasanuddin.
2. Malay Annals (sejarah Melayu) an annotated translation by C.C. Brown with a new introduction by R. Roovink, Oxford University Press, 1970 pp. 90-92. Rolvink menceritakan tentang hubungan Hang Tuah dengan Makassar.
3. L.A. Emmanuel dalam Memories van Overgave di Bone, periode 25 Oktober 1945 sampai 20 April 1948. Memories ini saya temukan pada Arsip Kerajaan Bone dalam tahun 1963.
4. Philip O. L. Tobing, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977, halaman 101



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Hamid. 1986. *Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Perairan Daerah Sulawesi Selatan*, Dep. P dan K, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- , 1988. *Pola Pengembangan Masyarakat Nelayan Di Sulawesi Selatan : Suatu Studi Sosio Antropologi Ekonomi* , Bappeda Sulsel, Unhas, Ujung Pandang.
- , 2001. *Passompe Bagi Orang Bugis di Sulawesi Selatan* Workshop Trade. Society and Belief in South Sulawesi and its Maritime World. Nederland
- , 2004. *Pengembangan orang Bugis – Passompe*, Pustaka refleksi, Makassar.
- , 2008. *Pengembangan Masyarakat Nelayan dan Kemaritanan (Suatu Studi Sosio Antropologi Ekonomi)*, Makassar.
- , 2007. *Pesan Pesan Moral Pelaut Bugis* .Makassar : Pustaka Refleksi
- Ahmad, Muchtar. 2007. *Teknologi Bahari Melayu Riau*. Diakses melalui www.melayuOnline.com pada 20 November 2007 pukul 10:40.
- Amri Marzali, 2005, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Andi Ernawati. 1992. *Fungsi PEMALI Dalam Kebudayaan Masyarakat Bugis Di Desa Bajoe Kabupaten Bone*. Makassar : Skripsi UNHAS.
- Andi Kartika Sari. 2005. *Perilaku Ekonomi Petani Tambak Digugus Pulau Mapat Kota Tarakan Kalimantan Timur*.

- Awaluddin. 1998. *Sistem Kredit Masyarakat Nelayan Bontosunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng*.
- Baharuddin Lopa. 1982. *Hukum Laut, Pelayaran dan Perdagangan (Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri)*, Bandung.
- Brink, Dr Hvan Den. 1943. *Dr Benjamin Frederik Matthes, Zijn Leven en Arbeid in Dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap*, N. B., Amsterdam
- Burke Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Caron, L.J. J. 1937. *Het handles-cn Zeerecht in Adat Rechtsregelen van den Rechtskring Zuid-Celebes*, uit. Mij C.A.J. van Dishoek, Bussum.
- Coleman, Simon dan Watson, Helen. 2005 . *Pengantar Antropologi*. Bandung: Nuansa.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1969. *Sejarah Gowa*. Makassar: Jajasan kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara,
- Darsono. 2006. *Budaya Organisasi*. BAB II Simbol Kebudayaan. Jakarta : Diadit Media
- Darwis, Muhammad. 1988. “*Mistik Bagi Kaum Nelayan di Sidde “ dalam Dimensi Social Kawasan Partai*”, Mukhlis (ed). P3MP, UNHAS –TIIS untuk The Toyota Foundation, Japan.
- Eaton Joseph W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari konsep ke aplikasi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Graag, H. J. De. 1949. *Geschiedenis van Indonesie*, V. V. Uitg. W. van Hoeve, S’Gravenhage
- Hadisuwarno, Sularto. 1986. *Konstruksi Perahu Layar Tradisional (Pinisi) dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pelayaran*, Unhas, Ujung Pandang
- Haeiril Anugrah. 1997. *Nelayan Bagang DI Kelurahan Dawi-Dawi Sulawesi Tenggara*. Makassar : UNHAS
- Haviland, William A. 1993. *Antropologi Jilid 2*, Erlangga, Jakarta.
- Haviland, William, A. 1988. *Antropologi*, Erlanga. Jakarta.

- Ihromi, T.O. 2000. *Pokok – Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Anem kosong Anem – Djambatan, Jakarta
- , 1987. *Sejarah teori Antropologi I* , Jakarta : UI Press.
- , 1987. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
- , 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.
- , 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Keesing, Roger M. 1981. *Antropologi Budaya – Suatu Perspektif Kontempores*, Erlangga, Jakarta.
- Lampe, Munsu. 1997. *Antropologi Maritim – Bahan Ajar*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- , 2005. *Wawasan Sosial Budaya Bahari*. Makassar: UPT-MKU Universitas Hasanuddin.
- , 2007. *Wawasan Sosial Budaya Bahari*. Makassar : UNHAS
- , 2007. *Budaya Bahari dalam Konteks Global-Modern (Kasus Komuniti-Komuniti Nelayan di Indonesia)*. Diakses melalui : www.Melayu On-Line 20 Desember 2008.
- Matthes, B. F. 1869. *Over de Wajorezen met hun Handels-en Scheeps*, Nederland : Wetboek,
- Mubyarto , dkk. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan : Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta : Rajawali.
- Mutmainah. 1986. *Aspek Tehnologi Dan Seni Dalam Kebudayaan Maritim*. Makassar : UNHAS.
- Naping , Hamka. 1990. *Pengetahuan kelautan masyarakat nelayan : Suatu studi Etnoekologi di Kelurahan Lappa Sulawesi Selatan , Thesis S2 UI , Jakarta*.
- , 2004. *Teknologi dan Perubahan Sosial Budaya Bagang Rambo di Kabupaten Barru*, Disertasi S3 UNHAS, Makassar.

- Paeni, Mukhlis, (Ed), 1991. *Teknologi Dan Perubahan Sosial Dikawasan Pantai. Dimensi Social Kawasan Pantai*, Mukhlis (ed). P3MP, UNHAS –TIIS untuk The Toyota Foundation, Japan.
- Pelras, Christian. 1973. *Sumber-sumber Kepustakaan Eropah Barat tentang Sulawesi Selatan* (Makalah dalam rangka Dies Natalis Fak. Hukum Univ. Hasanuddin) tgl. 3-3-1973
- . 2006. *Manusia Bugis*, Nalar, Jakarta.
- Robbins Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, Arcan – Prantice Hall International, Englewood Cliffs
- Safri. 1995. *Fungsi Pranata Sosial dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Laut di Desa Tirowali Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu*, Skripsi, Makassar.
- Soejito S. 1986. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soraya, Ria. 2007. *Tinja 'na To Palebbo (Fungsi Upacara Tradisional Masyarakat Nelayan) Di Kecamatan Mamuju*. Makassar : UNHAS
- Stapel, F. W. 1937. *De Geschiedenis van Nederlandsch-Indie, deel III*.
- Suhrah. 1986. *Sistem Tehnologi Pembuatan Perahu Penisi Sebagai Alat Transportasi, Di Desa Ara. Kab. Bulukumba. Makassar : Skripsi UNHAS*.
- Suwitha, I Putu Gede. 1991. *Teknologi dan Perubahan Sosial di Kawasan Pantai* (Mukhlis, Ed). Makassar: P3MP Universitas Hasanuddin.
- Tobing, Ph. O. L. 1977. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Cet. 2. Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Wikipedia Indonesia. 2008. *Teknologi* (Ensiklopedia Indonesia). Diakses melalui www.wikipedia.org pada 10 Desember 2008 pukul 08:19.
- <http://hariyantowijoyo.blogspot.co.id/2014/05/tana-beru-surga-pembuat-kapal-phinisi.html#ixzz4E4FMBYtH> dikutip tanggal 11 Juli 2016.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA.
Tempat / Tanggal Lahir : Barru / 4 Nopember 1961
NIP. : 131 658 802 / 196111041987021 001
Pangkat/Golongan : Guru Besar / Pembina Utama / IVE.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Keluarga : Kawin
Nama Istri : Dra. Hj. Nurjamiah Sallatu
Anak : 1. Icha Musywirah Hamka, S.Sos., MSi
2. Nurul Fitri F. Hamka
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Kantor : Kampus Unhas Tamalanrea Km.10
Makassar. Telp./Faks:0411–585024
e-mail:hamkanaping@yahoo.com.
Alamat Rumah : Komp. Unhas Tamalanrea Blok AG. 6
Makassar Telp. 0411- 586194,
HP. 081524242287.

I. PENDIDIKAN

1. SDN Ele, di Ele Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Tahun, 1972.
2. SMP Negeri Filial Sikapa. Sikapa, Kecamatan Tanete Riaja, Kab. Barru, Tahun,1978.
3. SMA Negeri Barru (Jurusan Bahasa) di Barru, Kabupaten Barru, Tahun 1981
4. Sarjana (S1). Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Makassar, Tahun 1986

5. Magister (S2). Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Program Antropologi. Tahun 1991
6. Doktor (S3). Universitas Hasanuddin, Program Pascasarjana, Program Ilmu-Ilmu Sosial (Antropologi). Tahun 2004

II. PEKERJAAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, Tahun 1987
2. Guru Besar / Pembina Utama / **Golongan IV E**. 2010
3. Staf Fungsional: Pelatih dan Peneliti PSKMP-UNHAS, Tahun 2000- sekarang
4. Ketua Jurusan Antropologi Fisip Unhas 2002- 2007
5. Sekertaris Senat Fisip Unhas 2006 - 2010
6. Staf Pengajar Luar Biasa STIA-LAN Makassar, 1993 -sekarang
7. Staf Pengajar Program Pascasarjana Unhas, 2001 - sekarang
8. Dekan Fisip Unhas, 2010 – sekarang
9. Staf Pengajar Luar Biasa IPDN Kampus Makassar, 2012

III. PENGHARGAAN

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun 2004.
2. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun 2007.

IV. KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI PROFESI

1. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) 2005 s/d sekarang
2. Perhimpunan Pencinta Bandar Lama Nusantara Pusaka Bangsa (PPBLNPB) 2006 s/d sekarang

3. Himpunan Indonesia Untuk Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (HIPPEB-Tra) 2008 s/d sekarang
4. Forum Kerjasama Departemen//Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia. 2009 s/d Sekarang
5. Forum Dekan Fisip, Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. 2010 s/d 2014

V. PELATIHAN

1. Training of Trainer (TOT) Participatory Local Social Development. Kerjasama JICA – UNHAS, Makassar, Tahun 2000.
2. Training of Trainer (TOT) Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik. Kerjasama Bappenas-Unhas. Makassar, peserta, Tahun 2000.
3. Workshop Penulisan Modul Participatory Local Social Developmen (PLSD). Kerjasama JICA – UNHAS. Makassar, 2000. Peserta.
4. Pelatihan “Peningkatan Kapasitas dan Performance Pelatih” Kerjasama PSKMP Unhas – Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia. Solo, Tahun 2002, peserta.
5. Workshop Perumusan Kurikulum Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan Dasar dan Lanjutan (TMPP D/L). Kerjasama PSKMP UNHAS – BAPPENAS. Makassar, 2002. peserta.
6. Lokakarya Pelatih Jabatan Fungsional Perencana. Jakarta, Kerjasama BAPPENAS – UNHAS. Tahun 2003.

7. Lokakarya dan Seminar Hasil Kajian: Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa. Dilaksanakan oleh Kantor Menkokesra, Jakarta, 2005
8. Lokakarya dan Serasehan Pemberdayaan Pusat-Pusat Kebudayaan Tradisional Di Sulawesi Selatan, Tgl 27 Desember 2006, di Makassar.
9. Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta 5-7 Oktober 2011.

VI. KARYA ILMIAH (Makalah)

1. *Suatu Catatan Ringkas Tentang Metode Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan*. Dibacakan di depan Peserta Program Bimbingan dan Penyuluhan Bidang Kearsipan, Bidang Bahasa, dan Metode Penelitian. Museum Negeri Lagaligo. Tanggal 19 Juli 1992 di Ujung Pandang.
2. *Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Kualitatif*. Disampaikan di depan Peserta Pelatihan “Dasar –Dasar Penelitian Kualitatif”. Tanggal 22 Februari 1993. Di Ujung Pandang.
3. *Sentuhan Teori dan Hampiran Antropologi dalam Kajian Antropologi Maritim*. Dibacakan di depan peserta Seminar Kajian Masyarakat Maritim. Tanggal 20 Oktober 1993 di Ujung Pandang.
4. *Pergelutan Antropologi Untuk Kebijaksanaan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan*. Dibacakan di depan Peserta Seminar Sehari dalam Rangka Temu Alumni Antropologi, pada tanggal 7 Juni 1994 di Ujung Pandang.
5. *Kondisi Ekologis dan Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Terasing*. Disampaikan pada Seminar Hasil

Penelitian Masyarakat Terasing, Tanggal 20 September 1995, di Ujung Pandang.

6. *Etos Kepemimpinan dan Budaya Keterbukaan Etnis Bugis di Sulawesi Selatan.* Dibacakan di depan peserta Pekan Seminar Ilmiah ‘ Terbuka Bertaqwa’ . Tanggal 11 Juni 1996 di Ujung Pandang.
7. *Perbedaan Persepsi dalam Menentukan Kebutuhan Masyarakat Lokal.* Dibacakan di depan Peserta Lokakarya : Participatory Local Social Development Planning (PLSDP). Kerjasama JICA-UNHAS. Tgl 20-4-2000
8. *Sistem Nilai dan Kelembagaan Masyarakat.* Disampaikan di depan peserta Pelatihan Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP-D Angkatan XXIII), kerjasama Bappenas-PSKMP LPPM Unhas. Tgl 21 Juni 2000
9. *Faktor Sosial Budaya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.* Disampaikan di depan peserta Pelatihan Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP-D Angkatan XXIII), kerjasama Bappenas-PSKMP LPPM Unhas. Tgl 29 Juni 2000
10. *Sistem Nilai dan Kelembagaan.* Dibacakan di depan peserta Diklat TMPP-D Angkatan XXIV) PSKMP-LPPM Unhas, Makassar, 2000.
11. *Partisipasi Lokal dan Pembangunan Sosial.* Dibacakan di depan peserta Diklat TMPP-Lanjutan (Angkatan IV). PSKMP-LPPM Unhas, tahun 2000.
12. *Pengendalian Pembangunan (Pelembagaan Pengawasan Pembangunan).* Dibacakan di depan peserta Diklat TMPP-Lanjutan (Angkatan IV). PSKMP-LPPM Unhas, tahun 2002.

13. *Peranan Kebudayaan Bugis dan Integrasi Nasional*. Dibacakan di depan peserta Seminar Sehari “ Kebudayaan Lokal dan Integrasi Bangsa. Dilaksanakan oleh Balai Jaranitra Makassar, tahun 2002.
14. *Dimensi Pembangunan Sosial*. Dibacakan di depan peserta Diklat TMPPD Angkatan XXIX. Kerjasama Unhas-Bappenas. Tahun 2003
15. *Faktor Sosial Budaya dalam Perencanaan Pembangunan*. Dibacakan di depan Peserta Diklat TMPPD Angkatan XXIX , Kerjasama Unhas-Bappenas, Tahun 2003.
16. *Sistem Nilai dan Kebudayaan Masyarakat Lokal*. Dibacakan di depan Peserta Diklat TMPPD. Angkatan XXIX, Kerjasama Unhas-Bappenas, Tahun 2003.
17. *Partisipasi Lokal dalam Pembangunan Sosial*. Dibacakan di Depan Peserta Diklat TMPP Lanjutan. Kerjasama Unhas-Bappenas, Tahun 2003.
18. *Arena Pembangunan untuk Pengorganisasian Kemampuan Masyarakat*. Dibacakan di depan Peserta Diklat TMPP Lanjutan. Kerjasama Unhas-Bappenas. Tahun 2003.
19. *Penjaringan Aspirasi Masyarakat*. Disampaikan di depan Peserta Diklat “ Anggaran Berbasis Kinerja” (PABK). Kerjasama Unhas-Bappenas, Tahun 2004.
20. *Budaya Maritim*. Disampaikan di depan Peserta Diklat Perencanaan Wilayah Pesisir. Kerjasama Unhas-Bappenas, Tahun 2004.
21. *Perencanaan Sektor Pendidikan*. Disampaikan di depan Peserta Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah, Kerjasama Unhas-Bappenas. Tahun 2004.

22. *Pembangunan Masyarakat Nelayan Melalui Strategi Pengkajian Dan Analisis Karakteristik Sosial Budaya Lokal*. Dimuat dalam: Sosial Politik, Majalah Ilmu Sosial Politik. Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhalu Kendari, Edisi Desember 2004. Jilid 10 Nomor 2.
23. *Teknologi dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Bagang Rambo di Kabupaten Barru*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Lembaga Penelitian Unhas, Tahun 2004.
24. *Kajian Nilai, Norma dan Hukum Tidak Tertulis dalam Kelembagaan Kombong Pada Masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan*, Dimuat Dalam Jurnal Ammanagappa, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2005.
25. *Nilai-nilai Budaya yang mendukung Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan pada Masyarakat Suku Makassar*, Dibacakan didepan peserta Lokakarya "Menggali Kearifan Lingkungan". Pada tanggal 10 Agustus 2006, di Makassar dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI.
26. *Aspek Sosial Budaya Masyarakat Luwu*, Dibacakan di Depan Peserta, Sarasehan : Pemberdayaan Pusat-Pusat Budaya Tradisional Se Sulawesi Selatan. Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prop. Sul-Sel Tgl. 27 Desember 2006. di Makassar.
27. *Kelembagaan Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Toraja*. Dimuat dalam Buku: Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan. A.M. Akhmar & Syarifuddin (Ed). Diterbitkan oleh PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua KLH Kerjasama dengan Masagena Press, 2007.

28. *Etika Komunikasi Politik*. Dibacakan di depan peserta seminar Komunikasi Politik Di Era Pemilihan Langsung. Dilaksanakan Oleh Balai Kajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII. Pada Tanggal 14 Desember 2007. di Makakssar.
29. *Endogenous Development For Aceh: Participatory Local Social Developmen*. Dibacakan di depan peserta The 2 nd International Comference on Development of Aceh: “ From Bitter Past Toward a Better Prospect” Dilaksanakan oleh Universitas Malikussaleh pada tanggal 29-30 Desember 2007 di Lhokseumawe (NAD).
30. *Reaktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Strategi Menangkal Pengaruh Negatif Perubahan Global*. Dibacakan di depan peserta Seminar Peningkatan Pemahaman Sejarah dan Kearifan Lokal. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2011.
31. *Kebudayaan, Masyarakat dan Lingkungan*, disampaikan pada Pelatihan Fungsional Perencana Muda. Angkatan XXII Kerjasama Unhas (PSKMP) dengan Bappenas RI. Mei 2014
32. *Pemberdayaan dan Keswadayaan Masyarakat*. Disampaikan pada pelatihan Fungsional Perencana Tingkat Pertama, angkatan XXIII Kerjasama Unhas (PSKMP) dengan Bappenas RI. Mei 2014

VII. HASIL PENELITIAN

1. *Orang Bajo di BajoE Kabupaten Bone*. Jurusan Antropologi Fisip Unhas, Tahun 1997.
2. *Pengrajin Perahu Di Tanah Beru Kabupaten Bukumba*. Lembaga Penelitian Unhas. Tahun 1988.

3. *Pengetahuan Kelautan Masyarakat Nelayan: Studi Etnoekologi di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 1991.
4. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Perubahan Kebudayaan Lokal di Tanah Toraja*. Lembaga Penelitian Unhas, Tahun 1992.
5. *Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Keadaan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Jeneponto*. Lembaga Penelitian Unhas (Dana OPF) Tahun 1993.
6. *Pengaruh Lingkungan Alam dan Lingkungan Sosial Terhadap Kondisi Ekonomi Petani di Desa Togo-Togo Kabupaten Jeneponto*. Lembaga Penelitian Unhas (Dana DPP) Tahun 1994.
7. *Studi Sosial Budaya untuk Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia di Pedesaan*. Departemen Dalam Negeri RI. Tahun 1994.
8. *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Terasing To Bentong di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Barru*. Kerjasama Dep. Sosial RI. Dengan Jurusan Antropologi Fisip Unhas. Tahun 1995.
9. *Nilai-Nilai Budaya yang Menunjang Konservasi Lingkungan Alam di Sulawesi Selatan*, Kerjasama Jurusan Antropologi Fisip Unhas dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 1995.
10. *Evaluasi kebijakan pengembangan agrowisata di kabupaten Bone, soppeng dan Wajo Sulawesi Selatan*. Departemen Pariwisata RI. Tahun 1995.
11. *Nilai-Nilai Tradisional Kebahariaan yang Menunjang Konservasi Lingkungan Laut di Perairan Selat Makasar Sulawesi Selatan*, Tahun 1997.
12. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Model Sistem Pendidikan Nasional*. Dep.Dikbud Jakarta, 1999.

13. *Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan TMKP yang Dilaksanakan oleh PSKMP LPPM_UNHAS*. Bappenas, Tahun 2000.
14. *Studi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Sulawesi Selatan*. Bappenas. Tahun 2000.
15. *Studi Kesiapan Daerah dalam Implementasi Otoda (Kasus Pulau Sulawesi)*. Kerjasama Jica Regional Sulawesi – PSKMP Unhas, Tahun 2001.
16. *Kombong: Studi Tentang Kelembagaan Lokal yang Menunjang Pembangunan Daerah*. Kerjasama JICA Regional Sulawesi – PSKMP UNHAS. Tahun 2002.
17. *Studi Perancangan Model Pembangunan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan*. Penelitian Dasar, DIRJEN DIKTI. Tahun 2003.
18. *Teknologi dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Bagang Rambo di Kabupaten Barru*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Tahun 2004.
19. *Adaptasi Masyarakat Terhadap Multikulturalisme di Sulawesi Selatan*. Kerjasama LPPM-UNHAS dengan Menkokesra RI. Tahun 2005.
20. *Survey Base Line Wilayah Indonesia Timur Bagian Utara*. Kerjasama JICA –PSKMP UNHAS. Tahun 2006. (anggota peneliti)
21. *Kelembagaan Tradisional Dalam Pengelolaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Toraja*. Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (PSL) Unhas-Kyoto University. Tahun 2006
22. *Aspek Sosial Budaya Masyarakat Luwu*, dilakukan atas kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prpinsi Sulawesi Selatan, tahun 2006.

23. *Model Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Nelayan Di Propinsi Sulawesi Barat*. Dilaksanakan atas kerjasama dengan Pemda Propinsi Sulawesi Barat. Tahun 2007.
24. *Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Lngkungan Laut Masyarakat Nelayan di Galesong Kab. Takalar*. Kerjasama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Wilayah Sulsel-Bar dan Ternggara, 2009
25. *Pengembangan Pola Kerjasama Sebagai Strtategi Penguatan Lembaga Jurusan Antropologi*. Dibiayai oleh Fisip Unhas, 2009.
26. *Identifikasi dan Analisis Potensi Kelembagaan Lokal dan Modal Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Secara Mandiri pada Desa-Desa Nelayan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Penelitian Unggulan Desentralisasi Perguruan Tinggi, 2012
27. *Studi Perancangan Model Pengentasan Kemiskinan Nelayan Berbasis Kelembagaan dan Nilai Budaya Lokal di Sulawesi Selatan*. Penelitian Unggulan Desentralisasi Perguruan Tinggi. 2013.
28. *Strategi Survival Pelaku Sektor Informal Perkotaan di Kota Makassar*. Penelitian mandiri. LP2M Unhas dan Jurusan Antropologi Fisip Unhas, 2016

Demikian, Semua data yang dikemukakan dalam Curriculum VitaE ini adalah benar, dan saya bersedia dituntut dihadapan hukum jika data yang dikemukakan ini tidak benar.

Semua sejahwara dunia mengakui bahwa suku bangsa yang mendiami Sulawesi Selatan adalah suku bahari yang berani mengarungi samudra dengan perahu sederhana yang dibuatnya sendiri. Tak disangkal, mereka adalah pelaut-pedagang, berhubungan dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, singgah di beberapa negeri dan bergaul dengan bangsa-bangsa yang dijumpainya. Berbulan-bulan dalam pengembaraan, barulah kembali ke negerinya setelah membawa hasil yang memadai.

Hal ini sudah membudaya yang diwarisi dari nenek moyangnya sejak berabad lampau sebelum era Sriwijaya. Mereka adalah pekerja ulet dan berani ambil risiko atas keberanian mengarungi samudra. Keberanian itu didukung oleh sistem pengetahuan astronomi dan oceanologi tradisional. Pengetahuan tentang hari-hari baik dan buruk, letak bintang dan tanda-tanda di lautan adalah hasil pengalaman yang terakumulasi, digunakan mengelola kehidupannya. Demikian pula, sistem pengetahuan dan teknologi pembuatan perahu (pinisi dan lambo), merupakan akumulasi pengetahuan dari hasil pengalaman dalam perkembangan budaya.

Buku ini mengisahkan secara gamblang dan detail lingkup kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, suku bangsa di Sulawesi Selatan, dengan segenap piranti budaya yang melingkupinya. Analisis epistemologis yang mendalam dari segala aspek menjadikan kajian buku ini menarik dan memiliki kontribusi konkret dalam khazanah ilmu kemaritiman nusantara.



Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA, Lahir di Barru, 4 Nopember 1961. Pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Makassar pada 1986. Dilarutkan Magister (S2) di Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Program Antropologi tahun 1991. Kemudian Doktor (S3) di Universitas Hasanuddin, Program Pascasarjana, Program Ilmu-Ilmu Sosial (Antropologi) tahun 2004. Peraih Tanda Kehormatan Satyalancara Karya Satya 2004 dan 2007 ini telah menulis puluhan karya ilmiah, baik berupa makalah, hasil penelitian, maupun buku. Di samping aktif dalam keanggotaan dalam beragam organisasi profesi juga aktif dalam berbagai kegiatan training, workshop, lokakarya, dan forum dialog, tercatat sebagai tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin.